SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang

(Lembaran) …

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN: ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

BAB II
KERANGKA RPJMD

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,

Pembangunan ...

Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangungan jangka menengah nasional.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam:

a. penyusunan Rencana Strategis;

b. penyusunan RKPD; dan

c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

Pasal 3

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan;

BAB II Gambaran Umum Daerah;

BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;

BAB IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan

BAB V Penutup.

(2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Pelaksanaan program RPJMD oleh Perangkat Daerah dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah.

(2) Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan kooordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 ...

Pasal 5

(1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya:

a. bencana alam;

b. goncangan politik;

c. krisis ekonomi;

d. konflik sosial budaya;

e. gangguan keamanan;

f. pemekaran Daerah; atau

g. perubahan kebijakan nasional.

(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

(5) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 29 September 2025

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 29 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (64.08/55/5/2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,
Kepala Bagian Hukum

Januar Bayu Irawan, S.H.,M.H.
NIP 19850112 201101 1 003



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah disusun perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjenjang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD, dan RKPD.

Pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi, program kepala daerah yang disusun berpedoman pada RPJPD. RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, yang dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur pada Tahun 2025-2029 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergi, harmonis dan berkesinambungan.

Ruang lingkup RPJMD meliputi kedudukan RPJMD, sistematika RPJMD, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, dan Perubahan RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang

dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan dengan melibatkan masyarakat.

Prinsip RPJMD meliputi:

a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana Pembangunan Daerah; dan
d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah sesuai dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

a. sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah serta kebijakan dan strategi pembangunan Tahun 2025-2029;
b. sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2025-2029;
c. sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
d. sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 termasuk dalam meenentukan program prioritas;
e. sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
f. menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan;
g. sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan; dan

h. sebagai instrumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program Pembangunan Daerah berdasarkan kondisi dan potensi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR

RANCANGAN AKHIR

Rencana Pembangunan Jangja Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Kutai Timur

Tahun **2025 - 2029**

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera, dengan penuh rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rancangan Akhir "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029" ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.

Penyusunan Rancangan Akhir "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029" ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen ini memuat gambaran umum kondisi daerah, perumusan gambaran keuangan daerah, identifikasi permasalahan pembangunan daerah, penelaahan terhadap dokumen perencanaan lainnya, serta perumusan isu-isu strategis daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD.

Penyusunan Rancangan Akhir "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029" ini merupakan hasil kolaborasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur dengan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PSEK) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam berbagai bentuk, baik berupa saran, kritik, maupun masukan selama proses penyusunan Rancangan "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029" ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.

Sangatta, September 2025

Tim Penyusun
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR vii
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-6
1.3.1 Hubungan Antara RPJMD dan RPJPD I-6
1.3.2 Hubungan Antara RPJMD dan Renstra OPD I-7
1.3.3 Hubungan Antara RPJMD dan RKPD I-7
1.3.4 Hubungan Antara RPJMD dan RTRW I-8
1.3.5 Hubungan Antara RPJMD dan Dokumen KLHS I-8
1.3.6 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Rencana Induk Sektoral I-9
1.4 Maksud dan Tujuan I-10
1.4.1 Maksud I-10
1.4.2 Tujuan I-10
1.5 Sistematika Penulisan I-11
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah II-1
2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam II-11
2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup II-18
2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan II-21
2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas II-25
2.1.1.6 Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim II-27
2.1.1.7 Demografi II-30
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-35
2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi II-35
2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua II-53
2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata II-58
2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif II-61
2.1.2.5 Beragam Maslahat dan Berkebudayaan Maju II-63
2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif II-67

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah II-70
2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia II-70
2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi II-71
2.1.3.3 Transformasi Digital II-73
2.1.3.4 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global II-75
2.1.3.5 Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi II-76
2.1.3.6 Stabilitas Ekonomi Makro II-78
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum II-79
2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif II-79
2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial II-80
2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan . II-82
2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah II-85
2.2 Gambaran Keuangan Daerah II-130
2.2.1 Realisasi APBD II-131
2.2.1.1 Pendapatan Daerah II-134
2.2.1.2 Belanja Daerah II-137
2.2.1.3 Pembiayaan II-139
2.2.2 Neraca Keuangan Daerah II-143
2.2.3 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025-2030 ..... II-149
2.2.4 Potensi *Corporate Social Responsibility* (CSR) II-156
2.2.5 Kebijakan Percepatan Proyek Infrastruktur Strategis Daerah Melalui Mekanisme Tahun Jamak (*Multi Years*) II-156
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis II-157
2.3.1 Permasalahan II-158
2.3.2 Isu - Isu Strategis II-171
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-1
3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran III-1
3.1.1 Visi dan Misi III-1
3.1.2 Tujuan dan Sasaran III-26
3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah III-32
3.2.1 Strategi III-32
3.2.2 Arah Kebijakan Kabupaten Kutai Timur 2025-2029 ..... III-80
3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah III-85
3.2.4 Dukungan Program Unggulan RPJMD Kutai Timur 2025-2029 Terhadap Kegitan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029 ..... III-106
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-1
4.1 Program Perangkat Daerah IV-1

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah IV-57
4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) IV-57
4.2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) IV-58
BAB V PENUTUP V-1
5.1 Pedoman Transisi V-1
5.2 Kaidah Pelaksanaan V-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Administrasi Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan II-2
Tabel 2.2 Kondisi Topografi Kabupaten Kutai Timur II-5
Tabel 2.3 Sungai Terpanjang di Kabupaten Kutai Timur II-6
Tabel 2.4 Formasi Geologis Utama Kabupaten Kutai Timur II-8
Tabel 2.5 Kawasan Bukit Karst Kabupaten Kutai Timur II-9
Tabel 2.6 Prakiraan Curah Hujan Bulan November 2024 s.d. Januari 2025 ..... II-10
Tabel 2.7 Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 ..... II-24
Tabel 2.8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 ..... II-26
Tabel 2.9 Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2024 ..... II-26
Tabel 2.10 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2019-2024 ..... II-29
Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024 ..... II-31
Tabel 2.12 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 ..... II-32
Tabel 2.13 Perbandingan Indikator Kependudukan Tahun 2020-2024 ..... II-33
Tabel 2.14 Proyeksi Jumlah Penduduk Kutai Timur Tahun 2025-2029 (ribuan) II-33
Tabel 2.15 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 (Juta Rp) II-36
Tabel 2.16 Distribusi PDRB ADHB Tahun 2020-2024 (%) II-38
Tabel 2.17 Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2019-2024 (%) II-41
Tabel 2.18 Pemetaan Sektor Ekonomi Kutai Timur Tahun 2024 ..... II-44
Tabel 2.19 Pemetaan Sektor Ekonomi Kutai Timur Tahun 2020-2024 ..... II-45
Tabel 2.20 Perbandingan PDRB Per Kapita Tahun 2020-2024 (Juta Rp) II-46
Tabel 2.21 Indikator Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018-2024 ..... II-47
Tabel 2.22 Indikator Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 ..... II-48
Tabel 2.23 Gini Ratio Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 ..... II-49
Tabel 2.24 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020-2024 ..... II-50
Tabel 2.25 Pola Pengeluaran Per Kapita Masyarakat (Rp/bulan) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 ..... II-51
Tabel 2.26 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif II-53
Tabel 2.27 Usia Harapan Hidup Tahun 2020-2024 (Tahun) II-54
Tabel 2.28 Angka Literasi dan Numerasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023-2024 ..... II-60
Tabel 2.29 Jumlah Total Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya Kutai Timur II-63
Tabel 2.30 Rasio Ketergantungan Kabupaten Kutai Timur 2024 ..... II-70
Tabel 2.31 Produktivitas Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 ..... II-71
Tabel 2.32 Rasio Sektor Industri Pengolahan, Sektor Akomodasi dan Makan Minum, serta Sektor Pertanian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018-2024 (%) II-72

Tabel 2.33 Aplikasi Digital Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 ..... II-74
Tabel 2.34 Proporsi PDRB ADHB Kabupaten Kutai Timur Menurut Pengeluaran (%) II-75
Tabel 2.35 Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 ..... II-77
Tabel 2.36 *Tax Ratio* Kabupaten Kutai Timur 2020-2024 (%) II-78
Tabel 2.37 Indeks Tata Kelola Pemerintahan Tahun 2023-2024 ..... II-80
Tabel 2.38 Kondisi Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 ..... II-81
Tabel 2.39 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2024 ..... II-85
Tabel 2.40 APK dan APM SD/Sederajat 2023/2024 ..... II-86
Tabel 2.41 Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Jenjang SD/Sederajat hingga SMA/Sederajat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023/2024 ..... II-87
Tabel 2.42 Rasio Jenjang Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023/2024 ..... II-87
Tabel 2.43 Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk di Kutai Timur 2024 ..... II-93
Tabel 2.44 Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun 2023 dan 2024 ..... II-93
Tabel 2.45 Sarana Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 ..... II-94
Tabel 2.46 Status Jalan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 ..... II-96
Tabel 2.47 Kondisi Jalan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2024 ..... II-96
Tabel 2.48 Kondisi Permukaan Jalan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 ..... II-96
Tabel 2.49 Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal (M^2) Tahun 2024 (%) II-98
Tabel 2.50 Kepemilikan dan Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar Tahun 2024 (%) II-99
Tabel 2.51 Sebaran Pemukiman Kumuh di Kecamatan Tahun 2024 ..... II-100
Tabel 2.52 Penyelesaian Tindak Kejahatan (%) II-101
Tabel 2.53 Kegiatan Demonstrasi Tahun 2024 ..... II-101
Tabel 2.54 Jumlah Rumah Tangga Penerima Bansos Pangan Tahun 2021-2024 ..... II-102
Tabel 2.55 Tingkat Pengangguran Terbuka dan TPAK Tahun 2020-2024 (%) II-105
Tabel 2.56 Sebaran Pencemaran di Kecamatan Tahun 2024 ..... II-109
Tabel 2.57 Potensi Ekonomi Desa di Kutai Timur Tahun 2024 ..... II-111
Tabel 2.58 Rasio Panjang Jalan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022-2024 ..... II-114
Tabel 2.59 Muat-Bongkar Pelabuhan Kutai Timur Tahun 2022-2024 ..... II-115
Tabel 2.60 Jumlah Base Transceiver Station (BTS) di Kutai Timur Tahun 2020-2024 ..... II-116
Tabel 2.61 Status Sinyal Internet di Kutai Timur Tahun 2024 ..... II-116
Tabel 2.62 Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Tahun 2021-2024 ..... II-120
Tabel 2.63 Perkembangan Realisasi Investasi PMA Tahun 2021-2024 ..... II-120
Tabel 2.64 Potensi Perikanan Provinsi Kalimantan Timur II-123
Tabel 2.65 Produksi Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023-2024 (Ton) II-124
Tabel 2.66 Jumlah Wisatawan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 ..... II-125
Tabel 2.67 Produksi Padi di Kabupaten Kutai Timur dan Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 ..... II-126
Tabel 2.68 Produksi Buah-buahan Tahun 2024 (Kuintal) II-126
Tabel 2.69 Produksi Beberapa Perkebunan Tahun 2024 (Ton) II-127

Tabel 2.70 Sumber Penerangan Utama Rumah Tangga Tahun 2020-2024 ..... II-128
Tabel 2.71 Bentuk Badan Usaha di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2024 ..... II-129
Tabel 2.72 Realisasi APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 (dalam Rp) II-133
Tabel 2.73 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 (dalam Rp) II-135
Tabel 2.74 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 (dalam Rp) II-138
Tabel 2.75 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 (dalam Rp) II-141
Tabel 2.76 Neraca Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019-2024 (dalam Rp) II-144
Tabel 2.77 Rata-rata Pertumbuhan Aset II-146
Tabel 2.78 Analisis Neraca Kabupaten Kutai Timur II-148
Tabel 2.79 Proyeksi Keuangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2030 (dalam Rp) II-150
Tabel 2.80 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2030 (dalam Rp) II-154
Tabel 2.81 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2030 (dalam Rp) II-154
Tabel 2.82 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur II-158
Tabel 2.83 Isu Strategis Kabupaten Kutai Timur II-172
Tabel 3.1 Pokok-Pokok Visi Kabupaten Kutai Timur III-2
Tabel 3.2 Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Kutai Timur Periode Lima Tahun Pertama III-7
Tabel 3.3 Program Unggulan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur 2025-2029 ..... III-18
Tabel 3.4 Sinkronisasi Dukungan Program Unggulan Kabupaten Kutai Timur dengan Prioritas Nasional III-21
Tabel 3.5 Sinkronisasi Dukungan Program Unggulan Kabupaten Kutai Timur dengan Prioritas Provinsi Kalimatan Timur III-23
Tabel 3.6 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Timur III-28
Tabel 3.7 Strategi Pemenuhan Tujuan dan Sasaran Dalam RPJMD Kutai Timur III-37
Tabel 3.8 Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2025-2029 ..... III-81
Tabel 3.9 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur III-87
Tabel 3.10 Pemetaan (*mapping*) antara Program Unggulan RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2025–2029 dengan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025–2029 ..... III-107
Tabel 4.1 Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur yang Disertai Kebutuhan Pendanaan IV-2
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2025-2030 ..... IV-57
Tabel 4.3 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur IV-59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antara Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek I-8
Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah, Provinsi, dan Nasional I-9
Gambar 2.1 Peta Kabupaten Kutai Timur II-2
Gambar 2.2 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kabupaten Kutai Timur II-14
Gambar 2.3 Produksi Perikanan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 ..... II-15
Gambar 2.4 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Kutai Timur II-16
Gambar 2.5 Luas Perkebunan Sawit Kabupaten Kutai Timur (Ha) II-16
Gambar 2.6 Produksi Crude Palm Oil (CPO) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 ..... II-17
Gambar 2.7 Ketercapaiaan Air Minum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 (%) II-22
Gambar 2.8 Rasio Elektrifikasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 ..... II-22
Gambar 2.9 Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi II-23
Gambar 2.10 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Kutai Timur II-25
Gambar 2.11 Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2019-2024 (Jiwa) II-30
Gambar 2.12 Perkembangan Pertumbuhan PAD, LPE, Pertumbuhan Pendapatan, dan PDRB per Kapita Kabupaten Kutai Timur II-40
Gambar 2.13 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur 2019-2024 (%) II-42
Gambar 2.14 Hubungan Pendapatan Per Kapita, Gini Ratio, dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018-2024 ..... II-49
Gambar 2.15 Proporsi Konsumsi Masyarakat Kabupaten Kutai Timur II-52
Gambar 2.16 Angka Stunting Tahun 2023-2024 (%) II-54
Gambar 2.17 Indeks Keluarga Sehat 2023 ..... II-57
Gambar 2.18 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2020-2024 ..... II-59
Gambar 2.19 Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2020-2024 ..... II-59
Gambar 2.20 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2024 ..... II-61
Gambar 2.21 Gambaran Cakupan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 ..... II-62
Gambar 2.22 Gambaran Cakupan Penerima (KK) Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 ..... II-62
Gambar 2.23 Gambaran Pencapaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 ..... II-67
Gambar 2.24 Gambaran Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 ..... II-68
Gambar 2.25 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 ..... II-69
Gambar 2.26 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Tahun 2020-2024 ..... II-69
Gambar 2.27 Rasio Ketergantungan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 (%) II-70

Gambar 2.28 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 ..... II-72
Gambar 2.29 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 ..... II-73
Gambar 2.30 Perkembangan Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 ..... II-76
Gambar 2.31 Struktur Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) II-83
Gambar 2.32 Kualifikasi Pendidik di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 ..... II-88
Gambar 2.33 Usia Guru di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 ..... II-88
Gambar 2.34 Angka Kesakitan Tahun 2024 (%) II-89
Gambar 2.35 Kepemilikan Jaminan Kesehatan Penduduk Tahun 2024 (%) II-91
Gambar 2.36 Tingkat Capaian Vaksinasi Balita Tahun 2024 (%) II-92
Gambar 2.37 Kondisi Kesehatan Balita Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 ..... II-95
Gambar 2.38 Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Tahun 2021-2024 ..... II-105
Gambar 2.39 Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 (%) II-107
Gambar 2.40 Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 (%) II-111
Gambar 2.41 Penggunaan Alat KB Perempuan Usia 15-49 Tahun 2024 ..... II-113
Gambar 2.42 Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%) II-114
Gambar 2.43 Jumlah Koperasi Aktif Tahun 2023 ..... II-118
Gambar 2.44 Jumlah Industri Mikro dan Kecil Tahun 2023 ..... II-119
Gambar 2.45 Penyelenggaraan Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 ..... II-122
Gambar 3.1 Keselarasan Visi Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kutai Timur III-9
Gambar 3.2 Hubungan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Timur III-17
Gambar 3.3 Skema Keterkaitan Antara Visi dan Misi Kabupaten Kutai Timur dengan Visi Misi Provinsi dan Nasional III-25
Gambar 3.4 Sinkronisasi Misi RPJPD Kutai Timur 2025-2045 dan Misi RPJMD Kutai Timur 2025-2029 ..... III-26
Gambar 3.5 Cascading Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur 2025-2029 ..... III-27
Gambar 3.6 Keselarasan Tujuan RPJMD Kutai Timur 2025-2029 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) III-32
Gambar 3.7 Agenda/Tahapan Pembangunan Tahunan Kutai Timur 2025-2029 ..... III-33

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen penjabaran visi, misi, dan program-program kepala dan wakil kepala daerah terpilih. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Kutai Timur yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 telah menghasilkan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025-2029, yaitu pasangan Drs. Ardiasyah Sulaiman, M.Si dan H. Mahyunadi, SE., M.Si sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025-2029 yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo. Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih, berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) paling lama 6 (enam) bulan setelah dilantik, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen RPJMD menjabarkan permasalahan pembangunan, isu strategis, visi, misi yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program-program pembangunan daerah.

Proses penyusunan dokumen RPJMD mengikuti tata cara penyusunan sebagaimana tertuang dalam Bagian Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 yang meliputi:

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Pelaksanaan Forum Konsultansi Publik;
4. Penyusuanan Rancangan;
5. Pelaksanaan Musrenbang;
6. Perumusan Rancangan Akhir; dan
7. Penetapan.

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD dimulai setelah kepala dan wakil kepala daerah dilantik. Proses ini merupakan penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD, penjabaran visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran, penentuan strategi dan arah kebijakan, serta perumusan program pembangunan daerah. Rancangan Awal RPJMD kemudian dibahas dalam Forum Konsultasi Publik

yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur dan pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan. Rancangan Awal yang sudah direvisi berdasarkan masukan Forum Konsultasi Publik selanjutnya dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mendapatkan persetujuan.

Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kutai Timur yang telah disetujui DPRD dikonsultasikan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur untuk memperoleh masukan. Rancangan Awal RPJMD juga disampaikan kepada semua Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Kabupaten Kutai Timur sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) PD sekaligus untuk mendapatkan *feedback* atau masukan dari PD. Seluruh masukan serta Rancangan Renstra seluruh PD menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD dan menjadi Rancangan RPJMD, selanjutnya dibahas dalam Musrenbang RPJMD.

Proses berikutnya adalah perumusan Rancangan Akhir RPJMD, yaitu proses penyempurnaan Rancangan RPJMD berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan Akhir RPJMD ini menjadi bahan penyusunan sekaligus Lampiran Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD. Rancangan Perda ini kemudian dikonsultasikan kembali ke Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Hasil akhir dari seluruh proses penyusunan RPJMD ini adalah ditetapkannya Perda Kabupaten Kutai Timur tentang RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2025-2029.

Arah Pembangunan dalam RPJMD mengacu pada sasaran pokok dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur tahun 2025-2029. RPJMD. Kebijakan terkait penggunaan/pemanfaatan tata ruang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2025-2029 juga mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur tahun 2015-2035, sementara menunggu peraturan terbaru terkait dengan rencana dan tata ruang wilayah Kabupaten Kutai Timur yang telah memasuki proses pembahasan DPRD Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan yang tertuang dalam Keputusan DPRD Kutim Nomor 14 Tahun 2025. Selain itu, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2025-2029 juga menjadikan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029 dan RPJMN 2025–2029 sebagai acuan. Dengan demikian, kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur tetap selaras dengan kebijakan Provinsi dan Nasional maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur lainnya.

RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2025-2029 merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) setiap Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan. Renstra Perangkat Daerah juga memiliki jangka waktu lima tahun. Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana tahunan yaitu dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rencana pembangunan tahunan inilah yang kemudian menterjemahkan pembangunan jangka menengah ke dalam program dan kegiatan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2025-2029 ini mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana disajikan berikut:

a. Landasan Idiil : Pancasila
b. Landasan Konstitusional : UUD 1945
c. Landasan Operasional :
    1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2003 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
    2) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
    3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
    4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
    5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
    6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
    7) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987).

8) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).
14) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

15) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19).
17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

24) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036;
25) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
26) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045;
27) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor ,Ä¶ Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.
28) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2045.
29) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
30) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2025-2029 tidak lepas dari RPJMD Kalimantan Timur 2025-2029 dan RPJMN 2025-2029. Hal tersebut membawa konsekuensi adanya hubungan antara RPJMD Kabupaten Kutai Timur dengan dokumen perencanaan lainnya.

Hubungan antar dokumen perencanaan adalah sebagai berikut:

1.3.1 Hubungan Antara RPJMD dan RPJPD

RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2025-2029 merupakan pelaksanaan tahap pertama dari pelaksanan RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2025-2045. Secara substantif, isi RPJMD 2025-2029 merupakan turunan perencanaan dalam rangka mencapai visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Kutai Timur 2025-2045.

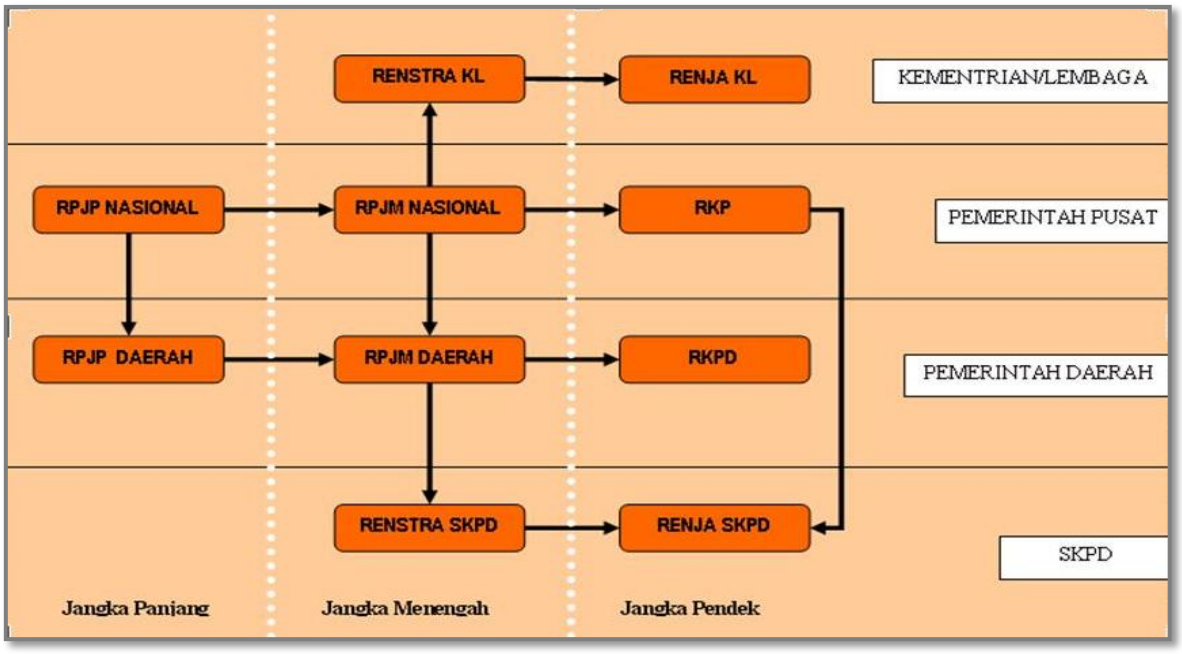
1.3.2 Hubungan Antara RPJMD dan Renstra OPD

Proses penyusunan RPJMD dilakukan selaras dengan proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Rancangan akhir Renstra PD harus sudah disahkan paling lambat satu bulan setelah RPJMD disahkan. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD) yang terdapat dalam RPJMD dirumuskan secara bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait dan disinkronkan melalui penyusunan Renstra PD dan karenanya juga terdapat dalam Renstra PD dan sekaligus menjadi dasar pertanggungjawaban Perangkat Daerah terkait. Program yang ada pada RPJMD selanjutnya didetilkan lebih lanjut menjadi kegiatan dan sub kegiatan oleh Perangkat Daerah ke dalam dokumen Renstra PD.

1.3.3 Hubungan Antara RPJMD dan RKPD

Tahapan pencapaian RPJMD diimplementasikan setiap tahun dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD menjadikan indikator kinerja dan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD sebagai pedoman dalam menentukan indikator kinerja dan program pembangunan pada tahun berkenaan. Selanjutnya program ini didetilkan lebih lanjut menjadi kegiatan dan sub kegiatan beserta target dan anggarannya pada tahun bersangkutan. Dalam RKPD ini dimungkinkan untuk dilakukan penajaman prioritas program tahunan, sehingga pencapaian tujuan lebih fokus, efisien, dan efektif sesuai dengan kondisi terkini daerah pada tahun tersebut dan arahan dari pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Pusat. Proses penajaman dan sinkronisasi program pembangunan ini dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang.

Gambar 1.1 Hubungan Antara Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek



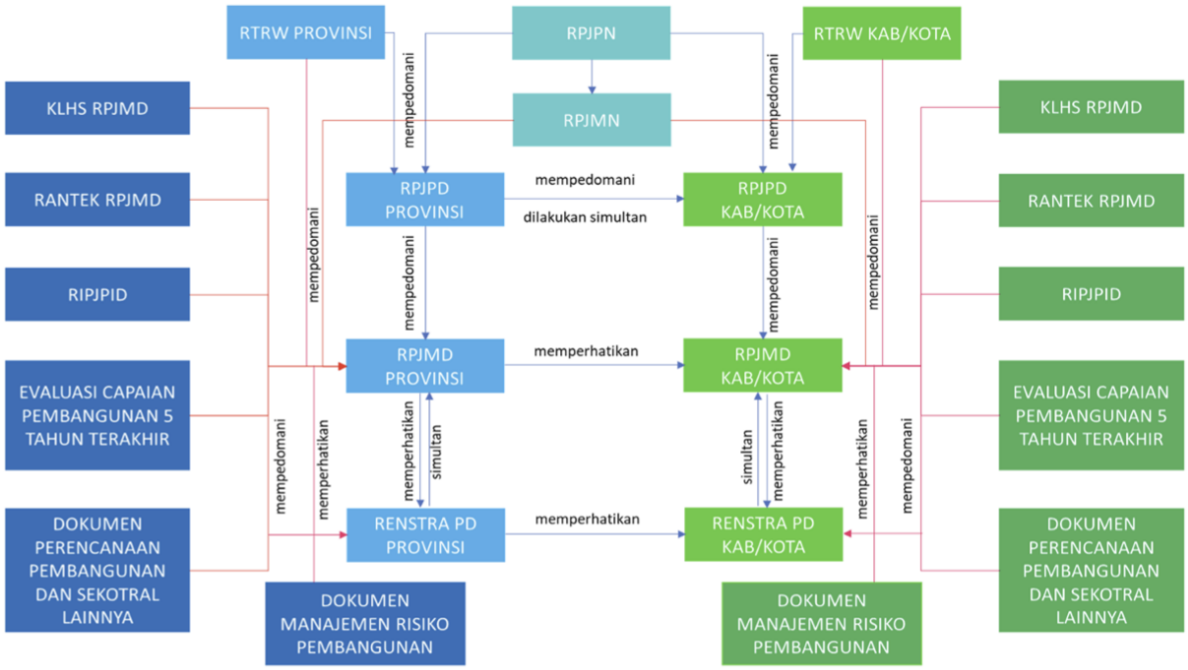
1.3.4 Hubungan Antara RPJMD dan RTRW

Implementasi RPJMD didasarkan pada RTRW Kabupaten Kutai Timur yang telah disusun sebelumnya. Pembangunan secara fisik sebagai implementasi RPJMD dilaksanakan dengan mengikuti RTRW yang telah disusun. Hal ini dimaksudkan untuk lebih menjamin sinkronisasi dan harmonisasi antar wilayah pembangunan, serta memperhatikan keselarasan atau harmonisasi antara Kabupaten Kutai Timur dengan daerah lain.

1.3.5 Hubungan Antara RPJMD dan Dokumen KLHS

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. KLHS RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa penyusunan rancangan awal RPJMD harus mencakup KLHS. Dokumen KLHS harus telah tersedia sebelum rancangan teknokratik RPJMD.

Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah, Provinsi, dan Nasional



Sumber: Inmendagri No. 2 Tahun 2025

1.3.6 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Rencana Induk Sektoral

RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2029 memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen rencana induk sektoral yang disusun sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Dokumen-dokumen tersebut berfungsi sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan pembangunan pada bidang-bidang tertentu, sementara RPJMD berperan sebagai dokumen payung yang menyatukan arah kebijakan pembangunan secara menyeluruh. Beberapa dokumen sektoral yang menjadi acuan penting antara lain Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Kebudayaan dan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPKPID) sebagai pedoman pengembangan kebudayaan dan inovasi berbasis Iptek, Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA) sebagai arah pengembangan destinasi, industri, dan pemasaran pariwisata yang berdaya saing, Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) yang mengarahkan perencanaan dan pengelolaan penyediaan air minum berkelanjutan bagi masyarakat, serta berbagai dokumen rencana induk sektoral lainnya seperti Rencana Induk Transportasi dan Rencana Induk Energi Daerah.

Selain itu, RPJMD Kutai Timur juga memiliki hubungan yang kuat dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah

(RIPJPID). Dokumen ini memuat arah kebijakan pembangunan Iptek yang mendukung pengembangan riset, inovasi, dan sektor-sektor unggulan daerah. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD perlu diselaraskan dengan tujuan, sasaran, dan strategi yang terdapat dalam RIPJPID, serta mengelaborasi strategi tersebut dengan pendekatan ekosistem riset dan inovasi daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah. Pembangunan ekosistem riset dan inovasi daerah dimaksudkan untuk memperkuat daya saing, mendukung pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

Sinergi antara RPJMD dengan dokumen rencana induk sektoral, termasuk RIPJPID, memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah berjalan secara terarah, terpadu, dan konsisten. RPJMD memberikan kerangka besar pembangunan, sementara rencana induk sektoral memberikan detail teknis implementasi pada bidang-bidang tertentu. Untuk itu, RPJMD Kutai Timur Tahun 2025–2029 juga perlu didukung dengan penerapan manajemen risiko pembangunan yang berfungsi mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko yang dapat menghambat pencapaian target pembangunan, sehingga implementasi pembangunan daerah dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan visi pembangunan Kutai Timur 2025-2029.

1.4.2 Tujuan

1) Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD;
2) Memberikan pedoman penyusunan RKPD setiap tahun selama Tahun 2025-2029;
3) Menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 2025-2029;
4) Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kutai Timur dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan

menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;

5) Memungkinkan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar waktu, antarruang dan antar fungsi pemerintahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2025-2029 disusun menurut sistematika sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, yang terdiri dari:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.

BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Kutai Timur yang meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing. Dalam bab ini juga terdapat gambaran keuangan Daerah yang memuat tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 beserta proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029 serta memuat permasalahan dan isu strategis daerah.

BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029 serta strategi, arah kebijakan, dan program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pada bab ini diuraikan daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dan indikator program, target, dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat di antaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Kutai Timur yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah 31.239,84 kilometer persegi. Secara administratif, Kabupaten Kutai Timur berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara: Kecamatan Talisayan dan Kecamatan Kelay (Kabupaten Berau)
2. Sebelah Selatan: Kecamatan Bontang Utara (Kota Bontang), Kecamatan Marang Kayu, dan Kecamatan Muara Karam (Kabupaten Kutai Kartanegara)
3. Sebelah Timur: Selat Makassar dan Laut Sulawesi
4. Sebelah Barat: Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang (Kabupaten Kutai Kartanegara), serta Kecamatan Kayan Hilir (Kabupaten Malinau)

Kabupaten Kutai Timur merupakan hasil dari proses pemekaran Kabupaten Kutai, yang diresmikan pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. Saat ini, wilayah administratif Kabupaten Kutai Timur mencakup 18 kecamatan, 2 kelurahan, dan 139 desa. Sejarah pemekaran dari 5 kecamatan menjadi 18 kecamatan menunjukkan dinamika perkembangan wilayah yang signifikan.

Kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Muara Wahau yaitu 4.997,83 km^2 atau 16% dari total wilayah Kabupaten Kutai Timur. Kecamatan Muara Wahau memiliki 10 desa sehingga rata-rata luas setiap desa adalah 499,78 km^2. Bila dilihat dari rata-rata luas per desa, maka Kecamatan Busang memiliki desa dengan rata-rata paling luas yaitu 593,51 km^2 karena meski luasnya lebih kecil dibandingkan Kecamatan Muara Wahau yaitu 3.561,07 km^2 namun hanya memiliki 6 desa.

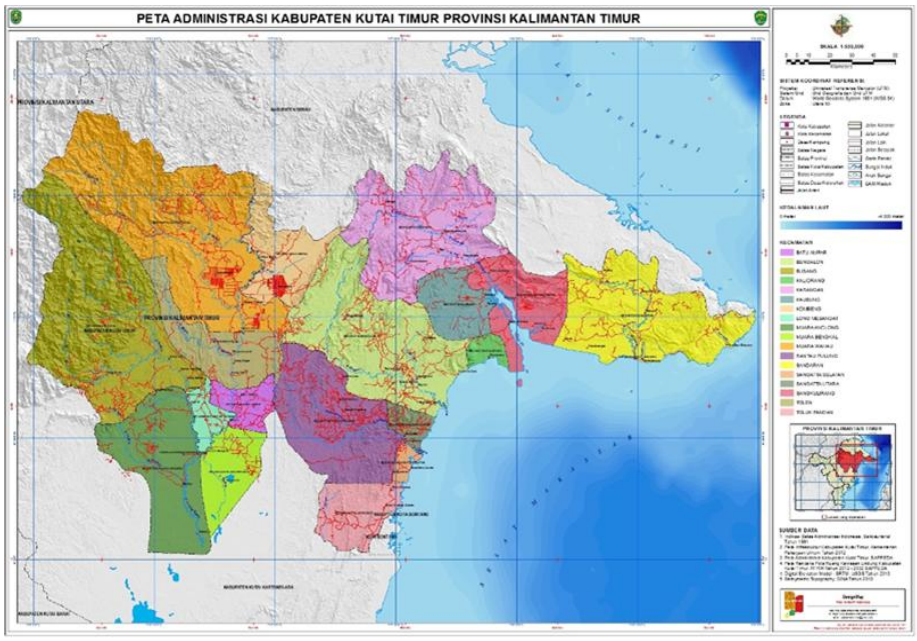
Kecamatan yang memiliki luas paling kecil adalah Kecamatan Kaliorang yaitu 302,93 km^2 atau hanya 0,97% dari luas Kabupaten Kutai Timur, serta yang memiliki 7 desa. Dari semua kecamatan, hanya Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan yang memiliki kelurahan yaitu masing-masing satu kelurahan.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Administrasi Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan

Kecamatan	Luas Wilayah (KM^2)	Persentase Luas Wilayah (%)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
Muara Ancalong	2.289,84	7,33	9	-
Busang	3.561,07	11,40	6	-
Long Mesangat	238,37	0,76	7	-
Muara Wahau	4.997,83	16,00	10	-
Telen	1.783,08	5,71	8	-
Kongbeng	1.101,24	3,53	7	-
Muara Bengkal	758,8	2,43	7	-
Batu Ampar	759,01	2,43	7	-
Sangatta Utara	333,56	1,07	3	1
Bengalon	3.429,36	10,98	11	-
Teluk Pandan	926,04	2,96	6	-
Sangatta Selatan	1.201,06	3,84	3	1
Rantau Pulung	916,04	2,93	9	-
Sangkulirang	1.630,38	5,22	15	-
Kaliorang	302,93	0,97	7	-
Sandaran	2.829,54	9,06	9	-
Kaubun	578,44	1,85	8	-
Karangan	3.603,23	11,53	7	-
Kutai Timur	**31.239,84**	**100,00**	**139**	**2**

Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka 2025, BPS Kabupaten Kutai Timur

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Kutai Timur



Sumber: Perda RTRW Kabupaten Kutai Timur No. 1 Tahun 2016

Secara astronomis Kabupaten Kutai Timur berada di antara garis lintang 10°52'39" Utara hingga 00°02'10" Selatan dan garis bujur 118°58'19" Timur hingga 115°56'26" Timur. Dari perspektif geografis, Kabupaten Kutai Timur berbatasan dengan Kabupaten Berau, Kutai Kartanegara, Kota Bontang, dan Selat Makassar, memberikan posisi strategis yang signifikan serta keanekaragaman geografis yang kaya. Posisi strategis ini mendukung interaksi regional dan pengembangan ekonomi yang lebih luas. Kabupaten Kutai Timur memiliki keunggulan dalam hal aksesibilitas dan konektivitas dengan wilayah-wilayah sekitar, yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan perdagangan dan mobilitas penduduk.

Posisi geografis Kabupaten Kutai Timur memberikan keunggulan strategis yang mendukung interaksi dengan wilayah lain. Beberapa poin strategis tersebut antara lain:

1. Terletak pada poros regional lintas trans Kalimantan yang menghubungkan wilayah Kalimantan Utara dengan jalur Kabupaten Nunukan – Malinau – Bulungan (Kota Tanjung Selor) – Berau (Kota Tanjung Redeb) – Kota Samarinda – Kota Balikpapan – Provinsi Kalimantan Selatan – Provinsi Kalimantan Tengah – Provinsi Kalimantan Barat.
2. Terletak pada poros pertumbuhan ekonomi kawasan ekonomi terpadu SASAMBA (Samarinda – Samboja – Balikpapan) dan kawasan segitiga pertumbuhan Bontang – Sangatta – Muara Wahau dan Sangkulirang.
3. Wilayah perairan Kabupaten Kutai Timur memiliki garis pantai sepanjang 587,62 Km, yang terletak dalam wilayah perairan Selat Makassar dan Laut Sulawesi, serta bagian laut Kalimantan Timur yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, sehingga posisi Kabupaten Kutai Timur ini menjadi strategis karena berada pada jalur transportasi laut internasional.

Wilayah Kutai Timur terdiri dari daratan dan perairan, terdiri dari wilayah daratan tidak terlepas dari gugusan gunung/pegunungan yang jumlahnya 8 (delapan) gunung dan yang tertinggi adalah Gunung Menyapa dengan ketinggian mencapai 2.000 mpl. Sedangkan wilayah perairan berupa laut/ pantai, sungai dan danau, untuk sungai terdapat di seluruh kecamatan namun yang terpanjang Sungai Kedang Kepala terletak di Kecamatan Muara Wahau dengan panjang 319 km.

2.1.1.1.1 Topografi

Topografi daerah Kutai Timur sangat beragam, dengan kombinasi dataran, bukit, pegunungan, dan wilayah pantai yang terdapat dalam satu kabupaten. Ketinggian tanah di wilayah ini bervariasi mulai dari 0 hingga lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut (dpl). Secara keseluruhan, wilayah Kabupaten Kutai Timur dapat dibagi menjadi dua, yaitu wilayah dengan kemiringan di bawah 15% dan wilayah dengan kemiringan di atas 15%.

Sebanyak 2.516.233 hektar (sekitar 76,37% dari luas total lahan) termasuk dalam kategori wilayah dengan kemiringan di atas 15%. Wilayah dengan kemiringan lebih dari 40 persen cukup luas dan tersebar di seluruh wilayah, terutama di sisi barat laut kabupaten ini, di mana ketinggiannya mencapai lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Wilayah dengan ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut ini cenderung berbukit hingga bergunung, dengan kemiringan yang cukup tajam, sehingga sangat rentan terhadap bencana alam dan erosi. Kondisi ini sebagian besar berada di wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Berau, seperti Kecamatan Sangkulirang, Muara Wahau, dan Muara Ancalong. Ketiga kecamatan ini terletak di pegunungan kapur, dengan sebagian besar wilayah berupa pegunungan (1.608.915 hektar) dan perbukitan (1.429.922,5 hektar).

Sementara itu, wilayah dataran di ketiga kecamatan ini mencakup 536.212,5 hektar, termasuk daratan, rawa, dan perairan sungai dan danau. Wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan kelerengan di bawah 15 persen (<2 s.d. 15), merupakan kawasan yang relatif datar dan landai. Kabupaten Kutai Timur memiliki wilayah dataran seluas 778.686 ha (23,63 persen). Kawasan ini terdapat di Kecamatan Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Muara Bengkal, Muara Ancalong serta sebagian Muara Wahau dan Sangkulirang. Kecamatan Muara Wahau dan Muara Ancalong merupakan daerah pegunungan kapur dan bukit Karst. Pegunungan dan perbukitan mempunyai areal paling luas yaitu masing-masing 1.608.915 ha dan 1.429.922,25 ha. Kabupaten Kutai Timur memiliki gunung sebanyak 8 buah. Gunung yang tertinggi adalah Gunung Menyapa, dengan ketinggian mencapai 2000 m. Selain pegunungan dan perbukitan, wilayah ini juga memiliki dataran landai seluas 536.212,5 ha yang terdiri dari daratan, rawa serta sungai dan danau.

Di sisi lain, ada juga wilayah yang relatif datar dan landai (dengan kemiringan kurang dari 15%) yang terdapat di Kecamatan Sangatta Utara, Muara Bengkal, Muara Ancalong, serta sebagian wilayah Muara Wahau dan Sangkulirang. Wilayah dengan kondisi ini sebagian besar terletak di sisi timur wilayah Kabupaten Kutai Timur, dengan ketinggian antara 0 hingga 7 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini memiliki kemiringan yang lebih landai, rawa mudah tergenang, dan merupakan daerah endapan. Namun, sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai Timur tetap memiliki kemiringan di atas 15 persen.

Tabel 2.2 Kondisi Topografi Kabupaten Kutai Timur

No	Sistem Lahan	Deskripsi Umum	Kemiringan (derajat)	Luas (ha)
1	Bakunan	Lembah-lembah kecil di antara perbukitan	< 2	15.717
2	Gambut	Rawa-rawa gambut yang dalam dengan permukaan umumnya lengkung	< 2	31.199
3	Kajapah	Dataran lumpur didaerah pasang surut di bawah bakau dan nipah	< 2	25.84
4	Klaru	Dataran banjir yang selalu tergenang	< 2	16.831
5	Sebangau	Jalur kelokan sungai-sungai besar dengan tanggul yang lebar	< 2	14.161
6	Kahayan	Dataran pantai/sungai yang tergabung	2 s/d 8	19.097
7	Kapor	Dataran karst yang berombak mengandung karst kecil- kecil	2 s/d 8	30.394
8	Lawangguang	Dataran batuan berombak hingga bergelombang	2 s/d 8	434.835
9	Pakau	Teras-teras berpasir berombak	2 s/d 8	188.834
10	Sungai Medang	Dataran vulkanik bergelombang	9 s/d 15	1.778
11	Gunung Baju	Dataran karst berbukit kecil	16 s/d 25	111.691
12	Teweh	Dataran batuan endapan berbukit kecil	16 s/d 25	809.91
13	Beriwit	Kuesta-kuesta bergunung batupasir dengan arah lereng tertoreh	26 s/d 40	35.058
14	Tewai Baru	Dataran bukit kecil dengan punggung terjal sejajar	26 s/d 40	95.545
15	Maput	Perbukitan batuan bukan endapan yang tidak simetris	41 s/d 60	530.667
16	Mantalat	Kelompok punggung panjang batuan endapan, dengan arah lereng	41 s/d 60	3.194

No	Sistem Lahan	Deskripsi Umum	Kemiringan (derajat)	Luas (ha)
17	Pendereh	Pegunungan batuan endapan yang tidak teratur	41 s/d 60	738.127
18	Bukit Pandan	Kelompok punggung gunung batuan bukan endapan	> 60	32.027
19	Batu Ajan	Gunung-gunung apitertoreh dengan pola drainase radial	> 60	2.604
20	Lohai	Kelompok punggung gunung yang panjang dan sempit	> 60	39.891
21	Okki	Punggung-punggung dan gunung karst yang curam	> 60	117.519

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Timur, 2021

2.1.1.1.2 Hidrologi

Wilayah perairan di Kabupaten Kutai Timur berupa laut/pantai, sungai dan danau. Daerah Aliran Sungai (DAS) terdapat di seluruh kecamatan. Sungai terpanjang adalah Sungai Kedang Kepala yang terletak di Kecamatan Muara Wahau, dengan panjang 319 km. Terdapat dua Danau yang terletak di Kecamatan Mura Bengkal yaitu Danau Ngayau dengan luas 1.900 ha dan Danau Karang seluas 750 ha. Wilayah pantai berada di sebelah Timur Kabupaten, yang mempunyai ketinggian antara 0-7 m di atas permukaan laut. Kawasan pantai yang memiliki potensi wisata bahari adalah Pantai Teluk Lombok dan Pantai Sekerat. Selama ini, wilayah Pantai Teluk Lombok dimanfaatkan oleh masyarakat lokal sebagai media perairan marikultur komoditi perikanan seperti tambak ikan dan udang, budidaya rumput laut dan budidaya ikan dalam Karamba Jaring Apung (KJA).

Daerah Aliran Sungai (DAS) terdapat hampir di seluruh kecamatan. Menurut peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) pada tahun 2016, Kabupaten Kutai Timur memiliki kurang lebih 282 sungai, dengan total panjang 6.151,9 km, di antaranya sebanyak 63 sungai besar dengan panjang 3.353,6 km. Terdapat 12 sungai terpanjang di Kutai Timur, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3 Sungai Terpanjang di Kabupaten Kutai Timur

No.	Nama Sungai	Panjang (km)
1	Sungai Telen	334,00
2	Sungai Bengalon	235,50
3	Sungai Kelinjau	206,50

No.	Nama Sungai	Panjang (km)
4	Sungai Wahau	187,50
5	Sungai Antan	176,50
6	Sungai Sangatta	159,50
7	Sungai Manubar	153,40
8	Sungai Senyiur	121,80
9	Sungai Marah	112,30
10	Sungai Karangan	110,30
11	Sungai Kedang Kepala	93,50
12	Sungai Pesah	82,90
Panjang Sungai (Total)		**1.973,70**

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Timur, 2021

Sungai Mahakam, Sungai Kedang Kepala, Sungai Bahan, Sungai Bani, Sungai Kayan, Sungai Senyiur, Sungai Sesayap, Sungai Telen, dan Sungai Wahan memiliki peran penting sebagai sumber penyedia air bersih bagi masyarakat, serta berfungsi sebagai jaringan transportasi air yang menghubungkan pusat pemerintahan dengan daerah pedalaman di Kalimantan Timur. Hal ini terjadi karena aksesibilitas darat ke beberapa daerah pedalaman di Kalimantan Timur terbatas, sehingga sungai-sungai ini menjadi jalur vital untuk distribusi sumber daya dan layanan ke daerah-daerah tersebut.

Selain sungai yang mengalir melintasi wilayahnya, Kabupaten Kutai Timur juga memiliki beberapa danau yang tersebar di berbagai kecamatan, yang penting untuk dikelola dengan baik untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat setempat. Kecamatan Muara Bengkal memiliki 4 danau, yaitu: (1) Danau Gelombang 7,56 ha; (2) Danau Ngayantua seluas 1.900ha; (3) Danau Padam Api seluas 511,36 ha; (4) Danau Karang dengan luas 750 ha. Kecamatan Muara Ancalong juga memiliki 3 danau, yaitu: (1) Danau Empaif seluas 6,46 ha; (2) Danau Kliring seluas 9,90 Ha; (3) Danau Setepus seluas 7,25 ha. Kecamatan Teluk Pandan memiliki Danau Redan seluas 6,66 ha. Sumber mata air lainnya yang juga menyerupai danau, dan masih dalam proses identifikasi nama, di antaranya: (1) Danau Tapal Kuda seluas 353,43 ha; dan (2) Danau/situ seluas 1.661,82 ha.

2.1.1.1.3 Geologi

Kondisi geologi Wilayah Kalimantan merupakan daerah yang kompleks dengan adanya interaksi antara 3 Lempeng Utama, yakni Lempeng Indo Australia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Asia. Terdapat banyak potensi mineral yang dimiliki seperti batu bara, minyak dan gas bumi, emas, dan lain-lain. Secara umum, formasi geologi yang ditemukan di Provinsi Kalimantan Timur adalah Endapan Alluvium yang banyak ditemukan di wilayah bantaran maupun wilayah paparan banjir dan dataran dari endapan sungai dan danau. Sedangkan, formasi yang paling sering ditemukan adalah Formasi Pamaluan, Mentarang, dan Balikpapan. Secara geologi, sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh Formasi Pemaluan (disusun oleh batu pasir kuarsa dengan sisipan batu lempung, batu gamping serpihan dan batu lana) yang tersebar di bagian tengah dan timur serta alluvium yang terdapat di sepanjang pantai. Selain itu, terdapat juga endapan batuan tersier dan batuan endapan kwarter dalam formasi batuan endapan, terutama batuan kwarsa dan batuan liat. Jenis tanah yang ditemukan di wilayah daratan Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh tanah podsolik merah kuning, latosol, dan litosol. Selain itu, juga terdapat jenis tanah lain seperti aluvial, organosol, latosol, podsol, dan podsolik merah kuning, yang memiliki tingkat kesuburan yang rendah. Banyak faktor yang memengaruhi kemampuan tanah di wilayah ini. Semakin banyak faktor penghambat seperti lereng yang curam, akan berdampak pada ketersediaan air yang rendah, dan kondisi ini juga rentan terhadap erosi. Karena berbagai faktor ini, kemampuan tanah di wilayah tersebut menjadi rendah.

Berdasarkan aspek geologi, wilayah daratan Kabupaten Kutai Timur tersusun dari 21 jenis formasi, namun 9 yang terluas sebagai berikut:

Tabel 2.4 Formasi Geologis Utama Kabupaten Kutai Timur

No	Sistem Lahan	Luas (Ha)
1	Dataran Alluvium	19.097
2	Dataran	1.505.176
3	Jalur Kelokan	14.161
4	Lembah	12.372
5	Rawa	138.994
6	Rawa Pasang Surut	25.840

No	Sistem Lahan	Luas (Ha)
7	Perbukitan	534.765
8	Pegunungan	975.938
9	Teras-teras	70.105

Sumber: RTRW Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035

Di Kabupaten Kutai Timur secara geologis juga terdapat kawasan karst. Luasan bukit karst tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) dan Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 140K/40/MEM/2019 Tanggal 30 Juli 2019. Dalam Surat Keputusan yang terakhir ditetapkan bahwa Kabupaten Kutai Timur memiliki 17 zona bentangan alam bukit karst.

Tabel 2.5 Kawasan Bukit Karst Kabupaten Kutai Timur

No	Kawasan Bukit Karst	Luas (ha)
1	Batu Aji	3.538,80
2	Batu Lepoq	6.496,00
3	Batu Onyen	6.681,59
4	Batu Thayib	44,76
5	Batu Tumok	16,47
6	Gunung Gergaji	5.832,58
7	Karangan	27.756,10
8	Kongbeng	90,65
9	Kulat	12.846,91
10	Mandu Dalam	370,52
11	Pengadan	997,52
12	Sandaran	56.255,08
13	Sekerat	9.052,60
14	Susuk	30.020,19
15	Teluk Bakung	2,235.50
16	Tepian Terap	498,01
17	Tutunambo Nyere	9.191,03
Total Luas Bukit Batu Karst		**171.924,31**

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Timur, 2021

2.1.1.1.4 Klimatologi

Wilayah Kabupaten Kutai Timur memiliki iklim tropis khas Indonesia, dengan suhu udara rata-rata 26°C dengan perbedaan suhu terendah dengan suhu tertinggi mencapai 5° sampai 7°C. Jumlah curah hujan antara 2.000 hingga 4.000 mm/tahun, dengan jumlah hari hujan rata-rata adalah 130 hingga 150 hari/tahun. Kutai Timur mengalami dua pola musim yang jelas, yaitu musim kemarau yang berlangsung dari Mei hingga Oktober, dan musim hujan yang mendominasi dari November hingga April. Kondisi iklim ini berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pertanian, perikanan, dan aktivitas ekonomi lainnya, yang harus disesuaikan dengan karakteristik musim yang ada. Periode-periode ini menjadi ciri khas yang berulang setiap tahun, dan di antaranya terdapat transisi musim yang terjadi pada beberapa bulan tertentu.

Berdasarkan data historis curah hujan Stasiun Metrologi Samarinda, Kabupaten Kutai Timur mengalami curah hujan menengah dan tinggi. Curah hujan dengan intensitas menengah yaitu 201-300 mm/bulan terjadi di Kabupaten Kutai Timur bagian timur, sedangkan curah hujan intensitas tinggi yaitu 301-400 mm/bulan terjadi di Kabupaten Kutai Timur bagian barat.

Tabel 2.6 Prakiraan Curah Hujan Bulan November 2024 s.d. Januari 2025

Curah Hujan (mm/bulan)		Kabupaten / Kota
Rendah	0 – 20	-
	21 – 50	-
	51 – 100	-
Menengah	101 – 150	-
	151 – 200	-
	201 – 300	Berau bagian timur Kutai Timur bagian timur Bontang Samarinda Balikpapan Penajam Paser Utara Kutai Barat bagian selatan Paser Kutai Kartanegara bagian timur
Tinggi	301 – 400	Berau bagian barat Kutai Timur bagian barat Kutai Kartanegara bagian barat Kutai Barat bagian utara Mahakam Ulu bagian selatan
	401 – 500	-
Sangat Tinggi	> 500	-

Sumber: Stasiun Metrologi Samarinda, BMKG, 2025

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Potensi tersebut terlihat dari beberapa aspek terutama pertambangan, pertanian, perikanan, perkebunan, serta pariwisata. Dalam hal pertambangan, Kabupaten Kutai Timur merupakan daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Selain batu bara, kekayaan sumber daya alam lain yang tersimpan di antaranya adalah minyak bumi, serta beberapa mineral seperti granit, pasir kuarsa, lempung, batu gamping, dan masih banyak lagi.

Penggunaan lahan di Kabupaten Kutai Timur tertuang dalam RTRW Kabupaten Kutai Timur 2015-2035. Dalam RTRW tersebut telah diatur dan direncanakan penggunaan lahan sesuai pola RTRW. Penggunaan lahan di Kabupaten Kutai Timur dikelompokkan menjadi beberapa kawasan sebagai berikut:

a) Kawasan hutan lindung tersebar di Kecamatan Bengalon, Kecamatan Busang, Kecamatan Karangan, Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Sandaran, dan Kecamatan Teluk Pandan dengan luas kurang lebih 327.825,87 ha.
b) Kawasan resapan air meliputi Kecamatan Bengalon, Kecamatan Kaubun, dan Kecamatan Telen kurang lebih 852,84 ha.
c) Kawasan lindung gambut, yaitu Kecamatan Muara Ancalong dengan luas kurang lebih 24.175,86 ha
d) Ruang Terbuka Hijau perkotaan terdapat di kawasan perkotaan kabupaten seluas kurang lebih 2.100,06 ha atau 30%.
e) Kawasan Konservasi Mangrove meliputi beberapa wilayah Kecamatan di pesisir pantai seluas kurang lebih 12.218,52 ha.
f) Kawasan Taman Nasional yaitu Taman Nasional Kutai yang berada di Kecamatan Sangatta Selatan dan Kecamatan Teluk Pandan dengan luas kurang lebih 143.265,13 ha.
g) Kawasan cagar alam yaitu Cagar Alam Muara Kaman Sedulang,meliputi Kecamatan Muara Bengkal dan Kecamatan Muara Ancalong dengan luas kurang lebih 44.963,55 ha.
h) Kawasan lindung geologi yaitu kawasan lindung karst di Kecamatan Karangan, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Kongbeng, Kecamatan Kaliorang, Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan Sandaran dengan luas kurang lebih 149.225,47 ha.

i) Kawasan Konservasi merupakan kawasan konservasi laut di Pulau Birah-birahan dengan luas kurang lebih 33,88 ha.
j) Kawasan Suaka Alam merupakan kawasan Suaka Alam Kabupaten dengan luas kurang lebih194.726,64 ha.
k) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas meliputi Kecamatan Bengalon, Kecamatan Busang, Kecamatan Karangan, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Kongbeng, Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Telen, dan Kecamatan Muara Ancalong dengan luas kurang lebih 492.814,79 ha.
l) Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Sangkulirang, Kecamatan Sandaran, Kecamatan Karangan, Kecamatan Kongbeng, Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Telen, Kecamatan Long Mesangat, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Busang, Kecamatan Muara Ancalong, dan Kecamatan Muara Bengkal dengan luas kurang lebih 540.841,50 ha.
m) Kawasan industri direncanakan di Kecamatan Bengalon seluas kurang lebih 6.042,89 ha, Kecamatan Kaliorang seluas kurang lebih 2.607,59 ha, Kecamatan Kongbeng seluas kurang lebih 6.187,98 ha, Kecamatan Muara Wahau seluas kurang lebih 49,15 ha, dan Kecamatan Sangkulirang seluas kurang lebih 3.623,53 ha.
n) Kawasan Industri yaitu Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan seluas kurang lebih 557,34 ha.
o) Kawasan industri di bagian wilayah hulu Kabupaten Kutai Timur, yaitu kawasan industri pengolahan batubara dengan sarana dan prasarana pendukungnya direncanakan di Kecamatan Kongbeng seluas kurang lebih 2.071,31 ha.
p) Kawasan perkebunan yang meliputi Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Kaliorang, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Sangkulirang, Kecamatan Sandaran, Kecamatan Karangan, Kecamatan Kongbeng, Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Telen, Kecamatan Long Mesangat, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Busang, Kecamatan Muara Ancalong, dan Kecamatan Muara Bengkal dengan luas kurang lebih 1.117.760,96 ha.

q) Kawasan pertanian pangan seluas kurang lebih 138.344,38 ha, dan Kawasan peternakan yang berada di Kecamatan Sandaran, Kecamatan Muara Ancalong dan Kecamatan Karangan seluas kurang lebih 10.497,59 ha.
r) Kawasan permukiman perdesaan meliputi Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Rantau Pulung, KecamatanKaliorang, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Sangkulirang, Kecamatan Sandaran, Kecamatan Karangan, Kecamatan Kongbeng, Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Telen, Kecamatan Long Mesangat, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Busang, Kecamatan Muara Ancalong, Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Muara Bengkal seluas kurang lebih 59.206,55 ha.
s) Kawasan permukiman perkotaan di Kecamatan Sangatta Utara dengan luas kurang lebih 13.979,91 ha, Kecamatan Kongbeng dengan luas kurang lebih 2.294,52 ha, Kecamatan Long Mesangat dengan luas kurang lebih 26,40 ha, Kecamatan Muara Bengkal dengan luas kurang lebih 6.624,33 ha, Kecamatan Muara Wahau dengan luas kurang lebih 3.760,72 ha, Kecamatan Sangkulirang dengan luas kurang lebih 2.237,50 ha, serta di Kecamatan Sangatta Selatan dengan luas kurang lebih 1.750,68 ha.
t) Tubuh air yang merupakan bentuk-bentuk tubuh perairan darat dan pemanfaatannya direncanakan dan/atau dilestarikan seluas kurang lebih 24.331,51 ha.
u) Kawasan peruntukan pariwisata pantai di Kecamatan Kecamatan Bengalon seluas lebih kurang 230,33 ha dan Kecamatan Sangatta Selatan seluas lebih kurang 51,37 ha

Pengembangan industrI hilir di Kabupaten Kutai Timur perlu diprioritaskan agar potensi sumber daya alamnya dapat dikelola untuk memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian daerah dan menciptakan perluasan lapangan kerja. Beberapa sektor yang menjadi potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :

2.1.1.2.1 Pertambangan

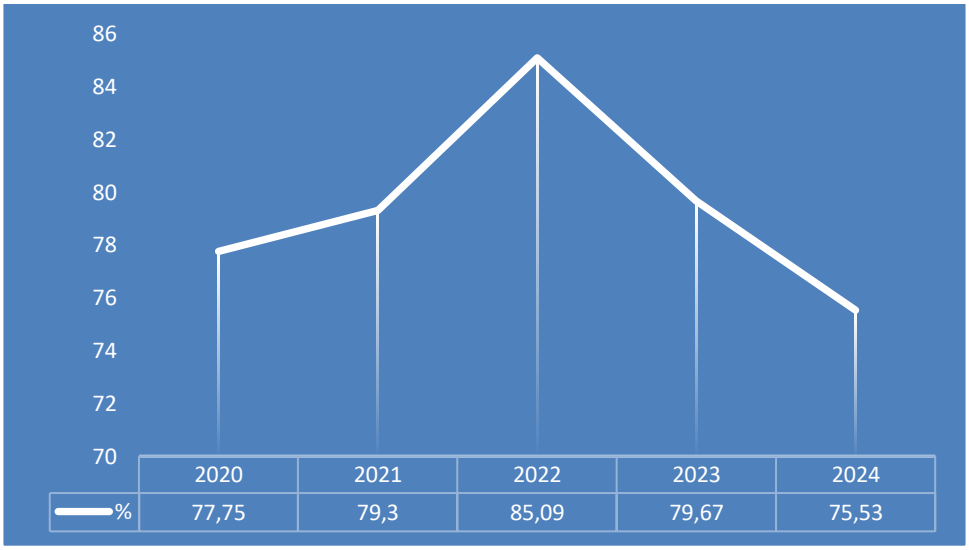
Kabupaten Kutai Timur memiliki cadangan sumber daya alam melimpah, khususnya batu bara. Sebagian besar wilayahnya menyimpan potensi tambang yang telah lama menjadi motor penggerak ekonomi daerah maupun nasional.

Keberadaan tambang batu bara di Kutai Timur menjadi salah satu penyumbang devisa negara sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Aktivitas pertambangan batu bara di Kutai Timur tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga memunculkan tantangan dalam aspek lingkungan dan sosial. Di satu sisi, industri tambang telah mendorong pembangunan infrastruktur, peningkatan pendapatan daerah, serta tumbuhnya sektor penunjang seperti transportasi, perdagangan, dan jasa. Namun di sisi lain, eksploitasi yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan seperti kerusakan lahan, pencemaran air, dan terganggunya ekosistem.

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian memiliki peran penting di dalam pendapatan daerah di Kabupaten Kutai Timur. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir kontribusi sektor pertambangan dan penggalian mencapai rata-rata 79,56% terhadap PDRB.

Gambar 2.2 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kabupaten Kutai Timur



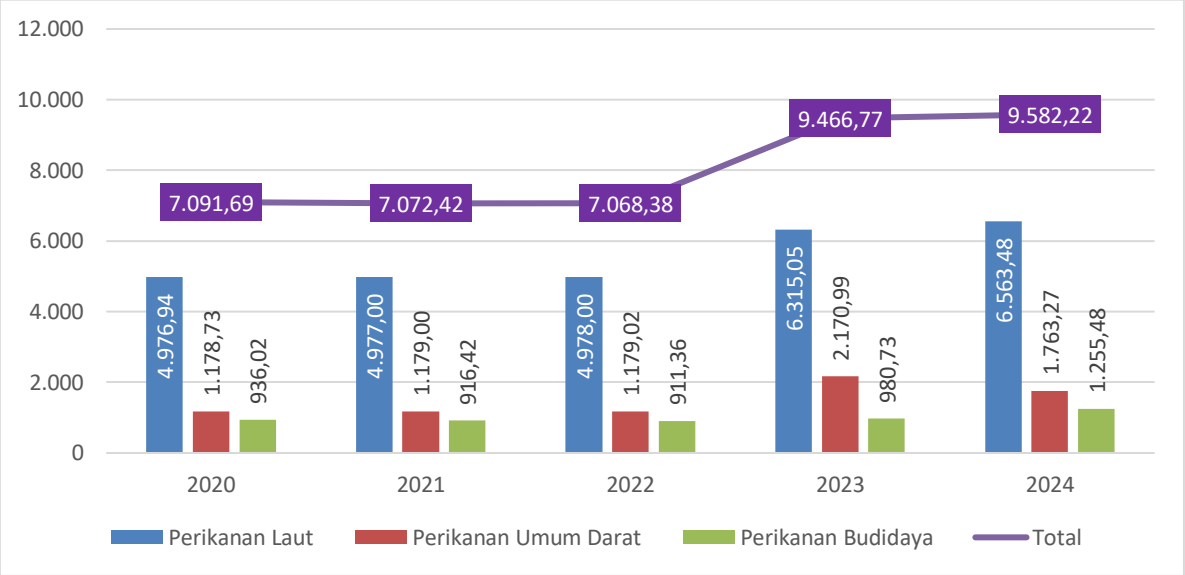
Berdasarkan data grafik di atas menunjukan bahwa potensi pemanfaatan batu bara di Kabupaten Kutai Timur mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan kebijakan *phasing-out* pemanfaatan batu bara serta meningkatnya kontribusi sektor lain di antaranya sektor industri pengolahan. Kondisi ini juga akan mendorong peluang pengembangan energi hijau di antaranya sektor pertanian dalam arti luas.

2.1.1.2.2 Perikanan

Dalam hal sumber daya kelautan untuk mendukung ekonomi biru (*blue economy*), Kabupaten Kutai Timur juga memiliki potensi besar di bidang perikanan dan pariwisata. Kabupaten Kutai Timur memiliki bibir pantai yang panjang, produksi perikanan tangkap laut di Kabupaten Kutai Timur juga masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan dengan dukungan kebijakan, sarana dan prasarana yang lebih baik. Pun demikian dengan perikanan tangkap daratan, potensi Kabupaten Kutai Timur cukup besar untuk dikembangkan ke depannya.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir produksi perikanan Kabupaten Kutai Timur terus mengalami peningkatan. Adanya dukungan pemerintah daerah melalui pemberian bantuan dalam bentuk sarana dan prasarana kepada kelompok nelayan dan pembudidaya.

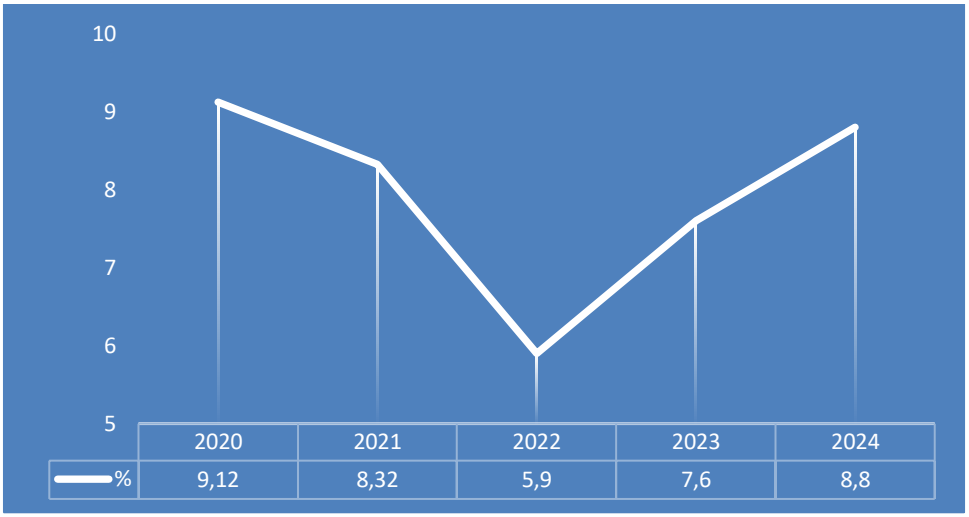
Gambar 2.3 Produksi Perikanan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024



2.1.1.2.3 Pertanian

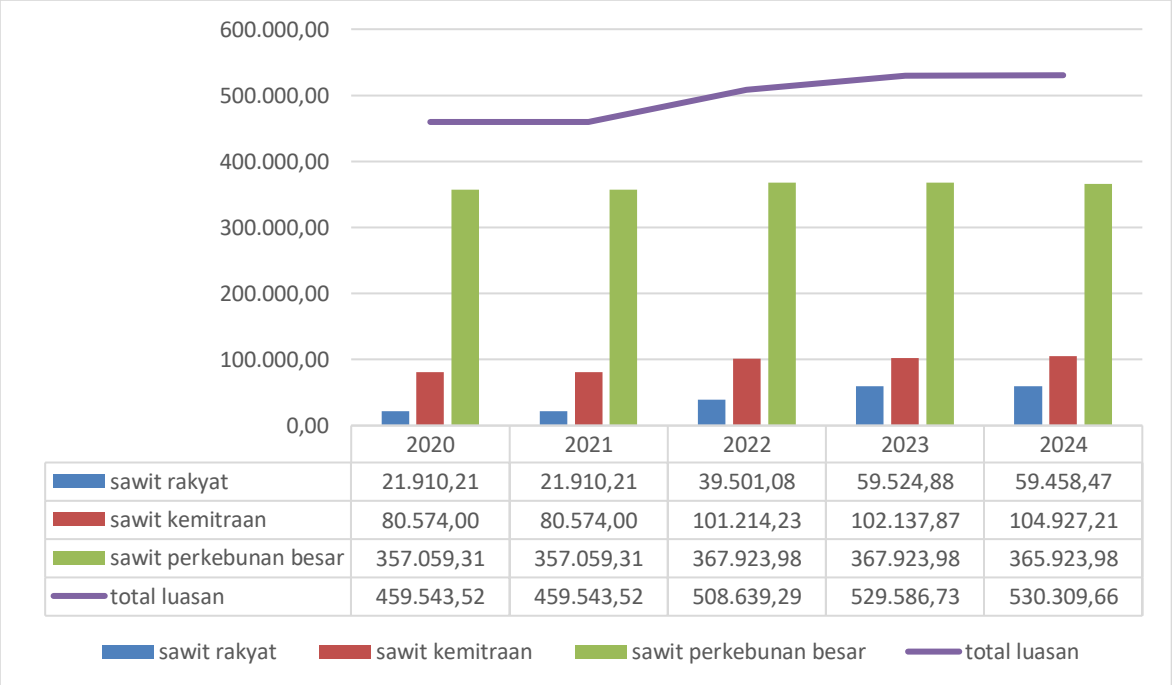
Dalam hal sektor pertanian, terdapat beberapa komoditas unggulan di Kabupaten Kutai Timur di antaranya pisang, kelapa sawit, coklat/kakao, karet, lada, kopi, dan nanas. Selain itu Kabupaten Kutai Timur memiliki lebih dari 100.000 hektar Kawasan budidaya kehutanan yang dapat dimaksimalkan untuk pengembangan program Perhutanan Sosial guna meningkatkan produktivitas pertanian serta industri pengolahan.

Gambar 2.4 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Kutai Timur



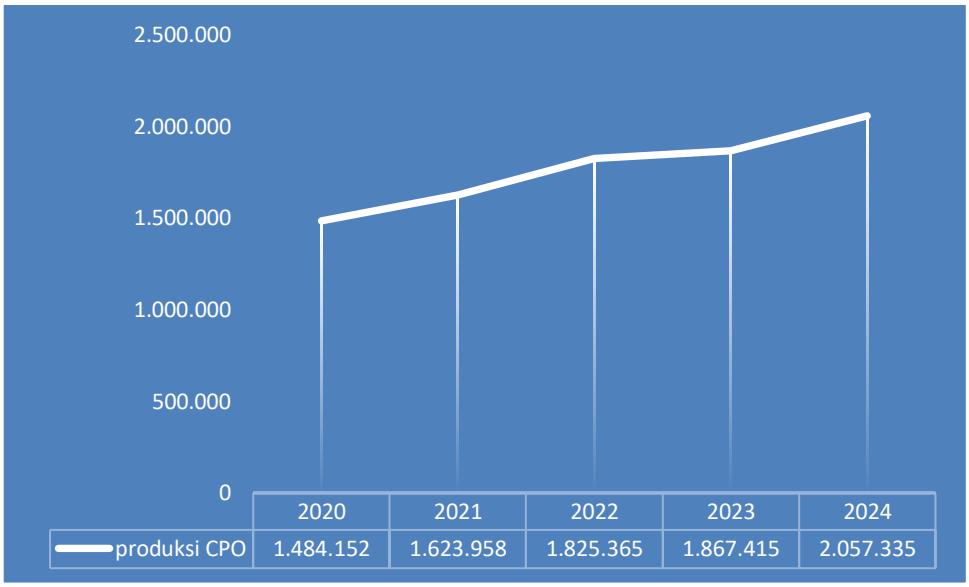
Potensi hasil perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur merupakan sektor unggulan perkebunan yang sangat strategis. Hingga tahun 2024 luas lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur mencapai 530.310 Hektar, dengan rincian kebun sawit rakyat seluas 59.458,47 hektar, kebun sawit kemitraan seluas 104.927,21 hektar dan kebun sawit perkebunan besar seluas 365.923,98 hektar. Adapun kapasitas produksi *Crude Palm Oil* (CPO) hingga tahun 2024 mencapai 1.183.103 Ton.

Gambar 2.5 Luas Perkebunan Sawit Kabupaten Kutai Timur (Ha)



Kabupaten Kutai Timur merupakan daerah penghasil *crude palm oil* (CPO) terbesar di Kalimantan Timur, dengan produksi penghasil *crude palm oil* (CPO) mencapai 2.057.335 ton di tahun 2024.

Gambar 2.6 Produksi Crude Palm Oil (CPO) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur 2024

2.1.1.2.4 Pariwisata

Kabupaten Kutai Timur salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, menyimpan potensi pariwisata yang kaya dan beragam. Wilayah ini memiliki keindahan alam yang memikat, mulai dari pesisir pantai, hutan tropis, hingga kawasan konservasi dengan keanekaragaman hayati yang unik. Posisi geografisnya yang strategis, dengan garis pantai yang panjang serta wilayah pegunungan dan pedalaman, menjadikan Kutai Timur sebagai destinasi yang menawarkan pengalaman wisata lengkap.

Kabupaten Kutai Timur memiliki bentang alam yang terdiri dari garis pantai, pegunungan karst, wisata kehutanan hingga ekosistem bawah laut yang menakjubkan. Selain itu Kabupaten Kutai Timur memiliki keberagaman budaya yang memiliki nilai tinggi untuk dijadikan potensi pariwisata di antaranya cagar budaya Desa Wehea, Festival Budaya Lom Plai, Pelas Tanah Kutai dan Festival Budaya Ufah.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Secara konsepsional, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 memberikan batasan tentang Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) untuk Pembangunan sebagai kajian yang mengukur kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung satu/rangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Kepentingan kajian ini terutama adalah untuk menentukan apakah intensitas pembangunan masih dapat dikembangkan atau ditambahkan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan berbagai *stakeholder,* termasuk kalangan perguruan tinggi menyepakati identifikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Indonesia menggunakan pendekatan jasa ekosistem *(ecosystem services)* sebagaimana yang dilakukan dalam Millenium Ecosystem Assessment–United Nation. Asumsinya, semakin tinggi jasa ekosistem semakin tinggi kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Jasa ekosistem pada habitat bumi ditentukan oleh keberadaan faktor endogen dan dinamika faktor eksogen yang dicerminkan dengan dua komponen yaitu kondisi ekoregion dan penutup lahan (*land cover*/*land use*) sebagai penaksir atau proxy. Dengan demikian terdapat empat konsep penting dalam penyusunan daya dukung lingkungan. Beberapa batasan konsep di antaranya adalah :

a) Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sedangkan Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
b) Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Penetapan batas ekoregion dengan mempertimbangkan kesamaan bentang alam, Daerah Aliran Sungai, Keanekaragaman Hayati dan sosial budaya (UU 32 Tahun 2009). Dalam operasionalisasinya penetapan ekoregion menggunakan pendekatan bentang lahan (*landscape*) dengan mengikuti sistem klasifikasi yang digunakan Verstappen. Selanjutnya jenis-jenis bentanglahan (*landscape*) akan dijadikan

salah satu komponen penaksir atau proxy jasa ekosistem (*landscape based proxy*)

c) Penutup Lahan adalah tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati, merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakukan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutup lahan tersebut. Dalam operasionalisasinya, digunakan sistem klasifikasi penutup lahan dari SNI 7645-2010, di mana jenis-jenis penutup lahan tersebut dijadikan salah satu komponen penaksir atau proxy jasa ekosistem (*landcover/landused based proxy*)

d) Jasa Ekosistem adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumberdaya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem yang dikelompokkan ke dalam empat macam manfaat yaitu manfaat penyediaan (*provisioning*), produksi pangan dan air; manfaat pengaturan (*regulating*) pengendalian iklim dan penyakit; manfaat pendukung (*supporting*),seperti siklus nutrien dan polinasi tumbuhan; serta manfaat kultural (*cultural*), spiritual dan rekreasional. Sistem klasifikasi jasa ekosistem tersebut menggunakan standar dari Millenium Ecosystem Assessment (2005)

Berdasarkan batasan konsep tersebut, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diukur dengan pendekatan jasa ekosistem. Semakin tinggi nilai jasa ekosistem, maka semakin tinggi pula kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Untuk memperoleh nilai jasa ekosistem digunakan dua penaksiran yaitu *landscape based proxy* dan *landcover/landused based proxy*, yang selanjutnya digunakan dasar untuk melakukan pemetaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan di antaranya adalah tentang ketersediaan air di Kabupaten Kutai Timur. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa ketersediaan air di Kutai Timur mencapai 27,236,513,511.40 m3 tiap tahun sedangkan untuk kebutuhannya 10,855,094,887.05 m3 tiap tahun. Dalam lingkup kabupaten, status daya dukung air masih memenuhi karena nilai ketersediaan lebih besar dibandingkan kebutuhannya. Walaupun begitu, ada beberapa kecamatan yang kondisinya defisit

seperti Kaliorang, Kaubun, Rantau Pulung dan Sangkulirang. Ambang batas penduduk yang mampu didukung dengan kondisi eksisting adalah 20 juta jiwa sedangkan jumlah penduduk eksisting sebanyak 338.637 jiwa. Empat kecamatan yang kondisinya defisit juga memiliki nilai defisit terkait perbadingan antara ambang batas penduduk dengan kondisi penduduk dalam grid. Kabupaten Kutai Timur mampu menyediakan jasa ekosistem berupa Jasa Lingkungan Penyedia Air (P1) dengan persentase kategori kelas berturut-turut, yaitu Sangat Rendah sebesar 2,60% (didominasi Kecamatan Muara Ancalong seluas 26.873,28 Hektar), Rendah sebesar 33,84% (didominasi Kecamatan Muara Wahau seluas 121.551,88 Hektar), Sedang sebesar 61,93% (didominasi Kecamatan Muara Wahau seluas 375.835,98 Hektar), Tinggi sebesar 1,21% (didominasi Kecamatan Muara Ancalong seluas 27.624,05 Hektar) serta Sangat Tinggi sebesar 0,41% (didominasi Kecamatan Muara Wahau seluas 2.672,83 Hektar).

Dalam hal jasa penyedia pangan, Kabupaten Kutai Timur mampu menyediakan jasa ekosistem berupa Jasa Lingkungan Penyedia Pangan (P2) dengan persentase kategori kelas berturut-turut, yaitu Sangat Rendah sebesar 0,002% (didominasi Kecamatan Muara Ancalong seluas 65,65 Hektar), Rendah sebesar 11,69% (didominasi Kecamatan Sandaran seluas 108.809,40 Hektar), Sedang sebesar 82,15% (didominasi Kecamatan Muara Wahau seluas 491.919,19 Hektar), Tinggi sebesar 5,71% (didominasi Kecamatan Muara Ancalong seluas 68.116,68 Hektar) serta Sangat Tinggi sebesar 0,44 % (didominasi Kecamatan Bengalon seluas 4.077,07 Hektar).

Di sisi yang lain Kabupaten Kutai Timur memiliki kemampuan dalam menyediakan layanan ekosistem dalam bentuk Jasa Lingkungan Pencegahan Banjir (R3A), dengan sejumlah persentase dalam kategori kelas yang berurutan. Persentase ini berkisar dari Sangat Rendah sekitar 0,05%, yang terutama didominasi oleh wilayah Kecamatan Bengalon seluas 836,43 Hektar. Kemudian, kategori Rendah mencapai sekitar 3,76%, yang utamanya didominasi oleh Kecamatan Bengalon dengan luas wilayah mencapai 30.020,52 Hektar. Sementara kategori Sedang mencapai sekitar 2,98%, dengan Kecamatan Muara Ancalong menjadi wilayah dominan dengan luas mencapai 42.675,21 Hektar. Pada tingkat yang lebih tinggi, kategori Tinggi mencapai sekitar 30,61%, dengan dominasi terutama terdapat di Kecamatan Muara Wahau seluas 120.825,26 Hektar. Terakhir,

kategori Sangat Tinggi mencapai sekitar 62,58%, dengan wilayah dominan utama juga terletak di Kecamatan Muara Wahau seluas 376.837,27 Hektar.

Kabupaten Kutai Timur juga memiliki kapasitas dalam menyediakan layanan ekosistem yang disebut Jasa Lingkungan Pencegahan Longsor (R3B). Persentase kategori-kategori kelas dalam jasa ini terdistribusi secara berurutan. Kategori Sangat Rendah mencapai sekitar 0,08%, dengan dominasi utama di Kecamatan Muara Ancalong yang mencakup luas wilayah sekitar 1.278,51 Hektar. Kemudian, terdapat kategori Rendah sekitar 5,98%, dengan wilayah dominan juga berlokasi di Kecamatan Muara Ancalong yang melibatkan area seluas 53.759,42 Hektar. Sementara itu, kategori Sedang mencapai sekitar 20,67%, yang didominasi oleh Kecamatan Muara Wahau dengan wilayah seluas 106.741,21 Hektar. Kategori Tinggi mencapai sekitar 12,76%, dengan wilayah dominan di Kecamatan Bengalon yang mencakup 41.537,60 Hektar. Kategori Sangat Tinggi mencapai sekitar 60,49%, dengan dominasi utama terdapat di Kecamatan Muara Wahau seluas 374.164,44 Hektar.

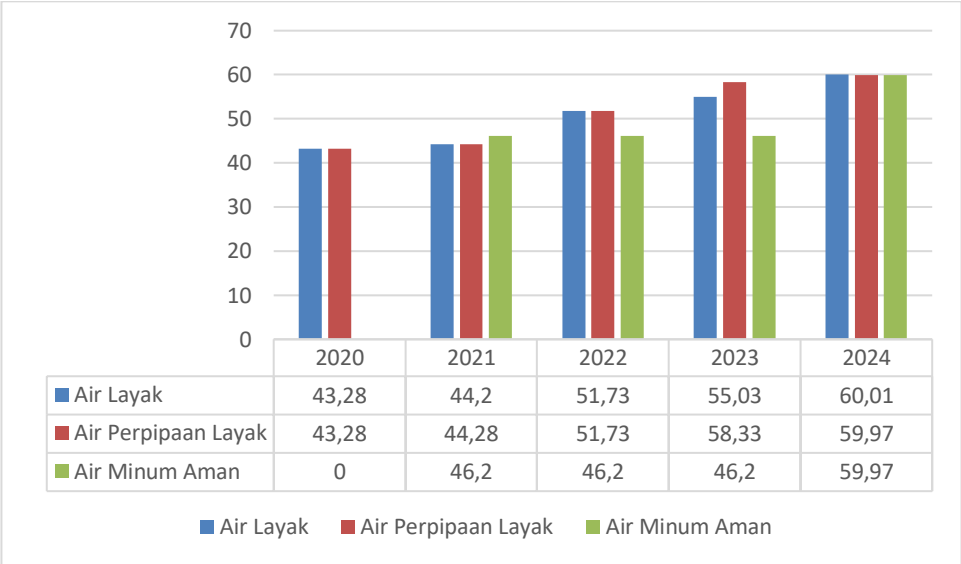
Dalam bidang yang lain Kabupaten Kutai Timur memiliki kemampuan dalam menyediakan layanan ekosistem yang dikenal sebagai Jasa Lingkungan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (R3C) dengan berbagai persentase kategori kelas yang berkembang secara berurutan. Kategori Sangat Rendah mencapai sekitar 0,14%, yang paling banyak terdapat di Kecamatan Muara Bengkal yang mencakup luas wilayah sekitar 1.748,92 Hektar. Sementara itu, kategori Rendah mencapai sekitar 5,98%, dengan dominasi wilayah terbesar terdapat di Kecamatan Muara Ancalong seluas 44.294,73 Hektar. Kategori Sedang mencapai sekitar 29,02%, dengan wilayah dominan terutama berlokasi di Kecamatan Muara Wahau seluas 117.754,75 Hektar. Kemudian, kategori Tinggi mencapai sekitar 63,79%, yang didominasi oleh Kecamatan Muara Wahau dengan luas wilayah mencapai 377.234,95 Hektar. Kategori Sangat Tinggi mencapai sekitar 1,07%, dengan wilayah terbesar berada di Kecamatan Sangkulirang seluas 14.397,77 Hektar.

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Secara keseluruhan akses terhadap air bersih khususnya dari 3 sumber utama yang terdata dari tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan data akses perpipaan layak menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan terhadap cakupan pelayanan PDAM untuk penyediaan air bersih kepada

masyarakat. Kemudian akses Masyarakat terhadap air minum layak juga mengalami peningkatan seiring dengan ketersediaan fasilitas air kemasan di tengah Masyarakat.

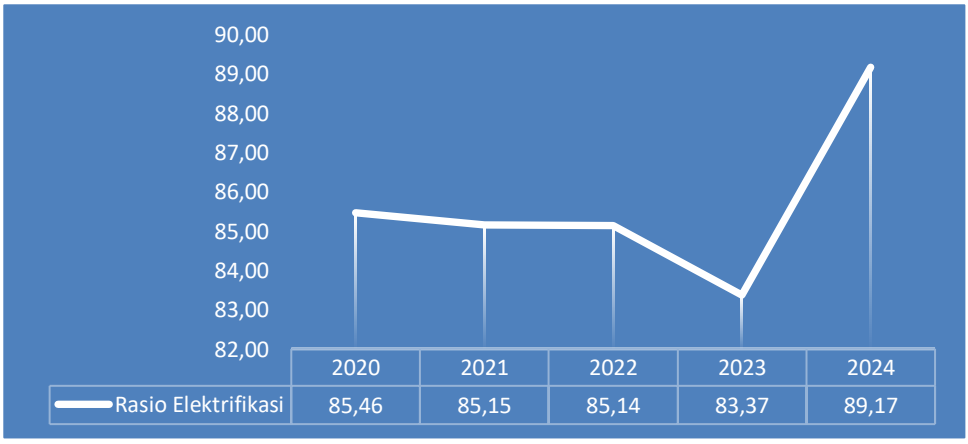
Gambar 2.7 Ketercapaiaan Air Minum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu wilayah dengan potensi sumber daya alam yang besar. Meskipun demikian, tantangan dalam pembangunan infrastruktur dasar masih menjadi isu utama, salah satunya adalah ketersediaan akses listrik yang merata ke seluruh wilayah. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, Rasio Elektrifikasi Kabupaten Kutai Timur mengalami peningkatan yang signifikan dari 85,46 menjadi 89,17.

Gambar 2.8 Rasio Elektrifikasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur, 2024

Secara kuantitatif, dari total lebih dari 119.000 sambungan rumah (SR) yang tercatat di Kutai Timur, sebagian besar sudah terhubung ke jaringan listrik PLN. Namun, masih terdapat sekitar 28 desa dari total 141 desa di kabupaten ini yang belum menikmati aliran listrik dari PLN dan bergantung pada sumber energi alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), atau bahkan genset diesel mandiri yang biayanya cukup tinggi dan tidak ramah lingkungan.

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabitas pasokan dan harga pangan.

Gambar 2.9 Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi



Sumber: Indeks Ketahanan Pangan 2022, Badan Pangan Nasional

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari 3 aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.

Secara keseluruhan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 cenderung mengalami penurunan dari 73,13 menjadi 61,64. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata indeks Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur. Menurunnya Indeks Ketahanan Pangan di Kutai Timur menggambarkan potensi kerawanan dalam hal pangan dan hal ini memerlukan kebijakan dan strategi yang tepat baik dalam aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Dari ketiga aspek tersebut aspek terlemah Kutai Timur adalah aspek ketersediaan. Aspek ini menjadi sangat penting dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan geologis Kutai Timur serta tingginya Indeks Risiko Bencana di Kutai Timur.

Tabel 2.7 Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024

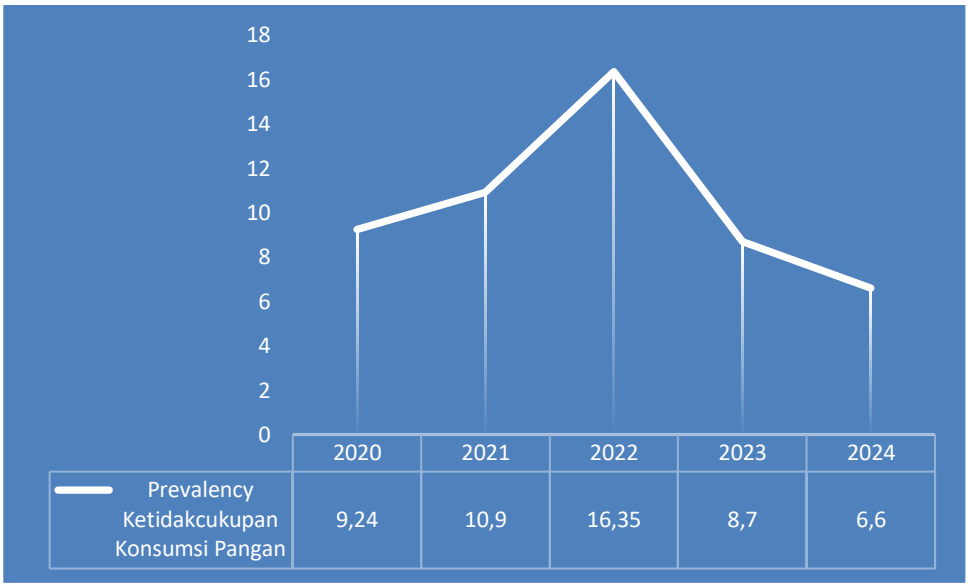
Tahun	Kutai Timur		Kalimantan Timur	
	Indeks	Peringkat	Indeks	Peringkat
2020	73,13	255	77,68	9
2021	66,19	324	77,34	NA
2022	60,09	344	77,65	11
2023	65,76	324	79,89	NA
2024	61,64	N/A	80,10	NA

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Jika dilihat dari angka PoU (prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan) Kabupaten Kutai Timur mengalami penurunan (positif) sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 dari angka 9,24 menjadi 6,6, artinya proporsi penduduk di Kabupaten Kutai Timur yang kekurangan gizi (mengonsumsi pangan di bawah standar energi untuk hidup sehat) mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Secara sederhana, hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi pangan dan gizi masyarakat, di mana

lebih sedikit orang yang tidak mendapatkan energi dan nutrisi yang cukup untuk kebutuhan dasar mereka atau semakin kecil angka PoU, itu berarti ada perbaikan, yaitu semakin sedikit penduduk yang mengalami kekurangan gizi.

Gambar 2.10 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Kutai Timur



2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup yang berkualitas menggambarkan kondisi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kualitas lingkungan hidup antara lain tercermin melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH tersusun dari 3 indeks utama Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), serta Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Secara statistik menunjukkan bahwa angka IKLH Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami perbaikan yaitu dari 69,47 menjadi 75,85. Namun angka ini masih di bawah rata-rata IKLH Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi ini menunjukkan keberhasilan Kutai Timur dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di tengah-tengah Pembangunan yang dilaksanakan.

Tabel 2.8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

Tahun	Kutai Timur	Kalimantan Timur
2020	69,47	75,25
2021	71,62	75,06
2022	72.48	74,46
2023	72.12	75,47
2024	75.85	76.63

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Dalam hal lingkungan hidup yang berkualitas, pengelolaan sampah yang berkualitas merupakan aspek yang penting. Hingga kini, praktik pengelolaan sampah di Kutai Timur masih bertumpu pada mekanisme angkut dan buang tanpa pemilahan optimal di tingkat rumah tangga. Strategi pengumpulan belum menjangkau pemilahan sejak sumbernya, sehingga efisiensi dan volume yang dapat diolah masih terbatas.

Dari data menyebutkan bahwa potensi timbunan sampah di Kabupaten Kutai Timur meningkat cukup signifikan selam 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2021 sebesar 77.461,58 Ton sampai dengan 2024 yang mencapai 79.082,18 Ton. Kondisi ini diakibatkan pertumbuhan penduduk yang berdampak kepada aktivitas masyarakat yang menimbulkan sampah.

Tabel 2.9 Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2024

Perihal	2021		2022		2023		2024	
	Kutai Timur	Kalimantan Timur	Kutai Timur	Kalimantan Timur	Kutai Timur	Kalimantan Timur	Kutai Timur	Kalimantan Timur
Potensi Timbunan Sampah (ton)	77.461,58	666.303,37	77.674,37	791.828,97	77.706,13	809.331,65	79.082,18	835.108,87
Jumlah Pengurangan Sampah (ton)	15.598,70	123.893,74	10.041,04	151.652,25	407,45	146.220,80	7.390,65	125.587,71
Jumlah Penanganan Sampah (ton)	20,14	18,15	12,93	15,34	0,52	14,13	9,35	12,99
Sampah yang Dikelola (ton)	54.817,31	495.428,80	35.748,10	537.560,26	41.720,61	547.419,15	39.226,37	467.473,77
% Sampah Yang Dikelola	70,77	71,04	46,02	58,13	53,69	58,37	49,60	54,62
Sampah yang tidak Dikelola (ton)	70.416,01	619.322,55	45.789,14	689.212,51	42.128,06	693.639,94	46.617,02	593.061,47
% Sampah Tidak Dikelola	90,90	89,19	58,95	73,47	54,21	72,50	58,95	67,61

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kutai Timur

2.1.1.6 Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi bencana yang signifikan, terutama dari bencana banjir. Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kutai Timur 2024-2028, banjir merupakan salah satu ancaman terbesar yang dihadapi wilayah Kutai Timur. Kecamatan seperti Muara Ancalong dan Sangatta termasuk dalam kategori risiko banjir kelas tinggi, dengan total luas wilayah terdampak mencapai 523.476,36 hektar. Penyebab utama banjir adalah intensitas hujan yang tinggi serta topografi dataran rendah yang menyebabkan sungai-sungai di wilayah ini meluap. Kerugian akibat banjir mencakup kerusakan infrastruktur, perumahan, serta lahan pertanian, yang memberikan dampak negatif signifikan terhadap kondisi ekonomi dan lingkungan.

Cuaca ekstrem juga menjadi ancaman yang patut diwaspadai di Kabupaten Kutai Timur. Wilayah-wilayah seperti Kecamatan Sangatta Utara dan Sangkulirang tercatat memiliki potensi bencana cuaca ekstrem kelas tinggi. Cuaca ekstrem, yang biasanya berupa angin kencang dan hujan lebat, dipengaruhi oleh topografi dataran dan tutupan lahan yang kurang optimal, seperti lahan kosong dan hutan terbuka. Bencana ini menyebabkan kerugian fisik dan ekonomi yang besar, terutama pada infrastruktur umum dan perumahan. Meski demikian, kapasitas mitigasi bencana cuaca ekstrem di beberapa wilayah masih tergolong rendah, sehingga risiko cuaca ekstrem harus menjadi perhatian serius dalam perencanaan kebencanaan.

Kebakaran hutan dan lahan juga merupakan ancaman yang signifikan di Kabupaten Kutai Timur. Luas wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran hutan mencapai lebih dari 2,8 juta hektar, dengan sebagian besar wilayah di kecamatan seperti Muara Wahau dan Bengalon berada dalam kategori risiko kebakaran hutan kelas tinggi. Aktivitas pembukaan lahan oleh manusia serta fenomena alam seperti El Nino merupakan faktor utama penyebab kebakaran hutan. Bencana kebakaran hutan tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi masyarakat setempat, tetapi juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius, termasuk hilangnya keanekaragaman hayati.

Selain itu, tanah longsor menjadi salah satu ancaman di daerah pegunungan Kabupaten Kutai Timur, terutama di Kecamatan Muara Wahau yang memiliki wilayah rawan longsor terbesar. Tanah longsor dipicu oleh kondisi topografi dengan

lereng yang curam, terutama pada wilayah pegunungan dengan elevasi tinggi. Bencana ini sering terjadi pada musim hujan ketika tanah yang tidak stabil bergerak turun akibat gaya gravitasi. Kerugian akibat tanah longsor meliputi kerusakan infrastruktur, perumahan, serta lahan pertanian. Kombinasi antara potensi bahaya tanah longsor yang tinggi dan kapasitas mitigasi yang rendah di wilayah ini membuat tanah longsor menjadi salah satu risiko prioritas.

Selain banjir, cuaca ekstrem, kebakaran hutan, dan tanah longsor, Kabupaten Kutai Timur juga menghadapi potensi ancaman dari bencana epidemi dan wabah penyakit. Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kutai Timur 2024-2028, bencana ini masuk dalam kategori risiko rendah. Penyakit menular seperti demam berdarah dan malaria masih menjadi ancaman di beberapa kecamatan. Faktor penyebab meliputi kurangnya kesadaran dan kesiapan masyarakat serta pemangku kepentingan dalam menghadapi wabah penyakit. Meskipun risikonya rendah, upaya peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan tetap diperlukan untuk meminimalkan dampak dari potensi wabah yang dapat mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Gelombang ekstrem dan abrasi juga menjadi ancaman yang signifikan di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur. Kecamatan yang berbatasan langsung dengan pantai, seperti Sangkulirang dan Sandaran, memiliki risiko moderat terhadap gelombang ekstrem dan abrasi. Bencana ini biasanya terjadi akibat siklon tropis yang menyebabkan gelombang laut tinggi dan merusak garis pantai. Faktor seperti tutupan vegetasi pesisir yang berkurang serta bentuk garis pantai turut memperbesar risiko abrasi. Dampak bencana ini meliputi kerusakan fisik pada infrastruktur pesisir dan pemukiman serta kerugian ekonomi bagi masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut.

Selain itu, kekeringan juga menjadi salah satu ancaman bencana di Kabupaten Kutai Timur. Wilayah ini berisiko mengalami kekeringan, terutama selama fenomena *El Nino* yang menyebabkan curah hujan menurun drastis. Dampak kekeringan terutama dirasakan oleh masyarakat yang bergantung pada sumber air untuk pertanian dan kebutuhan sehari-hari. Kekeringan juga berdampak pada penurunan kualitas air bersih, yang memengaruhi kesehatan masyarakat. Seluruh kecamatan di Kutai Timur termasuk dalam kategori risiko kekeringan sedang, dan kombinasi

antara pertumbuhan penduduk serta perambahan hutan semakin memperparah risiko ini.

Selanjutnya, gempa bumi dan tsunami juga menjadi ancaman di Kabupaten Kutai Timur, meskipun risikonya tergolong rendah. Kabupaten Kutai Timur dilintasi oleh beberapa sesar aktif, seperti Sesar Mangkalihat dan Sesar Tarakan, yang memiliki potensi menyebabkan gempa bumi. Sementara itu, risiko tsunami juga ada di wilayah pesisir, terutama di kecamatan yang memiliki pantai berteluk dan muara sungai dengan topografi landai. Kombinasi dari kondisi ini dapat memperbesar dampak tsunami jika terjadi.

Tabel 2.10 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2019-2024

Tahun	IKD	IRB	Kelas Risiko
2019	0,00	190	Tinggi
2020	0,00	190	Tinggi
2021	0,26	190	Tinggi
2022	0,38	181,57	Tinggi
2023	0,36	185,17	Tinggi
2024	0,42	173,36	Tinggi

Sumber: BPBD Kabupaten Kutai Timur 2024

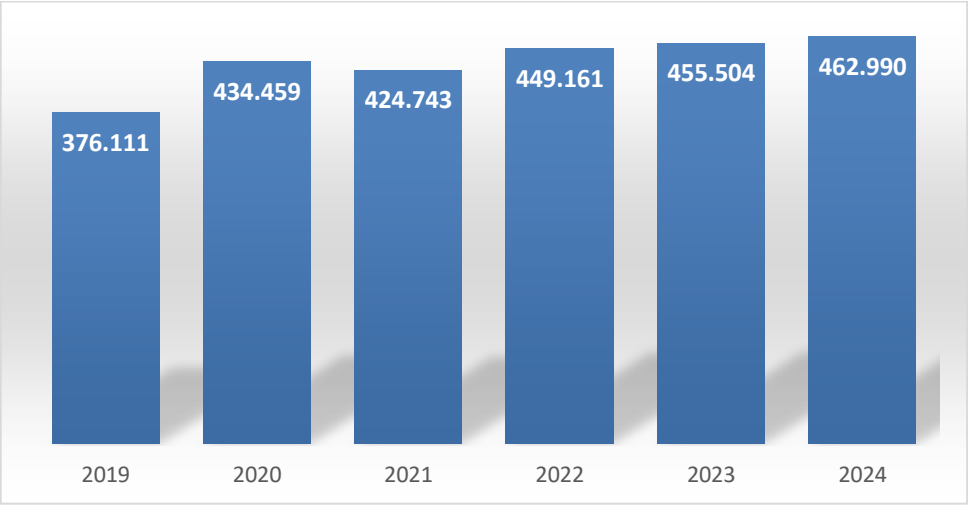
Data IKD dan IRB di Kabupaten Kutai Timur selama 2019-2024 menunjukkan pola yang konsisten dalam arti kenaikan IKD diikuti dengan penurunan IRB. Peningkatan nilai IKD mencerminkan peningkatan pengakuan dan pencatatan faktor-faktor kerentanan di Kabupaten Kutai Timur, sementara perubahan dalam IRB menunjukkan dinamika risiko bencana yang tetap tinggi namun sedikit berfluktuasi. Kelas risiko bencana selama 2019-2024 tetap berada pada kelas yang tinggi, meski pada 2023-2024 terjadi penurunan IRB yang cukup signifikan, sehingga perlu strategi mitigasi dan penanggulangan bencana yang lebih efektif dan terintegrasi untuk mengurangi kerentanan dan risiko di masa mendatang. Penurunan IRB yang terjadi selama 2021-2022 menunjukkan keberhasilan upaya mitigasi, namun tahun 2023 IRB kembali naik dan kembali turun cukup drastis di tahun 2024. Penurunan di tahun 2024 tersebut mengindikasikan bahwa upaya

mitigasi mengalami peningkatan, meskipun juga dapat disebabkan karena faktor alam yang mendorong penurunan nilai IRB.

2.1.1.7 Demografi

Penduduk Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2024 tercatat sebesar 462.990 jiwa. Jumlah ini menunjukkan kenaikan bila dibandingkan tahun 2023 yang besarnya 455.504 jiwa atau naik sebesar 1,64%. Selama 2019-2024 jumlah penduduk menunjukkan penurunan di tahun 2021 yaitu turun sebesar -2,24% sedangkan pertumbuhan penduduk tertinggi pada periode tersebut terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 15,51%. Perubahan jumlah penduduk dapat dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu: (1) kelahiran, (2) kematian, dan (3) migrasi atau perpindahan penduduk ke daerah lain. Pertumbuhan penduduk dapat menjadi peluang sekaligus tantangan di masa depan. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi perlu diimbangi dengan pembangunan sumber daya manusia sehingga pertumbuhan penduduk menjadi potensi bagi Kutai Timur dalam mempercepat pembangunan daerah. Di sisi lain pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat berpotensi menjadi permasalahan yang memerlukan penanganan serius.

Gambar 2.11 Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2019-2024 (Jiwa)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan kelompok umurnya, penduduk dengan usai di bawah lima tahun atau balita mencapai 8,35%; angka yang cukup tinggi dan memerlukan perhatian khususnya di bidang kesehatan balita. Bila usia sekolah mulai Taman Kanak-kanak

(TK) hingga perguruan tinggi adalah usia 5-24 tahun, jumlah penduduk kelompok usia tersebut mencapai 32,96% dan usia ini akan berpengaruh terhadap APK dan APM. Di sisi lain jumlah penduduk usia produktif yaitu usia 15-64 tahun mencapai 72,48%. Penduduk yang berusia lanjut (lansia) yaitu usia 65 ke atas tahun 2024 mencapai lebih dari 17.000 jiwa. Hal ini membutuhkan intervensi pemerintah daerah melalui kebijakan aspek sosial, khususnya yang berusia 70 tahun ke atas.

Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024

Umur	Laki-laki		Perempuan		Total	
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
0-4	19.740	51,06	18.930	48,97	38.660	8,35
5-9	17.650	51,62	16.540	48,38	34.190	7,38
10-14	19.350	51,53	18.200	48,47	37.550	8,11
15-19	20.800	52,22	19.030	47,78	39.830	8,60
20-24	21.770	53,03	19.280	46,97	41.050	8,87
25-29	22.210	53,88	19.000	46,09	41.220	8,90
30-34	23.330	53,68	20.130	46,32	43.460	9,39
35-39	23.100	54,17	19.540	45,83	42.640	9,21
40-44	19.790	54,03	16.840	45,97	36.630	7,91
45-49	17.360	53,83	14.890	46,17	32.250	6,97
50-54	14.650	55,56	11.710	44,41	26.370	5,70
55-59	11.150	57,77	8.150	42,23	19.300	4,17
60-64	7.330	57,22	5.480	42,78	12.810	2,77
65-69	4.550	56,88	3.450	43,13	8.000	1,73
70-74	2.690	58,61	1.900	41,39	4.590	0,99
75+	2.560	57,4	1.900	42,6	4.460	0,96
Kutai Timur	**248.020**	**53,57**	**214.980**	**46,43**	**462.990**	**100**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur

Bila dilihat per kecamatan, Kecamatan Sangatta Utara merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk yang paling banyak dan paling padat, yaitu 28,93% penduduk dengan tingkat kepadatan 389 orang per km^2. Hal ini berbeda jauh dengan Kecamatan Sangatta Selatan yang memiliki proporsi penduduk 7,16% dengan tingkat kepadatan hanya 25 orang per km^2. Kecamatan Bengalon merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak kedua yaitu 9,85% dengan tingkat

kepadatan hanya 26 orang per km^2. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Busang yaitu hanya 1,35% dan kecamatan ini juga memiliki tingkat kepadatan paling rendah yaitu 2 orang per km^2. Dengan demikian distribusi penduduk antar kecamatan di Kutai Timur belum merata. Hal ini menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan dan strategi konektivitas antarwilayah serta program pengembangan kecamatan.

Tabel 2.12 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

Kecamatan	Proporsi (%)	Kepadatan (jiwa/km^2)
Muara Ancalong	3,38	6,63
Busang	1,35	1,71
Long Mesangat	1,65	31,09
Muara Wahau	7,18	6,45
Telen	2,26	5,7
Kongbeng	7,13	29,08
Muara Bengkal	3,08	18,23
Batu Ampar	2,09	12,36
Sangatta Utara	28,93	389,28
Bengalon	9,89	12,95
Teluk Pandan	3,34	16,19
Sangatta Selatan	7,16	26,75
Rantau Pulung	3,29	16,14
Sangkulirang	5,61	15,43
Kaliorang	4,21	62,42
Sandaran	2,59	4,1
Kaubun	3,99	30,93
Karangan	2,86	3,56
Kutai Timur	**100,00**	**14,37**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur

Data kependudukan antar wilayah di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Kutai Timur cenderung menurun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2020. Laju pertumbuhan penduduk mencapai 5,27 dan menurun menjadi 1,71 pada tahun 2024. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kutai Timur sangat dipengaruhi oleh urbanisasi yang tinggi dari wilayah luar Kabupaten Kutai Timur yang berdampak kepada perbedaan rasio jenis kelamin.

Rasio Jenis Kelamin mencapai 115,4. Ini mencerminkan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan jenis kelamin perempuan. Selain itu pula berdampak kepada peningkatan kepadatan penduduk yang mencapai 15 orang per km^2.

Tabel 2.13 Perbandingan Indikator Kependudukan Tahun 2020-2024

Kutai Timur	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk (Ribu)	434,5	449,2	468,8	455,5	**463,0**
Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	5,27	2,53	4,45	1,73	**1,71**
Persentase Penduduk (%)	11,54	11,79	12,15	11,65	**11,44**
Kepadatan Penduduk per km persegi (km^2)	14	14	15	14	**15**
Rasio Jenis Kelamin Penduduk	117,6	117,2	116,8	115,9	**115,4**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Di tahun 2029 penduduk Kutai Timur diperkirkan mencapai 498.980 jiwa. Selama 2025-2029 rata-rata pertumbuhan mencapai 1,49% per tahun. Hasil proyeksi BPS menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan penduduk usia 65 ke atas cukup tinggi sehingga perlu diantisipasi dengan program dan kegiatan untuk penduduk usia non produktif tersebut. Proyeksi jumlah penduduk juga dijadikan sebagai salah satu dasar penyusunan program di bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, energi, dan sebagainya,

Tabel 2.14 Proyeksi Jumlah Penduduk Kutai Timur Tahun 2025-2029 (ribuan)

Kelompok Usia	2025	2026	2027	2028	2029	Rata-rata Pertumbuhan (%)
0-4	41,24	41,07	40,92	40,77	40,63	-0,37
5-9	32,68	34,01	35,43	37,06	39,03	4,54
10-14	37,01	36,44	35,86	35,17	34,24	-1,93
15-19	39,49	39,12	38,71	38,25	37,73	-1,13
20-24	41,23	41,26	41,16	40,94	40,64	-0,36
25-29	41,19	41,35	41,66	42,04	42,37	0,71
30-34	43,26	43,03	42,74	42,47	42,29	-0,57
35-39	43,46	43,93	44,08	44,01	43,84	0,22
40-44	37,59	38,74	40,06	41,38	42,52	3,13
45-49	33,13	33,93	34,66	35,38	36,19	2,23

Kelompok Usia	2025	2026	2027	2028	2029	Rata-rata Pertumbuhan (%)
50-54	27,53	28,62	29,66	30,64	31,57	3,48
55-59	20,55	21,81	23,07	24,31	25,5	5,54
60-64	13,76	14,79	15,88	17,01	18,18	7,21
65-69	8,64	9,32	10,02	10,77	11,58	7,60
70-74	4,91	5,29	5,74	6,24	6,77	8,36
75+	4,72	4,99	5,26	5,56	5,91	5,78
Jumlah	470,4	477,7	484,9	491,99	498,98	1,49

Sumber: SP2020, Proyeksi Penduduk, BPS Kabupaten Kutai Timur

Kutai Timur adalah wilayah yang heterogen, yang dihuni dengan berbagai suku bangsa di Indonesia. Dalam konteks masyarakat adat, Kabupaten Kutai Timur memiliki suku asli yang telah berdiam sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Masyarakat adat di Kutai Timur memiliki kearifan lokal yang kaya dan bersejarah, yang tercermin dalam budaya dan tradisi mereka. Salah satu contoh penting adalah "Pelas Tanah", sebuah pesta adat yang diselenggarakan setiap tahun. Pelas Tanah memiliki akar sejarah yang mendalam, berawal dari tradisi kerajaan Kutai Martadipura, sebuah kerajaan bercorak Hindu yang berdiri sejak sekitar abad ke-4. Kerajaan ini, dikenal juga sebagai Kutai Kartanegara ing Martadipura, memiliki sejarah yang merupakan salah satu yang tertua di Nusantara.

Selain itu, terdapat upaya khusus untuk mengembangkan dan memantapkan potensi budaya masyarakat adat Wehea Kelay di Kutai Timur sebagai destinasi wisata. Tujuannya adalah untuk menjadikan kawasan ini sebagai salah satu kawasan destinasi wisata utama di Kutai Timur dengan fokus pada pengembangan wisata sosial budaya. Strategi pengembangannya meliputi studi kajian untuk mengembangkan potensi wisata budaya dan pembangunan infrastruktur pendukung untuk mempromosikan destinasi wisata masyarakat adat Wehea Kelay.

Kedua aspek ini, Pelas Tanah dan pengembangan Wehea Kelay, menunjukkan bagaimana masyarakat adat Kutai Timur tidak hanya mempertahankan budaya mereka yang kaya, tetapi juga bagaimana mereka beradaptasi dan mengintegrasikan warisan budaya tersebut ke dalam konteks modern, khususnya pariwisata, untuk mempromosikan dan melestarikan tradisi mereka.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.1.2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan nilai akhir dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian dalam kurun waktu 1 tahun. PDRB menggambarkan hasil akhir dari berbagai aktivitas ekonomi masyarakat yang dikelompokkan ke dalam 17 sektor atau lapangan usaha maupun dikelompokkan berdasarkan pengeluaran komponen pelaku ekonomi. Data 2020-2024 menunjukkan bahwa nilai PDRB ADHB Kutai Timur tahun 2024 mencapai sekitar 159 triliun. Angka ini turun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 168 triliun atau turun sebesar -5,21%; tahun 2022-2023 bahkan turun hingga -20,29%.

Penurunan PDRB ADHB tahun 2023 dan 2024 tersebut disebabkan karena turunnya nilai PDRB ADHB sektor pertambangan dan penggalian yang cukup tajam dari 179,63 triliun di tahun 2022 menjadi 134,06 triliun di tahun 2023 atau turun sebesar -25,37%; dan di tahun 2024 kembali turun menjadi 120,46 triliun atau turun -10,14%. Penurunan ini terjadi akibat turunnya harga barang di sektor pertambangan dan penggalian di tahun 2023 dan 2024. Hal ini terlihat dari nilai PDRB ADHK sektor pertambangan dan penggalian yang menunjukkan kenaikan di tahun 2023 dari 80,14 triliun di tahun 2022 menjadi 86,55 triliun di tahun 2023 atau naik sebesar 8,00%; di tahun 2024 naik lagi menjadi 95,32 triliun atau naik sebesar 10,12%. PDRB ADHK dengan tahun dasar 2010 mengandung arti bahwa nilai output sektor pertambangan dan penggalian tahun 2023 dan 2024 dihitung dengan menggunakan harga tahun 2010. Dengan demikian sekalipun di tahun 2023 dan 2024 terjadi kenaikan output sektor pertambangan dan penggalian, namun bila terjadi penurunan harga maka akan menyebabkan PDRB ADHB sektor tersebut juga menurun.

Tabel 2.15 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 (Juta Rp)

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.537.387	11.366.917	12.460.886	12.783.082	14.031.353
Pertambangan dan Penggalian	89.850.254	108.984.972	179.628.767	134.057.967	120.461.014
Industri Pengolahan	4.107.441	4.616.395	5.378.676	5.419.382	6.924.547
Pengadaan Listrik dan Gas	15.697	16.052	17.524	21.913	27.708
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16.033	17.486	18.910	21.327	24.368
Konstruksi	2.575.777	2.700.809	3.593.882	4.723.578	5.407.409
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.507.306	2.719.779	3.126.743	3.625.015	3.954.839
Transportasi dan Pergudangan	1.481.943	1.534.113	1.671.647	1.904.723	2.185.860
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	325.116	362.435	403.297	449.819	501.521
Informasi dan Komunikasi	356.189	361.689	397.007	442.990	502.145
Jasa Keuangan dan Asuransi	201.006	229.052	266.272	303.300	360.359
Real Estate	382.981	421.083	478.916	524.633	568.754
Jasa Perusahaan	87.890	89.920	100.218	113.024	130.115
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.203.208	1.151.450	1.302.508	1.392.686	1.702.997
Jasa Pendidikan	1.426.501	1.516.813	1.667.830	1.826.759	1.978.602
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	238.158	275.569	304.646	335.148	363.365
Jasa lainnya	242.775	253.042	283.755	326.178	372.277
PDRB	115.555.662	136.617.573	211.101.484	168.271.524	159.497.231

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur, 2025

Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang mendominasi struktur PDRB bukan hanya di tahun 2024 saja, namun selama 2020-2024. Proporsi sektor ini selama 2020-2024 rata-rata mencapai 80,11%. Sektor yang memiliki kontribusi terbesar kedua adalah sektor pertanian dengan rata-rata 2020-2024 sebesar 7,87% dan yang ketiga adalah sektor industri pengolahan dengan rata-rata kontribusi 3,28%. Ketergantungan terhadap sektor pertambangan dan penggalian sangat tinggi sehingga membuat sektor lain tidak mudah untuk berkembang. Pengembangan sektor pertanian diarahkan pada pengembangan agribisnis atau hilirisasi sektor pertanian termasuk pengembangan Perkebunan yang mampu memberikan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja. Dengan demikian pengembangan sektor pertanian mampu mendukung berkembangnya sektor industri pengolahan.

Sektor perdagangan memberikan kontribusi sebesar 2,48% pada tahun 2024 dan pertumbuhan ADHK sektor perdagangan tahun 2024 cukup tinggi yaitu sebesar 7,66%. Untuk sektor penyediaan akomodasi dan makan minum pada tahun 2024 memiliki kontribusi yang kecil yaitu 0,31% meski memiliki pertumbuhan yang tinggi di tahun 2024 yaitu 8,77%. Untuk mendorong sektor perdagangan serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum perlu strategi pengembangan industri pariwisata. Pengembangan pariwisata selain mendorong pengembangan UMKM juga akan mampu mendorong perkembangan sektor perdagangan.

Tabel 2.16 Distribusi PDRB ADHB Tahun 2020-2024 (%)

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024	RATA-RATA PROPORSI 2020-2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,12	8,32	5,90	7,60	8,80	7,87
Pertambangan dan Penggalian	77,75	79,77	85,09	79,67	75,53	80,11
Industri Pengolahan	3,55	3,38	2,55	3,22	4,34	3,28
Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01
Konstruksi	2,23	1,98	1,70	2,81	3,39	2,27
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,17	1,99	1,48	2,15	2,48	1,97
Transportasi dan Pergudangan	1,28	1,12	0,79	1,13	1,37	1,12
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,28	0,27	0,19	0,27	0,31	0,25
Informasi dan Komunikasi	0,31	0,26	0,19	0,26	0,31	0,26
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,17	0,17	0,13	0,18	0,23	0,17
Real Estate	0,33	0,31	0,23	0,31	0,36	0,30
Jasa Perusahaan	0,08	0,07	0,05	0,07	0,08	0,07
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,04	0,84	0,62	0,83	1,07	0,88
Jasa Pendidikan	1,23	1,11	0,79	1,09	1,24	1,07
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,21	0,20	0,14	0,20	0,23	0,18
Jasa lainnya	0,21	0,19	0,13	0,19	0,23	0,19
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

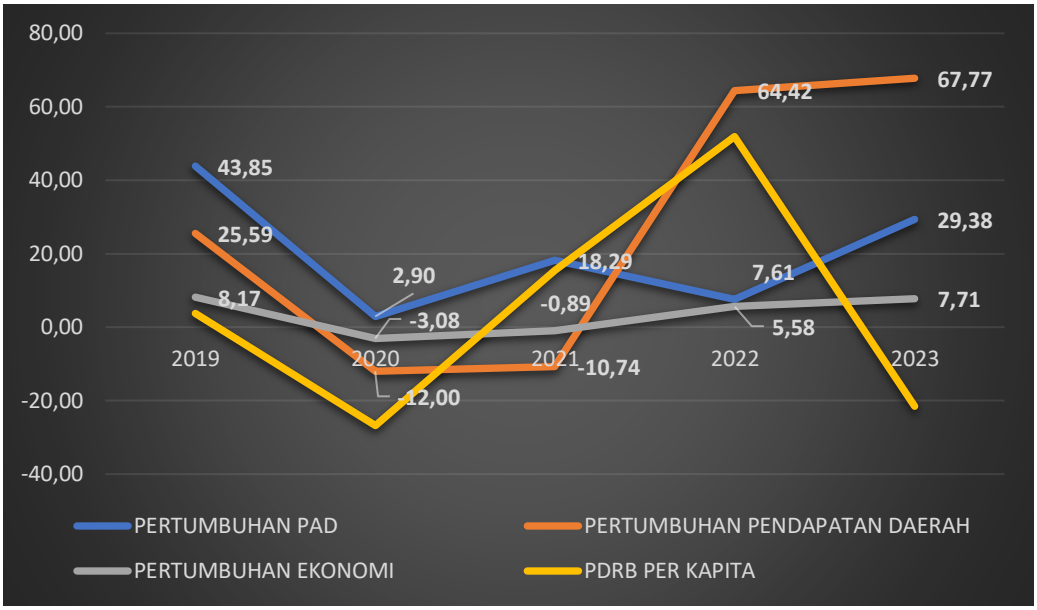
Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur, 2025

Pertumbuhan ekonomi 2024 adalah 9,82%; termasuk sangat tinggi karena lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional (5,03%) dan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur (6,17%). Pertumbuhan ekonomi 2024 ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi 2023 yang besarnya 7,71%; maupun tahun 2022 yang besarnya 5,58%. Pertumbuhan ekonomi Kutai Timur selama 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi, hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan Kutai Timur dalam menghasilkan barang dan jasa mengalami peningkatan, namun bila dihitung dengan menggunakan pendekatan harga berlaku (*current price*) nilai tersebut menunjukkan penurunan, sedangkan pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan harga konstan (*constant price*) pada tahun dasar (*base year*) tertentu.

Pertumbuhan ekonomi 2024 yang terbesar adalah sektor pengadaan listrik dan gas (25,42%) serta sektor industri pengolahan (21,77%). Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 2020-2024 adalah 4,44%; sementara rata-rata pertumbuhan ekonomi sektor pengadaan Listrik dan gas sebesar 12,98% dan sektor industri pengolahan sebesar 4,65%. Meski kedua sektor tersebut tumbuh sangat tinggi, namun konstruksi terhadap PDBB relatif rendah, kontribusi sektor pengadaan listrik dan gas tahun 2024 hanya 0,02% dan sektor industri pengolahan sebesar 4,34%. Pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian tahun 2024 tergolong tinggi yaitu 10,12% artinya nilai *output* sektor ini menunjukkan kenaikan di tahun 2024 bila dihitung dengan harga tahun dasar yaitu 2010. Hal ini menjadi berbeda bila dihitung menggunakan pendekatan harga berlaku *(current price)*, nilai sektor ini di tahun 2024 menunjukkan penurunan dibanding 2023, bukan karena output hasil tambang turun namun karena faktor penurunan harga di tahun 2024.

Pada periode 2020-2023 pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif dengan pendapatan daerah dan PAD, artinya pendapatan daerah dan PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Faktor yang perlu diperhatikan adalah besarnya dampak tersebut, kenaikan pendapatan daerah masih belum membawa dampak terhadap pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan. Oleh karena itu diperlukan ketepatan kebijakan dan strategi penggunaan pendapatan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Gambar 2.12 Perkembangan Pertumbuhan PAD, LPE, Pertumbuhan Pendapatan, dan PDRB per Kapita Kabupaten Kutai Timur



Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur, 2024 (diolah)

Transformasi ekonomi dari sektor pertambangan dan penggalian menjadi penting misalnya melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Pengembangan industri pengolahan yang berbasis sektor pertanian menjadi penting dalam rangka transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi akan mendorong pengembangan sektor perdagangan yang pada akhirnya berdampak pula pada pengembangan UMKM.

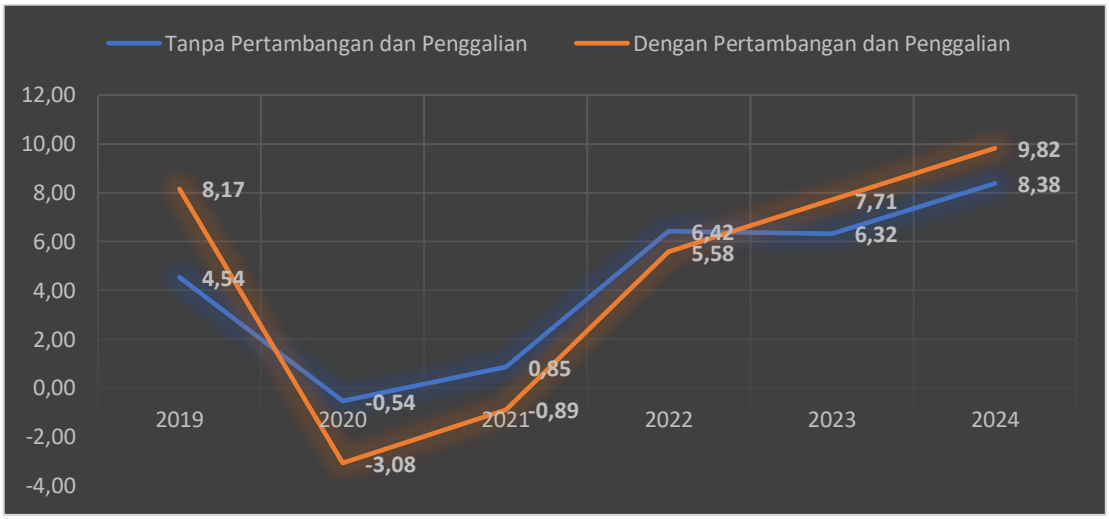
Tabel 2.17 Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2019-2024 (%)

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024	RATA-RATA
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,67	-0,93	2,53	2,37	1,11	1,32
Pertambangan dan Penggalian	-3,58	-1,25	5,40	8,00	10,12	4,47
Industri Pengolahan	-4,60	-1,54	5,31	1,87	21,77	4,65
Pengadaan Listrik dan Gas	14,57	2,28	6,01	21,70	25,42	12,98
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,59	4,18	6,93	11,51	7,21	6,13
Konstruksi	1,05	3,83	23,78	22,42	9,25	9,91
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,57	3,71	6,06	6,93	7,66	5,14
Transportasi dan Pergudangan	2,16	2,41	5,05	9,26	9,61	5,59
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-3,44	3,48	8,10	7,00	8,77	4,73
Informasi dan Komunikasi	5,43	7,47	7,44	6,82	10,70	6,92
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,60	3,69	5,39	9,91	14,38	6,39
Real Estate	2,21	0,17	4,78	4,75	5,08	3,44
Jasa Perusahaan	-2,86	3,62	6,35	8,77	9,50	4,32
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,22	-0,54	8,71	5,72	20,41	5,67
Jasa Pendidikan	1,76	2,71	5,18	4,92	5,73	4,30
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19,69	13,02	2,08	5,15	4,58	8,21
Jasa lainnya	-1,36	0,75	6,51	8,26	8,22	4,72
PDRB	-3,08	-0,89	5,58	7,71	9,82	4,44

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur, 2024 (diolah)

Bila Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dipisahkan antara "Dengan Pertambangan dan Penggalian" dengan "Tanpa Pertambangan dan Penggalian" maka terlihat bahwa selama 2023-2024 peran sektor pertambangan dan penggalian cukup signifikan. Hal ini terlihat dari perbedaan LPE di antara keduanya. Pada tahun 2024 misalnya, jika dihitung tanpa sektor pertambangan dan penggalian, maka LPE Kutai Timur sebesar 8,38% sementara jika dihitung dengan sektor pertambangan dan penggalian LPE Kutai Timur menjadi 9,82%. Hal yang berbeda terjadi pada tahun 2020-2022 yang menunjukkan bahwa LPE tanpa sektor pertambangan dan penggalian lebih tinggi dibandingkan LPE dengan sektor pertambangan dan penggalian. Hal ini terjadi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 secara global yang mempengaruhi perekonomian di berbagai negara termasuk Indonesia.

Gambar 2.13 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur 2019-2024 (%)



Bila PDRB Kutai Timur dipetakan berdasarkan PDRB Provinsi Kalimantan Timur, maka pada tahun 2024 hanya terdapat satu sektor yang menunjukkan baik proporsi maupun pertumbuhan Kutai Timur lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur yaitu sektor pertambangan dan penggalian (Kuadran 1). Sektor pertanian berada di Kuadran 2, yaitu proporsi tahun 2024 di Kutai Timur lebih tinggi dibandingkan Kalimantan Timur, namun memiliki pertumbuhan yang lebih rendah. Cukup banyak sektor di Kutai Timur yang berada dii Kuadran 3 yaitu proporsi lebih rendah dibandingkan dengan Kalimantan Timur namun memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi; serta di Kuadran 4 yaitu baik proporsi maupun pertumbuhan di Kutai Timur lebih rendah dibandingkan Kalimantan Timur.

Bila dilihat dalam rentang periode 2020-2024, sektor pertambangan dan penggalian masih tetap berada di Kuadran 1. Rata-rata proporsi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kutai Timur selama 2020-2024 adalah 75,53% sedangkan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 38,38%. Rata-rata pertumbuhan selama 2020-2024 Kutai Timur pun lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menjadikan sektor pertambangan dan penggalian selama 2020-2024 masuk dalam Kuadran 1 yaitu masuk dalam kategori Maju. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor pertambangan dan penggalian Kutai Timur unggul dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Timur.

KUADRAN 1	KUADRAN 2
MAJU Pertumbuhan Tinggi (+) Proporsi Tinggi (+)	TERTEKAN Pertumbuhan Rendah (-) Proporsi Tinggi (+)
KUADRAN 3	**KUADRAN 4**
POTENSIAL Pertumbuhan Tinggi (+) Proporsi Rendah (-)	TERTINGGAL Pertumbuhan Rendah (-) Proporsi Rendah (-)

Secara keseluruhan selama tahun 2024 maupun 2020-2024 masih cukup banyak sektor yang masuk di Kuadran 4 yaitu kategori Tertinggal, karena baik proporsi sektor tersebut terhadap PDRB maupun rata-rata pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini berarti posisi sektor tersebut di Kutai Timur rata-rata lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain (kabupaten dan kota) di Kalimantan Timur. Sektor yang masuk dalam Kuadran 4 selama periode 2020-2024 adalah sektor pertanian, sektor pengadaan air, sektor perdagangan, sektor informasi dan komunikasi, serta sektor jasa kegiatan dan kegiatan sosial. Sektor lainnya masuk ke dalam Kuadran 3 yaitu Potensial karena meskipun memiliki proporsi yang lebih kecil namun memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi sehingga diharapkan dengan kebijakan dan strategi yang tepat akan mendorong sektor-sektor tersebut masuk ke dalam Kuadran 1.

Tabel 2.18 Pemetaan Sektor Ekonomi Kutai Timur Tahun 2024

LAPANGAN USAHA	PROPORSI		PERTUMBUHAN		POSISI KUTIM		KUADRAN
	KUTIM	PROV	KUTIM	PROV	PROPORSI	PERTUMBUHAN	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,80	8,66	1,11	2,37	+	-	2
B. Pertambangan dan Penggalian	75,53	38,38	10,12	6,75	+	+	1
C. Industri Pengolahan	4,34	18,26	21,77	0,26	-	+	3
D. Pengadaan Listrik dan Gas *Electricity* & Gas	0,02	0,07	25,42	16,41	-	+	3
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,05	7,21	7,71	-	-	4
F. Konstruksi	3,39	11,87	9,25	13,60	-	-	4
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,48	6,90	7,66	8,57	-	-	4
H. Transportasi dan Pergudangan	1,37	4,50	9,61	8,15	-	+	3
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,31	1,12	8,77	11,67	-	-	4
J. Informasi dan Komunikasi	0,31	1,51	10,70	7,93	-	+	3
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,23	1,94	14,38	6,70	-	+	3
L. Real Estat	0,36	0,81	5,08	5,88	-	-	4
M,N. Jasa Perusahaan	0,08	0,22	9,50	7,56	-	+	3
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,07	2,21	20,41	16,44	-	+	3
P. Jasa Pendidikan	1,24	1,81	5,73	5,36	-	+	3
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,23	0,92	4,58	4,96	-	-	4
R,S,T,U. Jasa lainnya	0,23	0,77	8,22	10,41	-	-	4

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur dan Provinsi Kalimantan Timur, 2025 (diolah)

Tabel 2.19 Pemetaan Sektor Ekonomi Kutai Timur Tahun 2020-2024

LAPANGAN USAHA	PROPORSI		PERTUMBUHAN		POSISI KUTIM THD PROVINSI		KUADRAN
	KUTIM	PROV	KUTIM	PROV	PROPORSI	PERTUMBUHAN	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,72	8,03	1,36	1,46	-	-	4
B. Pertambangan dan Penggalian	80,87	45,83	3,37	2,56	+	+	1
C. Industri Pengolahan	3,10	17,59	1,52	1,51	-	+	3
D. Pengadaan Listrik dan Gas *Electricity* & Gas	0,01	0,05	10,64	8,37	-	+	3
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,05	5,92	5,92	-	-	4
F. Konstruksi	2,08	9,00	10,05	6,47	-	+	3
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,88	5,88	4,64	4,63	-	-	4
H. Transportasi dan Pergudangan	1,07	3,58	4,80	3,73	-	+	3
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,24	0,97	3,94	3,83	-	-	4
J. Informasi dan Komunikasi	0,25	1,37	6,18	7,24	-	-	4
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,15	1,62	4,85	5,80	-	+	3
L. Real Estat	0,29	0,84	3,12	1,66	-	+	3
M,N. Jasa Perusahaan	0,06	0,20	3,32	2,71	-	+	3
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,85	1,89	2,94	3,49	-	+	3
P. Jasa Pendidikan	1,04	1,68	4,01	3,50	-	+	3
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,17	0,77	8,95	9,93	-	-	4
R,S,T,U. Jasa lainnya	0,18	0,65	4,03	3,85	-	-	4

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur dan Provinsi Kalimantan Timur, 2025 (diolah)

2.1.2.1.2 PDRB per Kapita

PDRB per kapita tahun 2024 sebesar 344,493 juta; turun dibandingkan tahun 2023 yang besarnya 369,42 juta. Penurunan tersebut terjadi akibat turunnya PDRB ADHB tahun 2024 (159,497 triliun) dibandingkan tahun 2023 (168,271 triliun) atau turun sebesar -5,21%; sementara jumlah penduduk 2023-2024 menunjukkan kenaikan. Penurunan juga pernah terjadi di tahun 2020 akibat dampak Pandemi Covid-19. PDRB per kapita Kutai Timur tahun 2023 adalah yang tertinggi dibandingkan dengan kab/kota lain di Kalimantan Timur; termasuk jauh lebih tinggi dibandingkan PDRB per kapita Kalimantan Timur yang mencapai 215,76 juta. Mengingat tingginya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur PDRB, fluktuasi harga pertambangan dan penggalian dapat membuat kondisi perekonomian Kutai Timur rentan terhadap dinamika harga sektor pertambangan dan penggalian dunia.

PDRB per kapita Kutai Timur yang tinggi menggambarkan Tingkat kesejahteraan Masyarakat. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana distribusi pendapatan tersebut mampu dinikmati secara merata oleh seluruh Masyarakat. Tahun 2022 jumlah penduduk tumbuh sebesar 5,75% sementara PDRB ADHB tumbuh sebesar 54,52%. Hal ini menyebabkan PDRB per kapita tahun 2022 mengalami kenaikan yang drastis.

Tabel 2.20 Perbandingan PDRB Per Kapita Tahun 2020-2024 (Juta Rp)

Tahun	Kutai Timur	Kalimantan Timur
2020	268,80	161,80
2021	310,29	183,16
2022	471,27	238,92
2023	369,42	215,76
2024	344,49	212,18

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur dan Provinsi Kalimantan Timur, 2025

1.1.2.1.3 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan penduduk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Ukuran yang dipergunakan untuk menentukan seseorang miskin atau tidak adalah garis kemiskinan. Menurut BPS, garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum

makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Garis kemiskinan di Kutai Timur tahun 2024 adalah 753.332 per kapita per bulan yang berarti seseorang masuk dalam kategori miskin apabila memiliki pengeluaran di bawah 753.332 per orang per bulan. Jumlah penduduk miskin di Kutai Timur tahun 2023 adalah 37.040 dan naik di tahun 2024 menjadi 37.110. Meskipun jumlah penduduk miskin naik namun Tingkat kemiskinan di Kutai Timur menunjukkan penurunan dari 9,06% menjadi 8,81%. Penurunan Tingkat kemiskinan ini bukan disebabkan karena menurunnya jumlah penduduk miskin namun karena kenaikan jumlah penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan jumlah penduduk miskin itu sendiri.

Tabel 2.21 Indikator Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018-2024

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penduduk miskin (ribuan jiwa)	33.02	35.31	36.98	37.78	36.84	37.04	37,11
Tiingkat Kemiskinan (%)	9.22	9.48	9.55	9.81	9.28	9.06	8,81
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,49	1,9	2,02	1,64	2,33	1,2	1,4
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,41	0,55	0,63	0,44	0,78	0,28	0,24
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	543.442	569.449	610.858	626.492	659.136	714.241	753.332

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur

Tingkat kemiskinan Kutai Timur tahun 2023 merupakan yang tertinggi keempat di Kalimantan Timur. Indeks P1 di Kutai Timur tahun 2023 adalah 1,2; tertinggi kedua setelah Kutai Barat dan Indeks P2 adalah 0,28; tertinggi di Kalimantan Timur. Dengan demikian Kutai Timur menghadapi permasalahan dan tantangan yang relatif lebih berat dibandingkan daerah lain di Kalimantan Timur yaitu bagaimana agar penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan serta Upaya mengurangi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin tersebut.

Di tahun 2024 tingkat kemiskinan Kutai Timur menunjukkan penurunan namun justru menjadi tertinggi ketiga se-Kalimantan Timur. Meskipun tingkat kemiskinan di Kutai Timur menurun, namun daerah lain juga menunjukkan penurunan. Indeks P2 yang di tahun 2023 menempati urutan pertama, di tahun 2024 menjadi urutan kedua akibat meningkatnya Indeks P2 Mahakam Ulu.

Tabel 2.22 Indikator Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024

Tahun	Kutai Timur		Kalimantan Timur	
	Tingkat Kemiskinan (%)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/Bulan)	Tingkat Kemiskinan (%)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/Bulan)
2020	9,55	610.858	6,10	662.302
2021	9,81	626.492	6,54	689.035
2022	9,28	659.136	6,31	728.208
2023	9,06	714.241	6,11	790.186
2024	8,81	753.332	5,78	833.955

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

1.1.2.1.4 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Selain kemiskinan, faktor ketimpangan distribusi pendapatan adalah hal penting kaitannya dengan kesejahteraan Masyarakat. Jika ketimpangan menggambarkan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan pokok, maka ketimpangan menggambarkan tingkat kemerataan distribusi pendapatan yang diterima antar penduduk. Pendapatan per kapita yang tinggi disertai dengan ketimpangan yang rendah adalah dua hal yang menjadi tujuan utama setiap daerah. Sering kali pendapatan per kapita yang tinggi diikuti pula dengan Tingkat ketimpangan yang tinggi.

Salah satu ukuran yang menggambarkan ketimpangan distribusi pendapatan adalah gini ratio, semakin tinggi nilainya semakin timpang distribusi pendapatan. Nilai gini ratio Kutai Timur tahun 2024 adalah 0,283; dan angka ini adalah yang tertinggi keempat di Kalimantan Timur. Gini ratio Kutai Timur 2024 ini turun cukup tinggi dibandingkan tahun 2023 yang besarnya 0,336. Di tahun 2024 Pemerintah daerah berhasil menurunkan Tingkat kesenjangan distirbusi pendapatan padahal di tahun 2023 gini rasio Kutai Timur masih yang tertinggi se-Kalimantan Timur. Ketimpangan 2024 di Kutai Timur ini lebih rendah dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur yang besarnya 0,310. Ketimpangan berkaitan antara lain dengan kemampuan masyarakat terhadap akses ekonomi yang tidak sama. Untuk itu perlu kebijakan pemerintah daerah perlu mempertimbangkan terciptanya kesempatan yang sama bagi masyarakat dalam mengakses sumber daya di Kutai Timur termasuk akses terhadap sumber daya keuangan.

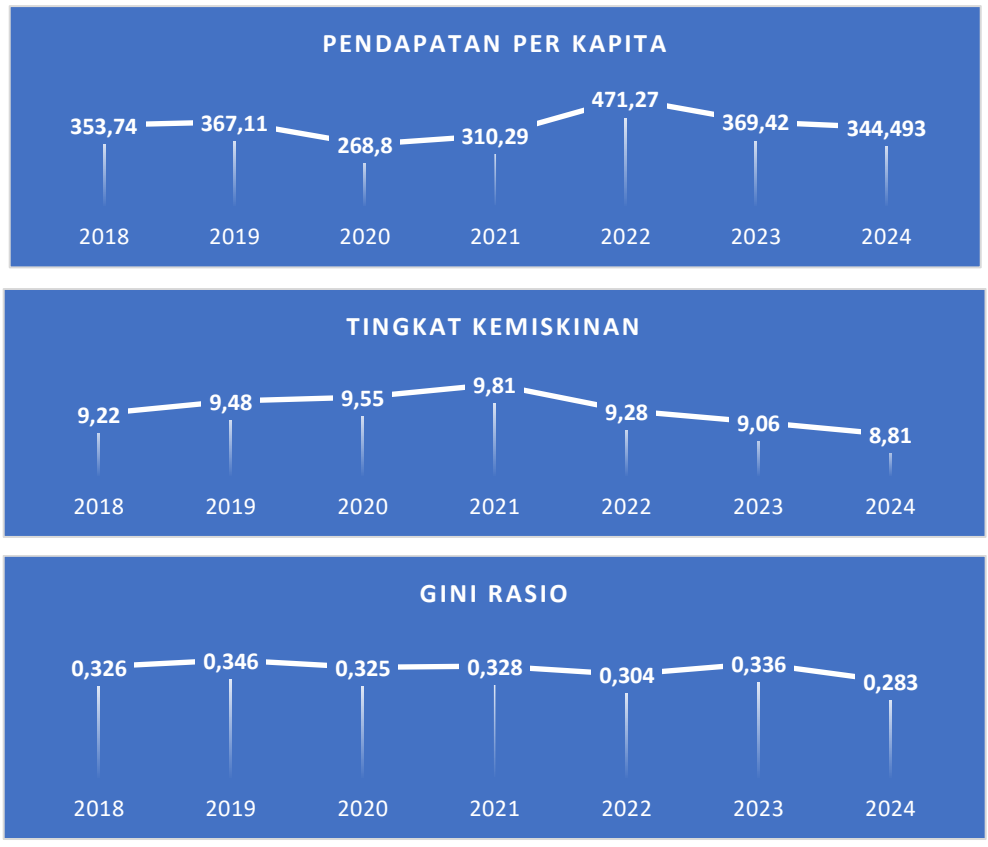
Bila diperbandingkan dengan pendapatan per kapita dan tingkat kemiskinan, terlihat antara tingkat ketimpangan, tingkat kemiskinan, dan pendapatan per kapita ketiganya tidak menunjukkan relevansi yang kuat. Saat pendapatan per kapita turun misalnya, kemiskinan juga turun. Hal ini mengindikasikan bahwa akar masalah ketiganya adalah berbeda sehingga memerlukan *treatment* yang berbeda sesuai dengan akar masalahnya. Kenaikan pendapatan per kapita misalnya, tidak diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan serta penurunan gini ratio.

Tabel 2.23 Gini Ratio Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024

Tahun	Kutai Timur	Kalimantan Timur
2020	0,325	0,328
2021	0,328	0,334
2022	0,304	0,327
2023	0,336	0,322
2024	0,283	0,321

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Gambar 2.14 Hubungan Pendapatan Per Kapita, Gini Ratio, dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018-2024



2.1.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menggambarkan Pembangunan sumber daya manusia di bidang Pendidikan, Kesehatan, serta kesejahteraan ekonomi. Nilai IPM Kutai Timur 2024 sebesar 75,53 dan nilai ini peringkat ke-6 se Kalimantan Timur. Nilai IPM Kutai Timur masih lebih rendah dibandingkan rata-rata seluruh kab/kota di Kalimantan Timur (76,92) dan jauh di bawah IPM Provinsi Kalimantan Timur (78,83). Nilai IPM Kutai Timur ini relatif kecil bila dibandingkan dengan besarnya PDRB, APBD, atau pendapatan per kapita.

Komponen UHH tahun 2024 sebesar 73,75 menduduki peringkat ke-4 se Kalimantan Timur dan masih di bawah UHH Provinsi Kalimantan Timur (75,03). Komponen UHH ini menggambarkan lamanya harapan hidup Masyarakat dari sisi Kesehatan. Peningkatan UHH perlu dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat serta peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana kesehatan.

Tabel 2.24 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020-2024

Tahun	Kutai Timur	Kalimantan Timur
2020	73	76,24
2021	73,81	76,88
2022	74,35	77,44
2023	74,98	78,2
2024	75,53	78,83

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

2.1.2.1.6 Pengeluaran Per Kapita Masyarakat

Di sisi pengeluaran per kapita per bulan, rata-rata pengeluaran Masyarakat per bulan untuk komoditas makanan adalah 999.528 per kapita per bulan sedangkan untuk non makanan sebesar 1.164.271. Rata-rata konsumsi Masyarakat per kapita per bulan adalah 2.163.799. Dengan demikian konsumsi non makanan lebih besar dibandingkan konsumsi makanan. Konsumsi makanan terbesar adalah untuk komoditas makanan dan minuman jadi, terutama untuk kelompok Masyarakat 20% teratas. Untuk konsumsi non makanan yang terbesar adalah pengeluaran untuk keperluan pesta dan upacara/kenduri.

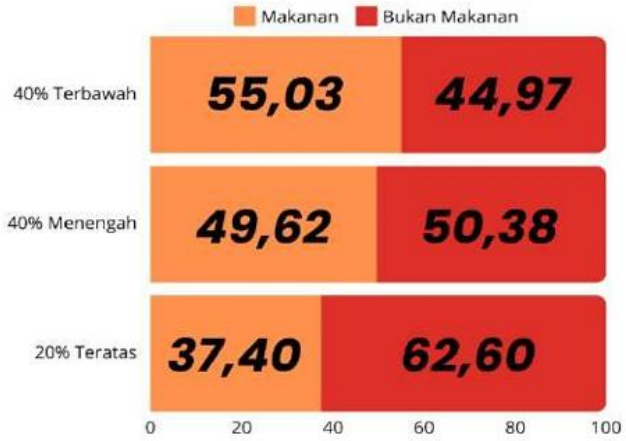
Tabel 2.25 Pola Pengeluaran Per Kapita Masyarakat (Rp/bulan)
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

Komoditas	40% Terbawah	40% Menengah	20% Teratas	Total Rata-rata Pengeluaran
1. Padi-padian	100.343	110.222	118.616	107.945
2. Umbi-umbian	4.959	9.771	10.422	7.973
3. Ikan/Udang/Cumi/Kerang	70.861	110.289	175.004	107.462
4. Daging	37.533	60.350	89.093	56.967
5. Telur dan Susu	33.942	47.826	80.528	48.819
6. Sayur-sayuran	55.310	75.186	99.769	72.148
7. Kacang-kacangan	13.059	15.997	25.073	16.639
8. Buah-buahan	27.980	59.631	125.425	60.139
9. Minyak dan Kelapa	15.347	19.876	28.141	19.718
10. Bahan Minuman	23.138	28.909	35.845	27.986
11. Bumbu-bumbuan	16.202	23.074	33.665	22.443
12. Bahan Makanan Lainnya	17.691	23.381	27.274	21.881
13. Makanan dan minuman jadi	159.755	298.585	513.906	286.114
14. Rokok dan Tembakau	103.749	165.730	177.763	143.293
Jumlah Makanan	**679.869**	**1.048.828**	**1.540.524**	**999.528**
15. Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	357.504	602.229	1.110.632	606.091
16. Aneka Barang dan Jasa	116.930	229.919	575.924	254.023
17. Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	20.613	47.740	91.554	45.652
18. Barang Tahan Lama	15.844	44.628	475.124	119.442
19. Pajak, Pungutan, dan Asuransi	43.041	103.569	187.591	96.155
20. Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri	1.558	NA	137.517	42.907
Jumlah Bukan Makanan	**555.490**	**1.064.969**	**2.578.342**	**1.164.271**

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Timur, 2024

Bila diperbandingkan antar kelompok Masyarakat, mereka yang masuk dalam kelompok 40% terbawah Sebagian besar pengeluaran adalah untuk makanan (55,03%) dibanding untuk non makanan (44,97%). Hal ini berbeda dengan Masyarakat yang masuk dalam kelompok 20% teratas; pengeluaran untuk makanan hanya 37,40% sementara untuk non makanan sebesar 62,60%. Hal ini berarti semakin Sejahtera Masyarakat pengeluaran untuk non makanan semakin besar.

Gambar 2.15 Proporsi Konsumsi Masyarakat Kabupaten Kutai Timur



2.1.2.1.7 Pembangunan Ekonomi Inklusif

Pembangunan ekonomi inklusif merupakan Pembangunan ekonomi yang diikuti dengan terjadinya penurunan Tingkat pengangguran, Tingkat kemiskinan, ketimpangan, termasuk peningkatan inklusivitas infrastruktur dan keuangan. Pembangunan ekonomi inklusif ini diukur dengan suatu indeks yaitu Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI). Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan.

- Indeks memiliki 3 pilar:

  1) Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi
     - Sub Pilar:
       - Pertumbuhan Ekonomi
       - Kesempatan Kerja
       - Infrastruktur Ekonomi

  2) Pemerataan pembangunan dan pengurangan kemiskinan
     - Sub Pilar:
       - Ketimpangan
       - Kemiskinan

  3) Perluasan akses dan kesempatan
     - Sub Pilar:
       - Kapabilitas Manusia
       - Infrastruktur Dasar
       - Keuangan Inklusif

Semakin tinggi nilai IPEI semakin tinggi pula derajat inklusivitas Pembangunan ekonomi. Nilai IPEI Kutai Timur sepanjang 2016-2021 menunjukkan tren kenaikan. Nilai IPEI sempat turun di tahun 2020 akibat dampak Pandemi Covid namun di tahun 2021 kembali naik. Dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur, nilai IPEI Kutai Timur ini adalah yang terkecil kedua setelah Mahakam Ulu. Hal ini menunjukkan hingga 2021 pembangunan ekonomi yang terjadi belum secara optimal mampu mendorong terciptanya pengurangan ketimpangan dan kemiskinan, serta peningkatan akses dan kesempatan. Data IPEI yang dikeluarkan Bappenas untuk level kabupaten/kota hanya tersedia hingga 2021.

Tabel 2.26 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Tahun	Kutai Timur	Kalimantan Timur
2016	4,83	5,85
2017	5,03	6,04
2018	5,04	5,95
2019	5,23	6,22
2020	5,04	5,77
2021	5,18	6,24

Sumber: Bappenas RI

2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

Kesehatan penduduk salah satunya dapat dilihat dari lamanya Usia Harapan Hidup (UHH). Lamanya UHH menunjukkan kualitas atau derajat kesehatan masyarakat. Dengan demikian UHH menggambarkan lamanya harapan hidup masyarakat yang dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat sedang derajat kesehatan masyarakat sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor. UHH Kutai Timur tahun 2024 mencapai 73,75 tahun. Angka ini menduduki peringkat ke-4 se Kalimantan Timur namun masih lebih kecil dibandingkan UHH Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 75,03 tahun. Selama 2020-2024 posisi nilai UHH Kutai Timur tidak berubah yaitu tertinggi keempat se Kalimantan Timur.

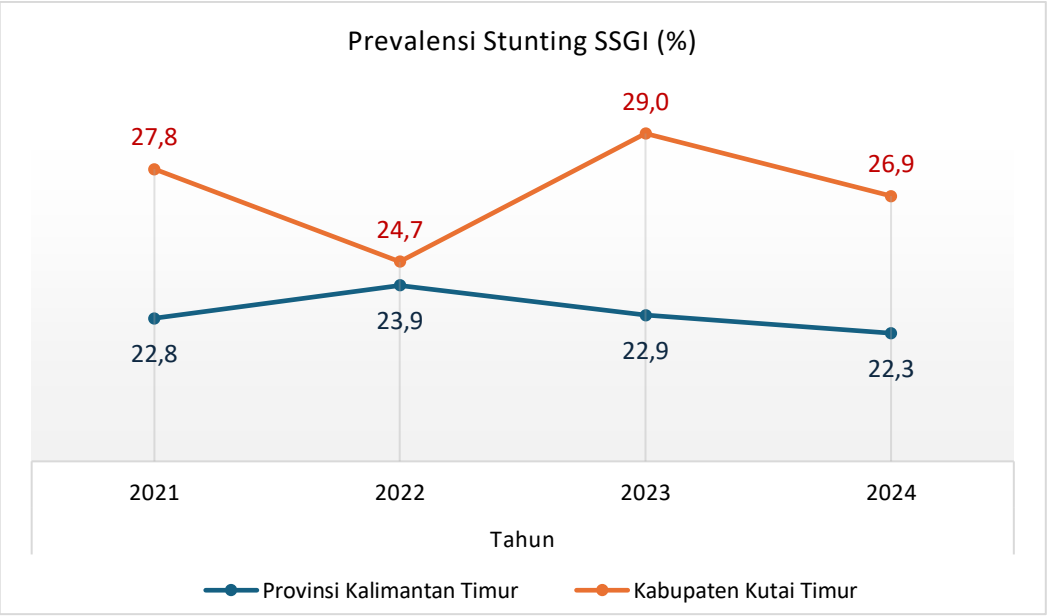
Tabel 2.27 Usia Harapan Hidup Tahun 2020-2024 (Tahun)

Tahun	Kutai Timur	Kalimantan Timur
2020	73,16	74,33
2021	73,46	74,61
2022	73,47	74,62
2023	73,57	74,72
2024	73,75	75,03

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Aspek kesehatan masyarakat yang perlu diperhatikan sejak dini adalah terkait dengan stunting. Stunting merupakan salah satu bentuk masalah gizi kronis yang ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih rendah dari standar usianya akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu lama atau karena terjadinya infeksi secara berulang, terutama selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yakni sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik, tetapi juga pada perkembangan kognitif, tingkat produktivitas di masa depan, serta peningkatan risiko penyakit tidak menular pada usia dewasa. Oleh karena itu, stunting menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa.

Gambar 2.16 Angka Stunting Tahun 2021-2024 (%)



Sumber: SSGI Kementerian Kesehatan

Angka stunting di Kabupaten Kutai Timur selama 2021-2024 terlihat cukup tinggi, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur. Tahun 2022 sempat terjadi penurunan -3,1% dari 27,8% menjadi 24,7%. Namun, di tahun 2023 mengalamai kenaikan +4,3% menjadi 29,0% disaat prevalensi stunting di tingkat Provinsi Kalimantan Timur mengalami sedikit penurunan. Tahun 2024 prevalensi stunting di Kabupaten Kutai Timur mulai kembali mengalami penurunan -2,1% menjadi 26,9%; tertinggi ketiga setelah Kabupaten Penajam Paser Utara (32,0%) dan Kabupaten Kutai Barat (27,6%).

Kondisi kesehatan keluarga secara umum dapat dilihat dari nilai Indeks Keluarga Sehat (IKS). Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kesehatan suatu keluarga berdasarkan 12 indikator. Keduabelas indikator yang menjadi ukuran dari IKS adalah sebagai berikut:

1. **Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)**

   Tidak semata membatasi jumlah anak dalam keluarga, program KB juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak mendapat ASI yang cukup dan pola asuh yang optimal sehingga bisa menjadi anak yang sehat dan cerdas. Selain itu, program KB juga dapat menurunkan risiko kematian ibu dan bayi serta mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, sehingga dapat menjaga kesejahteraan keluarga.

2. **Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan**

   Fasilitas kesehatan yang memadai akan mendukung proses persalinan yang aman dan minim risiko komplikasi kehamilan. Setelah melahirkan, ibu juga akan memiliki tempat untuk memeriksa kesehatannya dan bayinya secara berkala. Dengan begitu, keselamatan serta kesehatan ibu dan anak jadi lebih terjamin.

3. **Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap**

   Imunisasi anak sangat penting dilakukan guna mencegah terjadinya penyakit yang bisa berakibat fatal seperti polio, campak, dan difteri. Untuk mendapatkan imunisasi wajib, keluarga bisa membawa anak ke posyandu, puskesmas, rumah sakit, maupun fasilitas medis lain yang menyediakannya.

4. Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif

Keunggulan air susu ibu (ASI) sebagai sumber nutrisi bayi memang sudah tidak diragukan lagi. ASI dapat melindungi bayi dari beragam penyakit serta mendukung perkembangan tubuh dan otaknya secara optimal, sehingga ia tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Itulah sebabnya pemberian ASI eksklusif sangat berperan besar untuk membentuk keluarga sehat.

5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan

Berat badan bayi perlu ditimbang setiap bulannya, sejak lahir sampai usia 5 tahun. Hal ini penting untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak sudah sesuai dengan usianya, serta mendeteksi secara dini bilamana terdapat gangguan pada pertumbuhannya.

6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar

Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit menular yang dapat menurunkan kualitas hidup seseorang dan keluarganya. Tuberkulosis yang tidak ditangani dengan benar berisiko menyebabkan kerusakan paru-paru yang parah dan penularan ke orang-orang terdekat. Maka dari itu, bila terdapat anggota keluarga yang mengalami gejala tuberkulosis, segera bawa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan.

7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur

Hipertensi adalah penyakit kronis yang sering terabaikan karena sering kali tidak memiliki gejala. Meski begitu, dampak yang terjadi akibat hipertensi bisa fatal, mulai dari serangan jantung hingga stroke. Oleh karena itu, bila terdapat anggota keluarga yang menderita hipertensi, ingatkan ia agar selalu menerapkan gaya hidup sehat, meminum obat secara teratur sesuai rekomendasi dokter, serta melakukan kontrol teratur.

8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan

Gangguan jiwa tidak hanya dapat menurunkan kualitas hidup penderitanya secara signifikan, tapi juga keluarga penderitanya. Namun, sebenarnya hal ini dapat dicegah bila ditangani dengan baik dan sedini mungkin. Bila ada anggota keluarga yang memiliki tanda-tanda gangguan jiwa, seperti perubahan emosi atau perilaku, dampingi dan ajak dia untuk berobat ke psikiater guna mendapatkan penanganan yang tepat.

9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok

Sudah kita ketahui bersama bahwa asap rokok mengandung banyak zat beracun bagi tubuh. Meskipun hanya satu orang yang merokok di rumah, asapnya bisa dihirup anggota keluarga lain dan membuat mereka menjadi perokok pasif.

10. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Dengan menjadi anggota program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, seluruh anggota keluarga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Kondisi finansial keluarga dapat tetap terjaga walau sedang membutuhkan biaya berobat.

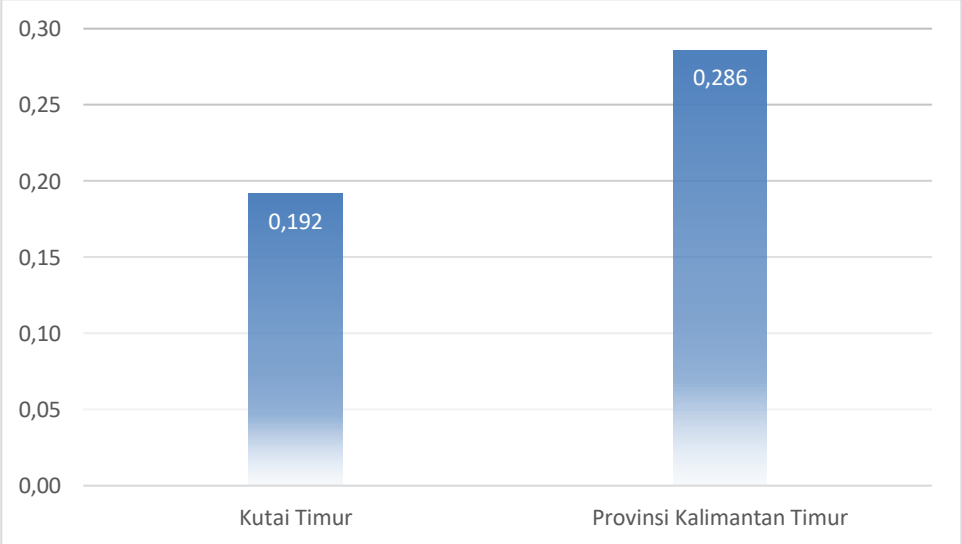
11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih

Sarana air bersih sangat penting untuk menjaga kesehatan keluarga dari berbagai penyakit infeksi. Untuk mewujudkan hal ini, pastikan sumber air yang dipakai di rumah tidak tergenang atau tercemar dengan berbagai kotoran maupun polutan.

12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat

Memiliki akses sanitasi layak dan jamban sehat juga termasuk indikator penting dalam mewujudkan keluarga sehat. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyakit menular yang disebabkan oleh buang air besar sembarangan, seperti tifus, cacingan, diare, atau disentri.

Gambar 2.17 Indeks Keluarga Sehat 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, 2024

IKS mencerminkan proporsi keluarga yang sehat di suatu wilayah dibandingkan dengan total jumlah keluarga yang ada. Nilai IKS berkisar antara 0 hingga 1, dimana Keluarga Sehat jika nilai IKS > 0,8, Keluarga Pra Sehat jika nilai IKS 0,5 – 0,8 dan Keluarga Tidak Sehat jika nilai IKS < 0,5.

Capaian IKS Kutai Tmur tahun 2023 hanya 0,192 dan Provinsi Kalimantan Timur pada sebesar 0,286. Hal ini berarti termasuk dalam kategori "Keluarga Tidak Sehat".

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

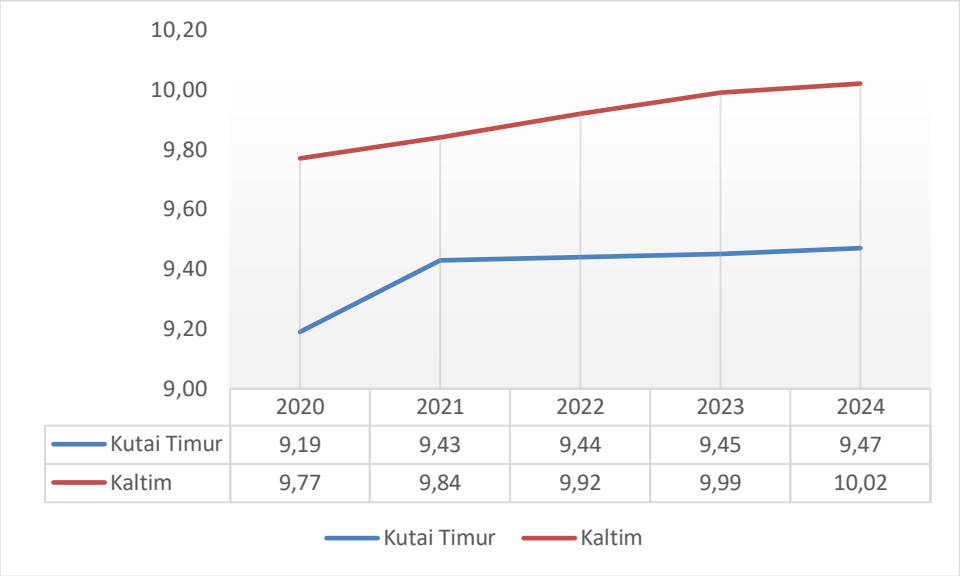
Pendidikan berkualitas yang merata ditandai dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, tenaga pendidik yang kompeten, kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, serta jaminan akses yang setara bagi semua anak bangsa. Hal ini mencakup upaya mengurangi kesenjangan antarwilayah, meningkatkan partisipasi sekolah, hingga memastikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap dapat menempuh pendidikan tanpa hambatan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) rata-rata Lama Sekolah adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas dan aksesibilitas pendidikan di suatu negara.

Di samping kesehatan, pendidikan juga menjadi faktor penting kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan penting untuk dikelola sejak dini (PAUD) hingga pendidikan tinggi, meski kewajiban pemerintah kabupaten dibatasi hingga sekolah menengah pertama (SMP) sementara untuk SMA menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Dalam hal pendidikan sarana dan prasarana sekolah perlu mendapatkan perhatian, termasuk di dalamnya kebutuhan guru. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan sehingga berdampak pada dua hal yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Semakin tinggi angka RLS dan HLS menunjukkan semakin meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan.

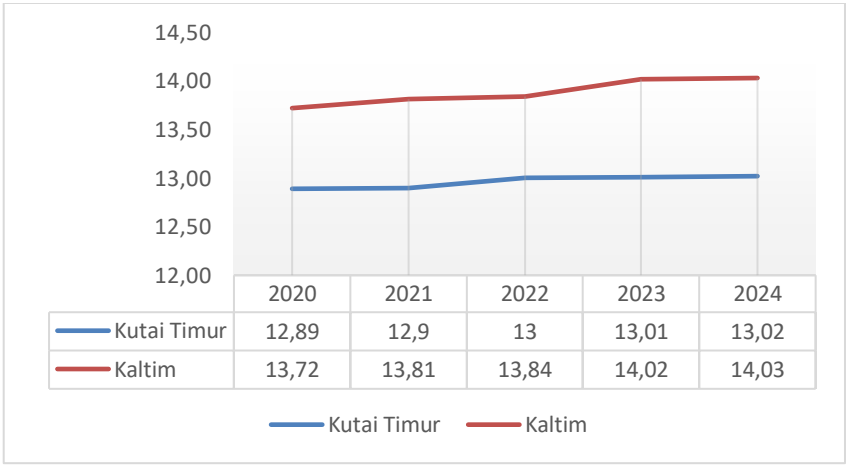
Gambar 2.18 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Nilai RLS di Kutai Timur masih berada di bawah RLS Provinsi Kalimantan Timur. Dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi peningkatan yang cukup signifikan sejalan dengan pembangunan sekolah baru dan rekruitmen tenaga Pendidikan di wilayah terpencil.

Gambar 2.19 Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2020-2024



Nilai HLS di Kutai Timur masih berada di bawah rata-rata HLS Provinsi Kalimantan Timur. Dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi peningkatan yang cukup signifikan sejalan dengan peningkatan aksesibilitas pendidikan, peningkatan kualitas pengajar/guru, pemberian bantuan dana pendidikan, hingga menanamkan pentingnya pendidikan untuk investasi di masa depan kepada masyarakat.

Berdasarkan Kepmendikbudristek Nomor 311 Tahun 2022 bahwa kemampuan literasi dan numerasi adalah rerata kemampuan literasi dan numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan *assessment* nasional dan rata-rata kompetensi literasi dan numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) di rapor pendidikan berdasarkan *assessment* nasional. Literasi dan numerasi merupakan pondasi utama dalam peningkatan kualitas pendidikan. Literasi tidak hanya sekadar kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kemampuan memahami, mengolah informasi, serta berpikir kritis terhadap berbagai bacaan. Sementara itu, numerasi merupakan kemampuan menggunakan konsep matematika dasar untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kedua aspek ini menjadi indikator penting untuk menilai mutu pendidikan di sekolah.

Tabel 2.28 Angka Literasi dan Numerasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023-2024

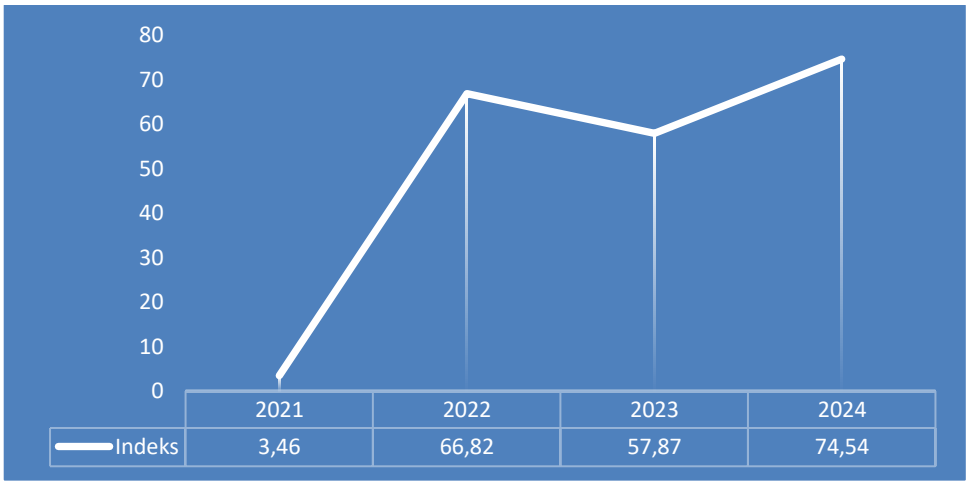
No	Indikator	Satuan	Capaian	
			2023	2024
1	Rerata Kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	65,87	71,76
2	Rerata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	53,71	65,84
3	Rerata Kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	73,10	78,65
4	Rerata Kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	67,39	72,85

Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kutai Timur, 2025.

Aspek pendidikan yang juga penting adalah pembangunan literasi masyarakat. Perkembangan pembangunan literasi masyarakat diwujudkan melalui Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) untuk mengukur usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Dalam indeks ini terdapat 7 (tujuh) unsur Pembangunan literasi yang dijadikan sebagai pengukuran, yaitu : Pemerataan layanan perpustakaan, Ketercukupan koleksi, Ketercukupan tenaga perpustakaan, Tingkat kunjungan masyarakat per hari, Jumlah perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi, dan Anggota perpustakaan.

Nilai IPLM Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam meningkatkan aksesibilitas perpustakaan hingga di tingkat desa serta pemenuhan koleksi buku bacaan di perpustakaan.

Gambar 2.20 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2024



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

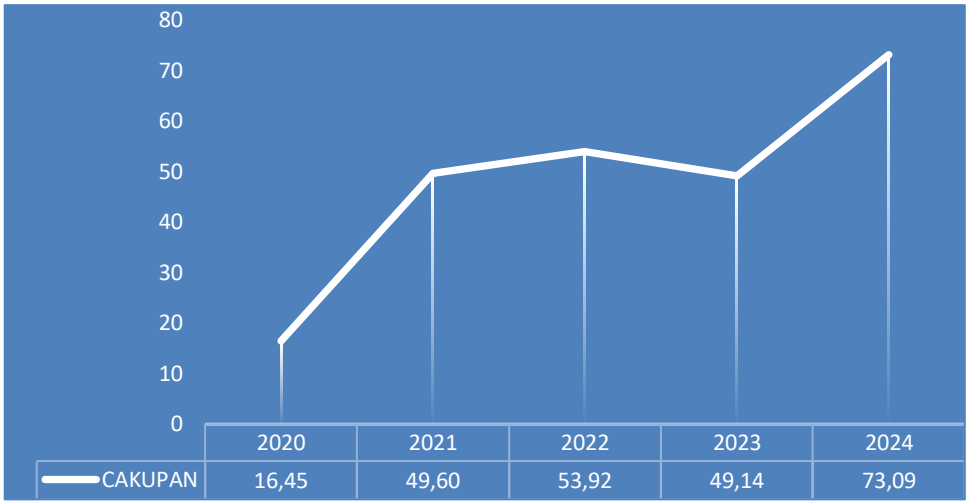
Perlindungan sosial menggambarkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial Masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memberikan jaminan sosial pada masyarakat dalam bentuk jaminan Kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan.

Jaminan sosial kesehatan merupakan salah satu wujud nyata dari upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dasar bagi seluruh warga masyarakat. Program ini hadir untuk menjamin setiap orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang layak tanpa terbebani biaya tinggi. Dengan adanya jaminan sosial kesehatan, akses terhadap pelayanan kesehatan menjadi lebih merata, baik di perkotaan maupun di pedesaan, sehingga setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sehat dan produktif.

Selain jaminan sosial Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkomitmen memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya pada pekerja rentan. Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu instrumen penting

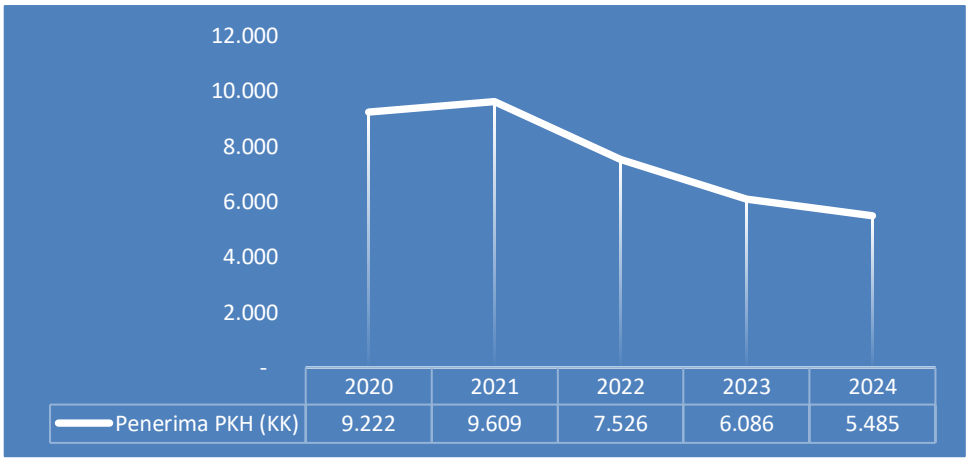
untuk melindungi pekerja dari risiko sosial dan ekonomi yang dapat terjadi selama masa kerja maupun setelah pensiun. Program ini dirancang untuk memberikan rasa aman, kepastian, serta perlindungan bagi tenaga kerja dan keluarganya, sehingga mereka dapat bekerja dengan tenang dan produktif.

Gambar 2.21 Gambaran Cakupan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024



Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program perlindungan sosial bersyarat dari pemerintah Indonesia. PKH ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang memenuhi kriteria tertentu. Seiring dengan menurunnya angka kemiskinan daerah, bantuan masyarakat miskin dalam bentuk program keluarga harapan (PKH) setiap tahun mengalami penurunan.

Gambar 2.22 Gambaran Cakupan Penerima (KK) Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

2.1.2.5 Beragam Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Kebudayaan merupakan identitas dan jati diri bangsa yang tumbuh dari kearifan lokal serta diwariskan secara turun-temurun. Di tingkat daerah, kebudayaan tidak hanya menjadi warisan yang patut dijaga, tetapi juga aset strategis yang dapat dikembangkan untuk memperkuat karakter masyarakat, mempererat persatuan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor kreatif dan pariwisata.

Pengembangan kebudayaan di Kabupaten Kutai Timur diwujudkan dalam bentuk pelestarian tradisi, seni, bahasa, adat istiadat, hingga peninggalan sejarah yang bernilai tinggi.

Tabel 2.29 Jumlah Total Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya Kutai Timur

NO	ARTEFAK/CAGAR BUDAYA	SITUS/LOKASI	JUMLAH/VOL	KETERANGAN
1	Tulang manusia Liang Jon Tulang Manusia Kebobo	Liang Jon 2003-2006 Liang Kebobo 2006-2007	3 Box Plastik Besar 3 Box Plastik Kecil	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
2	Sejumlah Tulang Binatang	Liang Jon 2003-2006	1 Box plastik besar	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutäf Timur)
3	Temuan Gerabah	Goa-Goa Marang 1998 - 2007 Goa-Goa Perondongan 1997-1998 Goa-Goa Pengadan 1994-1995	1 Box plastik besar	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
4	flakes Posteriori	Goa-Goa Marang 1998-2007 Goa-Goa Perondongan 1997-1998 Goa-Goa Pengadaan 1994-1995	2 Box plastik besar	Dilestarikan (berada di Ga leri Kab.Kutai Timur)
S	Temuan Lain	Goa-Goa Marang 1998-2007 Goa-Goa Perondongan 1997-1998 Goa-Goa Pengadaan 1994-1995	1 Box besar	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
6	Temuan Cangkang	Gaa-Goa Marang 1998-2007 Goa-Goa Perondongan 1997-1998	4 Kardus	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)

NO	ARTEFAK/CAGAR BUDAYA	SITUS/LOKASI	JUMLAH/VOL	KETERANGAN
		Goa-Goa Pengadaan 1994-1995		
7	Gerabah	JON	2484	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
8	Gerabah	Keboboh	2329	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
9	Gerabah	Gudang Pecah	549	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
10	Gerabah	Abu	490	Dilestarikan (berada di Galen Kab.Kutai Timur)
11	Gerabah	Pecah Seribu	471	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
12	Gerabah	Batu Aji	410	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
13	Gerabah	Tengkorak	349	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
14	Gerabah	Tamrin	283	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
15	Gerabah	Ara Raya	244	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
16	Gerabah	Kairim	225	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
17	Gerabah	Ind	224	Oilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
18	Gerabah	Ilas Kecil	200	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
19	Gerabah	IIas Madu	148	Diiestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
20	Gerabah	Palangiran	146	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
21	Gerabah	Beloyot	81	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
22	Gerabah	Tewet	76	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
23	Gerabah	tebok	72	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
24	Gerabah	Unak	70	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.KMtai Timur)
25	Gerabah	Alan Bilan	41	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
26	Gerabah	Kamun	20	Dilestarikan tberada di Galeri Kab.Kutai Timur)

NO	ARTEFAK/CAGAR BUDAYA	SITUS/LOKASI	JUMLAH/VOL	KETERANGAN
27	Gerabah	Lungun	19	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
28	Gerabah	Masri	12	Dilestarikan (berada di Galera Kab.Kutai Timur)
29	Gerabah	Akar Tebas	9	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
3D	Gerabah	Ampir Kosong	3	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur}
31	Gerabah	Jon	2484	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur}
32	Batu Gosok	Liang Jon	3	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
33	Pecahan Xampak Gosok	Liang Jon	1	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
34	Flakes Posteriori	Liang Jon	7	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
35	Tulang Monyet	Liang Jon	8 Set	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
36	Gigi Beruang	Liang Jon	1 Gigi	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
37	Tanduk Kijang	Liang Jon	1 Tanduk	Dilestarikan (berada di Gaíeri Kab.Kutai Timur)
38	Tengkorak Kijang	Liang jon	1 Tengkorak	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
39	Industri Tulang	Liang Jon	4 Mikro Tulang	Dilestarikan (berada di Ga)eri Kab.Kutai Timur)
40	Tengkorak OS Frontale	Liang Jon	2 Set	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
41	Alat untuk gambar	Goa Tebok Atas	10 Set	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
42	Tanduk Kijang	Liang Jon	1	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
43	Manik-Manik Kauri	Liang Jon	30 Besar, 21 Sedang dan 103 Kecil	Dilestarikan (berada di GaterÎ Kab.Kutai Tìmur)
44	TA (3,5-4,6)	Liang Jon	8 Buah	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
45	Liang Jon 05/07	Liang Jon	4 Set	Dilestarikan [berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
46	Shell LJon 07	Liang Jon	2 set	Dilestarikan {berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
47	Mikro Manìk	Liang Jon	4 Set	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)

NO	ARTEFAK/CAGAR BUDAYA	SITUS/LOKASI	JUMLAH/VOL	KETERANGAN
48	Bowi Remontage	Goa Unak	1	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
49	Pegangan Satwa	Goa Unak	1	Dilestarikan (berada di Galeri Xab.Xutai Timur)
50	Wadah	Beragam	5	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
51	Pecahan gerabah	Goa Keboboh	12	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
S2	Pecahan gerabah	Goa Keboboh	7	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
S3	Pecahan Porselen	Goa Keboboh	2 Set	Dilestarikan [berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
54	Kerang	Goa Keboboh	1	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
55	Pecahan Gerabah	Liang Karim	1	Oilestarikan [berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
5G	PetahanGerabah	Liang Karim	19	Dilestarikan (berada di Galeri Kaü.Kutał Timur)
57	Pecahan Gerabah		4	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
58	Pecahan Gerabah		15	Dilestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
59	Goa Angin	Kongbeng lndah	1	Belum Dilestarikan
60	Fragmen Arca 1	Kongbeng łndah	1	Belum Dilestarikan
61	Fragmen Area 11	Kongbeng lndah	1	Belum Dilestarikan
62	Mesin Uap	Spaso Induk	1	Belum Dilestarikan
91	Rumah Camat	Kelinjau IIir	1	Belum Dilestarikan
92	Lamin Datun	Kelinjau IIir	1	Belum Dilestarikan
93	Rumah Peninggalan Belanda 1	Kelinjau IIir	1	Belum Dilestarikan
94	Rumah Peninggalan Belanda 2	Kelinjau IIir	1	Belum Dilestarikan
95	Rumah Peninggalan Belanda 3	Kelinjau Iîir	1	Belum Dilestarikan
96	Rumah Peninggalan Belanda	Benua Baru Ulu	1	Belum Dilestarikan
97	Situs Goa Angin	Juk Ayaq	1	Belum Dilestarikan
98	Makam Habib Hasan AI-ldrus(Habib Alam)		1	Belum Dilestarikan

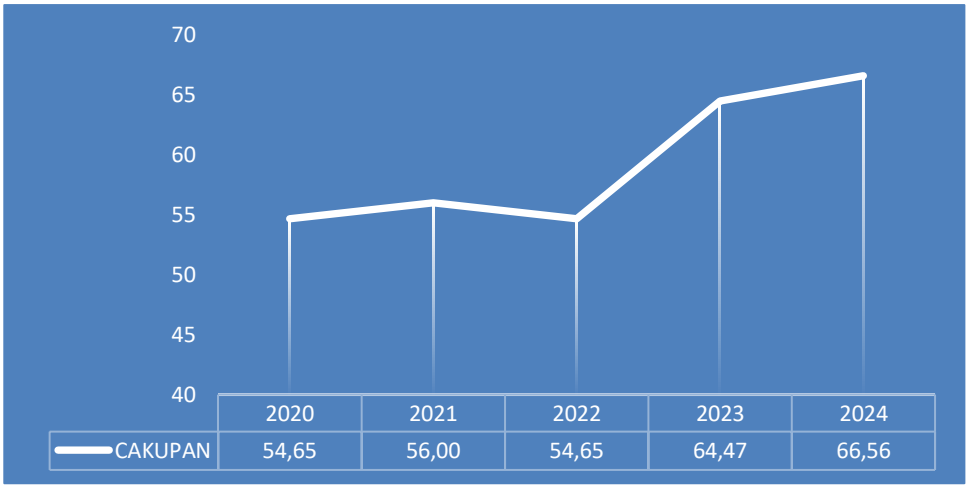
NO	ARTEFAK/CAGAR BUDAYA	SITUS/LOKASI	JUMLAH/VOL	KETERANGAN
99	Kawasan Karts Sangkulirang Mangaliat		1	Di Lestarikan (berada di Karst Sangkulirang)
100	Tempayan	Liang Karim	1	Di Lestarikan (berada di Sangkulirang)
101	Kendi	Situs Keboboh	1	Di Lestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
102	Periuk	Situs Liang Jhon	1	Di Lestarikan (berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
103	Mangkuk	Gua Unak	1	Di Lestarikan {berada di Galeri Kab.Kutai Timur)
104	Liang Jhon	Situs	1	Di Lestarikan (berada di Tepian Langsat Kec.Bengalon)
105	Gua Keboboh	Situs	1	Di Lestarikan (berada di Tepian Langsat Kec.BengaIon)
106	Liang Karim	Situs	1	Di Lestarikan (berada di Tepian Langsat Kec.BengaIon)

Sumber: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kutai Timur, 2025

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

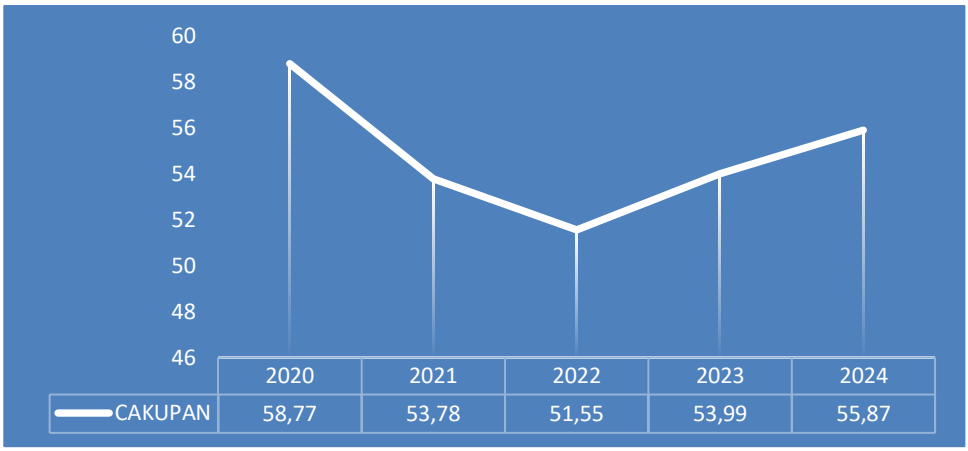
Pembangunan keluarga adalah upaya terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, sehat, mandiri, serta memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Pembangunan keluarga mencakup 3 (tiga) dimensi utama, yaitu: ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan keluarga dicerminkan dengan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).

Gambar 2.23 Gambaran Pencapaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024



Pemberdayaan gender merupakan proses meningkatkan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Tujuannya adalah memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk berperan, berpartisipasi, dan menikmati hasil pembangunan tanpa adanya diskriminasi. Untuk mengukur keberhasilan pemberdayaan gender dapat digambarkan melalui pengukuran Indeks Pemberdayaan Gender (IPG).

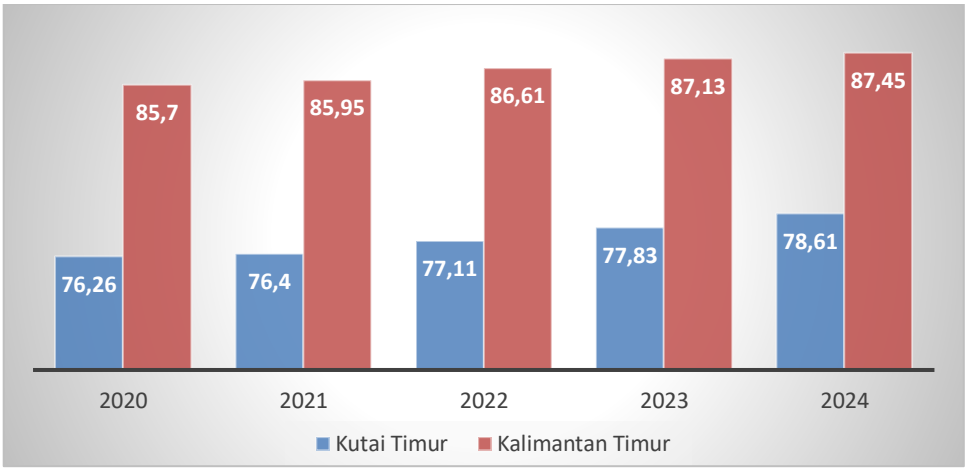
Gambar 2.24 Gambaran Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024



Pembangunan gender adalah upaya terencana dan berkesinambungan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang kehidupan, meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya. Tujuannya bukan hanya memberi peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki, tetapi juga memastikan keduanya dapat berpartisipasi aktif, memiliki akses setara terhadap sumber daya, serta memperoleh manfaat yang adil dari hasil pembangunan. Dengan pembangunan gender, diharapkan tercipta masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan berdaya saing, karena setiap individu—tanpa membedakan jenis kelamin—dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan bangsa. Untuk mengukur pembangunan gender dapat digambarkan melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). Peningkatan IPG menjadi penting karena kesetaraan gender berkontribusi langsung pada kualitas sumber daya manusia, produktivitas, serta daya saing bangsa. Oleh karena itu, pemerintah mendorong kebijakan pengarusutamaan gender (PUG), pemberdayaan perempuan,

serta peningkatan akses perempuan dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi untuk mempercepat pencapaian pembangunan yang adil dan inklusif.

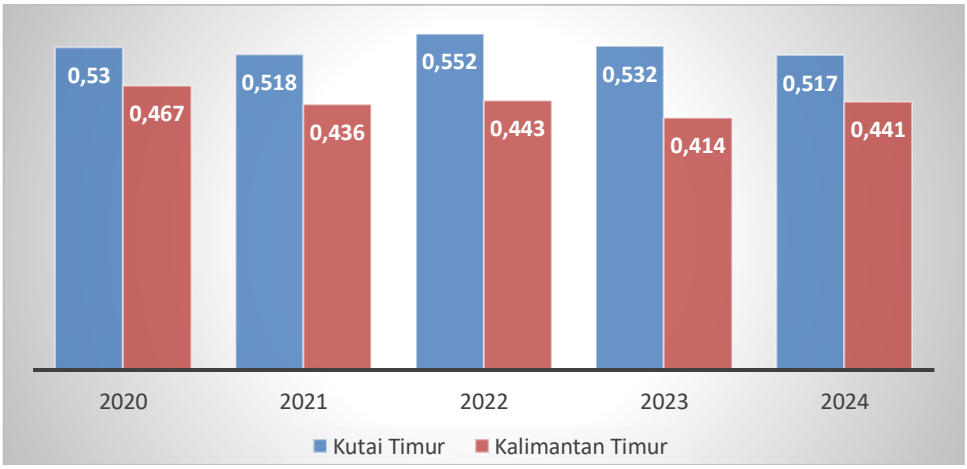
Gambar 2.25 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Nilai IKG yang semakin kecil mengindikasikan bahwa ketimpangan gender semakin kecil atau kesetaraan gender semakin membaik. Penurunan IKG dilakukan dengan memperkuat kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dengan memberikan kesempatan yang luas kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang.

Gambar 2.26 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

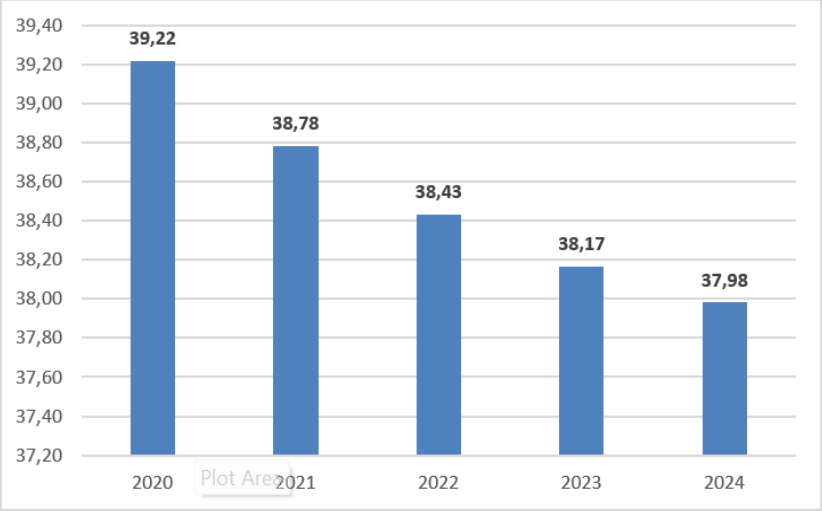
Daya saing sumber daya manusia dapat dilihat dari beberapa aspek, di antaranya adalah besarnya angka ketergantungan atau rasio ketergantungan *(dependency ratio)* dan tingkat pendidikan penduduk. Angka ketergantungan atau rasio ketergantungan adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara penduduk bukan usia produktif (usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas) dengan usia produktif (usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan Kutai Timur tahun 2024 mencapai 37,99%; angka ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban 38 penduduk bukan usia produktif. Rasio ketergantungan perempuan (39,55%) lebih tinggi bila dibandingkan dengan laki-laki (36,66%).

Tabel 2.30 Rasio Ketergantungan Kabupaten Kutai Timur 2024

Usia	Jumlah			*Dependency Ratio*		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
0-14	56.740	53.670	110.410	**36,66**	**39,55**	**37,99**
15-64	181.490	154.050	335.540			
65+	9.800	7.250	17.050			
Total	**248.030**	**214970**	**463.000**			

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur, diolah

Gambar 2.27 Rasio Ketergantungan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: SP2020 BPS Kabupaten Kutai Timur

Selama periode 2020-2024 rasio ketergantungan Kabupaten Kutai Timur menunjukkan tren yang menurun setiap tahun. Tahun 2020 rasio ketergantungan

sebesar 39,22% dan di tahun 20204 turun menjadi 37,98%. Penurunan tersebut disebabkan karena pertumbuhan penduduk usia produktif yaitu 15-64 tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk bukan usia produktif, yaitu usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas. Pertumbuhan penduduk usia produktif ini perlu diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja agar mampu menekan angka pengangguran.

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Perekonomian Kutai Timur didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian. Kutai Timur terus berupaya dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi sehingga terjadi transformasi ekonomi sehingga tidak tergantung pada sektor pertambangan. Salah satu bentuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi antara lain terlihat dari peran rasio PDRB sektor industri pengolahan, sektor akomodasi dan makan minum, serta pertanian. Proporsi sektor industri pengolahan selama 2020-2024 meski berfluktuasi namun terlihat menunjukkan tren peningkatan. Hal yang sama juga terjadi pada sektor pertanian yang menunjukkan proprosi peningkatan meskipun berfluktuasi. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa peran industri pengolahan yang berbasis sektor pertanian mengalami peningkatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi mendorong semakin besarnya kontribusi sektor industri pengolahan. Dari sisi sektor akomodasi dan makan minum selama 2020-2024 juga menunjukkan proporsi yang meningkat sehingga inovasi dan dinamika di bidang perekonomian mendorong peningkatan peran sektor akomodasi dan makan minum.

Tabel 2.31 Produktivitas Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024

Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB Adhb (Juta Rp)	115.555.662	136.617.573	211.101.484	168.271.524	159.497.231
Tenaga Kerja (Orang)	182.916	206.502	190.015	216.253	223226
Produktivitas (Juta Rp)	631,742	661,580	1.110,973	778,123	714,510
Pertumbuhan Produktivitas Daerah (%)	-16,13	4,72	67,93	-29,96	-8,18

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur, diolah

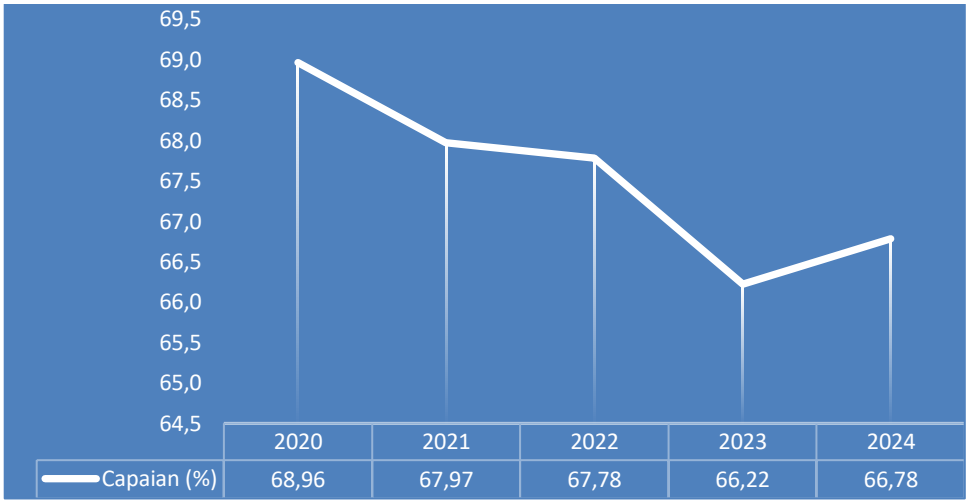
Tabel 2.32 Rasio Sektor Industri Pengolahan, Sektor Akomodasi dan Makan Minum, serta Sektor Pertanian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018-2024 (%)

Rasio PDRB	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Proporsi 2018-2024
Rasio PDRB Industri Pengolahan	2,98	2,93	3,55	3,38	2,55	3,22	4,34	3,28
Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum	0,22	0,24	0,28	0,27	0,19	0,27	0,31	0,25
Rasio Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,69	7,69	9,12	8,32	5,90	7,60	8,80	7,87

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur, diolah

Peran tenaga kerja dalam mendukung ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi merupakan faktor penting. Inovasi dan teknologi memerlukan dukungan tenaga kerja yang berkualitas, oleh karena itu suplai tenaga kerja adalah faktor yang berpengaruh terhadap berkembangnya tenaga kerja yang berkualitas. Berkaitan dengan hal tersebut indikator yang perlu diperhatikan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yaitu rasio antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja.

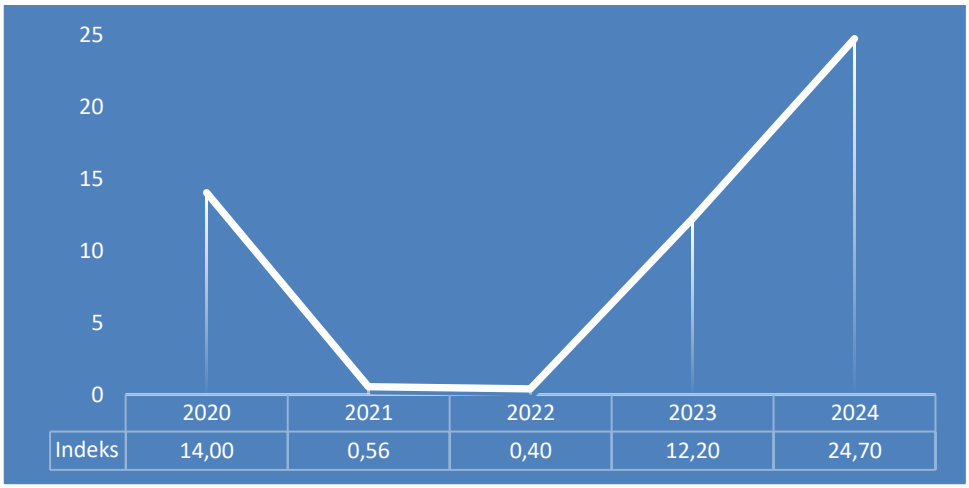
Gambar 2.28 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024



Inovasi yang terjadi di daerah dapat diukur dengan Indeks Inovasi Daerah (IID). Indeks ini mengukur berbagai inovasi yang dilakukan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal inovasi, Kabupaten Kutai Timur masih memiliki skor yang rendah yaitu 24,7 atau masuk dalam kategori "Kurang Inovatif". Nilai ini adalah peringkat ke 3 terendah di

Kalimantan Timur. Salah satu tantangan inovasi adalah ketersediaan infrastruktur pendukung yang didukung dengan teknologi informasi.

Gambar 2.29 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024



Bentuk inovasi daerah dalam indeks ini adalah: 1). Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, seperti: e-kinerja, e-evaluasi, e-*monitoring*, e-kepegawaian, e-arsip dan lain sebagainya; 2). Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat atau pihak lainnya yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat atau pihak lainnya seperti inovasi dalam pelayanan perijinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan pendidikan dan lain sebagainya; dan 3). Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah segala bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti inovasi pemberdayaan usaha ekonomi, sosial budaya, adat-istiadat, dan lain sebagainya.

2.1.3.3 Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan pengarusutamaan transformasi digital meliputi pengembangan super platform, percepatan transformasi digital, dan produksi talenta digital. Dengan kata lain aktivitas Masyarakat dalam berbagai

bidang telah menggunakan perangkat atau platform digital. Penggunaan media digital seperti HP, komputer, serta internet dalam keseharian Masyarakat di berbagai bidang menjadi salah satu faktor untuk mendukung percepatan transformasi digital.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan pengembangan transformasi digital dalam menunjang peningkatan kinerja pelayanan publik, peyehatan investasi dan peningkatan kinerja aparatur pemerintahan. Hingga tahun 2024, beberapa platfrom digital telah diaplikasikan, sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.33 Aplikasi Digital Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

No.	Aplikasi Digital	Pemanfaatan
1.	Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD)	Penyajian Data Spasial Daerah
2.	E-Kinerja (E-Kin)	Pelaporan Kinerja & Kedisiplinan Pegawai
3.	SP4N Lapor	Kanal Aduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
4.	Portal Satu Data Kutai Timur	Pengelolaan Data Sektoral Kinerja Perangkat Daerah
5.	Sistem Informasi & Manajeman Kemiskinan	Pelaporan, Monitoring & Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah
6.	Elektronik Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (e-SPTPD)	Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah
7.	Sistem Informasi Administrasi Pelayanan Kependudukan Warga Ku Layani (SIAP KAWAL)	Pelayanan Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil.
8.	Sistem Layanan Cepat Tanggap (SIGAP)	Pelayanan Pelaporan Kejadian Kebakaran di Permukiman Masyarakat
9.	Sistem Cerdas Pengadaan Terpadu (SICEPAT)	Pelayanan Pengadaan Barang & Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

No.	Aplikasi Digital	Pemanfaatan
10.	E-Harga Kutim	Pengajuan Standarisasi Harga Barang & Jasa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten

Sumber: DISKOMINFOSTAPER Kabupaten Kutai Timur, 2024

2.1.3.4 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global menunjukkan keterkaitan ekonomi dalam mendukung rantai pasok global melalui investasi serta kegiatan ekspor impor. Berdasarkan struktur PDRB menurut pengeluaran faktor pembentuk PDRB Kutai Timur yang paling utama adalah ekspor neto yaitu selisih nilai ekspor dengan nilai impor, khususnya ekspor sektor pertambangan. Proporsi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) Kutai Timur selama 2020-2024 menunjukkan tren yang meningkat cukup tajam dari 18,65% di tahun 2019 menjadi 23,43% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan semakin besarnya aktivitas investasi di Kutai Timur dan semakin besarnya peran investasi dalam struktur PDRB. Dari sisi ekspor neto selama 2020-2024 berfluktuasi namun menunjukkan tren penurunan dari 71,73% di tahun 2020 menjadi 66,44% di tahun 2024. Diversifikasi ekspor perlu dipertimbangkan berdasarkan produk unggulan daerah sehingga ketergantungan terhadap ekspor pertambangan semakin berkurang.

Tabel 2.34 Proporsi PDRB ADHB Kabupaten Kutai Timur Menurut Pengeluaran (%)

Komponen PDRB	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Rumah Tangga	7,17	6,26	4,45	6,06	6,78
Pengeluaran konsumsi LNPRT	0,28	0,25	0,16	0,23	0,28
Pengeluaran konsumsi Pemerintah	2,03	1,71	1,38	2,51	2,98
PMTB	18,65	19,10	13,92	20,13	23,43
Perubahan inventori	0,15	0,04	0,04	0,06	0,10
Ekspor Neto	71,73	72,64	80,05	71,00	66,44
PDRB MENURUT PENGELUARAN	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur

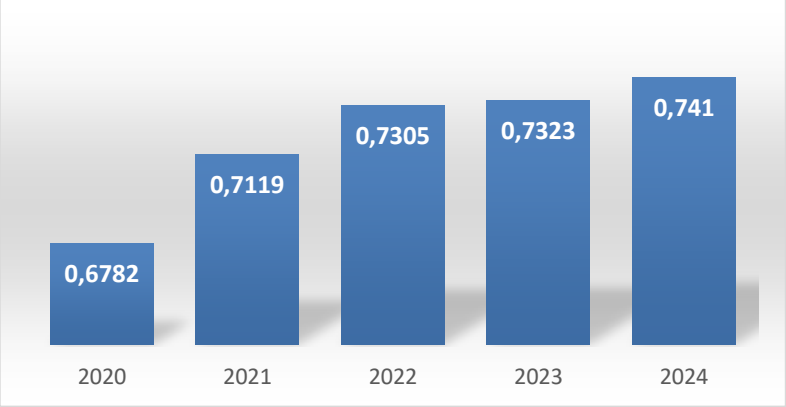
2.1.3.5 Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Desa merupakan satuan wilayah terkecil yang diharapkan menjadi titik awal pergerakan ekonomi masyarakat. Di Kutai Timur saat ini terdapat 139 desa dan 2 kelurahan, dan diharapkan jumlah desa akan semakin berkembang seiring dengan dinamika yang ada. Setiap desa memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda, sehingga pembangunan desa diharapkan akan mempercepat proses pemerataan pembangunan daerah. Dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 41 serta 378 dusun dan 1.656 RT, pembangunan desa memiliki tantangan tersendiri. Pengembangan desa perlu dilakukan melalui pembangunan BUMDes, infrastruktur, serta stimulan lainnya agar ekonomi desa berjalan lebih dinamis. Pembangunan perlu diarahkan pada pemberdayaan masyarakat serta pemanfaatan potensi yang ada, untuk mendukung hal tersebut konektivitas desa ke pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat menjadi penting untuk dilakukan.

Dari semua kecamatan yang ada, tahun 2024 terdapat dua kecamatan yang memiliki rata-rata IDM dengan status Mandiri, yaitu Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Sebagian besar kecamatan memiliki nilai IDM dengan status Maju dan terdapat 4 kecamatan yang memiliki nilai IDM Berkembang. Kondisi ini menjadi salah satu faktor pendukung untuk melaksanakan program pembangunan desa.

Secara keseluruhan selama 2020-2024 nilai IDM Kutai Timur menunjukkan peningkatan. Bila tahun 2020 masih berstatus “berkembang”, mulai 2021-2024 status IDM di Kutai Timur menjadi “maju”. Hal ini memperkuat peran perdesaan sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Kutai Timur.

Gambar 2.30 Perkembangan Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024



Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Upaya menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat secara lebih cepat dan merata. Salah satu upaya terkait hal tersebut adalah ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat desa. Aspek kelayakan rumah masih menjadi tantangan ke depan bagi Kutai Timur. Setiap tahun pemerintah daerah berupaya menyusun program pengurangan rumah tidak layak huni (RTLH). Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, di tahun 2022 terdapat 6.995 RTLH. Sebagian besar RTLH pada tahun 2022 berada di Kecamatan Rantau Pulung, Bengalon, Sandaran, serta Long Mesangat yang masing-masing memiliki RTLH lebih dari 500 unit.

Tabel 2.35 Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah RTLH
1	Batu Ampar	338
2	Bengalon	645
3	Busang	170
4	Kaliorang	389
5	Karangan	173
6	Kaubun	376
7	Kongbeng	229
8	Long Mesangat	516
9	Muara Ancalong	499
10	Muara Bengkal	407
11	Muara Wahau	409
12	Rantau Pulung	914
13	Sandaran	522
14	Sangatta Selatan	234
15	Sangatta Utara	124
16	Sangkulirang	281
17	Telen	365
18	Teluk Pandan	404
Total		**6.995**

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kutai Timur (https://data.kaltimprov.go.id/)

Untuk menjadikan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan dibutuhkan ketersediaan aksesibilitas jalan antar desa dan kecamatan yang mantap. Hal ini penting untuk mendorong percepatan konektivitas antar wilayah di Kutai Timur. Berdasarkan data kondisi jalan yang masuk di dalam kategori jalan kabupaten sesuai SK Bupati Kutai Timur Nomor: 600/K.154/2024 , panjang jalan

kabupaten mencapai 1.127,09 km. Adapun kondisi jalan mantap baru mencapai 373,6km (33,15%). Kemudian kondisi desa yang memiliki akses telekomunikasi di wilayah Kutai Timur sudah mencapai 136 desa dan hanya tertinggal 3 desa dengan kategori *blank spot*.

2.1.3.6 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro daerah merupakan prasyarat terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Stabilitas tersebut dapat terwujud dengan menjaga indikator ekonomi makro seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi melalui PDRB, serta fiskal seperti pajak atau penerimaan daerah. Perbandingan antara pajak dengan PDRB menghasilkan ukuran rasio pajak terhadap PDRB atau *tax ratio*. Rasio ini menjadi penting karena menggambarkan kontribusi pajak dalam PDRB, semakin tinggi nilainya berarti peran pajak dalam PDRB semakin tinggi. Nilai *tax ratio* yang rendah menggambarkan bahwa pengelolaan pajak belum optimal dalam mendukung PDRB.

Tax ratio Kabupaten Kutai Timur selama 2020-2024 terlihat berfluktuatif, namun pada periode 2022-2024 menunjukkan kenaikan dari 0,047% di tahun 2022 menjadi 0,127 di tahun 2024. Selama 2020-2024 nilai *tax ratio* terlihat sangat kecil, hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan pajak daerah tidak sebanding dengan besarnya PDRB yang terbentuk. Hal ini bisa terjadi karena ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertambangan sedangkan proporsi penerimaan pajak dari sektor tersebut dalam bentuk bagi hasil pajak dan sebagian besar menjadi hak pemerintah pusat. Pengembangan ekonomi daerah diharapkan dapat memunculkan potensi ekonomi lokal non-pertambangan sehingga penerimaan pajak dari pemerintah tidak tergantung dari sektor pertambangan. Sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, serta sektor akomodasi dan makan minum diharapkan mampu dikembangkan dalam rangka meningkatkan *tax ratio*.

Tabel 2.36 *Tax Ratio* Kabupaten Kutai Timur 2020-2024 (%)

Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
Pajak Daerah (MILYAR)	114,06	99,79	98,63	112,71	201,95
PDRB ADHB (MILYAR)	115.555,66	136.617,57	211.101,48	168.271,52	159.497,23
Tax Ratio (%)	0,099	0,073	0,047	0,067	0,127

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business prosess)* dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui.

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner. Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Pengembangan tata pemerintahan yang profesional melibatkan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM di sektor pemerintahan. SDM pemerintah perlu mendapatkan pelatihan yang terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam merespons tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks. Sistem seleksi, pengangkatan, dan promosi pegawai juga perlu didasarkan pada meritokrasi untuk memastikan bahwa posisi-posisi strategis diisi oleh individu yang memiliki kemampuan dan integritas yang tinggi.

Untuk melihat sejauh mana implementasi pemerintah daerah menuju tata Kelola, dipergunakan beberapa alat ukur seperti SAKIP, SPBE, IPP, dan IRB. Dalam

beberapa indeks tata kelola, pada tahun 2023 Kutai Timur memiliki nilai yang masih rendah untuk Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yaitu masih CC sementara untuk Indeks Pelayanan Publik (IPP) memiliki skor 0,89. Untuk SPBE skor yang diperoleh sudah cukup bagus yaitu 3,20 (tertinggi ketiga).

Di tahun 2024 terjadi peningkatan yang signifikan pada IRB; dari CC menjadi BB namun terjadi penurunan indeks SPBE dari 3,20 di tahun 2023 menjadi 3,02 di tahun 2024 meski masih sama-sama masuk dalam kategori "Baik". Nilai IRB tahun 2023 adalah 53,9 dan tahun 2024 naik tajam menjadi 70,35. Untuk IPP terjadi kenaikan yang signifikan dari 0,89 di tahun 2023 menjadi 2,90 di tahun 2024.

Tabel 2.37 Indeks Tata Kelola Pemerintahan Tahun 2023-2024

Kabupaten/Kota	2023				2024			
	Indeks RB	Indeks SAKIP	Indeks SPBE	Indeks PP	Indeks RB	Indeks SAKIP	Indeks SPBE	Indeks PP
Kutai Kartanegara	B	B	2.54	4.24	BB	B	3,09	4,35
Paser	B	B	2.90	3.91	BB	B	3,27	4,03
Berau	C	B	2.02	1.09	BB	B	2,28	3,71
Kutai Barat	CC	B	2.50	3.53	B	B	2,62	4,11
Kutai Timur	**CC**	**B**	**3.20**	**0.89**	**BB**	**B**	**3,02**	**2,9**
Penajam Paser Utara	CC	B	2.85	3.45	BB	B	2,87	3,75
Mahakam Ulu	CC	N/A	1.11	1.82	CC	B	2,25	1,42
Samarinda	BB	B	3.14	4.02	BB	B	3,85	4,26
Balikpapan	B	B	3.75	4.51	A	B	3,96	4,19
Bontang	BB	B	2.83	4.11	A	BB	3,39	4,28

Sumber: Kementerian PAN dan RB

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Kondisi ketenteraman dan ketertiban umum suatu daerah sangat mempengaruhi terhadap proses pembangunan daerah. Hal ini juga akan mempengaruhi iklim investasi di daerah tersebut. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kutai Timur dapat tercermin dari angka kriminalitas yang terjadi.

Keamanan dan ketertiban umum merupakan prasyarat kelancaran program-program pembangunan daerah. Situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang mendukung akan memperlancar implementasi program Pembangunan daerah yang telah disusun. Keamanan dan ketertiban umum antara lain tercermin melalui rendahnya kejadian kriminalitas di Masyarakat. Di tahun

2024 terdapat 642 kejadian kriminalitas di Kutai Timur atau rata-rata 53 kejadian per bulan. Dari 642 kejadian tersebut, dikategorikan ke kriminalitas umum (sebanyak 619 kejadian) dan kriminalitas khusus (sebanyak 23 kejadian). Dari 619 kriminalitas umum, sebanyak 557 atau 89,98% telah diselesaikan dan dari 31 kejadian kriminal khusus sebanyak 17 kejadian (73,91%) telah diselesaikan; dengan demikian total kejadian kriminalitas yang telah diselesaikan mencapai 574 dari 642 atau 89,41%, naik dibandingkan tahun 2023 yang besarnya 86,04%.

Kasus kriminal umum yang sering terjadi adalah kasus narkotika yaitu 288 kasus dan telah diselesaikan sebanyak 256 atau 88,89%. Tingginya kasus ini memerlukan penanganan preventif dan sistematis terlebih kasus ini sering menimpa generasi muda Kutai Timur. Program-program yang difokuskan untuk generasi muda perlu diarahkan untuk membangun generasi muda yang sehat, dinamis, dan kreatif. Untuk kriminal khusus masalah yang menonjol adalah *illegal logging, illegal mining,* dan migas. Sebagai daerah penghasil pertambangan utama, kasus ini rawan terjadi di Kutai Timur.

Tabel 2.38 Kondisi Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

No	Tindak Kriminal	Kejadian	Diselesaikan
Kriminal Umum			
1	Terhadap ketertiban umum	–	1
2	Membahayakan keamanan umum	–	–
3	Sengaja menimbulkan kebakaran/banjir (pembakaran)	1	-
4	Pemalsuan	2	1
5	Perkosaan	1	-
6	Judi	4	4
7	Perbuatan yang tidak menyenangkan	–	–
8	Pembunuhan	5	2
9	Kelalaian Mengakibatkan orang mati	1	1
10	Kelalaian mengakibatkan orang luka	1	2
11	Pencurian biasa	25	23
12	Pencurian dengan pemberatan (Curat)	50	52
13	Pencurian ringan	-	-
14	Pengancaman	3	7
15	Penggelapan	35	29
16	Penipuan/Perbuatan Curang	7	7
17	Kejahatan Perlindungan Anak	35	33
18	Kekerasan dalam rumah tangga	5	5
19	Penyalahgunaan sajam, senpi dan handak	9	10
20	Pengeroyokan	7	6
21	Penganiayaan	19	20
22	Cabul	1	-

No	Tindak Kriminal	Kejadian	Diselesaikan
23	Curanmor	3	3
24	Penyerobotan tanah	2	-
25	Kecelakaan Lalu Lintas	54	50
26	Kejahatan tenaga kesehatan	1	-
27	Percobaan Pencurian	–	–
28	Pengerusakan	2	2
29	Narkotika	288	256
30	Menjual atau mengedarkan Obat Keras tanpa ijin	1	4
31	Penjual Minuman Keras	26	16
32	Pelanggaran hukum non pidana lainnya	-	-
33	Sumpah palsu dan keterangan palsu	-	–
34	Pemerasan	-	1
35	Pencurian dengan kekerasan (Curas)	6	3
36	Penadahan	2	-
37	Kekerasan Seksual	1	-
38	Persetubuhan terhadap anak	17	18
39	Kejahatan perdagangan Manusia	4	3
	Jumlah	**619**	**557**
Kriminal Khusus			
1	HAKI	–	–
2	Hak Paten	–	–
3	Korupsi	2	1
4	Illegal Logging	1	1
5	Illegal Fishing	–	–
6	Migas	7	8
7	Illegal Mining	9	3
8	Lingkungan Hidup	–	–
9	Perkebunan	4	4
10	Penyelundupan	–	–
11	Kesehatan	–	–
12	Ketenaga Listikan	–	–
13	Cagar Alam	–	–
14	Peternakan dan Cagar Budaya	–	–
15	UU Pertambangan	–	–
16	Cyber Crime	–	–
17	ITE	-	-
	Jumlah	**23**	**17**
TOTAL		**642**	**574**

Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka, 2025

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Dalam konteks daerah, ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar dapat dilihat antara lain dari Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). IDSD merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kab/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD memiliki 4 komponen dan 12 pilar yang menggambarkan kondisi daya saing suatu daerah.

Gambar 2.31 Struktur Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)



Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional

Pilar 1: Institusi

Pilar Institusi mengukur kekuatan kondisi institusi di daerah, dengan indikator yaitu keamanan, modal sosial, *check and balances,* transparansi, hak atas kepemilikan, dan orientasi masa depan Pemerintah.

Pilar 2: Infrastruktur

Pilar Infrastruktur mengukur keberadaan dan kualitas infrastruktur di daerah, dengan indikator, yaitu, infrastruktur transportasi, infrastruktur utilitas kelistrikan, dan infrastruktur air minum.

Pilar 3: Adopsi TIK

Pilar ini mengukur tingkat difusi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di daerah, dengan indikator, yaitu pengguna telepon seluler, jangkauan jaringan 4G, pelanggan internet *fixed-broadband*, dan pengguna internet.

Pilar 4: Stabilitas Ekonomi Makro

Pilar ini mengukur kondisi keuangan daerah, dengan indikator inflasi, kapasitas fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, indeks ketahanan pangan, nilai investasi, dan PDRB per kapita.

Pilar 5: Kesehatan

Pilar Kesehatan mengukur "harapan hidup" yang disesuaikan dengan kesehatan di daerah melalui satu indikator, yaitu angka harapan hidup.

Pilar 6: Keterampilan

Pilar Keterampilan mengukur kuantitas dan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja di daerah. Indikatornya adalah tenaga kerja saat ini dan tenaga kerja masa depan.

Pilar 7: Pasar Produk

Pilar Pasar Produk mengukur keterbukaan pasar produk di daerah melalui dimensi persaingan domestik, dengan indikator tingkat dominasi pasar, dan persaingan sektor jasa.

Pilar 8: Pasar Tenaga Kerja

Pilar Pasar Tenaga Kerja menggambarkan fleksibilitas dan pemanfaatan tenaga kerja di daerah, dengan indikator kebijakan pasar tenaga kerja aktif, upah pekerja, dan kesetaraan upah perempuan dan laki-laki.

Pilar 9: Sistem Keuangan

Pilar ini mengalokasikan sumber daya dan investasi yang dapat dimanfaatkan suatu daerah, dengan indikator kredit usaha rakyat per penduduk, pembiayaan lembaga ventura kepada umkm/*start-up*, dan rasio kredit bermasalah terhadap total pinjaman.

Pilar 10: Ukuran Pasar

Pilar Ukuran Pasar menggambarkan ukuran pasar yang dapat menguatkan struktur industri di daerah melalui dua indikator, yaitu PDRB, dan Rasio Nilai Impor terhadap PDRB.

Pilar 11: Dinamisme Bisnis

Pilar ini menggambarkan kapasitas sektor swasta untuk menghasilkan dan mengadopsi teknologi baru dan cara baru di daerah, dengan indikator biaya untuk memulai usaha, dan waktu untuk memulai usaha.

Pilar 12: Kapabilitas Inovasi

Pilar Kapabilitas Inovasi menggambarkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan formal yang mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, dan konfrontasi lintas visi dan sudut pandang yang

berbeda, serta kapasitas untuk mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Indikatornya adalah keanekaragaman tenaga kerja, status pengembangan klaster, publikasi ilmiah, aplikasi Kekayaan Intelektual (KI), belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, dan aplikasi merek dagang.

Berdasarkan IDSD tahun 2024, Kutai Timur memiliki skor 3,17 masih di bawah rata-rata nasional yang besarnya 3,43 dan Provinsi Kalimantan Timur (3,37). Nilai IDSD Kutai Timur tersebut adalah terendah kedua setelah Mahakam Ulu, meski naik cukup tajam dibandingkan tahun 2023 yang besarnya 2,78. Skor Pilar 4 (skor 3,10), Pilar 7 (skor 1,16), dan Pilar 12 (1,38) Kutai Timur memiliki nilai yang rendah dibandingkan sebagian besar dengan lain di Kalimantan Timur.

Tabel 2.39 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2024

NAMA KAB/KOTA	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM		PASAR				EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
KALIMANTAN TIMUR	**4,28**	**2,89**	**4,14**	**4,25**	**4,15**	**4,00**	**1,13**	**3,63**	**2,76**	**4,33**	**2,35**	**2,58**	**3,37**
KAB. PASER	4,54	3,33	4,17	3,67	4,00	3,93	1,81	3,74	1,53	4,69	3,03	1,23	3,31
KAB. KUTAI BARAT	4,10	3,10	4,00	3,91	4,02	3,77	3,24	3,01	3,05	4,49	3,73	0,84	3,44
KAB. KUTAI KARTANEGARA	4,43	3,87	3,90	4,51	3,98	4,15	1,93	3,29	1,58	5,00	3,81	1,75	3,52
KAB. KUTAI TIMUR	**4,17**	**3,31**	**3,83**	**3,10**	**4,05**	**3,93**	**1,16**	**3,26**	**2,06**	**5,00**	**2,84**	**1,38**	**3,17**
KAB. BERAU	4,42	3,07	3,73	4,28	3,96	4,02	3,74	2,83	2,66	4,62	3,00	1,35	3,47
KAB. PENAJAM PASER UTARA	4,11	3,44	4,37	3,52	3,92	4,24	2,95	2,67	1,69	4,09	4,29	0,70	3,33
KAB. MAHAKAM ULU	3,62	1,71	3,08	3,93	3,96	3,99	2,12	2,17	2,81	3,35	1,92	1,30	2,83
KOTA BALIKPAPAN	4,36	3,95	4,90	4,44	4,16	4,05	5,00	3,95	3,39	5,00	3,14	2,56	4,07
KOTA SAMARINDA	4,59	3,51	4,92	3,89	4,15	4,03	5,00	4,61	3,70	4,85	3,25	3,30	4,15
KOTA BONTANG	4,13	3,63	5,00	3,77	4,15	4,08	2,20	3,67	2,46	4,75	2,80	2,29	3,58

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

2.1.4.4.1 Urusan Pemeritahan Wajib

A. Urusan Pendidikan

Urusan pendidikan antara lain berkaitan dengan masalah angka partisipasi kasar (APK) maupun angka partisipasi murni (APM). Dalam hal APK, APK untuk jenjang SD/sederajat hingga SMA/Sederajat tahun 2023/2024 sudah tinggi (di atas 100%) namun yang kuliah di perguruan tinggi tergolong rendah sehingga motivasi untuk kuliah bagi lulusan SMA/SMK belum sesuai dengan yang diharapkan. APK SD/sederajat sebesar 105,1 mengandung arti bahwa dari jumlah penduduk yang bersekolah di SD/MI sebanyak 5,1% berusia di luar 7-12 tahun sedangkan APM SD/sederajat sebesar 95,22% berarti terdapat 95,22% usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/sederajat atau terdapat 4,78% usia 7-12 tahun yang belum bersekolah di jenjang SD/sederajat.

Tabel 2.40 APK dan APM SD/Sederajat 2023/2024

Nama Kabupaten/ Kota	Penduduk Usia 7-12 tahun	Jumlah Siswa SD/Sederajat	Jumlah Siswa Usia 7-12	APK	APM
Kab. Paser	33.949	35.597	32.325	104,85	95,22
Kab. Kutai Kartanegara	89.979	94.539	86.379	105,07	96
Kab. Berau	34.737	36.308	33.106	104,52	95,3
Kab. Kutai Barat	22.284	23.669	21.637	106,22	97,1
Kab. Kutai Timur	**53.523**	**56.254**	**51.584**	**105,1**	**96,38**
Kab. Penajam Paser Utara	20.964	22.005	20.117	104,97	95,96
Kab. Mahakam Ulu	4.080	4.215	3.756	103,31	92,06
Kota Samarinda	87.112	92.172	86.473	105,81	99,27
Kota Balikpapan	72.621	76.871	71.912	105,85	99,02
Kota Bontang	19.551	20.568	19.041	105,2	97,39

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Pelayanan pendidikan untuk Kabupaten Kutai Timur meliputi SD/sederajat hingga SMP/sederajat di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk MI dan MTs di bawah kewenangan Kementerian Agama. Pendidikan pada jenjang SMA/sederajat menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Timur. Di tingkat SD/sederajat jumlah sekolah adalah 249, dengan jumlah sekolah terbanyak berada di Kecamatan Sangatta Utara yaitu 38 sekolah dan kedua adalah Kecamatan Bengalon sebanyak 25 sekolah. Hal yang sama juga terjadi dengan jumlah murid, terbanyak di Kecamatan Sangatta Utara dan Bengalon, masing-masing 13.148 dan 5.511 murid. Total jumlah murid untuk jenjang SD/sederajat adalah 51.835 dan total jumlah guru SD/sederajat sebanyak 3.392. Kecamatan dengan jumlah sekolah paling sedikit adalah Kecamatan Long Mesangat dan Kecamatan Batu Ampar, masing-masing terdapat 7 sekolah.

Pada jenjang SMP/sederajat Kecamatan Sangatta Utara memiliki jumlah sekolah terbanyak yaitu 22 sekolah selanjutnya Kecamatan Muara Wahau dengan 11 sekolah. Untuk jumlah murid, meski Kecamatan Muara Wahyu memiliki jumlah SMP/sederajat yang lebih banyak dibandingkan Kecamatan Bengalon, namun jumlah murid SMP/sederajat Kecamatan Bengalon lebih banyak dibandingkan dengan Kecamatan Muara Wahau.

Tabel 2.41 Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Jenjang SD/Sederajat hingga SMA/Sederajat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023/2024

Kecamatan	SD/Sederajat			SMP/Sederajat		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
Muara Ancalong	13	1828	160	5	776	72
Busang	6	726	68	2	255	23
Long Mesangat	7	858	69	3	335	38
Muara Wahau	23	4738	296	11	1506	114
Telen	9	1713	109	4	468	47
Kongbeng	14	3244	183	7	1355	107
Muara Bengkal	11	1745	118	5	634	65
Batu Ampar	7	838	72	2	221	20
Sangatta Utara	38	13148	874	22	5893	385
Bengalon	25	5511	330	7	1619	121
Teluk Pandan	8	1366	107	6	767	64
Sangatta Selatan	16	3129	195	8	1326	103
Rantau Pulung	10	1551	99	4	572	40
Sangkulirang	22	3181	226	6	1055	87
Kaliorang	10	2167	122	4	670	56
Sandaran	13	1996	141	6	680	58
Kaubun	9	2270	121	6	820	81
Karangan	8	1826	102	4	601	41
Kutai Timur	**249**	**51835**	**3392**	**112**	**19553**	**1522**

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka, 2024

Dilihat dari aspek rasio rata-rata jumlah guru untuk jenjang SD/sederajat dan SMP/sederajat adalah 13 per sekolah sementara untuk SMA/sederajat jumlahnya 17 guru per sekolah. Rasio murid terhadap sekolah untuk SD/sederajat adalah 208 sehingga rata-rata setiap sekolah memiliki 208 murid. Bila dalam sekolah terdapat 6 rombongan belajar artinya setiap rombongan belajar memiliki 34-35 siswa, namun jika terdapat 12 rombongan belajar maka tiap rombongan belajar memiliki 17 murid. Dengan jumlah guru sebanyak 13-14 orang, untuk jenjang SD/sederajat jumlah ini sudah cukup.

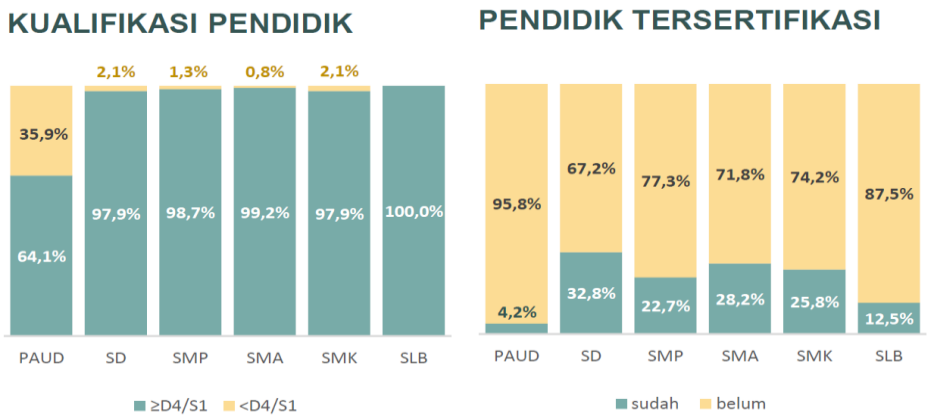
Tabel 2.42 Rasio Jenjang Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023/2024

Jenjang	Murid-Sekolah	Murid-Guru	Guru-Sekolah
SD/Sederajat	208,17	15,28	13,62
SMP/Sederajat	174,58	12,85	13,59

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, 2024

Faktor geografis menjadi faktor yang juga penting untuk dipertimbangkan, meski dalam satu desa minimal satu SD/sederajat dan satu kecamatan minimal terdapat satu SMP/sederajat terpenuhi, namun luasnya geografis Kutai Timur juga perlu menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan. Dalam hal ini terdapat dua hal yang diperhatikan yaitu antara efisiensi dan efektivitas. Jumlah sekolah yang banyak mungkin efektif dengan mempertimbangkan geografis, namun tidak efisien. Sebaliknya, jumlah sekolah yang sedikit (sesuai standar) akan efisien, namun tidak efektif. Hal ini menjadi tantangan dalam pembangunan pendidikan dasar dan menengah di Kutai Timur.

Gambar 2.32 Kualifikasi Pendidik di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023

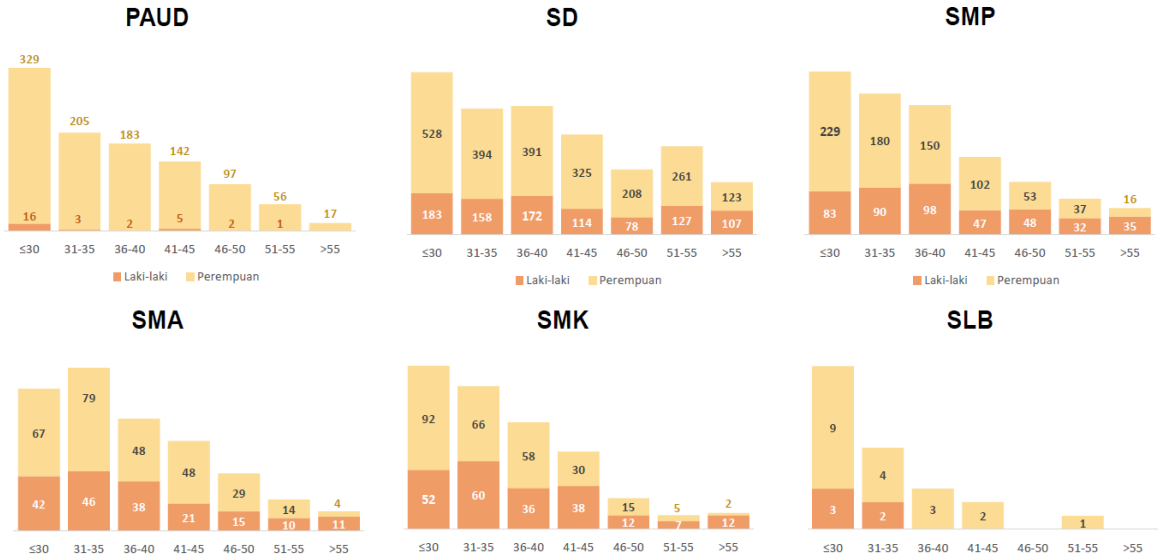


Selain itu kualifikasi pendidik adalah hal lain yang juga penting diperhatikan. Sesuai peraturan yang berlaku pendidik sekurang-kurangnya berijazah sarjana naik S1 maupun D4 (Sarjana Terapan). Di jenjang PAUD masih cukup banyak pendidik yang belum berijazah S1/D4 yaitu 35,9%. Dari sisi sertifikasi sebagai pendidik, masih sangat banyak pendidik yang belum bersertifikat sebagai pendidik sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di semua jenjang pendidikan. Di jenjang SD/sederajat terdapat 67,2% pendidik yang belum bersertifikat dan di jenjang SMP/sederajat terdapat 77,3% yang belum bersertifikat.

Selain pendidikan dan kualifikasinya, penting untuk diperhatikan adalah usia para pendidik. Hal ini untuk mengantisipasi jumlah pendidik atau guru yang memasuki usia pensiun sehingga dapat diantisipasi lebih dini tentang kebutuhan guru. Guru yang sudah berusia di atas 55 tahun untuk SD/sederajat hingga 2023 adalah 230 guru sedang untuk jenjang SMP/sederajat adalah 51 guru. Banyaknya guru yang sudah berusia di atas 55 tahun ini perlu diperhatikan untuk menjaga agar

kebutuhan guru di sekolah tetap dapat terpenuhi, bukan hanya jumlahnya saja namun juga kompetensi pelajaran atau keilmuan.

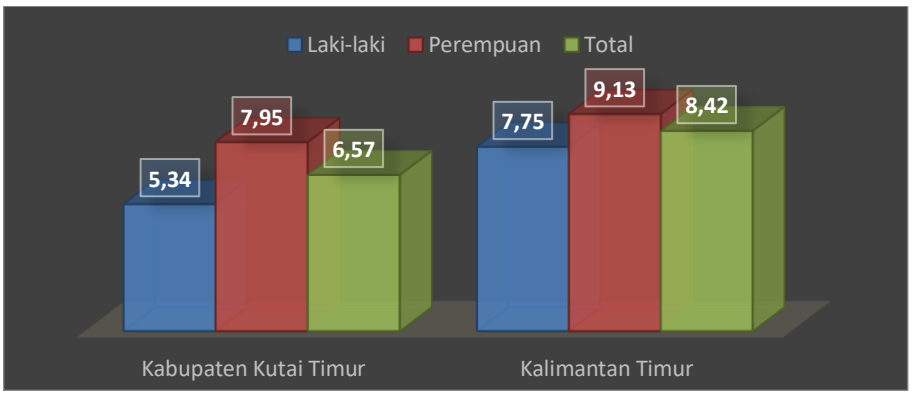
Gambar 2.33 Usia Guru di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023



B. Urusan Kesehatan

Salah satu indikator penting kesehatan adalah angka kesakitan yang menggambarkan banyaknya penduduk yang sakit pada periode tertentu. Berdasarkan data, dapat dilihat bahwa Kabupaten Kutai Timur memiliki tingkat kesakitan yang lebih rendah dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur di semua kategori: laki-laki, perempuan, dan total penduduk. Angka kesakitan di Kutai Timur tercatat 5,34% untuk laki-laki, 7,95% untuk perempuan, dan 6,57% secara total. Sementara itu, Provinsi Kalimantan Timur mencatat angka 7,75% untuk laki-laki, 9,13% untuk perempuan, dan 8,42% secara total.

Gambar 2.34 Angka Kesakitan Tahun 2024 (%)



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Selisih yang cukup signifikan menunjukkan bahwa secara umum, penduduk Kutai Timur mengalami lebih sedikit gangguan kesehatan dibandingkan rata-rata provinsi. Perbedaan ini dapat mencerminkan kondisi lingkungan, akses layanan kesehatan, atau kebiasaan hidup sehat masyarakat lokal yang lebih baik. Namun, hal ini juga bisa dipengaruhi oleh perbedaan sistem pelaporan, cakupan survei, atau kesadaran masyarakat dalam melaporkan gangguan kesehatan.

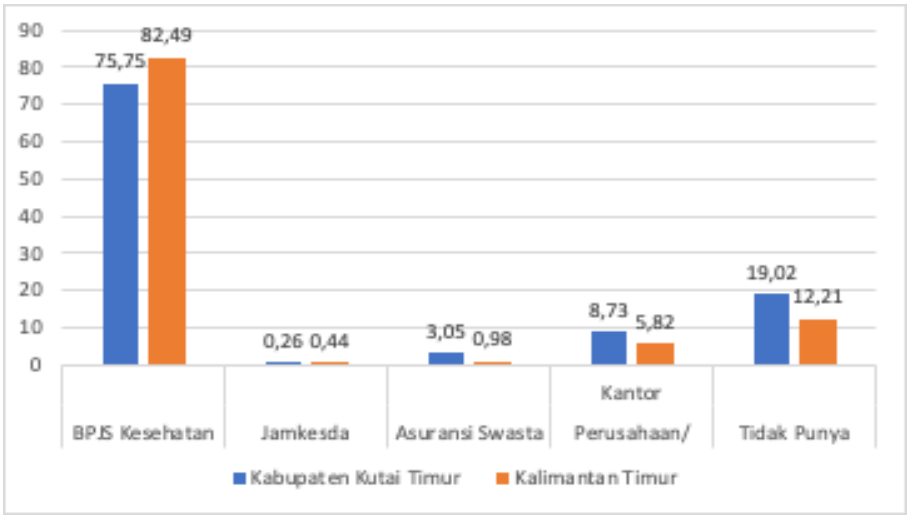
Di kedua wilayah, angka kesakitan perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, yang bisa jadi disebabkan oleh faktor biologis, beban ganda perempuan, atau tingkat kesadaran lebih tinggi dalam mencari pelayanan kesehatan. Di Kutai Timur, selisih antara laki-laki dan perempuan adalah 2,61 poin persentase, sementara di tingkat provinsi selisihnya 1,38 poin. Artinya, ketimpangan angka kesakitan berdasarkan gender di Kutai Timur lebih besar dibandingkan provinsi.

Untuk mengantisipasi kesakitan yang terjadi pada penduduk, penting bagi penduduk untuk memiliki asuransi sehingga penduduk menjadi lebih sejahtera. Berdasarkan data persentase kepemilikan jaminan kesehatan penduduk tahun 2024, mayoritas penduduk tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan, dengan Kabupaten Kutai Timur sebesar 75,75% dan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 82,49%. Meskipun angka di Kutai Timur cukup tinggi, namun masih di bawah rata-rata provinsi sekitar 6,7 persen. Ini menunjukkan bahwa cakupan jaminan kesehatan nasional di Kutai Timur masih bisa ditingkatkan, khususnya untuk menjangkau penduduk di wilayah pedalaman atau rentan secara ekonomi.

Kepemilikan jaminan dari sumber lain seperti Jamkesda, asuransi swasta, dan jaminan kantor/perusahaan masih sangat rendah di Kutai Timur, yaitu Jamkesda hanya 0,26% (lebih rendah dari provinsi: 0,44%), asuransi swasta: 3,05% (lebih tinggi dari provinsi: 0,98%), kantor/perusahaan: 8,73% (lebih tinggi dari provinsi: 5,82%) Artinya, meskipun kontribusi swasta dan dunia usaha di Kutai Timur sedikit lebih baik dibandingkan provinsi, namun jumlahnya masih kecil dibandingkan total penduduk, dan sebagian besar tetap bergantung pada program pemerintah.

Yang cukup menjadi perhatian adalah tingginya persentase penduduk Kutai Timur yang belum memiliki jaminan kesehatan, yaitu 19,02%, dibandingkan hanya 12,21% di tingkat provinsi. Ini mengindikasikan masih adanya kesenjangan akses dan partisipasi dalam sistem jaminan kesehatan, terutama di kalangan masyarakat informal, rentan, atau tinggal di daerah sulit dijangkau.

Gambar 2.35 Kepemilikan Jaminan Kesehatan Penduduk Tahun 2024 (%)



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, 2024

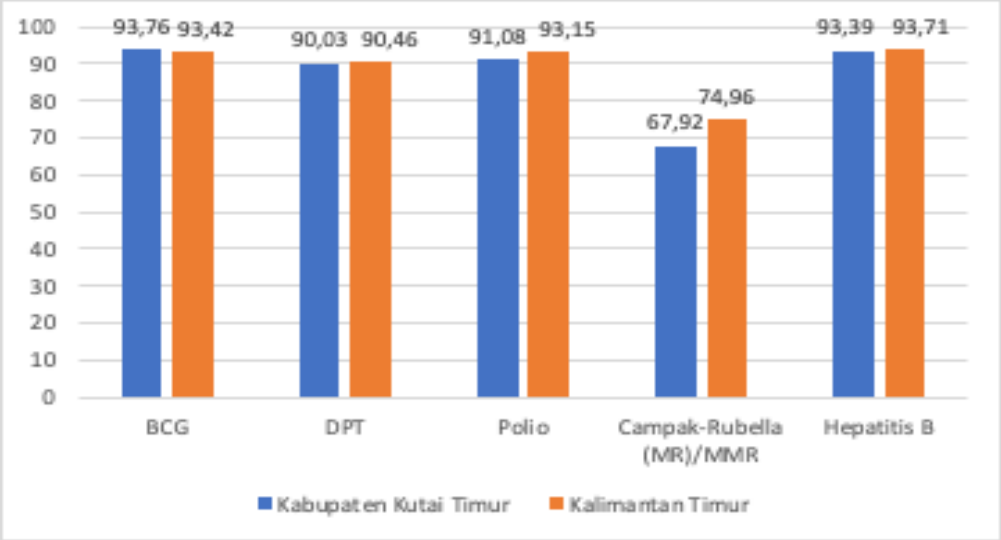
Kebijakan di bidang kesehatan penting untuk dilakukan sejak dini (balita) misal melalui vaksinasi sebagai antisipasi penyakit yang didera di masa mendatang. Vaksinasi yang sering dilakukan untuk balita adalah vaksinasi BCG, DPT, Polio, Campak, dan Hepatitis B. Secara umum, capaian vaksinasi di Kabupaten Kutai Timur hampir setara dengan capaian provinsi, khususnya pada vaksin BCG (93,76%), DPT (90,93%), Polio (91,08%), dan Hepatitis B (93,39%). Seluruh capaian ini berada di atas 90%, yang menunjukkan bahwa program imunisasi dasar di Kutai Timur berjalan dengan baik dan mendekati standar cakupan ideal dari WHO yang merekomendasikan >95%.

Namun, vaksin Campak-Rubella (MR/MMR) menunjukkan capaian relatif rendah, yaitu 67,92% di Kutai Timur, dibandingkan capaian provinsi sebesar 74,96%. Rendahnya cakupan vaksin MR/MMR ini menjadi tantangan khusus, karena vaksin ini penting untuk mencegah wabah penyakit menular yang bisa berakibat fatal pada anak-anak. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan logistik, keraguan masyarakat terhadap vaksin, atau hambatan geografis.

Secara keseluruhan, capaian vaksinasi balita di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan komitmen dan kinerja yang cukup baik, namun masih terdapat celah penting pada jenis vaksin tertentu yang perlu mendapat perhatian serius. Pemerintah daerah bersama dengan puskesmas dan kader posyandu perlu memperkuat edukasi masyarakat, peningkatan akses layanan imunisasi, serta

mendorong pelaksanaan sweeping atau imunisasi kejar untuk mengejar cakupan vaksin yang masih di bawah target.

Gambar 2.36 Tingkat Capaian Vaksinasi Balita Tahun 2024 (%)



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Selain fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, posyandu, dan sebagainya jumlah tenaga kesehatan merupakan faktor penting dalam mendukung berbagai program kesehatan serta upaya mewujudkan SDM yang sehat dan berkualitas. Faktor penting yang perlu diperhatikan adalah rasio kecukupan serta penyebarannya. Jumlah kesehatan yang cukup namun tidak merata penyebarannya juga menjadi permasalahan, terlebih bagi daerah yang secara geografis luas seperti Kutai Timur.

Di tahun 2023 jumlah tenaga medis di Kutai Timur sebanyak 281, terbanyak ke 4 di Kalimantan Timur. Meski demikian, jika dibagi dengan jumlah penduduk maka rasio jumlah penduduk terhadap tenaga medis mencapai 1.621 yang berarti 1 tenaga medis melayani 1.621 penduduk. Rasio ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan standar 1:1.000 dan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan menempati urutan tertinggi ke-3 di Kalimantan Timur. Untuk tenaga keperawatan dan kebidanan rasio di Kutai Timur masing-masing 1:380 dan 1:592. Jumlah tenaga medis ini juga perlu diimbangi dengan jumlah fasilitas kesehatan yang ada. Kondisi geografis Kutai Timur menjadi tantangan tersendiri untuk kebijakan dan strategi bidang kesehatan ini.

Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan merupakan aspek penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat melalui layanan kesehatan. Untuk SDM tenaga medis, menurut standar WHO dan Kementerian Kesehatan, satu dokter melayani paling banyak 1.000 orang. Dengan jumlah tenaga medis sebanyak 314 di tahun 2024 dan jumlah penduduk 462.990, maka rasio jumlah penduduk per tenaga medis sebesar 1.472 yang berarti pada tahun 2024 satu tenaga medis melayani 1.472 orang; jauh lebih besar dibandingkan standar yang ada yaitu 1:1.000. Demikian pula dengan rasio untuk tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, dan lainnya. Pertambahan jumlah penduduk perlu diantisipasi dengan pertambahan sarana dan prasarana kesehatan agar layanan kesehatan penduduk tetap berjalan optimal. Aspek penyebaran dan pemerataan juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan sehingga layanan kesehatan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.

Tabel 2.43 Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk di Kutai Timur 2024

Tenaga Medis	Psikologi Klinis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Tenaga Keterapian Fisik
1.474	462.990	377	577	2.194	4.495	12.184	10.065	20.130

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2025, diolah

Dari aspek fasilitas kesehatan yang ada, di setiap kecamatan telah memiliki Puskesmas dan jumlah rumah sakit cukup banyak. Posyandu aktif sebanyak 268 yang tersebar di berbagai desa. Dengan jumlah desa sebanyak 139 berarti rata-rata setiap desa memiliki 2 Posyandu. Melihat sarana dan prasarana kesehatan yang ada, meski mungkin belum dapat dikatakan ideal, namun dipandang cukup dengan melihat rasio yang ada dan relatif cukup baik dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur. Saat ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah jumlah tenaga medis serta penyebarannya untuk lebih memudahkan masyarakat dalam akses kesehatan.

Tabel 2.44 Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun 2023 dan 2024

Kabupaten/Kota	Puskesmas Rawat Inap 2024	Puskesmas Non Rawat Inap 2024	Rumah Sakit Umum 2024	Posyandu Aktif 2023	Apotek 2023
Paser	9	10	2	348	58
Kutai Barat	14	5	3	214	46
Kutai Kartanegara	13	19	3	751	140

Kabupaten/Kota	Puskesmas Rawat Inap 2024	Puskesmas Non Rawat Inap 2024	Rumah Sakit Umum 2024	Posyandu Aktif 2023	Apotek 2023
Kutai Timur	18	3	8	**268**	**88**
Berau	10	11	2	270	72
Penajam Paser Utara	9	2	3	268	57
Mahakam Ulu	6	–	2	50	13
Balikpapan	7	20	11	1309	212
Samarinda	2	24	10	618	355
Bontang	–	6	5	120	25

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, 2024 dan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2025

Berdasarkan data BPS Kabupaten Kutai Timur, pada tahun 2024 jumlah Puskesmas di Kutai Timur sebanyak 21 yang tersebar secara merata di masing-masing kecamatan. Terdapat tiga kecamatan yang memiliki Puskesmas lebih dari satu yaitu Kecamatan Muara Wahau, Sangatta Utara, serta Kecamatan Bengalon. Sangatta utara meski memiliki jumlah penduduk terbanyak hanya memiliki 2 Puskesmas namun kecamatan ini memiliki klinik pratama terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Dari sisi Posyandu, jumlah Posyandu tahun 2024 adalah sebanyak 301 dengan jumlah terbanyak ada di Kecamatan Sangatta Utara yaitu 53 Posyandu. Meski dari sisi jumlah semua kecamatan memiliki Puskesmas dan Posyandu, namun perbedaan luas geografis serta jumlah penduduk menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan sarana kesehatan karena berkaitan dengan akses masyarakat terhadap sarana kesehatan tersebut. Selain itu, jumlah apotek juga terlihat belum merata antarwilayah sehingga menyebabkan akses terhadap keterjangkauan obat menjadi tantangan yang perlu dipertimbangkan.

Tabel 2.45 Sarana Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

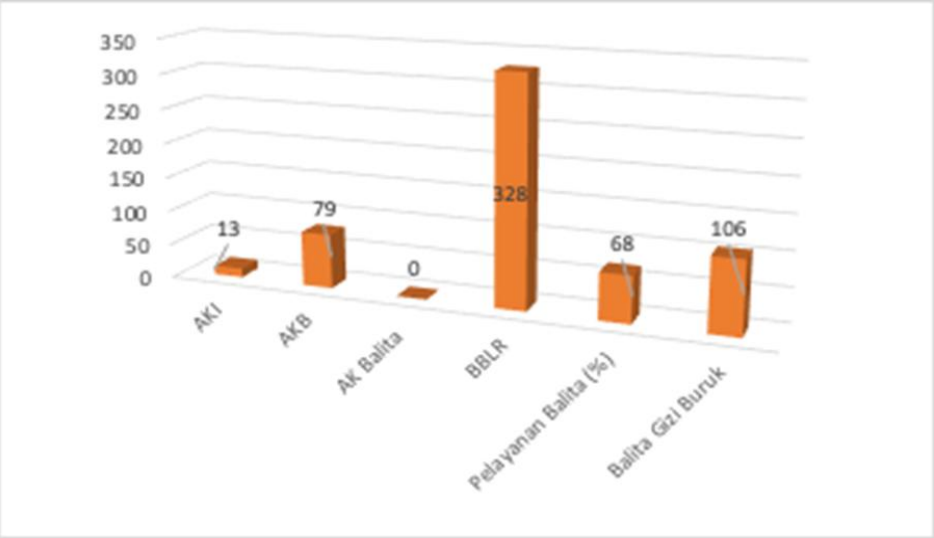
Kecamatan	Puskesmas	Klinik Pratama	Posyandu	Apotek
Muara Ancalong	1	3	19	1
Busang	1	2	8	–
Long Mesangat	1	–	10	–
Muara Wahau	2	2	18	1
Telen	1	2	8	–
Kongbeng	1	2	12	1
Muara Bengkal	1	1	16	4
Batu Ampar	1	1	10	–

Kecamatan	Puskesmas	Klinik Pratama	Posyandu	Apotek
Sangatta Utara	2	16	53	4
Bengalon	2	7	34	3
Teluk Pandan	1	2	18	2
Sangatta Selatan	1	1	26	3
Rantau Pulung	1	–	9	2
Sangkulirang	1	4	19	1
Kaliorang	1	3	10	2
Sandaran	1	2	13	–
Kaubun	1	–	8	2
Karangan	1	4	10	–
Kutai Timur	**21**	**52**	**301**	**26**

Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka 2025

Kesehatan masyarakat perlu diperhatikan sejak lahir hingga dewasa. Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2023 di Kabupaten Kutai Timur sebanyak 79 dengan Angka Kematian Ibu (AKI) sebanyak 13. Meskipun dibandingkan dengan daerah lain hal ini bukanlah yang terburuk namun perlu upaya preventif agar semakin kecil melalui berbagai program yang melibatkan bukan saja balita namun juga ibu. Bayi dengan berat lahir rendah (BBLR) berjumlah 328 dan balita dengan kasus gizi buruk mencapai 106. Untuk angka balita gizi buruk ini cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Intensifikasi dan ekstensifikasi pelayanan balita dan ibu perlu diperhatikan dengan dukungan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai.

Gambar 2.37 Kondisi Kesehatan Balita Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, 2024

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Infrastruktur jalan merupakan salah satu bidang Pekerjaan Umum yang sangat penting. Jalan merupakan salah satu sarana yang menjadi media penting dalam konektivitas antarwilayah di Kutai Timur. Konektivitas akan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat antarwilayah semakin lancar termasuk aspek produksi, konsumsi, maupun distribusi. Panjang jalan di Kutai Timur pada tahun 2021 mencapai 1.649,76 km dan dari panjang jalan tersebut 1.105,77 km atau 67,03% merupakan jalan kabupaten. Di tahun 2022 panjang jalan naik menjadi 1.681,58 km yang disebabkan karena pertambahan jalan kabupaten; namun di tahun 2023 panjang kabupaten turun menjadi 1.127,09. Penurunan panjang jalan kabupaten diikuti dengan kenaikan jalan negara dari 387,54 km menjadi 390,76 km serta jalan provinsi dari 156,45 km menjadi 159,38 km. Penambahan panjang jalan negara dan jalan provinsi ini tergolong kecil, masing-masing hanya bertambah sekitar 3 km.

Tabel 2.46 Status Jalan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	2020	2021	2022	2023	2024
Negara	387,54	387,54	387,54	390,76	409,15
Provinsi	156,45	156,45	156,45	159,38	159,38
Kabupaten	1.105,77	1.105,77	1.137,59	1.127,09	1.128
Jumlah	**1.649,76**	**1.649,76**	**1.681,58**	**1.677,23**	**1.696,53**

Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka 2025 dan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2025

Tabel 2.47 Kondisi Jalan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2024

Kondisi Jalan	2021	2022	2023	2024
Baik	152	234,84	243,403	377,63
Sedang	429,28	70,28	69,418	24,03
Rusak	366,64	27,66	74,049	6,60
Rusak Berat	157,85	804,76	740,22	719,58
Jumlah	**1.105,77**	**1.137,54**	**1.127,09**	**1.128**

Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka 2025

Tabel 2.48 Kondisi Permukaan Jalan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024

Jenis Permukaan Jalan	2020	2021	2022	2023	2024
Aspal	207,41	237,12	248,61	230,79	204,39
Kerikil	568,74	527,7	521,15	0,59	1,47
Tanah	241,56	247,66	217,32	730,96	668,01
Lainnya	88,06	93,29	150,5	164,75	253,99
Jumlah/Total	**1.105,77**	**1.105,77**	**1.137,58**	**1127,09**	**1.128**

Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka 2025

Dari sisi kondisi jalan, pada tahun 2023 dari 1.127,09 km jalan kabupaten jalan dengan kondisi baik hanya 243,402 km atau hanya 21,59% sementara yang rusak berat mencapai 740,22 km atau 65,68%. Dari sisi permukaan jalan, tahun 2023 hanya 230,79 km jalan yang memiliki permukaan aspal sedang 730,96 km memiliki permukaan tanah.

Tahun 2024 total panjang jalan belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Perubahan yang signifikan terjadi pada kondisi jalan dalam keadaan Baik, yang meningkat tajam menjadi 377,63 km. Peningkatan kondisi jalan dalam keadaan Baik tersebut menjadikan kondisi jalan yang Sedang, Rusak, dan Rusak Berat menjadi berkurang. Hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang cukup besar di tahun 2024, meskipun masih banyak jalan dalam kondisi yang Rusak Berat.

Dengan demikian banyaknya jalan yang rusak atau rusak berat lebih banyak disebabkan karena permukaan jalan yang masih berupa tanah. Kondisi geografis Kutai Timur menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan konektivitas antarwilayah kecamatan maupun titik penting yang akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Konektivitas ini penting dalam rangka mendorong percepatan pemerataan pembangunan melalui aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Akses masyarakat akan semakin cepat dan mudah sehingga kegiatan ekonomi antarwilayah akan semakin berkembang.

Dari sisi kondisi jalan, pada tahun 2023 dari 1.127,09 km jalan kabupaten jalan dengan kondisi baik hanya 243,402 km atau hanya 21,59% sementara yang rusak berat mencapai 740,22 km atau 65,68%. Dari sisi permukaan jalan, tahun 2023 hanya 230,79 km jalan yang memiliki permukaan aspal sedang 730,96 km memiliki permukaan tanah.

Tahun 2024 total panjang jalan belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Perubahan yang signifikan terjadi pada kondisi jalan dalam keadaan Baik, yang meningkat tajam menjadi 377,63 km. Peningkatan kondisi jalan dalam keadaan Baik tersebut menjadikan kondisi jalan yang Sedang, Rusak, dan Rusak Berat menjadi berkurang. Hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang cukup besar di tahun 2024, meskipun masih banyak jalan dalam kondisi yang Rusak Berat.

Dengan demikian banyaknya jalan yang rusak atau rusak berat lebih banyak disebabkan karena permukaan jalan yang masih berupa tanah. Kondisi geografis Kutai Timur menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan konektivitas antarwilayah kecamatan maupun titik penting yang akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Konektivitas ini penting dalam rangka mendorong percepatan pemerataan pembangunan melalui aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Akses masyarakat akan semakin cepat dan mudah sehingga kegiatan ekonomi antarwilayah akan semakin berkembang.

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kondisi perumahan masyarakat merupakan salah satu indikator yang menunjukkan derajat kesejahteraan Masyarakat. Terdapat beberapa indikator yang menggambarkan kondisi perumahan Masyarakat seperti misal kondisi lantai rumah baik dari sisi jenis lantai maupun luasnya. Dari sisi luasnya Sebagian besar penduduk memiliki lantai bangunan yang cukup luas. Sebanyak 47,45% penduduk memiliki tempat tinggal dengan luas lantai 50-99m^2. Bila rumah tangga memiliki 3-4 anggota keluarga, berarti rata-rata luas per kapita sekitar 15-25m^2 dan dari sisi luas lantai hal ini dapat dikatakan layak. Rumah dengan luas lantai di bawah 50m^2 di Kutai Timur sebanyak 26,82%; sedikit lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.49 Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal (M^2) Tahun 2024 (%)

Kabupaten/Kota	< 50	50-99	100-149	150+	Jumlah
Kabupaten Paser	33,88	48,89	12,44	4,79	100
Kabupaten Kutai Barat	15,8	49,97	20,22	14,01	100
Kabupaten Kutai Kartanegara	21,11	50,47	17,6	10,82	100
Kabupaten Kutai Timur	**26,82**	**47,45**	**16,0**	**9,73**	**100**
Kabupaten Berau	30,34	49,49	14,53	5,64	100
Kabupaten Penajam Paser Utara	23,15	56,57	15,88	4,41	100
Kabupaten Mahakam Ulu	30,31	51,55	14,37	3,77	100
Kota Balikpapan	36,73	39,77	11,53	11,98	100
Kota Samarinda	23,56	41,74	18,01	16,68	100
Kota Bontang	17,92	42,55	20,98	18,55	100
Kalimantan Timur	**26,3**	**46,02**	**16,07**	**11,61**	**100**

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Dalam aspek perumahan penduduk, hal yang juga perlu dipertimbangkan adalah fasilitas kesehatan misalnya fasilitas buang air besar serta akses air minum. Untuk fasilitas buang air besar masih terdapat 3,62% rumah penduduk yang tidak memiliki fasilitas buang air besar. Sebanyak 94,96% memiliki fasilitas buang besar yang dipergunakan sendiri, sementara 1,32% menggunakan fasilitas buang air besar bersama dengan rumah tangga tertentu. Masih terdapatnya rumah yang tidak memiliki fasilitas MCK tersebut perlu diperhatikan mengingat dalam perumahan hal tersebut menjadi salah satu fasilitas pokok.

Tabel 2.50 Kepemilikan dan Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar Tahun 2024 (%)

Kabupaten/Kota	Sendiri	Bersama Rumah Tangga Tertentu	MCK Umum	Tidak Menggunakan	Tidak Ada Fasilitas	Jumlah
Kab. Paser	95,93	1,5	0,97	–	1,6	100
Kab. Kutai Barat	92,44	2,89	4,66	–	–	100
Kab. Kutai Kartanegara	96,99	1,23	1,77	–	–	100
Kab. Kutai Timur	**94,96**	**1,32**	**NA**	**–**	**3,62**	**100**
Kab. Berau	97,13	1,48	–	–	1,39	100
Kab. Penajam Paser Utara	93,75	3,36	2,24	NA	NA	100
Kab. Mahakam Ulu	92,22	4,55	1,46	NA	NA	100
Kota Balikpapan	96,78	2,68	NA	–	NA	100
Kota Samarinda	96,41	3,39	NA	–	–	100
Kota Bontang	98,52	1,1	–	–	NA	100
Kalimantan Timur	**96,24**	**2,19**	**0,86**	**NA**	**0,71**	**100**

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Masalah pemukiman kumuh merupakan masalah yang banyak terjadi di berbagai daerah termasuk Kutai Timur. Di Kutai Timur pemukiman kumuh masih terdapat 7 kecamatan dan 14 desa. Desa dengan pemukiman kumuh terbanyak adalah desa yang berada di Kecamatan Sangatta Selatan yaitu 5 desa. Selain itu, masalah lain kaitannya dengan pemukiman adalah masih banyaknya pemukiman di bantaran sungai. Terdapat 16 desa yang memiliki pemukiman di bantaran sungai, meski hal itu tidak dalam arti pemukiman kumuh. Kecamatan Telen, Muara Bengkal,

Bengalon, dan Kecamatan Sandaran merupakan kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak pemukiman di bantaran sungai.

Tabel 2.51 Sebaran Pemukiman Kumuh di Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Pemukiman Kumuh	Pemukiman di Bantaran Sungai
Muara Ancalong	-	4
Busang	-	-
Long Mesangat	-	-
Muara Wahau	-	5
Telen	1	8
Kongbeng	-	2
Muara Bengkal	1	7
Batu Ampar	-	1
Sangatta Utara	1	2
Bengalon	1	9
Teluk Pandan	3	3
Sangatta Selatan	5	5
Rantau Pulung	-	2
Sangkulirang	-	5
Kaliorang	-	2
Sandaran	-	7
Kaubun	-	-
Karangan	2	2
Kutai Timur	**14**	**64**

Sumber: Potensi Desa Kabupaten Kutai Timur 2024

E. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Iklim investasi merupakan kebijakan, institusional, dan kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap tingkat pengembalian dan risiko suatu investasi. Dengan Bahasa lain, iklim investasi menggambarkan kondisi daerah yang mampu mendukung pelaksanaan investasi berjalan dengan aman dan stabil. Untuk mendukung iklim yang kondusif untuk investasi, diperlukan dua aspek utama, yaitu pertama lingkungan yang aman dan stabil, tidak bergejolak, tidak ada permasalahan sosial dan kriminalitas dengan intensitas tinggi. Kedua, kebijakan berupa peraturan perundangan yang memberikan kemudahan semua pihak dalam melakukan investasi.

Dari sisi situasi dan kondisi lingkungan, di Kutai Timur kondisinya cukup stabil. Jumlah kriminalitas tergolong rendah, namun yang perlu diperhatikan dan

diwaspadai adalah penyelesaian tindak kriminal. Tahun 2023 sebanyak 77% Tindakan kriminal telah diselesaikan dan angka ini cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur. Tingginya penyelesaian Tindakan kejahatan menunjukkan respons dan komitmen pemerintah daerah Bersama pihak berwenang dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Tahun 2024 persentase tindak kejahatan yang mampu diselesaikan naik tajam menjadi 90%. Hal ini menunjukkan komitmen pemerindah daerah bersama aparat penegak hukum untuk menjaga suasana kondusif sehingga mampu mendorong pembangunan Kutai Timur dan mampu memberikan kepercayaan tinggi masyarakat luar terutama calon investor terhadap Kutai Timur yang tertib dan aman.

Di sisi lain, di tahun 2024 jumlah demonstrasi di Kutai Timur juga tergolong rendah yaitu hanya 5 demonstrasi. Lima demonstrasi tersebut adalah 1 demonstrasi politik, 2 demonstrasi masalah ekonomi, dan 2 demonstrasi masalah sosial. Jumlah demonstrasi yang relatif sedikit ini semakin mendukung iklim Kutai Timur yang kondusif serta komitmen pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menciptakan iklim yang mendorong iklim investasi.

Tabel 2.52 Penyelesaian Tindak Kejahatan (%)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1. Paser	86	79	78	74	59
2. Kutai Barat	90	95	55	77	77
3. Kutai Kartanegara	99	97	90	89	89
4. Kutai Timur	**78**	**62**	**82**	**77**	**90**
5. Berau	74	95	86	68	60
6. Penajam Paser Utara	84	89	87	86	77
7. Mahakam Ulu	–	...		34	51
8. Balikpapan	91	78	74	51	62
9. Samarinda	97	91	80	66	65
10. Bontang	78	102	79	47	34
Kalimantan Timur	**87**	**85**	**80**	**67**	**66**

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka, 2025

Tabel 2.53 Kegiatan Demonstrasi Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Demo Politik	Demo Ekonomi	Demo Sosial	Jumlah
1. Paser	–	3	1	4
2. Kutai Barat	–	–	–	–

Kabupaten/Kota	Demo Politik	Demo Ekonomi	Demo Sosial	Jumlah
3. Kutai Kartanegara	3	6	4	13
4. Kutai Timur	**1**	**2**	**2**	**5**
5. Berau	–	1	3	4
6. Penajam Paser Utara	–	–	–	–
7. Mahakam Ulu				
8. Balikpapan	–	5	6	11
9. Samarinda	2	3	4	9
10. Bontang	–	–	1	1
Kalimantan Timur	**6**	**20**	**21**	**47**

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka, 2025

F. Urusan Sosial

Masalah sosial merupakan masalah yang selalu ada di setiap daerah dalam berbagai bentuk seperti anak terlantar, penyandang disabilitas, tuna sosial, dan korban bencana. Penanganan masalah sosial menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah yang menjadi bagian dari pelayanan dasar. Masalah sosial yang tidak segera ditangani dapat memicu terjadinya masalah lainnya. Pemerintah daerah berupaya untuk melakukan penanganan masalah sosial melalui berbagai program antara lain bantuan sosial (Bansos) pangan.

Di Kutai Timur jumlah rumah tangga penerima Bansos pangan pada tahun 2023 mencapai 70.560 dari 77.240 yang direncanakan, atau terealisasi sebesar 91,35%. Di tahun 2024 jumlah rumah tangga penerima Bansos ini menurun cukup drastis menjadi 46.425 dari 50.018 yang direncanakan atau realisasinya turun sebesar -7,18%. Penurunan ini kemungkinan disebabkan karena keterbatasan alokasi anggaran, bukan karena jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin Kutai Timur tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan 2023 dari 37.040 menjadi 37.110, meski tingkat kemiskinan 2024 mengalami penurunan dibandingkan 2023 dari 9,06% menjadi 8,81%.

Tabel 2.54 Jumlah Rumah Tangga Penerima Bansos Pangan Tahun 2021-2024

Kabupaten/ Kota	Persentase Realisasi			
	2021	2022	2023	2024
Paser	94,52	82,09	92,68	93,53
Kutai Barat	106,59	85,15	90,79	91,39
Kutai Kartanegara	99,29	79,89	90,04	92,77

Kabupaten/ Kota	Persentase Realisasi			
	2021	2022	2023	2024
Kutai Timur	**101,36**	**88,08**	**91,35**	**92,82**
Berau	105,72	92,87	95,56	95,94
Penajam Paser Utara	116,37	92,07	93,82	94,41
Mahakam Ulu	100,00	77,58	79,12	77,98
Kota Balikpapan	94,24	81,10	90,95	92,70
Kota Samarinda	93,24	82,74	92,46	93,69
Kota Bontang	92,20	88,71	84,40	88,37
Kalimantan Timur	**98,96**	**84,01**	**91,36**	**92,91**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, di mana capaian indikator kinerja untuk urusan Sosial pada tahun 2023 adalah: a) Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mendapatkan Jaminan dan Perlindungan Sosial Kelompok Maupun Perorangan sebesar 64,28%; b) Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan sebesar 20%; c) Persentase PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial sebesar 100%; d) Persentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar 90,87%; e) Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar 100%.

G. Urusan Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan masalah penting yang menjadi salah satu tujuan pembangunan daerah. Pemerintah daerah akan berupaya Pembangunan yang dilaksanakan mampu mendorong terwujudnya inklusivitas antara lain dengan semakin terbukanya kesempatan kerja. Hal ini akan menjadikan semakin kecilnya Tingkat pengangguran yang pada akhirnya berdampak pada pengurangan Tingkat kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Tingkat pengangguran merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan Angkatan kerja.

Tingkat pengangguran di Kutai Timur tahun 2023 tercatat 5,93% dan tahun 2024 ini turun menjadi 5,76%. Angka pengangguran baik 2023 maupun 2024 ini

lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur. Dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur, tingkat pengangguran di Kutai Timur tahun 2024 ini adalah tertinggi ketiga setelah Kota Bontang dan Kota Balikpapan. Selama 2018-2024 tingkat pengangguran di Kutai Timur cenderung stagnan di kisaran 5%. Meskipun Kutai Timur memiliki PDRB serta PDRB per kapita yang tinggi, bahkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun hal tersebut belum secara signifikan berdampak pada pengurangan Tingkat pengangguran seperti yang diharapkan. Perluasan kesempatan kerja menjadi prioritas penting untuk dilaksanakan dengan memperkuat sektor non pertambangan dan penggalian.

Dari sisi pendidikannya, Tingkat pengangguran Kutai Timur tahun 2024 didominasi oleh mereka yang berpendidikan SMA/sederajat (7,64%) dan yang terkecil adalah lulusan perguruan tinggi (2,23%). Dari sisi jenis kelaminnya Tingkat pengangguran Kutai Timur tahun 2024 didominasi oleh Perempuan (7,39%) sedangkan laki-laki hanya 5,06%. Dengan demikian karakteristik pengangguran di Kutai Timur adalah para lulusan SMA/sederajat yang berjenis kelamin Perempuan. Banyaknya Perempuan yang berstatus pengangguran bisa dilatarbelakangi oleh faktor sosial budaya tentang status Perempuan, namun bisa pula dimaknai jenis atau karakteristik pekerjaan di Kutai Timur yang memang lebih banyak membutuhkan laki-laki dibandingkan Perempuan. Pengangguran juga dapat disebabkan karena ketidaksinkronan antara jenis/karakteristik pekerjaan yang diperlukan dengan kompetensi tenaga kerja yang tersedia. Hal ini memerlukan kebijakan dan strategi yang integral, bukan parsial yang mampu memperkecil gap atau kesenjangan di pasar tenaga kerja dengan melibatkan para pemangku kepentingan *(stakeholders)*. Pengembangan ekonomi wilayah juga diharapkan dapat dilakukan untuk memperkecil Tingkat pengangguran.

Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan dari 5,45 pada tahun 2020 menjadi 5,76 pada tahun 2024. Hal ini disebabkan perpindahan penduduk dari berbagai daerah ke Kabupaten Kutai Timur semakin tinggi setiap tahunnya. Ini mengakibatkan pertumbuhan angkatan kerja tidak mengalami pertumbuhan secara alami. Namun di satu sisi perkembangan lapangan pekerjaan tidak seimbang dengan angkatan kerja yang tersedia. Selain itu, bonus

demografi yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur belum mampu dimanfaatkan untuk menciptakan angkatan kerja yang memiliki kemampuan untuk bersaing dalam lapangan kerja formal.

Tabel 2.55 Tingkat Pengangguran Terbuka dan TPAK Tahun 2020-2024 (%)

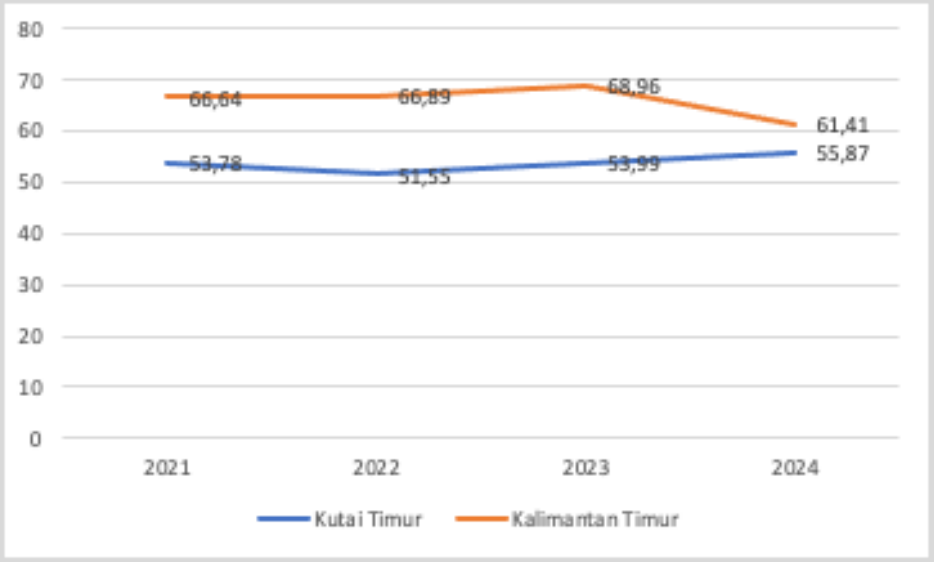
Tahun	TPT		TPAK	
	Kutai Timur	Kalimantan Timur	Kutai Timur	Kalimantan Timur
2020	5,45	6,87	68,96	65,50
2021	5,35	6,83	67,97	65,49
2022	6,48	5,71	67,78	64,73
2023	5,93	5,31	66,22	65,57
2024	5,76	5,14	66,78	66,31

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

H. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan merupakan indikator yang menunjukkan keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan daerah melalui berbagai peran. Pemberdayaan perempuan menggambarkan adanya kesetaraan gender. Salah satu ukuran yang menggambarkan derajat pemberdayaan Perempuan adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) yaitu indikator yang digunakan untuk mengukur keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. IPG mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan dalam bidang-bidang seperti parlemen, pejabat senior, manajer, profesional, teknis, dan pendapatan. IPG menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Gambar 2.38 Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Tahun 2021-2024



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

IPG Kutai Timur selama 3 tahun terakhir yaitu dari 2022-2024 menunjukkan kenaikan dari 51,55; 53,99; dan di tahun 2024 menjadi 55,86 sementara pada periode sebelumnya yaitu 2021-2022 sempat menunjukkan penurunan. IPG Kutai Timur tahun 2024 merupakan terendah ketiga se-Kalimantan Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa keterlibatan perempuan di Kutai Timur masih kurang dibandingkan daerah lain baik keterlibatan dalam ekonomi, politik, maupun jabatan-jabatan publik serta karir. IPG Kutai Timur juga masih jauh di bawah IPG Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 61,41 di tahun 2024.

I. Urusan Pangan

Aspek penting dalam urusan pangan adalah berkaitan dengan posisi penduduk yang mengalami ketidakcukupan pangan. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan adalah proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi energi di bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat dan aktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan pada tahun tertentu. Jumlah Penduduk yang Mengalami Ketidakcukupan Konsumsi Pangan adalah Jumlah penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi energi minimum untuk hidup sehat dan aktif di suatu wilayah (nasional atau provinsi atau kab/kota) pada tahun tertentu

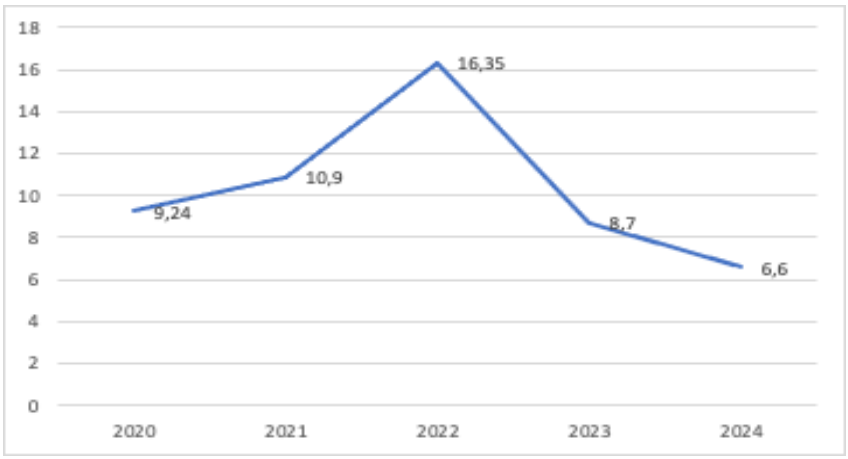
Dengan demikian prevalensi ketidakcukupan pangan menggambarkan persentase penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan energi minimum dari konsumsi pangannya, biasanya dengan ambang batas 2.100 kilokalori per

kapita per hari. Semakin tinggi angka angka prevalensi ketidakcukupan pangan berarti semakin buruk, karena menunjukkan semakin banyak penduduk yang mengalami kekurangan pangan dari sisi jumlah energi yang dikonsumsi, demikian pula sebaliknya.

Prevalensi ketidakcukupan pangan Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2024 tercatat sebesar 6,6%, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Kalimantan Timur yang sebesar 7,51%. Angka ini juga menempatkan Kutai Timur lebih baik dibandingkan sebagian besar kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur, seperti Penajam Paser Utara (8,2%), Mahakam Ulu (8,18%), dan Kutai Kartanegara (8,06%), kecuali Kota Balikpapan yang memiliki nilai lebih rendah, yaitu 5,9%.

Capaian ini menunjukkan bahwa Kutai Timur memiliki kinerja yang relatif lebih baik dalam pengendalian kerawanan pangan dibandingkan provinsi dan mayoritas daerah lainnya. Rendahnya IKP berarti proporsi penduduk yang mengalami kesulitan dalam memperoleh pangan yang cukup secara energi lebih kecil. Ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memastikan ketersediaan, akses, dan stabilitas pangan—melalui intervensi seperti peningkatan produksi lokal, penguatan distribusi, dan program perlindungan sosial. Dengan kata lain, Kutai Timur lebih efektif dalam menjaga ketahanan pangan masyarakatnya dibandingkan sebagian besar wilayah lain di Kaltim.

Gambar 2.39 Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik

J. Urusan Pertanahan

Pertanahan merupakan hal yang berpotensi tinggi menimbulkan konflik atau sengketa baik antar individu maupun kelompok. Geografis Kutai Timur yang sangat luas berpotensi terhadap berkembangnya penguasaan atas tanah secara sepihak oleh individu maupun kelompok masyarakat. Oleh karena itu masalah pertanahan yang memerlukan prioritas adalah masalah pengelolaan administrasi pertanahan. Persoalan sengketa tanah merupakan peristiwa yang cukup menonjol di Kutai Timur. Persoalan tersebut semakin berkembang dengan adanya program transmigrasi, sehingga pengelolaan tanah transmigrasi memerlukan antisipasi agar tidak berpotensi menimbulkan sengketa atau konflik. Penyelesaian masalah yang muncul mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Kawasan transmigrasi di Kutai Timur memiliki peran penting dalam pemerataan pembangunan, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan aktivitas ekonomi lainnya. Namun, tantangan seperti konflik lahan, infrastruktur yang belum memadai, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi menjadi merupakan tantangan yang memerlukan strategi dan kebijakan yang tepat. Untuk itu keterlibatan unsur kecamatan dan desa menjadi sangat penting dalam administrasi pertanahan.

K. Urusan Lingkungan Hidup

Di Kabupaten Kutai Timur terdapat dua pusat kegiatan yaitu PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota, dengan Sangatta sebagai wilayah PKW di Kutai Timur serta kawasan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu a) kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan Industri Hijau dan pusat pertanian, perikanan, dan jasa yang melayani skala Kabupaten atau beberapa kecamatan; b) kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi yang melayani skala Kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau c) kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi ekonomi kelautan lokal. Wilayah yang berfungsi menjadi kawan PKL adalah wilayah Muara Bengkal, Muara Wahau, dan Sangkulirang.

Pengembangan kawasan di Kutai Timur harus memperhatikan aspek lingkungan hidup. Saat ini terdapat 11 isu lingkungan di Kutai Timur yang menjadi perhatian utama meliputi kebencanaan (banjir, tanah longsor, dan kekeringan),

kebakaran hutan, konflik tata ruang, dan optimalisasi ruang terbuka hijau. Selain itu, penting pula diperhatikan eksploitasi tambang, degradasi pesisir (kerusakan hutan mangrove), pencemaran air permukaan, pencemaran udara, pengelolaan sampah dan limbah, ketahanan pangan, serta kualitas sumber daya manusia (SDM). Aspek lingkungan hidup merupakan hal yang kompleks sehingga perlu kebijakan dan strategi yang bersifat holistik dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup. Hilirisasi sumber daya alam di Kutai Timur penting untuk dilakukan dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup.

Dari sebaran pencemaran lingkungan terdapat 30 desa yang memiliki kasus pencemaraan air, 5 desa pencemaran tanah, dan 24 desa pencemaran udara. Pencemaran tersebut muncul karena aktivitas rumah tangga dan kegiatan masyarakat. Untuk itu diperlukan kesadaran tinggi masyarakat dalam tanggung jawab memelihara lingkungan hidup.

Tabel 2.56 Sebaran Pencemaran di Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Pencemaran Air	Pencemaran Tanah	Pencemaran Udara	Tidak Ada
Muara Ancalong	-	-	-	10
Busang	1	1	1	5
Long Mesangat	-	-	6	1
Muara Wahau	7	-	1	4
Telen	1	-	1	6
Kongbeng	2	-	-	6
Muara Bengkal	3	2	2	5
Batu Ampar	1	-	-	6
Sangatta Utara	-	-	1	3
Bengalon	6	2	8	6
Teluk Pandan	-	-	-	7
Sangatta Selatan	1	-	-	4
Rantau Pulung	-	-	-	9
Sangkulirang	2	-	-	14
Kaliorang	2	-	1	4
Sandaran	-	-	1	8
Kaubun	4	-	2	3
Karangan	-	-	-	7
Kutai Timur	**30**	**5**	**24**	**108**

Sumber : Dokumen IKLH 2024

L. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan merupakan salah layanan yang berkaitan dengan semua aspek data kependudukan. Administrasi kependudukan merupakan hal yang penting dalam rangka untuk mengidentifikasi jumlah dan kondisi kependudukan di Kutai Timur. Hal ini disebabkan karena aspek kependudukan merupakan sesuatu yang sangat dinamis, baik menyangkut kelahiran, kematian, atau migrasi.

Secara umum pelayanan administrasi kependudukan di antaranya meliputi layanan sebagai berikut:

1. Pelayanan pendaftaran penduduk;
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan;
3. Pelayanan KTP elektronik;
4. Pelayanan dan pengendalian perpindahan penduduk WNI;
5. Pelayanan dan pengendalian perpindahan penduduk WNA;
6. Pelayanan pencatatan kelahiran;
7. Pelayanan pencatatan kematian;
8. Pelayanan pencatatan perkawinan;
9. Pelayanan pencatatan perceraian;
10. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan.

Pelayanan administrasi kependudukan di Kutai Timur diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutal Timur. Akurasi pencatatan data kependudukan sangat penting karena menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan dan program Pembangunan. Akurasi selain dipengaruhi oleh inisiatif pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh kesadaran Masyarakat atas pentingnya data kependudukan.

Pada tahun 2024 penduduk Kutai Timur usia 0-4 tahun yang memiliki Akta Kelahiran baru mencapai 83,11% dan usia 0-17 tahun yang memiliki Akta Kelahiran 96,08%. Hal ini berarti ada Akta Kelahiran yang baru diurus penduduk setelah berumur di atas 4 tahun. Penduduk usia 0-4 tahun dan 0-17 tahun yang belum memiliki Akta Kelahiran di Kutai Timur tersebut adalah yang tertinggi kedua di Kalimantan Timur.

Gambar 2.40 Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 (%)



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, 2024

M. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan dengan memanfaatkan potensi yang ada di masing-masing desa melalui pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan daerah yang dilaksanakan harus diikuti dengan pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat desa. Potensi yang ada di masing-masing desa perlu dioptimalkan untuk dikelola masyarakat setempat.

Tabel 2.57 Potensi Ekonomi Desa di Kutai Timur Tahun 2024

Kecamatan	BUMDes	Keberadaan Produk Unggulan		Produk Unggulan yang Diekspor	
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
Muara Ancalong	-	1	9	-	1
Busang	-	-	6	-	-
Long Mesangat	3	3	4	-	3
Muara Wahau	1	6	5	2	4
Telen	1	-	8	-	-
Kongbeng	1	1	7	-	1
Muara Bengkal	-	5	3	-	5
Batu Ampar	5	2	5	1	1
Sangatta Utara	1	2	2	1	1

Kecamatan	BUMDes	Keberadaan Produk Unggulan		Produk Unggulan yang Diekspor	
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
Bengalon	4	9	6	-	9
Teluk Pandan	1	4	3	-	4
Sangatta Selatan	-	5	-	-	5
Rantau Pulung	1	4	5	-	4
Sangkulirang	2	9	7	-	9
Kaliorang	4	2	5	2	-
Sandaran	-	4	5	-	4
Kaubun	-	2	6	1	1
Karangan	-	1	6	-	1
Kutai Timur	24	**60**	**92**	**7**	**53**

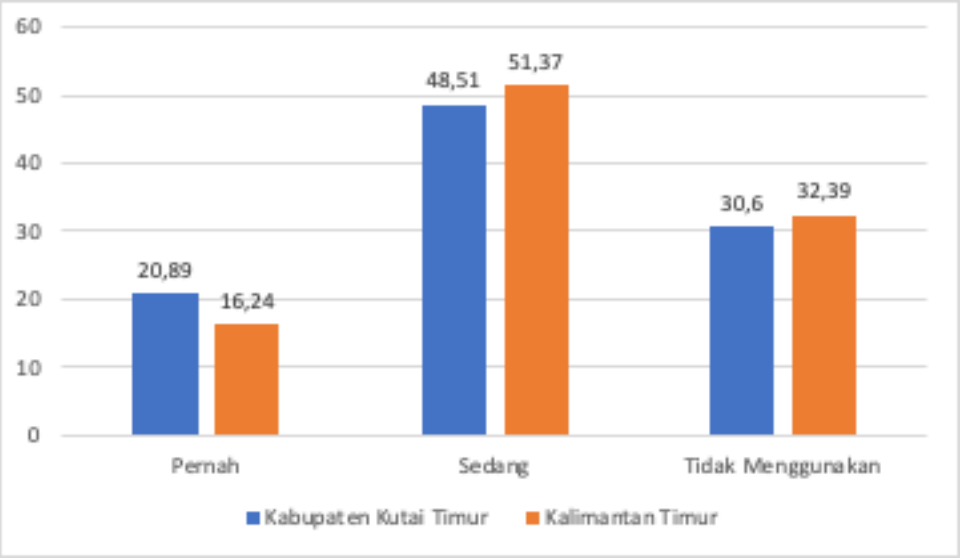
Sumber: Statistik Potensi Desa Kabupaten Kutai Timur 2024

Di Kutai Timur pada tahun 2024 terdapat 24 BUMDes, angka ini masih perlu ditingkatkan dengan memberdayakan potensi masyarakat dan desa. Produk unggulan yang dimiliki oleh masing-masing desa masih perlu untuk ditingkatkan, pada tahun 2024 terdapat 60 desa yang memiliki produk unggulan dan dari jumlah tersebut baru 7 produk yang diekspor. Dengan demikian potensi produk unggulan untuk dikembangkan masih besar melalui pemberdayaan masyarakat dan desa. Pemberdayaan masyarakat dan desa akan mempercepat pemerataan pembangunan daerah, mengurangi tingkat pengangguran, serta menurunkan tingkat kemiskinan.

N. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk penting untuk dikendalikan, bukan dibatasi. Hal ini berkaitan dengan perbedaan kemampuan masing-masing keluarga untuk memberikan penghidupan layak bagi keluarga. Secara geografis Kutai Timur sangat luas dengan tingkat kepadatan yang masih rendah, namun hal tersebut tidak berarti aspek pengendalian penduduk menjadi hal yang tidak penting. Pertumbuhan penduduk yang tinggi membawa dampak pada kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik yang meningkat pulan. Salah satu Upaya pengendalian penduduk adalah dengan penggunaan alat kontrasepsi KB.

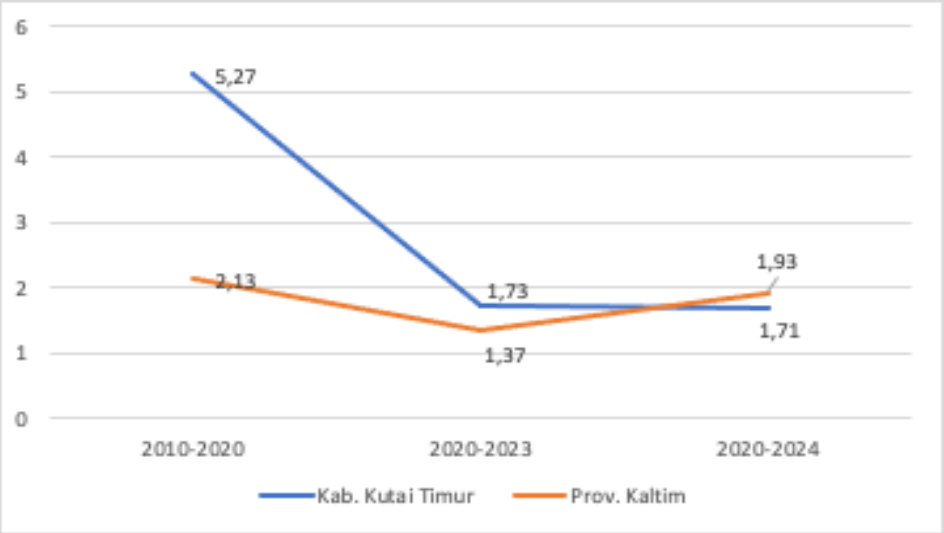
Gambar 2.41 Penggunaan Alat KB Perempuan Usia 15-49 Tahun 2024



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Pada tahun 2024 sebanyak 20,89% Perempuan usia 15-49 tahun pernah menggunakan alat KB dan yang sedang menggunakan alat KB mencapai 48,51%. Perempuan yang sedang menggunakan alat KB tahun 2024 tersebut tergolong kecil yaitu terendah ketiga di Kalimantan Timur. Hal ini berpotensi mendorong pertumbuhan jumlah penduduk di Kutai Timur akan menjadi lebih tinggi. Pertumbuhan penduduk Kutai Timur 2010-2020 per tahun adalah 5,27%; tertinggi di Kalimantan Timur dan di tahun 2020-2023 pertumbuhan penduduk per tahun 1,73%; masih yang tertinggi di Kalimantan Timur. DI tahun 2020-2024 rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun adalah 1,71% dan angka ini tertinggi ketiga di Kalimantan Timur.

Gambar 2.42 Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)



Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka, 2024

O. Urusan Perhubungan

Urusan perhubungan merupakan urusan penting daerah dalam rangka mendukung konektivitas antarwilayah. Urusan perhubungan berkaitan dengan kelancaran lalu lintas angkutan darat, laut, dan udara. Dalam hal angkutan darat aspek perhubungan berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur jalan untuk mendukung kelancaran lalu lintas. Pada tahun 2024 panjang jalan Kutai Timur adalah 1.128 km dengan jumlah kendaraan roda dua 217.098 dan roda empat 58.004. Rasio jalan terhadap kendaraan roda dua adalah 192 per km, artinya terdapat 192 kendaraan roda dua dalam 1 km jalan. Untuk roda empat terdapat 51 kendaraan per km. Pertumbuhan jumlah kendaraan perlu diimbangi dengan penambahan Panjang jalan untuk memperlancar arus lalu lintas. Permasalahan yang penting diperhatikan adalah dari Panjang jalan di tahun 2024 tersebut hanya 377,63 km yang memiliki kondisi Baik dan 719,58 km dalam kondisi Rusak Berat. Selain itu jalan yang permukaanya aspal baru sekitar 200 km dan permukaan beton sekitar 250 km. Dengan demikian secara bertahap perlu dilakukan perbaikan jalan terutama jalan yang mampu mendorong kegiatan ekonomi Masyarakat antarwilayah termasuk jalur lalu lintas pelabuhan.

Tabel 2.58 Rasio Panjang Jalan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022-2024

Tahun	Panjang Jalan (Km)	Jumlah Kendaraan (Unit)		Rasio Kendaraan Terhadap jalan		
		Roda 2	Bukan Roda 2	Roda 2	Bukan Roda 2	Total

2022	1.105,77	222.081	33.215	201	30	231
2023	1127	217.093	57.996	193	51	244
2024	1128	217.098	58.004	192	51	244

Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka 2025, diolah

Untuk perhubungan laut, aktivitas tersebut dapat dilihat pada Pelabuhan Kutai Timur. Aktivitas muat menggambarkan banyaknya barang yang akan diangkut keluar dari Kutai Timur sedangkan aktivitas bongkar merupakan aktivitas barang yang masuk ke Kutai Timur. Aktivitas bongkar muat barang di Kutai Timur semuanya berupa barang hasil pertambangan, bahan bakar, dan bahan bangunan/konstruksi. Tidak terlihat aktivitas bongkar muat untuk barang-barang industri, perdagangan, maupun pertanian.

Tabel 2.59 Muat-Bongkar Pelabuhan Kutai Timur Tahun 2022-2024

Jenis Barang	Dimuat			Dibongkar		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Bahan Bakar Minyak	4.610	6.900	22.720	143.910	203.554	741.071
Batu Bara	46.420.248	56.069.846	59.817.984	–	45.069	824.695
Semen	750	108.250	2.720.325	25.160	23.314	2.156
Pasir Batu	–	–	11.002	82.536	218.228	622.546
Campuran	–	–	199.121	–	–	211.747
Alat Berat	41.820	18.977	63.828	36.490	41.085	17.592

Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka 2025, diolah

P. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika di Kutai Timur memegang peran yang sangat penting. Kondisi geografis Kutai Timur yang luas dan berbukit memerlukan dukungan komunikasi yang handal melalui jaringan internet. Dengan jaringan komunikasi yang handal komunikasi antarwilayah akan tetap dapat berjalan lancar karena tidak terbatas pada tempat dan waktu. Infrastruktur komunikasi yang handal akan mendorong kehidupan bermasyarakat berjalan lebih dinamis. Komunikasi yang handal dan merata akan mendukung urusan kependidikan, layanan publik, maupun perekonomian Masyarakat. Untuk mendukung jaringan komunikasi internet diperlukan menara *Base Transceiver Station* (BTS) sebagai media menangkap sinyal internet untuk selanjutnya disebarluaskan. Jumlah BTS Kutai Timur tahun 2024 adalah 1.752; melonjak tajam dibandingkan tahun 2023 yang

banyaknya 1.053. BTS terbanyak berada di Kecamatan Sangatta Utara, disuse kemudian Kecamatan Bengalon, Muara Wahau, Teluk Pandan, dan Kongbeng. Peningkatan jumlah BTS di beberapa kecamatan disesuaikan dengan kondisi geografis.

Kondisi geografis sangat berpengaruh terhadap kualitas penerimaan sinyal internet. Berdasarkan data Potensi Desa di Kabupaten Kutai Timur yang disusun oleh BPS Kabupaten Kutai Timur, dari seluruh desa atau kelurahan yang ada, 77 desa/kelurahan memiliki sinyal internet kuat dan 55 memiliki sinyal lemah. Masih terdapat wilayah yang tidak terjangkau sinyal yaitu wilayah di Kecamatan Sandaran. Beberapa wilayah belum diketahui tentang status kekuatan sinyal seperti Sangatta Utara.

Tabel 2.60 Jumlah Base Transceiver Station (BTS) di Kutai Timur Tahun 2020-2024

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Muara Ancalong	5	5	9	32	55
Busang	1	1	7	6	15
Long Mesangat	1	1	5	12	19
Muara Wahau	14	14	15	88	171
Telen	9	9	11	28	49
Kongbeng	13	13	14	62	105
Muara Bengkal	11	11	13	32	53
Batu Ampar	3	4	7	19	21
Sangatta Utara	50	50	50	262	397
Bengalon	18	18	22	132	244
Teluk Pandan	17	17	18	88	121
Sangatta Selatan	15	14	14	66	97
Rantau Pulung	6	8	10	37	63
Sangkulirang	13	13	19	56	87
Kaliorang	8	8	9	32	65
Sandaran	4	4	11	14	36
Kaubun	9	9	15	46	80
Karangan	4	4	10	41	74
Kutai Timur	**201**	**203**	**259**	**1.053**	**1.752**

Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka 2025

Tabel 2.61 Status Sinyal Internet di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

Kecamatan	Kuat	Lemah	Tidak Ada Sinyal
Muara Ancalong	3	7	-

Kecamatan	Kuat	Lemah	Tidak Ada Sinyal
Busang	-	6	-
Long Mesangat	-	7	-
Muara Wahau	4	2	-
Telen	7	1	-
Kongbeng	5	-	-
Muara Bengkal	5	3	-
Batu Ampar	4	3	-
Sangatta Utara	-	-	-
Bengalon	6	9	-
Teluk Pandan	1	-	-
Sangatta Selatan	-	5	-
Rantau Pulung	9	-	-
Sangkulirang	6	9	-
Kaliorang	7	-	-
Sandaran	3	3	3
Kaubun	7	-	-
Karangan	7	-	-
KUTAI TIMUR	**74**	**55**	**3**

Sumber: Statistik Potensi Desa Kabupaten Kutai Timur 2024, BPS Kabupaten Kutai Timur

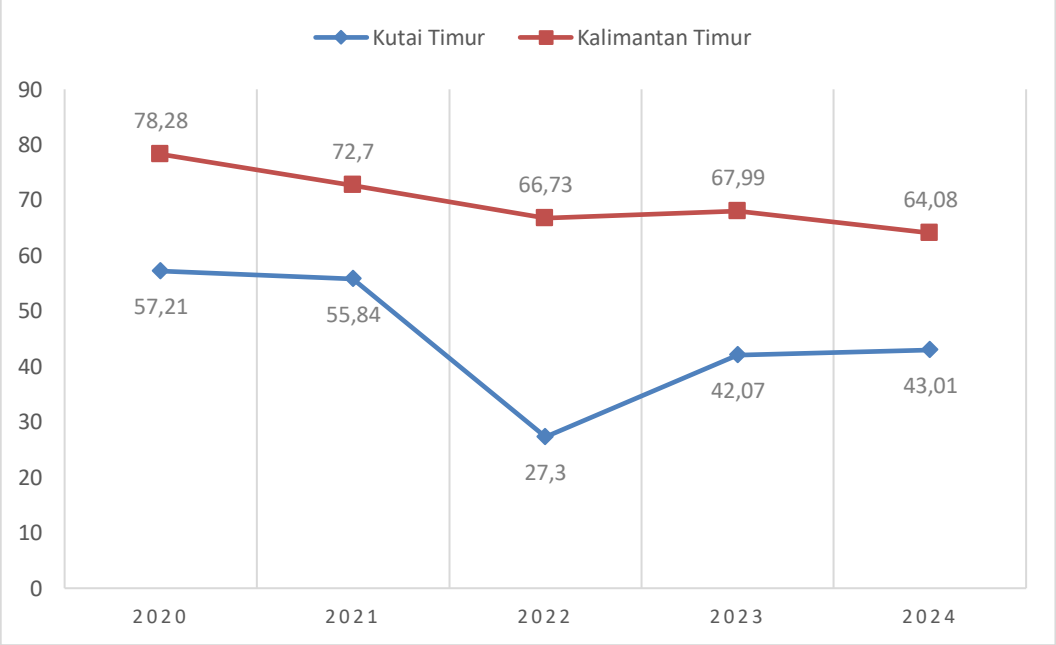
Q. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Koperasi dan UMKM merupakan bentuk usaha yang menggambarkan pemberdayaan masyarakat luas. Di Indonesia kontribusi UMKM terhadap PDB cukup besar yaitu sekitar 60,5% namun 99% dari pelaku usaha adalah para UMKM. Pengembangan UMKM merupakan salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta memperkecil tingkat ketimpangan yang ada.

Di Kutai Timur jumlah koperasi aktif berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Timur mencapai 465 unit. Koperasi aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Salah satu aspek yang juga penting selain keaktifan adalah koperasi yang sehat. Menurut Pemerintah Daerah Kutai Timur, koperasi sehat berdasarkan aset untuk tahun 2023, kali ini ada peningkatan cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar 44 unit meningkat menjadi 80 unit Koperasi. Untuk Koperasi yang diperiksa dan diawasi oleh Satuan Tugas (satgas) Diskop Kutim, ada sekitar 10 unit Koperasi. Sementara itu jumlah UMKM di Kutai Timur berdasarkan identifikasi Dinas Koperasi dan

UMKM Kutai Timur adalah sekitar 6.000an. Beberapa program pemberdayaan koperasi dan UMKM telah dilakukan seperti bimbingan teknis, pemasaran, produksi, maupun keuangan. Hal penting yang juga perlu dipertimbangkan adalah kemudahan akses permodalan serta peningkatan kemitraan antara koperasi dan UMKM dengan Perusahaan besar.

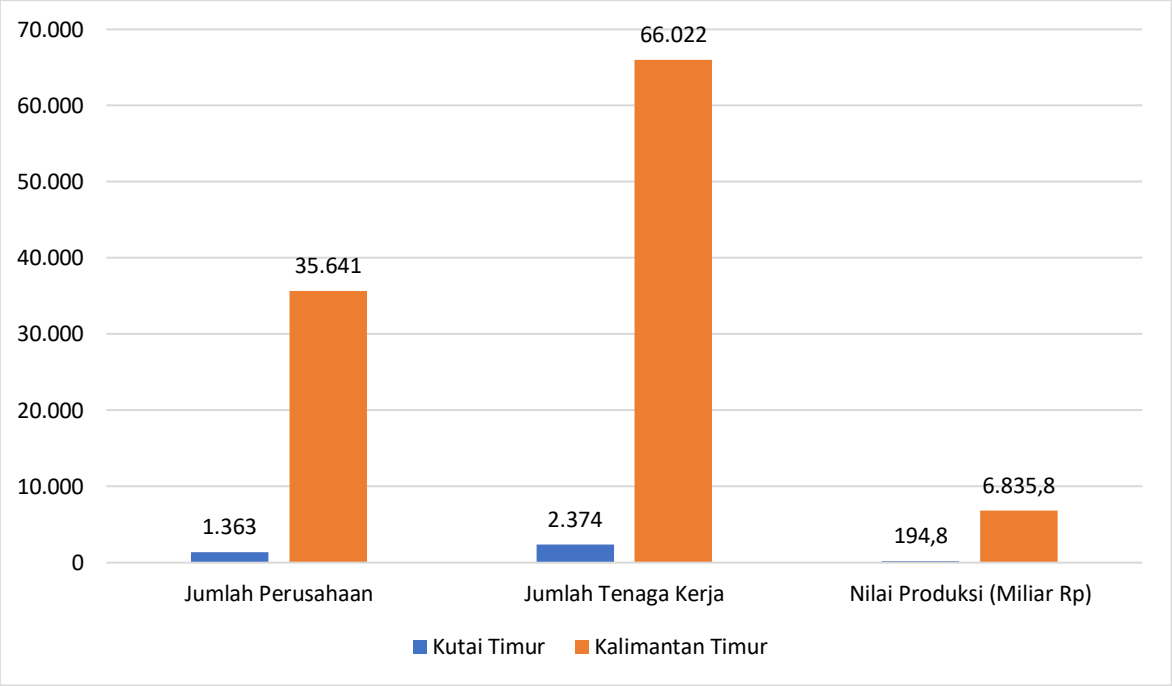
Gambar 2.43 Jumlah Koperasi Aktif Tahun 2023



Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2025

Jumlah Perusahaan industri mikro dan kecil di Kutai Timur tahun 2023 sebanyak 1.363 dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 2.374. Dengan demikian rata-rata setiap perusahaan hanya menyerap 1-2 tenaga kerja. Nilai produksi dari 1.363 perusahaan tersebut adalah 194 Miliar atau rata-rata setiap perusahaan menghasilkan pendapatan 143 juta per tahun. Di tingkat Provinsi Kalimantan Timur, jumlah Perusahaan mikro dan kecil tahun 2023 adalah 35.641 dengan tenaga kerja 66.022 atau rata-rata per UMKM adalah 2 orang, namun pendapatan per perusahaan mencapai sekitar 192 juta; lebih tinggi dibandingkan Kutai Timur. Sementara itu jumlah perusahaan besar dan sedang di Kutai Timur pada tahun 2023 adalah 38 perusahaan, namun mampu menyerap sekitar 9.677 tenaga kerja. Permasalahan perusahaan mikro dan kecil di Kutai Timur menyangkut 2 aspek utama yaitu pemasaran dan akses permodalan.

Gambar 2.44 Jumlah Industri Mikro dan Kecil Tahun 2023



Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2025

R. Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan komponen penting dalam mendorong pembangunan daerah. Tingginya penanaman modal atau investasi akan mendorong bukan hanya pertumbuhan ekonomi, namun juga pengurangan tingkat pengangguran melalui penciptaan tenaga kerja serta pengurangan tingkat kemiskinan. Selain itu investasi yang berkembang akan mendorong peningkatan pendapatan daerah.

Penanaman modal atau investasi terdiri dari dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta Penanaman Modal Asing (PMA). Nilai PMDN Kutai Timur tahun 2024 berdasarkan data *National Single Window for Investment* Kementerian Investasi dan Hilirasi serta BPS Provinsi Kalimantan Timur mencapai 3.429.334,20 juta atau sekitar 3,4 trilyun. Nilai ini turun jika dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 5.241.826,7 juta atau sekitar 5,2 triliun. Dari sisi jumlah proyeknya, nilai investasi 2024 tersebut untuk 1.350 proyek; naik bila dibandingkan jumlah proyek tahun 2023 yang banyaknya 665 proyek. Untuk PMA pada tahun 2024 US$240.873,20 juta; turun bila dibandingkan tahun 2023 yang besarnya US$458.235,8 juta. Dari sisi jumlah proyek PMA di tahun 2024, terjadi kenaikan yang

tajam dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu dari 82 proyek menjadi 207 proyek. Investasi di tahun 2024 tersebut mampu menyerap sekitar 25 tenaga kerja dan berdampak pada penurunan tingkat pengangguran terbuka di tahun 2024.

Investasi yang terjadi di Kutai Timur diharapkan mampu mendorong munculnya efek *multiplier* berupa pengembangan sektor industri dan perdagangan. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu melakukan promosi intensif terhadap keunggulan sumber daya alam Kutai Timur, khususnya sumber daya berbasis pertanian dalam rangka mewujudkan tercapainya hilirisasi SDA.

Tabel 2.62 Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Tahun 2021-2024

Tahun	Kutai Timur		Kalimantan Timur	
	Proyek	Nilai Investasi (Juta Rp)	Proyek	Nilai Investasi (Juta Rp)
2021	536	5.279.054,0	4.317	30.297.382,2
2022	447	3.428.929,9	4.219	39.595.633,0
2023	665	5.241.826,7	7.571	52.171.695,7
2024	1.350	3.429.334,20	18.524	38.669.046,70

Sumber: NSWI Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan BPS Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.63 Perkembangan Realisasi Investasi PMA Tahun 2021-2024

Tahun	Kutai Timur		Kalimantan Timur	
	Proyek	Nilai Investasi (Juta Rp)	Proyek	Nilai Investasi (Juta Rp)
2021	54	248.360,8	428	745.190,2
2022	65	630.926,0	486	1.266.221,9
2023	82	458.235,8	822	1.332.710,6
2024	207	240.873,20	2.274	1.144.415,80

Sumber: NSWI Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan BPS Provinsi Kalimantan Timur

S. Seni dan Kebudayaan

Kutai Timur adalah wilayah yang heterogen, yang dihuni dengan berbagai suku bangsa di Indonesia. Dalam konteks masyarakat adat, Kabupaten Kutai Timur juga memiliki suku asli yang telah berdiam sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Masyarakat adat di Kutai Timur memiliki kearifan lokal yang kaya dan bersejarah, yang tercermin dalam budaya dan tradisi mereka. Salah satu contoh penting adalah "Pelas Tanah", sebuah pesta adat yang diselenggarakan setiap tahun. Pelas Tanah

memiliki akar sejarah yang mendalam, berawal dari tradisi kerajaan Kutai Martadipura, sebuah kerajaan bercorak Hindu yang berdiri sejak sekitar abad ke-4. Kerajaan ini, dikenal juga sebagai Kutai Kartanegara ing Martadipura, memiliki sejarah yang merupakan salah satu yang tertua di Nusantara.

Selain itu, terdapat upaya khusus untuk mengembangkan dan memantapkan potensi budaya masyarakat adat Wehea Kelay di Kutai Timur sebagai destinasi wisata. Tujuannya adalah untuk menjadikan kawasan ini sebagai salah satu Kawasan destinasi wisata utama di Kutai Timur dengan fokus pada pengembangan wisata sosial budaya. Strategi pengembangannya meliputi studi kajian untuk mengembangkan potensi wisata budaya dan pembangunan infrastruktur pendukung untuk mempromosikan destinasi wisata masyarakat adat Wehea Kelay. Kedua aspek ini, Pelas Tanah dan pengembangan Wehea Kelay, menunjukkan bagaimana masyarakat adat Kutai Timur tidak hanya mempertahankan budaya mereka yang kaya, tetapi juga bagaimana mereka beradaptasi dan mengintegrasikan warisan budaya tersebut ke dalam konteks modern, khususnya pariwisata, untuk mempromosikan dan melestarikan tradisi mereka.

Kutai Timur memiliki beberapa pilar kebudayaan, yakni kebudayaan pedalaman dan kebudayaan pesisir dari etnis Kutai Timur, kebudayaan berlatar agama serta kebudayaan berdasar etnis pendatang. Kebudayaan pedalaman adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat adat etnis Dayak. Beberapa di antaranya dalam bentuk seni tari, seperti tari perang, tari enggang, tari berburu, dan tari gentar. Selain itu juga dalam bentuk ritual dan upacara-upacara adat, di antaranya berupa pesta adat lomplai, hudoq, dan belian. Seni tradisi tersebut tetap bertahan dan bahkan tumbuh berkembang, termasuk cerita-cerita rakyat. Senu rupa dan kriya yang berbasis kebudayaan lokal sangat berkembamg, seperti ukiran dan kehidupan komunitas rumah adat (rumah panjang/lamin), mandau, tombak dan talabang. Seni musiknya juga khas, seperti sampe, seni bermain gong dan tari gong, kelentangan, kulintang, gendang, dan apa yang mereka sebut suling dewa.

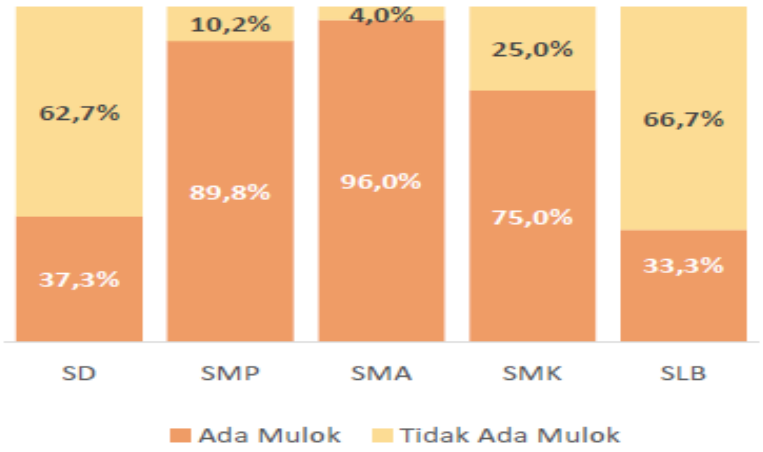
Salah satu upacara khas suku Dayak di daerah ini yang menarik adalah Lomplai, semacam pesta adat yang digelar masyarakat yang bermukim di sepanjang daerah aliran Sungai Wahea dan Sungai Telen, Kecamatan Wahau. Lomplai

mengandung arti mengantisipasi agar tidak sakit atau selalu sehat dan panjang umur. Namun, lomplai bisa juga diartikan sebagai pesta masa panen padi.

Lomplai adalah salah satu bentuk kearifan lokal terkait bagaimana masyarakat di sana menghargai alam dan lingkungan sekitar sebagai tak terpisah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Karena itu, upacara ini mengandung banyak makna pujian dan rasa terima kasih kepada alam dan sang pencipta. Tumbuhan padi dalam pesta ini dijadikan ikon, sehingga semua manusia menghargai tumbuhan sebagai sesama ciptaan Tuhan. Prosesnya ditandai dengan pemukulan gong yang dijuluki ngesea agung dan diikuti tetabuhan yang disebut tewung. Pesta adat warisan leluhur yang hingga kini terus dipertahankan ini membuat masyarakat masa kini dapat melihat peninggalan budaya masa lalu yang masih tetap lestari.

Dalam Pendidikan, upaya pelestarian budaya antara dilakukan melalui penyelenggaraan muatan lokal pada berbagai jenjang Pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut muatan lokal untuk jenjang SD/sederajat hanya 37,3%. Pengenalan budaya penting dilakukan sejak sekolah dasar sehingga para murid mengenal dan memahami dengan baik budaya dan seni yang berkembang di Kutai Timur. Di jenjang SMP/sederajat dan SMA muatan lokal sudah cukup tinggi yaitu masing-masing 89,8% dan 96,0% sementara untuk SMK sebesar 75,0%.

Gambar 2.45 Penyelenggaraan Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023



Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2.1.4.4.2 Urusan Pemeritahan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

Kutai Tmur memiliki potensi besar di bidang perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Pengembangan dan pengolahan potensi perikanan di Kutai Timur diharapkan dapat mendorong hilirisasi sektor perikanan serta dikembangkan dalam rangka mendukung *blue economy*. Produksi perikanan tangkap darat di Kutai Timur tahun 2023 mencapai sekitar 2.171 ton dan produksi perikanan tangkap laut mencapai 6.843 ton. Meskipun masih lebih kecil dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur, namun potensi ini dapat dikembangkan melalui kebijakan dan strategi yang mendorong pengembangan produksi sektor perikanan terutama upaya mewujudkan *blue economy* dalam perekonomian Kutai Timur.

Tabel 2.64 Potensi Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	Perikanan Tangkap di Laut		Perikanan Tangkap di Darat	
	Volume (ton)	Nilai (Ribuan Rp)	Volume (ton)	Nilai (Ribuan Rp)
1. Paser	10.628	230.934.716	84	5.195.065
2. Kutai Barat	–	–	1.570	44.064.097
3. Kutai Kartanegara	47.371	1.533.547.276	34.318	1.098.187.392
4. Kutai Timur	5.718	189.563.504	1.179	32.641.340
5. Berau	23.299	795.895.497	1.671	79.397.405
6. Penajam Paser Utara	6.521	189.684.430	157	6.513.515
7. Mahakam Ulu	–	–	60	8.226.010
8. Balikpapan	5.704	113.075.347	–	–
9. Samarinda	12.038	447.747.000	4.540	171.816.500
10. Bontang	21.922	1.044.570.063	–	–
Kalimantan Timur	**133.201**	**4.545.017.833**	**43.579**	**1.446.041.324**

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2025

Potensi perikanan laut terutama berada di Kecamatan Sangkulirang, Sangatta Selatan, Kaliorang, Sangatta Utara, dan Kecamatan Bengalon. Untuk perikanan darat atau perikanan umum potensi yang besar terdapat di Muara Bengkal, Muara Ancalong, Batu Ampar, serta Busang. Perikanan budidaya menyebar cukup merata di berbagai kecamatan terutama di Kecamatan Sangatta Selatan, Sangatta Utara, serta Bengalon. Pengembangan hilirisasi sektor perikanan dapat dilakukan dengan mengembangkan industri berbasis perikanan.

Tabel 2.65 Produksi Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023-2024 (Ton)

Kecamatan	Perikanan Laut		Perairan Umum		Perikanan Budidaya	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Muara Ancalong	–	–	250,55	282,87	31,83	31,83
Busang	–	–	216,44	179,18	–	–
Long Mesangat	–	–	41,98	40,96	22,74	22,74
Muara Wahau	–	–	106,25	102,4	22,74	22,74
Telen	–	–	167,91	143,36	4,55	4,55
Kongbeng	–	–	66,9	71,68	13,13	13,13
Muara Bengkal	–	–	1007,44	1155,81	36,38	36,38
Batu Ampar	–	–	219,07	97,28	9,09	9,09
Sangatta Utara	632,05	569,7	0,57	–	165,32	165,32
Bengalon	506,19	469,98	–	–	110,44	110,44
Teluk Pandan	484,3	509,97	–	–	90,94	109,73
Sangatta Selatan	949,45	1214,99	–	–	300,36	537,12
Rantau Pulung	–	–	–	–	50,02	50,02
Sangkulirang	2.175,25	2264,87	45,91	44,8	23,17	35,97
Kaliorang	804,43	819,99	–	–	27,28	33,68
Sandaran	763,39	713,99	–	–	4,55	4,55
Kaubun	–	–	48,54	44,8	18,19	18,19
Karangan	–	–	–	–	50,02	50,02
Kutai Timur	6.315,06	6563,49	2170,99	2163,14	980,75	1255,5

Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka, 2025

B. Pariwisata

Kutai Timur memiliki alam yang sangat indah sehingga memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata. Kabupaten Kutai Timur memiliki berbagai obyek wisata yang menarik bagi pengunjung. Salah satu tempat yang terkenal misalnya Taman Nasional Kutai, yang memiliki luas sekitar 192.709,55 hektar. Selain itu, Kutai Timur juga memiliki lokasi wisata utama yang harus dikunjungi, di antaranya adalah Pantai Teluk Lombok, Teluk Perancis, Pantai Kenyamukan, dan Aquatiq yang berada di Kecamatan Sangatta Utara dan Selatan, serta Taman Nasional Kutai Mentoko, Pantai Birah-birahan di Kecamatan Sandaran, dan wisata tambang serta wisata religi di Bukit Pelangi. Banyaknya jumlah tempat pariwisata di Kabupaten Kutai Timur harus ditingkatkan pelayanannya sehingga dapat menghadirkan juga jumlah wisatawan yang datang.

Jumlah wisatawan di tahun 2023 mencapai 75.233; naik lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun 2022. Di tahun 2024, jumlah wisatawan melonjak tajam

menjadi 189.851. Kenaikan yang terjadi di tahun 2024 tersebut lebih dari dua kali lipat tahun 2023. Sebagian besar wisatawan tahun 2023 berkunjung ke Miau Baru, Bukit Hijau, Pantai Teluk Lombok, serta Pantai Jepu Jepu. Di tahun 2024 destinasi wisata berkembang seperti Teluk Singkama, Embung Wisata, pantai Sekerat, Pantai Marang, serta Mata Air Tangga Bidadari. Promosi yang intensif melalui visualisasi destinasi wisata perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan wisatawan. Peningkatan wisatawan akan memberikan dampak bagi pengembangan industri kreatif, perdagangan, kuliner, perhotelan, serta UMKM. Pariwisata akan mendorong pula berkembangnya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Untuk itu perlu dipertimbangkan semacam "*tagline*" agar lebih mudah mempopulerkan destinasi wisata di Kutai Timur.

Tabel 2.66 Jumlah Wisatawan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024

Destinasi Wisata	2020	2021	2022	2023	2024
Pantai Teluk Lombok	3.607	-	4.249	7.185	5.400
Taman Nasional Kutai Sangkimah	1.331	-	3.354	2.919	-
Taman Nasional Kutai Frevab Mentoko	35	-	17	373	-
Wehea	7	-	–	–	-
Miau Baru	1.656	-	2.024	42.818	-
Bukit Hijau	1.413	-	3.949	10.970	7.016
Mangkuris	209	-	393	374	-
Pesat	351	-	–	–	-
Pantai Jepu-jepu	-	-	3.476	6.823	37.200
Pantai Sekerat	-	-	4.735	3.771	16.900
Wisata Luah Putih	-	-	-	-	1400
Teluk Prancis	-	-	-	-	2.223
Teluk Singkama	-	-	-	-	33.032
Pulau Miang	-	-	-	-	6.167
Mata Air Tangga Bidadari	-	-	-	-	10.925
Embung Wisata Suka Maju Kombeng	-	-	-	-	27.950
Dana Lelhut	-	-	-	-	6,410
Pantai Marang	-	-	-	-	15.100
Desa Batu Lepoq	-	-	-	-	3.350
Danau Senal	-	-	-	-	5.289
Nayla Waterboom	-	-	-	-	3.224
Air Terjun Air Putih dan Agrowisata	-	-	-	-	3.925
Kebun Kelulut	-	-	-	-	2.153
Kolam Renang Victoria	-	-	-	-	1.902
Mangrove Sei Papan	-	-	-	-	285
Kutai Timur	**8.609**	**-**	**22.197**	**75.233**	**189.851**

Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka 2024 dan 2025

C. Pertanian

Salah satu aspek penting dalam ketahanan pangan adalah padi atau beras sebagai makanan pokok sehari-hari. Pada tahun 2023 luas panen padi di Kutai Timur adalah 3.440,35 Ha, dengan jumlah panen sebanyak 10.777,38 ton. Tahun 2024 luas panen maupun produksi padi meningkat, luas panen padi menjadi 3.790,01 Ha dengan produksi padi turun menjadi 13.938,46 ton. Peningkatan produksi tersebut karena meningkatnya produktivitas padi dari 31,33 kuintal/hektar di tahun 2023 menjadi 36,78 kuintal per hektar di tahun 2024 (Tabel 2.67). Tanaman padi merupakan salah satu aspek ketahanan pangan yang penting, oleh karena itu perlu untuk dipertimbangkan kelestarian lingkungan dengan kebijakan pembangunan yang tidak mengganggu produksi padi dan beras. Area atau wilayah yang dipandang potensial untuk tanaman padi perlu dijaga agar ketahanan pangan di Kutai Timur dalam jangka panjang dapat terjaga. Dengan mempertimbangkan aspek geografis pengembangan wilayah yang menjadi lumbung pangan perlu mendapatkan perhatian termasuk mitigasi bencana alam yang dapat mengganggu ketahanan pangan. Urusan pangan selain diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan juga penting diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor lain. Potensi pangan dan buah-buahan yang ada dapat diarahkan pada pengembangan industri berbasis sumber daya lokal.

Pertanian dalam arti besar mencakup aspek pertanian tanaman pangan, buah-buahan, sayuran, biofarma, peternakan, perikanan, serta kehutanan. Dari sisi produksi, buah-buahan Kutai Timur memiliki potensi yang tinggi terutama buah mangga, durian, jeruk siam, pisang, salak, dan nanas (Tabel 2.68). Khusus untuk durian, jeruk siam, dan pisang Kutai Timur memiliki tingkat produksi yang termasuk tiga besar di Kalimantan Timur, bahkan untuk pisang adalah yang terbesar di Kalimantan Timur.

Di dalam Kutai Timur sendiri, buah yang memiliki produksi terbesar adalah pisang dan nanas. Untuk tahun 2024 produksi pisang mengalami penurunan cukup besar sementara untuk produksi nanas mengalami kenaikan yang signifikan. Buah-buahan termasuk tanaman yang rentan dengan perubahan iklim. Hilirasi berbagai hasil pertanian seperti perkebunan akan mendorong berkembangnya perekonomian daerah. Untuk itu perlu pengembangan industri yang berbasis buah-buahan dalam rangka meningkatkan nilai tambah buah sekaligus mendorong *backward* dan *forward linkage* industri pengolahan berbasis pertanian.

Tabel 2.67 Produksi Padi di Kabupaten Kutai Timur dan Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Tahun	Kutai Timur				Kalimantan Timur			
	Luas Panen	Produktivitas	Produksi Padi	Produksi Beras	Luas Panen	Produktivitas	Produksi Padi	Produksi Beras
2020	4.978,75	34,30	17.078,56	9.882,90	73.568,44	35,67	262.434,52	151.863,46
2021	3.660,48	35,84	13.119,61	7.631,26	66.269,46	36,92	244.677,96	142.321,36
2022	3.415,90	35,35	12.076,25	7.024,36	64.970,01	36,85	239.425,34	139.266,10
2023	3.440,35	31,33	10.777,38	6.268,86	57.143,29	37,68	215.290,58	125.227,66
2024	3.790,01	36,78	13.938,46	8.107,56	63.041,65	39,60	249.642,90	145.209,36

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2025

Tabel 2.68 Produksi Buah-buahan Tahun 2024 (Kuintal)

Sumber	Kutai Timur					Kalimantan Timur				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Mangga	9,774	8,135	9,393	7,216	6.492,11	42.604,18	51.315,94	30.102,88	47.579,56	74.985,53
Durian	8,952	10,878	20,414	60,511	22.078,90	104.974,38	134.395,51	87.727,88	208.205,05	98.695,10
Jeruk Siam	37,948	51,296	2,7201	42,752	17.063,62	125167,56	113.006,30	77.552,06	83.955,31	57.790,80
Pisang	340,266	938,261	752,162	1.046.128	877.354,54	955275,52	1.306.561,44	1.275.624,65	1.561,317,45	1.591.196,86
Pepaya	5,785	6,57	4,687	6,739	8.479,16	151.206,08	240.679,54	136.740,98	294.421,27	128.823,05
Salak	2,004	831	1,293	6,011	1.263,56	198.780,56	75.080,92	68.413,83	67.559,27	155.461,98
Nanas	3,413	16,082	73,457	95,607	170.366,18	219.756,45	551.708,51	366.411,41	248.670,57	709.882,37
Buah naga	0	16	189	386	246,1	0	120.348,14	127.191,37	33.375,41	105.283,38

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Di bidang perkebunan Kutai Timur memiliki potensi besar untuk komoditas kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, serta kakao. Total produksi kelapa sawit tahun 2024 mencapai sekita 7,7 juta ton dan karet sebesar 1,8 ribu ton. Produksi kelapa sawit ini di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 6,2 juta ton akibat penurunan produksi di semua kecamatan, terutama di Kecamatan Muara Wahau, Sangkulirang, dan Kongbeng. Kelapa sawit menyebar cukup merata di semua kecamatan, namun Kecamatan yang menjadi penghasil utama adalah Kecamatan Muara Wahau, Kongbeng, Bengalon, Sangkulirang, Muara Bengkal, serta Kecamatan Karangan. Komoditas karet yang juga memiliki produksi besar terutama terdapat di Kecamatan Teluk Pandan, Kaliorang, serta Kecamatan Batu Ampar. Hilirisasi sektor perkebunan penting dilakukan dalam rangka memberikan efek multiplier yang besar bagi pembangunan daerah. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai program yang mendorong investor datang ke Kutai Timur serta pembangunan saran dan prasarana pendukung terutama infrastruktur jalan, listrik, air, dan telekomunikasi.

Tabel 2.69 Produksi Beberapa Perkebunan Tahun 2024 (Ton)

Kecamatan	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao
Muara Ancalong	293.799,48	2,23	87,51	0,24	28,49
Busang	291.358,80	0	72,48	–	23,1
Long Mesangat	30.350,51	9	198	–	–
Muara Wahau	1.576.886,28	2,06	31,61	1,18	–
Telen	347.807,95	1,14	76,22	–	–
Kongbeng	843.137,03	53	32	–	4,7
Muara Bengkal	520.663,54	1,05	26,52	–	–
Batu Ampar	4.875,00	8,2	208,25	5.50	–
Sangatta Utara	325,00	9	184	0,45	0,5
Bengalon	1.081.477,36	1,03	5,42	–	0,73
Teluk Pandan	159,00	41,93	439,9	13,50	4,68
Sangatta Selatan	6.458,94	1,55	4,38	1,49	0,81
Rantau Pulung	261.784,22	11,22	90,45	–	1,02
Sangkulirang	878.918,66	43,44	63	3,92	12,88
Kaliorang	70.011,27	219	231,84	–	21,6
Sandaran	566.891,09	352,43	–	3,92	38,93
Kaubun	402.015,00	8,2	15	0.8	7
Karangan	583.010,89	1,32	42	–	67,2
Kutai Timur	**7.752.987,08**	**765,8**	**1.808,58**	**27,08**	**211,64**

Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka, 2025

D. Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Salah satu aspek penting dalam ESDM adalah masalah listrik sebagai sumber energi utama bagi rumah tangga. Berdasarkan data tahun 2022 hingga 2024, persentase rumah tangga di Kabupaten Kutai Timur yang menggunakan listrik dari PLN menunjukkan tren peningkatan, dari 73,91% pada 2022 menjadi 77,77% pada 2024. Secara bersamaan, terjadi penurunan pada rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan non-PLN, dari 24,31% menjadi 22,13%. Sementara itu, proporsi rumah tangga tanpa penerangan menurun signifikan, dari 1,78% pada 2022 menjadi hanya 0,67% pada 2023, dan tidak tercatat lagi pada 2024, mengindikasikan potensi capaian elektrifikasi 100%.

Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Timur, capaian Kutai Timur masih tertinggal cukup jauh. Pada tahun 2024, akses listrik PLN di provinsi mencapai 96,5%, lebih tinggi ±19 poin dari Kutim. Hal ini menunjukkan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan di Kutai Timur agar kesenjangan antarwilayah dapat ditekan dan target pemerataan akses energi tercapai secara berkelanjutan.

Tabel 2.70 Sumber Penerangan Utama Rumah Tangga Tahun 2020-2024

Tahun	Kabupaten Kutai Timur			Provinsi Kalimantan Timur		
	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama PLN	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama Non-PLN	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Bukan Listrik	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama PLN	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama Non-PLN	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Bukan Listrik
2024	77,77	22,13	N/A	96,5	N/A	N/A
2023	75,69	23,64	0,67	95,36	4,52	0,12
2022	73,91	24,31	1,78	95,56	4,2	0,24
2021	76,97	22,54	0,49	94,65	5,17	0,18
2020	80,77	16,98	2,25	95,46	4,06	0,48

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, 2024

E. Perdagangan

Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang paling luas dilakukan oleh masyarakat. Aktivitas perdagangan masyarakat bersifat sangat dinamis baik dari sisi pelaku perdagangan maupun jenis komoditas atau barang yang diperdagangkan. Kegiatan perdagangan memerlukan dukungan sarana dan prasarana seperti pasar, pertokoan, kawasan/pusat perdagangan, konektivitas, serta jalan. Sarana dan prasarana tersebut menjadi salah satu aspek yang dapat meningkatkan dinamika perdagangan masyarakat. Pengembangan pariwisata dan industri juga akan mendorong berkembangnya aktivitas perdagangan masyarakat.

Dari sisi pelaku perdagangan, sebagian besar aktivitas perdagangan dilakukan atau didominasi oleh perusahaan perseorangan yaitu 3.025 di tahun 2023; meningkat sekitar dua kali lipat dibandingkan tahun 2022. Tahun 2024 bentuk usaha perseroan kembali naik cukup tajam menjadi 3.618. Kegiatan perdagangan selain memerlukan sarana dan prasarana fisik, juga melibatkan pihak lain seperti distributor atau pemasok. Dukungan sarana dan prasarana diharapkan akan mendorong lalu lintas perdagangan di Kutai Timur semakin meningkat baik lalu lintas perdagangan di dalam daerah maupun antardaerah.

Tabel 2.71 Bentuk Badan Usaha di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2024

Bentuk Badan Usaha	2021	2022	2023	2024
Perseroan Terbatas	51	176	245	195
Koperasi	8	65	37	55
Persekutuan Firma	–	–	–	-
Perusahaan Perseorangan	217	1.532	3.025	3.618
Persekutuan Komanditer	140	331	451	686
Yayasan	2	6	14	16
Lainnya	9	30	82	44
Jumlah/Total	**427**	**2.140**	**3.854**	**4.614**

Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka, 2025

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, harus dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sesuai dengan Pasal 279, ayat (2) dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Bidang Keuangan Daerah, dinyatakan sebagai berikut: (i) Pemberian sumber penerimaan Daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (ii) Pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (DAPER); (iii) Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang- undang; dan (iv) Pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal). Khusus terkait dengan pemberian sumber penerimaan Daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sementara dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; khususnya Pasal 156 juga telah dinyatakan bahwa: (i) Analisis keuangan Daerah dirumuskan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD; (ii) Analisis keuangan Daerah dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar

penentuan kebijakan keuangan Daerah; serta (iii) Kapasitas riil keuangan Daerah, diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan.

Keuangan daerah merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat.

Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya Belanja Daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan/stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Kutai Timur. Oleh karenanya kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Pasal 280, ayat (2); telah dinyatakan bahwa kewajiban penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah: (i) Mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; (ii) Menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan (iii) Melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

2.2.1 Realisasi APBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 1, ayat (26) telah disebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD dari sisi Pendapatan Daerah, mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DAPER) dan Lain–lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian pos Pendapatan Daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain–lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK); serta
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.

Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman. Perkembangan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur dan rata-rata pertumbuhannya selama kurun waktu Tahun 2020-2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2.72 Realisasi APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 (dalam Rp)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN DAERAH	3.491.592.184.252	3.116.655.808.498	5.124.474.001.354	8.597.328.360.021	10.440.426.780.704
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	214.021.234.386	253.159.605.189	272.430.833.078	352.462.374.617	532.251.880.804
Pajak Daerah	114.059.971.336	99.793.473.728	98.631.755.308	119.665.567.598	201.517.383.483
Retribusi Daerah	6.876.867.424	6.314.204.198	6.356.405.010	4.638.173.595	5.331.687.700
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.154.852.867	4.258.759.577	5.085.760.438	5.332.834.233	7.316.134.771
Lain-lain PAD yang Sah	88.929.542.759	142.793.167.686	162.356.912.322	222.825.799.191	318.086.674.850
Pendapatan Transfer	2.503.977.023.693	2.776.170.339.368	4.774.489.363.927	7.676.010.272.909	9.816.188.964.469
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	773.593.926.173	87.325.863.941	77.553.804.349	568.855.712.495	91.985.935.431
BELANJA DAERAH	3.378.216.857.846	2.843.825.472.652	4.047.272.765.263	8.357.502.854.791	11.970.560.837.722
Belanja Operasi	2.019.955.041.110	1.924.693.918.291	2.613.363.634.676	4.250.665.063.813	5.638.635.027.761
Belanja Pegawai	1.047.254.979.351	840.929.684.855	1.125.340.741.513	1.315.963.086.155	1.625.347.086.172
Belanja Barang dan Jasa	841.061.758.134	1.018.586.718.030	1.356.704.493.060	2.615.488.257.482	3.781.902.505.870
Belanja Bunga					
Belanja Subsidi		10.999.921.800			
Belanja Hibah	131.638.303.625	53.942.593.606	122.343.527.603	319.213.720.176	231.385.435.719
Belanja Bantuan Sosial		235.000.000	8.974.872.500		
Belanja Modal	846.728.032.422	706.899.903.373	1.005.918.036.438	3.295.383.241.069	5.082.907.431.862
Belanja Tidak Terduga	98.571.027.223	23.562.786.490	4.003.489.510		
Belanja Transfer	412.962.757.091	188.668.864.498	423.987.604.639	811.454.549.909	1.249.018.378.098
SURPLUS/DEFISIT	113.375.326.405	272.830.335.846	1.077.201.236.090	239.825.505.230	-1.530.134.057.018
PEMBIAYAAN DAERAH	159.230.318.401	266.834.893.005	501.865.228.850	1.532.566.464.941	1.737.332.505.394
Penerimaan Pembiayaan	164.230.318.401	271.834.893.005	540.865.228.850	1.579.066.464.941	1.772.332.505.394
Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000	5.000.000.000	39.000.000.000	46.500.000.000	35.000.000.000
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	272.605.644.807	539.665.228.851	1.579.066.464.941	1.772.391.970.171	207.198.448.377

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Timur

2.2.1.1 Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 1, ayat (26) telah disebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD dari sisi Pendapatan Daerah, mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DAPER) dan Lain–lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian pos Pendapatan Daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain–lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK); serta
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.

Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman. Perkembangan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur dan rata-rata pertumbuhannya selama kurun waktu Tahun 2020-2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2.73 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 (dalam Rp)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN DAERAH	3.491.592.184.252	3.116.655.808.498	5.124.474.001.354	8.597.328.360.021	10.440.426.780.704
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	214.021.234.386	253.159.605.189	272.430.833.078	352.462.374.617	532.251.880.804
Pajak Daerah	114.059.971.336	99.793.473.728	98.631.755.308	119.665.567.598	201.517.383.483
Retribusi Daerah	6.876.867.424	6.314.204.198	6.356.405.010	4.638.173.595	5.331.687.700
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.154.852.867	4.258.759.577	5.085.760.438	5.332.834.233	7.316.134.771
Lain-lain PAD yang Sah	88.929.542.759	142.793.167.686	162.356.912.322	222.825.799.191	318.086.674.850
Pendapatan Transfer	2.503.977.023.693	2.776.170.339.368	4.774.489.363.927	7.676.010.272.909	9.816.188.964.469
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	773.593.926.173	87.325.863.941	77.553.804.349	568.855.712.495	91.985.935.431

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Timur

Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu tahun 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, total pendapatan daerah tercatat sebesar Rp3,49 triliun, kemudian sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi Rp3,11 triliun, namun kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai Rp10,44 triliun pada tahun 2024. Dengan demikian, secara rata-rata terjadi pertumbuhan lebih dari 30% per tahun, yang menunjukkan adanya peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan perkembangan positif, dari Rp214 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp532 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini terutama didorong oleh pertumbuhan Pajak Daerah, sementara komponen Retribusi Daerah masih relatif stagnan dan kontribusinya sangat kecil terhadap total PAD. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain PAD yang Sah juga memberikan tambahan kontribusi, meskipun dengan pola yang berfluktuasi.

Sumber utama pendapatan daerah masih berasal dari Pendapatan Transfer, yang perannya sangat dominan terhadap struktur pendapatan daerah. Dari Rp2,5 triliun pada tahun 2020, transfer meningkat hampir empat kali lipat menjadi Rp9,8 triliun pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan tingginya tingkat ketergantungan fiskal Kabupaten Kutai Timur terhadap pemerintah pusat. Sementara itu, pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan fluktuasi cukup tajam, yang menggambarkan sifat penerimaan yang tidak stabil.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat peningkatan yang cukup pesat dalam total pendapatan daerah, proporsi PAD terhadap total pendapatan masih tergolong rendah, yaitu sekitar 5% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Kutai Timur masih terbatas, dan masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Oleh karena itu, ke depan diperlukan upaya penguatan basis penerimaan daerah melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi, serta pengembangan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, guna meningkatkan kapasitas fiskal dan memperkuat kemandirian pembangunan daerah.

2.2.1.2 Belanja Daerah

Berdasarkan pada Pasal 298 dari UU Nomor 23 Tahun 2014, khususnya yang membahas tentang Belanja Daerah, telah dijelaskan beberapa hal sebagai berikut: (i) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (ii) Belanja Daerah berpedoman pada Standar Teknis dan Standar Harga Satuan Regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta (iii) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berpedoman pada Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga Satuan Regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambaran tentang perkembangan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur selama Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.86.

Tabel 2.74 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 (dalam Rp)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
BELANJA DAERAH	3.378.216.857.846	2.843.825.472.652	4.047.272.765.263	8.357.502.854.791	11.970.560.837.722
Belanja Operasi	2.019.955.041.110	1.924.693.918.291	2.613.363.634.676	4.250.665.063.813	5.638.635.027.761
Belanja Pegawai	1.047.254.979.351	840.929.684.855	1.125.340.741.513	1.315.963.086.155	1.625.347.086.172
Belanja Barang dan Jasa	841.061.758.134	1.018.586.718.030	1.356.704.493.060	2.615.488.257.482	3.781.902.505.870
Belanja Bunga					
Belanja Subsidi		10.999.921.800			
Belanja Hibah	131.638.303.625	53.942.593.606	122.343.527.603	319.213.720.176	231.385.435.719
Belanja Bantuan Sosial		235.000.000	8.974.872.500		
Belanja Modal	846.728.032.422	706.899.903.373	1.005.918.036.438	3.295.383.241.069	5.082.907.431.862
Belanja Tidak Terduga	98.571.027.223	23.562.786.490	4.003.489.510		
Belanja Transfer	412.962.757.091	188.668.864.498	423.987.604.639	811.454.549.909	1.249.018.378.098
SURPLUS/DEFISIT	113.375.326.405	272.830.335.846	1.077.201.236.090	239.825.505.230	-1.530.134.057.018

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Timur

Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam periode 2020–2024 menunjukkan tren yang meningkat signifikan. Pada tahun 2020, total belanja daerah tercatat sebesar Rp3,37 triliun, kemudian sempat menurun menjadi Rp2,84 triliun pada tahun 2021. Namun, mulai tahun 2022 belanja mengalami lonjakan tajam hingga mencapai Rp11,97 triliun pada tahun 2024.

Komponen Belanja Operasi mendominasi struktur belanja daerah, dengan porsi terbesar pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Pada 2024, belanja operasi mencapai lebih dari Rp5,6 triliun atau hampir separuh dari total belanja daerah. Selain itu, belanja modal juga tumbuh signifikan dari Rp846 miliar (2020) menjadi Rp5,08 triliun (2024), menunjukkan adanya peningkatan alokasi untuk pembangunan infrastruktur dan aset daerah. Adapun belanja transfer dan belanja hibah mengalami fluktuasi, sedangkan belanja bantuan sosial relatif kecil kontribusinya.

Jika dibandingkan dengan perkembangan pendapatan daerah pada tabel sebelumnya, terlihat bahwa meskipun pendapatan meningkat pesat (dari Rp3,49 triliun pada 2020 menjadi Rp10,44 triliun pada 2024), pertumbuhan belanja daerah lebih cepat, terutama sejak 2022. Kondisi ini berimplikasi pada posisi surplus/defisit APBD. Pada 2020–2023, APBD masih mencatatkan surplus, dengan puncaknya di tahun 2022 sebesar Rp1,07 triliun. Namun, pada 2024 terjadi pembalikan drastis menjadi defisit Rp1,53 triliun, seiring peningkatan belanja yang melampaui kenaikan pendapatan. Hal ini menyimpulkan bahwa:

- Surplus pada 2020–2022 menunjukkan adanya ruang fiskal yang cukup baik bagi pemerintah daerah untuk mengakselerasi pembangunan.
- Defisit pada 2024 menjadi peringatan bahwa pengelolaan belanja harus lebih hati-hati, agar lonjakan belanja modal dan belanja operasi tidak menimbulkan risiko keberlanjutan fiskal.
- Struktur pendapatan yang masih bergantung pada transfer pusat, ditambah tingginya pertumbuhan belanja, menegaskan perlunya strategi peningkatan PAD untuk mendukung kemandirian fiskal daerah.

2.2.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang

akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

APBD dapat didanai dari Penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD. Penjabaran lebih lanjut juga dinyatakan bahwa Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari: (i) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; (ii) Pencairan dana cadangan; (iii) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan; (iv) Pinjaman Daerah; dan (v) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.75 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 (Dalam Rp)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PEMBIAYAAN DAERAH	159.230.318.401	266.834.893.005	501.865.228.850	1.532.566.464.941	1.737.332.505.394
Penerimaan Pembiayaan	164.230.318.401	271.834.893.005	540.865.228.850	1.579.066.464.941	1.772.332.505.394
Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000	5.000.000.000	39.000.000.000	46.500.000.000	35.000.000.000
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	272.605.644.807	539.665.228.851	1.579.066.464.941	1.772.391.970.171	207.198.448.377

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Timur

Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, total pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp159,23 miliar, kemudian naik hampir sebelas kali lipat menjadi Rp1,73 triliun pada tahun 2024. Komponen terbesar berasal dari penerimaan pembiayaan, yang meningkat dari Rp164,23 miliar (2020) menjadi Rp1,77 triliun (2024). Peningkatan ini menunjukkan adanya pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan, terutama dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, sebagai salah satu instrumen untuk menutup defisit dan mendukung belanja pembangunan.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan relatif kecil dibanding penerimaan, meskipun cenderung meningkat, dari Rp5 miliar (2020–2021) menjadi Rp39 miliar (2022), Rp46,5 miliar (2023), dan Rp35 miliar (2024). Peningkatan ini terkait kewajiban pemerintah daerah seperti penyertaan modal atau kewajiban pembiayaan lainnya. Posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) juga memperlihatkan dinamika yang cukup mencolok. Pada 2020–2023, SiLPA tercatat sangat besar, bahkan mencapai Rp1,77 triliun pada tahun 2023, yang menunjukkan adanya sisa ruang fiskal cukup tinggi. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan drastis menjadi hanya Rp207,19 miliar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar ruang fiskal telah digunakan untuk menutup defisit akibat tingginya lonjakan belanja pada tahun tersebut.

Jika dikaitkan dengan perkembangan pendapatan dan belanja:

- Surplus 2020–2022 ditopang tidak hanya dari pendapatan yang tumbuh, tetapi juga dari SiLPA yang besar sehingga pembiayaan relatif aman.
- Defisit 2024 sebesar Rp1,53 triliun yang muncul pada APBD, pada akhirnya ditutupi oleh penerimaan pembiayaan yang juga melonjak hingga Rp1,77 triliun.
- Fluktuasi SiLPA menunjukkan bahwa meskipun kapasitas fiskal meningkat, kemampuan perencanaan dan penyerapan anggaran masih menghadapi tantangan, yang perlu diperbaiki agar pembiayaan tidak sekadar menjadi penyeimbang defisit, tetapi benar-benar diarahkan untuk memperkuat program prioritas pembangunan.

2.2.2 Neraca Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah mengalami dua kali perubahan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, terjadi perubahan mendasar dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah. Perubahan ini mencakup pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sehingga menjadi lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan akuntabel dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, termasuk segala bentuk kekayaan yang menjadi milik Daerah terkait dengan hak dan kewajiban tersebut.

Neraca daerah menggambarkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah dan kondisi ekuitas dana yang tersedia. Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Neraca daerah merupakan alat yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dengan menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas, neraca ini memberikan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan daerah, yang sangat krusial untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang efektif. Berikut merupakan Tabel Neraca Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2019 - 2024.

Tabel 2.76 Neraca Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019-2024 (dalam Rp)

AKUN	2019	2020	2021	2023	2024
TOTAL ASET	**9.780.644.494.000,34**	**9.889.919.115.440**	**9.980.115.527.849**	**35.572.579.735.151**	**15.986.161.131.119,50**
ASET LANCAR	**289.046.081.157,75**	**485.557.583.611**	**605.853.864.312**	**4.264.092.128.545**	**633.959.272.930**
Kas dan Setara Kas	166.137.294.982,31	272.612.678.007,55	539.688.244.555	3.544.958.314.139	92.698.770.223,83
Investasi Jangka Pendek					
Piutang Pendapatan	46.744.556.864,04	103.469.694.118,00	42.864.329	61.418.624.457	
Piutang Lainnya			29.800.000	3.615.760.041	
Penyisihan Piutang				-14.433.844.300	-11.523.916.141,83
Beban dibayar Dimuka	1.310.565.708,33	1.169.977.941,66	1.147.701.500	32.175.988.540	33.375.186.426,60
Persediaan	74.853.663.603,07	108.305.233.543,56	64.945.253.927	636.357.285.667	519.409.232.421,40
Aset untuk Dikonsolidasikan					
Aset Lancar Lainnya					
INVESTASI JANGKA PANJANG	**154.393.236.883,21**	**162.516.334.330**	**165.573.863.199**	**491.532.673.431**	**286.142.553.670,64**
Investasi Nonpermanen	1.168.468.513,00	1.168.468.513,00	1.168.468.513		
Investasi Permanen	153.224.768.370,21	161.347.865.817,37	164.405.394.686	491.532.673.431	286.142.553.670,64
ASET TETAP	**9.163.876.081.365,98**	**8.657.353.156.630**	**8.503.499.550.906**	**23.365.039.734.889**	**14.390.190.080.151**
Tanah	1.619.834.634.972,00	1.653.719.241.907,00	1.662.212.287.133	3.602.453.128.984	1.751.490.400.637
Peralatan dan Mesin	1.701.559.983.888,40	1.832.936.707.003,30	1.922.527.326.007	5.452.580.317.088	3.687.627.527.477.224,63
Gedung dan Bangunan	3.564.528.662.858,50	3.751.592.753.585,50	3.759.333.371.584	9.329.744.473.244	5.345.321.600.521,57
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.128.704.475.748,60	6.239.710.506.175,60	6.751.942.867.202	18.092.563.774.208	12.510.527.459.785,22
Aset Tetap Lainnya	179.459.773.802,18	88.570.780.327,03	92.155.807.120	226.156.537.316	197.396.252.768,03
Konstruksi dalam Pengerjaan	312.078.103.838,00	336.178.792.219,00	212.039.331.601	1.120.726.160.036	720.591.423.113,79
Akumulasi Penyusutan	4.342.289.553.741,70	5.245.355.624.587,90	-5.896.711.439.741	-14.459.184.655.987	-8.071.274.133.262,32
DANA CADANGAN					
Dana Cadangan					
ASET LAINNYA	**173.329.094.593,40**	**584.492.040.869**	**705.188.249.433**	**7.451.915.199.286**	**873.265.477.136**

AKUN	2019	2020	2021	2023	2024
Tagihan Jangka Panjang					17.691.244.385,16
Kemitraan dengan Pihak Ketiga					
Aset Tak Berwujud	17.448.856.994,37	21.233.148.962,52	57.982.498.804		134.534.371.830,39
Aset Lain-Lain	155.880.237.599,03	563.258.891.906,47	647.205.750.628		721.039.860.920,49
KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA					
KEWAJIBAN	**397.254.605.794,08**	**344.257.590.702**	**98.837.262.202**	**379.328.967.779**	**1.440.428.250.924,88**
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**397.254.605.794,08**	**344.257.590.702**	**98.837.262.202**	**379.328.967.779**	**1.440.428.250.924,88**
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2.400,00	63.200,00			
Utang Bunga					
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang					
Pendapatan Diterima di Muka	287.836.311,59	546.097.750,00	692.501.608	1.142.917.500	577.803.739,33
Utang Belanja	97.680.857.001,00	114.289.882.366,54	98.144.760.594	57.289.382.502	1.439.850.447.185,55
Utang Jangka Pendek Lainnya	299.285.910.081,49	229.421.547.385,89		320.896.667.777	
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang Dalam Negeri					
Utang Jangka Panjang Lainnya					
EKUITAS	**9.383.389.888.206,30**	**9.545.661.524.737**	**9.930.426.337.963**	**41.117.947.754.002**	**17.682.718.767.363,43**
EKUITAS	**9.383.389.888.206,30**	**9.545.661.524.737**	**9.930.426.337.963**	**41.117.947.754.002**	**17.682.718.767.363,43**
Ekuitas	9.383.389.888.206,30	9.545.661.524.737,20	9.930.426.337.963	41.117.947.754.002	17.682.718.767.363,43

Catatan: BPKAD Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan Tabel 2.76, Neraca Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2023 menyajikan gambaran menyeluruh mengenai posisi keuangan pemerintah daerah, dengan total aset mencapai Rp 35.572.579.735.151, dengan rincian sebagai berikut: Aset Lancar tercatat sebesar Rp 4.264.092.128.545, mencakup kas, piutang, dan persediaan. Aset lancar ini menunjukkan likuiditas yang memadai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Aset Tetap mencakup investasi dalam infrastruktur dan properti, dengan total mencapai Rp 23.365.039.734.889. Aset tetap ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi Kewajiban, total Kewajiban tercatat sebesar Rp 379.328.967.779. Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Kewajiban jangka pendek, yang mencakup utang dan kewajiban lainnya, menunjukkan tanggung jawab keuangan yang harus dipenuhi dalam waktu dekat.

Sedangkan dari sisi ekuitas, tercatat total ekuitas Rp 41.117.947.754.002. Ekuitas mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah setelah dikurangi kewajiban. Ini menunjukkan kemampuan daerah untuk mendanai program dan kegiatan tanpa bergantung pada utang.

Tabel 2.77 Rata-rata Pertumbuhan Aset Kabupaten Kutai Timur

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	**TOTAL ASET**	**38,10%**
1.1	**ASET LANCAR**	**95,98%**
1.1.1	Kas dan Setara Kas	**114,92%**
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	
1.1.3	Piutang Pendapatan	**7,06%**
1.1.4	Piutang Lainnya	
1.1.5	Penyisihan Piutang	
1.1.6	Beban dibayar Dimuka	**122,60%**
1.1.7	Persediaan	**70,75%**
1.1.8	Aset untuk Dikonsolidasikan	
1.1.9	Aset Lancar Lainnya	
1.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**33,58%**
1.2.1	Investasi Nonpermanen	**-100,00%**
1.2.2	Investasi Permanen	**33,83%**

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.3	**ASET TETAP**	**26,36%**
1.3.1	Tanah	**22,12%**
1.3.2	Peralatan dan Mesin	**33,79%**
1.3.3	Gedung dan Bangunan	**27,19%**
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	**31,08%**
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	**5,95%**
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	**37,66%**
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	**35,08%**
1.4	**DANA CADANGAN**	
1.4.1	Dana Cadangan	
1.5	**ASET LAINNYA**	**156,06%**
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	
1.5.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	
1.5.3	Aset Tak Berwujud	**77,25%**
1.5.4	Aset Lain-Lain	**161,41%**
2	**KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA**	
2.1	**KEWAJIBAN**	**-1,15%**
2.1.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**-1,15%**
2.1.1.1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	**-100,00%**
2.1.1.2	Utang Bunga	
2.1.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	
2.1.1.4	Pendapatan Diterima di Muka	**41,16%**
2.1.1.5	Utang Belanja	**-12,49%**
2.1.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	**1,76%**
2.1.2	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	
2.1.2.1	Utang Dalam Negeri	
2.1.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	
2.2	**EKUITAS**	**44,68%**
	EKUITAS	**44,68%**
2.2.1	Ekuitas	**44,68%**

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Timur

Untuk mengetahui kondisi rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dilakukan analisis terhadap rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Secara lengkap,

perkembangan rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019-2023, dapat di lihat pada Tabel 2.78.

Tabel 2.78 Analisis Neraca Kabupaten Kutai Timur

No	Jenis Analisis	Hasil analisis				Rata-rata
		2019	2020	2021	2023	
1	**Rasio Liquiditas**					
	a. Rasio Lancar	0,73	1,22	6,13	11,24	1,22
	b. Rasio Quick	0,54	1,03	5,47	9,56	1,03
2	**Rasio Solvabilitas**					
	a. Rasio Total Hutang Terhadap Aset	0,0406	0,0348	0,0099	0,0107	0.0348
	b. Rasio hutang terhadap modal	0,0423	0,0361	0,0100	0,0092	0,0361

Berdasarkan Tabel 2.90, rasio keuangan yang dianalisis terdiri atas rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis yaitu:

1. Rasio Lancar

   Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Berdasarkan Tabel 2.90 di atas, rasio lancar dari tahun 2019 sampai 2023 mengalami kenaikan. Kondisi terparah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,73. Hal ini mengindikasi kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi hutang jangka pendeknya melalui aset lancar hanya sebesar 0,73 kali. Kemudian pada tahun 2020 kembali meningkat sebesar 1,22 dan di tahun 2021 sebesar 6,13, serta di tahun 2023 sebesar 11,24. Rasio lancar perlu dijaga jangan sampai menurun tiap tahunnya. Penurunan nilai rasio lancar dari tahun ke tahun memberi pertanda yang kurang baik dan perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

2. Rasio *Quick*

   Rasio *Quick* menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan Tabel 2.90 di atas, juga terjadi fluktuasi dengan rata-rata 1,03. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam membayar

kewajiban jangka pendek cukup baik akan tetapi perlu di tingkatkan setiap tahunnya sehingga mencapai level di atas angka 10.

Sedangkan Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas terdiri atas:

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

   Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, di mana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Besar Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset rata-rata sebesar 0,348. Hal ini menunjukkan total aset pemerintah Kabupaten Kutai Timur cukup baik karena masih di bawah angka 1.

2. Rasio Hutang Terhadap Modal

   Rasio Hutang Terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, di mana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Rata-rata rasio hutang terhadap modal sebesar 0,0361.

2.2.3 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025-2030

Pada proyeksi keuangan daerah ini bertujuan untuk menentukan seluruh kapasitas keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendukung program pembangunan jangka menengah daerah dan prioritas utama untuk lima tahun ke depan, yang berakhir pada tahun 2030, serta alokasi untuk pengeluaran daerah lainnya dan pengeluaran berkala yang bersifat wajib dan mengikat.

Untuk sampai pada perkiraan jumlah penerimaan kas daerah secara keseluruhan, prediksi pendapatan daerah harus dihitung. Hal ini akan memungkinkan untuk menentukan kemampuan sebenarnya dari kapasitas keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah. Untuk menghasilkan prediksi kemampuan keuangan daerah yang sebenarnya untuk lima tahun ke depan. Proyeksi kerangka pendanaan tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.79 Proyeksi Keuangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2030 (dalam Rp)

URAIAN			2025	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN DAERAH			**8.425.454.264.416**	**6.383.224.200.000**	**6.648.381.424.950**	**6.926.796.511.148**	**7.219.132.351.655**	**7.526.084.984.188**
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		358.388.327.000	358.388.327.000	376.307.743.350	395.123.130.518	414.879.287.043	4,35623E+11
	1	Pajak Daerah	208.019.299.000	208.019.299.000	218.420.263.950	229.341.277.148	240.808.341.005	252.848.758.055
	2	Retribusi Daerah	118.447.153.000	118.447.153.000	124.369.510.650	130.587.986.183	137.117.385.492	143.973.254.766
	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.441.875.000	7.441.875.000	7.813.968.750	8.204.667.188	8.614.900.547	9.045.645.574
	4	Lain-lain PAD yang Sah	24.480.000.000	24.480.000.000	25.704.000.000	26.989.200.000	28.338.660.000	29.755.593.000
2	Pendapatan Transfer		7.975.080.937.416	5.932.850.873.000	6.180.088.681.600	6.439.688.380.630	6.712.268.064.612	6.998.476.732.792
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		91.985.000.000	91.985.000.000	91.985.000.000	91.985.000.000	91.985.000.000	91.985.000.000
BELANJA DAERAH			**8.390.454.264.416**	**6.348.224.200.000**	**6.613.381.424.950**	**6.891.796.511.148**	**7.184.132.351.655**	**7.491.084.984.188**
1	Belanja Operasi		4.299.132.250.947	3.252.726.793.376	3.388.589.041.286	3.531.244.401.593	3.681.032.529.914	3.838.310.064.651
	1	Belanja Pegawai	2.517.136.279.325	1.904.467.260.000	1.984.014.427.485	2.067.538.953.344	2.155.239.705.497	2.247.325.495.256
	2	Belanja Barang dan Jasa	1.594.186.310.239	1.206.162.598.000	1.256.542.470.741	1.309.441.337.118	1.364.985.146.814	1.423.306.146.996
	3	Belanja Hibah	187.809.661.383	142.096.935.376	148.032.143.061	154.264.111.130	160.807.677.603	167.678.422.399
2	Belanja Modal		3.356.181.705.766	2.539.289.680.000	2.645.352.569.980	2.756.718.604.459	2.873.652.940.662	2.996.433.993.675
3	Belanja Tidak Terduga		21.951.695.227	16.608.669.624	17.302.392.563	18.030.801.649	18.795.631.188	19.598.702.205
4	Belanja Transfer		713.188.612.475	539.599.057.000	562.137.421.121	585.802.703.448	610.651.249.891	636.742.223.656
SURPLUS/DEFISIT			**35.000.000.000**	**35.000.000.000**	**35.000.000.000**	**35.000.000.000**	**35.000.000.000**	**35.000.000.000**
PEMBIAYAAN DAERAH								
1	**Penerimaan Pembiayaan**		-	-	-	-	-	-
	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu						
	2	Pencairan Dana Cadangan						
	3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						

URAIAN			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	4	Penerimaan Pinjaman Daerah						
	5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman						
2	**Pengeluaran Pembiayaan**		**35.000.000.000**	**35.000.000.000**	**35.000.000.000**	**35.000.000.000**	**35.000.000.000**	**35.000.000.000**
	1	Pembentukan Dana Cadangan						
	2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000
	3	Pembayaran Pokok Utang						
	4	Pemberian Pinjaman Daerah						
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			-	0	-	-	0	-

Total pendapatan daerah Kutai Timur pada 2025 diproyeksikan sebesar Rp8,43 triliun dan mengalami fluktuasi selama periode proyeksi lima tahun, sempat turun signifikan pada 2026 menjadi Rp6,38 triliun, sebelum kembali naik dan mencapai Rp7,53 triliun pada 2030. Penurunan pada 2026 terutama berasal dari berkurangnya pendapatan transfer, yang menjadi komponen dominan dengan kontribusi sekitar 94–95% dari total pendapatan daerah. Hal ini menegaskan ketergantungan keuangan daerah pada Dana Transfer dari Pemerintah Pusat, terutama DBH dari sektor pertambangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif kecil dengan rata-rata kontribusi hanya sekitar 4–5% per tahun. Meskipun terjadi tren kenaikan terutama pada komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peningkatan tersebut belum signifikan untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat. Dari sisi belanja daerah, total belanja selalu diupayakan seimbang dengan pendapatan (*balanced budget*), yang ditunjukkan dengan adanya surplus/defisit sebesar Rp35 miliar per tahun yang kemudian dialokasikan untuk pengeluaran pembiayaan, terutama penyertaan modal pemerintah daerah. Komposisi belanja terbesar masih didominasi oleh Belanja Operasi (lebih dari 65% dari total belanja), khususnya belanja pegawai yang pada 2025 mencapai Rp2,52 triliun dan cenderung meningkat hingga Rp2,42 triliun pada 2030. Hal ini menunjukkan tingginya rigiditas belanja daerah yang membuat ruang fiskal (*fiscal space*) untuk belanja pembangunan menjadi terbatas.

Belanja Modal menunjukkan tren yang cukup positif, meskipun mengalami penurunan pada 2026 dan 2027, namun meningkat kembali hingga Rp2,99 triliun pada 2030. Peningkatan belanja modal ini penting sebagai indikasi komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat infrastruktur dan investasi pembangunan jangka panjang. Dari sisi pembiayaan daerah, terlihat bahwa pemerintah daerah secara konsisten mengalokasikan Rp35 miliar per tahun untuk penyertaan modal (investasi) kepada BUMD atau pihak terkait. Tidak terdapat komponen pembiayaan dari pinjaman daerah, sehingga ketergantungan terhadap utang tetap nol, menjaga kondisi fiskal daerah tetap sehat.

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan pola fiskal yang hati-hati (*prudent fiscal policy*) dengan memastikan belanja tidak melebihi pendapatan. Namun, fluktuasi tajam pada pendapatan terutama di 2026 menjadi perhatian penting karena

berpotensi memengaruhi kemampuan belanja publik. Pemerintah daerah perlu memperkuat diversifikasi PAD, melakukan efisiensi belanja operasional, serta menjaga porsi belanja modal agar tetap optimal sehingga pembangunan daerah dapat terus berlanjut meskipun terjadi penurunan pendapatan transfer dari pusat..

Tabel 2.80 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2030 (dalam Rp)

NO	Uraian	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan	8,425,454,264,416	6,383,224,200,000	6,648,381,424,950	6,926,796,511,148	7,219,132,351,655	7,526,084,984,188
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)						
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran						
Total Penerimaan		8,425,454,264,416	6,383,224,200,000	6,648,381,424,950	6,926,796,511,148	7,219,132,351,655	7,526,084,984,188
	Dikurangi:						
4	Pengeluaran Pembiayaan	35,000,000,000	35,000,000,000	35,000,000,000	35,000,000,000	35,000,000,000	35,000,000,000
5	Belanja Tidak Terduga	21,951,695,227	16,608,669,624	17,302,392,563	18,030,801,649	18,795,631,188	19,598,702,205
6	Belanja Transfer	713,188,612,475	539,599,057,000	562,137,421,121	585,802,703,448	610,651,249,891	636,742,223,656
Kapasitas Kemampuan Keuangan		**7,655,313,956,713**	**5,792,016,473,376**	**6,033,941,611,266**	**6,287,963,006,052**	**6,554,685,470,576**	**6,834,744,058,327**

Sumber: Data diolah

Tabel 2.81 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2030 (dalam Rp)

Uraian	Proyeksi					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kapasitas Kemampuan Keuangan	7,655,313,956,713	5,792,016,473,376	6,033,941,611,266	6,287,963,006,052	6,554,685,470,576	6,834,744,058,327
Prioritas I	3,827,656,978,357	2,896,008,236,688	3,016,970,805,633	3,143,981,503,026	3,277,342,735,288	3,417,372,029,163
Prioritas II	2,679,359,884,850	2,027,205,765,682	2,111,879,563,943	2,200,787,052,118	2,294,139,914,702	2,392,160,420,414
Prioritas III	1,148,297,093,507	868,802,471,006	905,091,241,690	943,194,450,908	983,202,820,586	1,025,211,608,749
Total Belanja Prioritas	7,655,313,956,713	5,792,016,473,376	6,033,941,611,266	6,287,963,006,052	6,554,685,470,576	6,834,744,058,327

Sumber: Data diolah

Berdasarkan proyeksi, kapasitas kemampuan keuangan daerah Kutai Timur pada tahun 2025 mencapai Rp7,65 triliun. Namun, pada 2026 terjadi penurunan signifikan hingga Rp5,79 triliun, sebelum kembali meningkat bertahap hingga mencapai Rp6,83 triliun pada 2030. Fluktuasi ini menggambarkan ketergantungan penerimaan daerah terhadap dinamika harga komoditas, kebijakan transfer pusat, serta kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Dari sisi alokasi belanja prioritas, struktur pembiayaan daerah diarahkan secara proporsional untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan dasar, pelaksanaan visi-misi kepala daerah, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

- Prioritas Pertama dialokasikan untuk belanja langsung wajib dan mengikat, termasuk layanan publik dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar), serta kewajiban lain yang tidak dapat ditunda. Alokasi besar pada kelompok ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya pelayanan dasar masyarakat.
- Prioritas Kedua digunakan untuk membiayai program-program strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Porsi ini diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan daya saing daerah.
- Prioritas Ketiga diperuntukkan bagi pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya, seperti koordinasi, administrasi, dan penguatan kapasitas birokrasi. Porsi ini tetap penting untuk memastikan kelancaran roda pemerintahan secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, pola distribusi ini menunjukkan adanya keseimbangan yang terukur antara kebutuhan mendasar, agenda pembangunan strategis, dan urusan administratif. Namun, penurunan kapasitas keuangan pada 2026 menjadi sinyal penting perlunya langkah antisipatif. Pemerintah daerah perlu memperkuat strategi peningkatan PAD, efisiensi belanja, dan diversifikasi ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada fluktuasi komoditas pertambangan. Dengan demikian, pembangunan tetap dapat berjalan sesuai target RPJMD sekaligus menjaga stabilitas fiskal jangka menengah.

2.2.4 Potensi *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Potensi pendanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) di daerah sangat besar, terutama melalui program-program yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Dana CSR, yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, dapat dialokasikan untuk berbagai bidang seperti pengembangan sumber daya manusia, kesehatan, UMKM, pelestarian lingkungan, dan infrastruktur sosial.

Untuk memaksimalkan potensi pendanaan CSR, perusahaan perlu menyusun program yang terencana, terukur, dan berkelanjutan serta melibatkan Masyarakat dalam proses perencanaannya. Perusahaan juga perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal, untuk memastikan program CSR berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Dalam Peraturan Bupati Kutai Timur No. 42 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, sudah diatur tata cara pelaksanaan penggunaan dana CSR dengan pelaksana Forum TJSL dan/atau Tim Pelaksana TJSL. Pada Perbup tersebut, dana TJSL perusahaan adalah dana yang dialokasikan atau yang dimasukkan dalam pembukuan keuangan oleh perusahaan untuk program TJSL perusahaan yang bersangkutan. Realisasi dana untuk pelaksanaan program TJSL yang dilaksanakan oleh perusahaan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. Besarnya jumlah dana TJSL ditentukan oleh masing-masing Perusahaan dengan tetap berpegang pada asas yang tertera pada perbup tersebut. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim Pelaksana TJSL wajib didukung dengan pendanaan dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam keanggotaan Forum TJSL. Besarnya dana dukungan terhadap Tim Pelaksana TJSL diatur berdasarkan kesepakatan bersama, Tim Pelaksana TJSL melaporkan penggunaan dana setiap tahun kepada Forum TJSL sebagai bentuk pertanggungjawaban.

2.2.5 Kebijakan Percepatan Proyek Infrastruktur Strategis Daerah Melalui Mekanisme Tahun Jamak (*Multi Years*)

Tujuan dari rencana anggaran kegiatan *multi years* ini adalah untuk mendukung proyek jangka panjang yang memerlukan waktu lebih dari satu tahun untuk

diselesaikan, atau proyek yang manfaatnya lebih optimal jika dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Pelaksanaan proyek infrastruktur strategis daerah khususnya untuk menjamin konektivitas antara wilayah serta ketersediaan prasarana infrastruktur pelayanan publik strategis merupakan bagian penting dari pemenuhan prioritas pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya beberapa kegiatan tersebut yang memerlukan jangka waktu lebih dari satu tahun untuk penyelesaian secara konstruksi. Oleh karena itu untuk menjamin tuntasnya pelaksanaan proyek strategis daerah tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timur akan menggunakan mekanisme *Multi Years Contrac (MYC)* sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kegiatan yang didanai melalui pola *Multi Years Contrac (MYC)* ini harus memenuhi kriteria paling sedikit : (a). pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau (b). pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran. Penganggaran kegiatan Tahun Jamak ini akan dilakukan persetujuan bersama antara Kepala daerah dan DPRD dan persetujuannya ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.

Pelaksanaan Proyek proyek infrastruktur strategis daerah melalui pola *Multi Years Contrac (MYC)* akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun anggaran yang dimulai pada tahun 2026 sampai dengan 2028 yang kegiatannya mengacu pada Program yang tercantum dalam dokumen RPJMD.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

Setiap daerah pasti menghadapi berbagai permasalahan dalam pembangunan. Permasalahan pembangunan daerah bersifat dinamis, baik yang disebabkan faktor internal maupun eksternal apalagi untuk Kabupaten Kutai Timur yang masih tergolong daerah yang baru berdiri berdasarkan Undang-undang No. 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. Berdasarkan hasil analisis terhadap data capaian pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan dengan melihat hasil

evaluasi RKPD tahun 2024, berikut permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi oleh Kabupaten Kutai Timur dalam pembangunan daerah.

2.3.1 Permasalahan

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Setelah menelaah kajian data dan informasi di Bab 2.1 dan menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, diperoleh rumusan 5 (lima) permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Kutai Timur, yaitu:

Tabel 2.82 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia dan cenderung terjadi ketidakmerataan antar wilayah	Belum optimalnya Pelayanan Kesehatan dasar Masyarakat	Akses layanan kesehatan sulit di daerah tertentu
			Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan ibu dan calon pengantin yang mengakibatkan masih terdapat kasus kematian ibu dan bayi
			Pelayanan kesehatan lansia belum optimal dikarenakan lemahnya koordinasi lintas sektor
			Terbatasnya akses layanan TBC yang berkesinambungan
			Masih banyak puskesmas yang belum membentuk tim jejaring kinerja dalam penanganan dan pengendalian penyakit DM di masyarakat
			Kerjasama antar fasilitas kesehatan, terutama fasyankes swasta, belum optimal
			Kurangnya dukungan lintas sektor dalam penanganan ODGJ
			Rendahnya akses dan kualitas layanan kesehatan produktif
			Rendahnya akses dan kualitas layanan kesehatan hipertensi

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Rendahnya ODHIV yang mengakses layanan pengobatan
			Distribusi nakes tidak merata
			Belum meratanya peningkatan kompetensi yang diterima setiap nakes dikarenakan belum adanya kebijakan pemda tentang program standar kompetensi nakes
			Masih ada fasilitas kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit yang belum memenuhi standar
			Belum semua puskesmas terakreditasi paripurna
			Edukasi dan promosi kesehatan belum optimal
		Kasus gizi buruk dan stunting masih tinggi	Keterbatasan akses pangan bergizi
			Kurangnya tenaga kesehatan gizi
			lemahnya intervensi gizi di tingkat komunitas
		Terbatasanya fasilitas serta sarana dan prasarana pelayanan RSUD	Kurangnya ketersediaan tenaga kesehatan di RSUD
			Terbatasnya akses dan kualitas layanan rujukan
			Belum optimalnya digitalisasi/pemanfaatan teknologi informasi bidang kesehatan
		Belum Optimalnya Pemenuhan Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Belum optimalnya standar pelayanan minimal pendidikan untuk penerima layanan dasar dan mutu minimal layanan dasar
			Belum merata dan terpenuhinya sarana, prasarana untuk wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi atau tersebar pada jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan nonformal/kesetaraan
			Belum meratanya persebaran pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompetensi dan berkualifikasi serta masih rendahnya kesejahteraan guru honorer
			Belum optimalnya kurikulum mulok yang relevan dengan kearifan lokal yang telah ditetapkan pada Jenjang PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
		Masih rendahnya kemampuan Literasi Masyarakat	Kurangnya jenis bahan bacaan dan pendistribusian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
			Rendahnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan (di kabupaten, kecamatan, dan desa)
			Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana perpustakaan di wilayah Kutai Timur
			Belum terlaksananya peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan (bimtek, sertifikasi pustakawan, diklat pustakawan)
			Banyaknya perpustakaan dan yang belum ber-SNP

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum Optimalnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan sebagai kewenangan pada tingkat kabupaten.
			Terbatasnya pelaksanaan kejuaraan olahraga *multi event* dan *single event* tingkat Kabupaten Kutai Timur
			Sinergitas pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi belum optimal.
		Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Daerah Kutai Timur	belum adanya sebuah wadah komunikasi yang memfasilitasi *stakeholder* terkait, pemangku kepentingan, pegiat budaya serta elemen masyarakat yang berkontribusi terhadap pengembangan kebudayaan melalui pelaksanaan *event* kebudayaan
			Kurangnya pembinaan seni budaya dan pelestarian seni tradisional
			Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pembinaan sejarah
			Masih kurangnya pusat dokumentasi sejarah dan pemeliharaan situs sejarah yang ada serta belum adanya program digitalisasi dan modernisasi dalam pengelolaan sejarah daerah
			Belum adanya tim ahli cagar budaya Kabupaten Kutai Timur.
			Belum adanya museum Kebudayaan di Kabupaten Kutai Timur untuk mengumpulkan, merawat, melestarikan dan memamerkan benda-benda atau koleksi yang memiliki nilai historis, budaya, ilmiah atau artistik
		Kondusifitas daerah yang belum stabil	Masih lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat terkait peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
			Masih berkembangnya ajaran paham radikalisme di kalangan masyarakat
			Kurangnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap pancasila dan wawasan kebangsaan
			Belum optimalnya sosialisasi pendidikan politik yang dilaksanakan ke berbagai lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Kutai Timur
			Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
		Belum Optimalnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Kurangnya perhatian pemuda dalam pengembangan diri sebagai wirausaha. Mereka masih berharap mendapatkan pekerjaan di pemerintahan/perusahaan tambang dan/atau perusahaan sawit.
			Kurangnya pengembangan pemuda menjadi pemuda pelopor di Kabupaten Kutai Timur

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Masih rendahnya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan.
		Belum terciptanya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi perempuan di lembaga legislatif sehingga menyebabkan keterwakilan perempuan masih rendah
			Kurang optimalnya pelatihan pemberdayaan ekonomi khusus perempuan dan Kepala Keluarga (PEKKA)
			Belum maksimalnya penerapan ARG (Anggaran Responsif Gender) yang dilakukan oleh SKPD
			Peran tim driver dan pokja belum berjalan optimal
		Belum Optimalnya upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan perkara kekerasan yang di alami
			Minimnya tenaga konselor / tenaga Layanan di UPTD PPA
			Belum optimalnya sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan di tingkat Kecamatan dan Desa.
		Belum optimalnya pemenuhan kesejahteraan masyarakat	Pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial terhadap PMKS sangat tergantung dari Program bantuan sosial sehingga PMKS belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri serta masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup mandiri
			Kurangnya kualitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diusulkan mulai dari level desa/kelurahan
			Terbatasnya SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
			Sarana dan prasarana di rumah perlindungan sosial belum sesuai standar
			Belum terbentuk PSM setiap desa
			Rendahnya jiwa sosial PSKS
		Belum Optimalnya Serapan Tenaga Kerja Lokal	Kurangnya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri
			Belum optimalnya peningkatan kerjasama dengan lembaga pendidikan swasta dan mengoptimalkan peran Bursa Kerja Khusus (BKK)
			Belum optimalnya peningkatan kerjasama kemitraan dengan dunia usaha dan industri
			belum optimalnya peningkatan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan
		Masih tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terutama dari Penduduk Pendatang dan kurang	Advokasi program kependudukan yang belum dijalankan secara optimal
			Masih lemahnya koordinasi antar instansi dan lembaga terkait, terutama permintaan data mengenai kependudukan dan data keluarga

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		seimbangnya struktur umur penduduk	Jumlah Penyuluh yang belum ideal (1 Desa 1 penyuluh KB) serta operasional bagi kader pendata masih kurang (insentif kader)
			Rendahnya kualitas SDM kader dan penyuluh
			Peran bidan dan petugas lapangan KB dalam konseling belum optimal
			masih adanya keluarga berisiko stunting di kelompok peringkat kesejahteraan rumah tangga
2	Transformasi ekonomi yang berjalan lamban dan masih sangat tergantung pada sektor pertambangan	Lambatnya transformasi ekonomi sektor perkebunan dalam peningkatan nilai produk dan lapangan usaha	Terbatasnya akses pekebunan terhadap lahan pengembangan ekonomi melalui usaha perkebunan
			Rendahnya sumber daya manusia dan kelembagaan pekebun/petani sub sektor perkebunan
			Rendahnya produktivitas komoditas perkebunan petani swadaya
			Terbatasnya ketersediaan infrastruktur pendukung usaha perkebunan
			Terbatasnya ketersediaan benih unggul bermutu bersertifikat dalam daerah dan sumber benih untuk mendorong pembangunan kebun
			Lambatnya perkembangan inovasi dan ilmu pengetahuan teknologi perkebunan
			Tingginya kerugian akibat serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT)
			Tuntutan isu lingkungan dan penurunan emisi gas rumah kaca dalam pembangunan perkebunan masih tinggi
		Rendahnya daya saing/daya tarik pariwisata di Kabupaten kutai timur	Infrastruktur pariwisata belum memadai
			Belum adanya kerjasama dengan mitra pariwisata terkait promosi pariwisata
			Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan pariwisata
		Belum optimalnya upaya peningkatan ekonomi masyarakat sektor ekonomi kreatif	belum tersedianya infrastruktur ekonomi kreatif
			Kurangnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas kreatif dalam melaksanakan suatu event kreatif
			Kurangnya ekosistem digital yang mendukung ekonomi kreatif dalam promosi produk kreatif
		Belum optimalnya upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM	Kurangnya minat kewirausahaan masyarakat
			Belum optimalnya pembinaan anggota koperasi
			Terbatasnya kelembagaan peningkatan kapasitas UKM (inovasi) dalam menumbuhkan wirausaha baru
			Rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi dan UKM
			Kurangnya pembinaan UKM

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan pekebun melalui usaha perkebunan	Tingginya baya produksi dan rantai pasok komoditas perkebunan tidak merata dan efisien
			Harga komoditas perkebunan yang fluktuatif
			Akses pemasaran yang masih konvensional
			Belum terbentuknya korporasi petani
			Pola kemitraan pekebun dan perusahaan masih terbatas dan belum berjalan efektif
			Rendahnya efisiensi pemanfaatan lahan pada pola ruang perkebunan
		Rendahnya kualitas dan daya saing SDM petani dan peternak	Banyak petani dan peternak bekerja berdasarkan pengalaman tanpa akses ke pendidikan formal atau pelatihan
			Regenerasi petani dan peternak menurun karena generasi muda lebih tertarik ke sektor lain
			Rasio jumlah kelompok tani dengan jumlah penyuluh yang sangat tinggi
		Belum optimalnya peningkatan kuantitas dan kualitas produksi tanaman pangan (padi dan palawija) dan holtikultura	Infrastruktur air bersih dan listrik serta jalan on farm ke market masih minim
			Pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga cenderung merugikan petani
			Kurangnya permodalan untuk meningkatkan produk olahan
			Penggunaan pupuk anorganik dan pestisida secara berlebihan
		Belum optimalnya peningkatan produksi daging	Pelaksanaan mini ranch (model pengelolaan budidaya sapi ternak) belum efektif
			Kurangnya SDM (petugas paramedik/petugas IB (Inseminasi Buatan)) yang terampil
			Pelayanan IB (Inseminasi Buatan) terkendala jarak dan lokasi
		Belum optimalnya upaya penguatan produksi, pengolahan dan pengawasan hasil perikanan.	Kualitas sumber daya manusia dan keinginan berusaha masih rendah
			Ketersediaan sarana dan dan prasarana yang belum merata dan masih tradisional
			Terbatasnya olahan hasil perikanan (kurang variatif)
			Masih tingginya tingkat penangkapan ikan secara ilegal (*ilegal fishing*) atau yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku
		Belum optimalnya pengembangan industri hilir	Keterbatasan fasilitas pendukung industri pengolahan seperti jalan kawasan, pasokan listrik, dan air
			Kelembagaan yang belum kuat
			Kurangnya keterampilan tenaga kerja untuk dapat memenuhi kebutuhan industri lokal
			Kurangnya regulasi serta kebijakan daerah dan kepastian hukum dan peraturan yang tumpang tindih membuat investor ragu untuk berinvestasi di sektor industri hilir

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum adanya jaminan ketersediaan lahan dan bahan baku yang cukup mendukung industri pengolahan
		Belum optimalnya upaya kemandirian pangan lokal guna menjamin ketahanan pangan yang berkelanjutan	Kurang optimalnya penyediaan pangan utama
			Masih rendahnya diversifikasi sumber bahan pangan
			Belum optimalnya program ketahanan pangan dalam mendukung ketersediaan dan kecukupan pangan utama.
			Alih fungsi lahan yang tidak terkendali dari hutan dan lahan pertanian ke perumahan dan industri
		Pemanfaatan hasil riset dan inovasi belum optimal	Belum adanya regulasi yang mengatur tata kelola riset dan inovasi Kutai Timur
			Belum terpetakannya kebutuhan dan karakteristik teknologi dan inovasi
			Pelaksanaan riset dan inovasi belum satu pintu
			Masih minimnya keterampilan SDM pengelola riset dan inovasi naik secara kuantitas maupun kualitas
			Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang riset
		Belum optimalnya upaya pemenuhan capaian target investasi	Masih rendahnya pengetahuan masyarakat/pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas dan penggunaan sistem/aplikasi perizinan berusaha melalui OSS RBA
			Kurang optimalnya strategi promosi melalui media digital, media sosial dan *Business Matching*
			Pelaporan LKPM belum dilakukan secara periodik oleh pelaku usaha
			Minat investor yang tidak dapat diprediksi atau *unpredictable*.
			Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM terkait pelayanan perizinan berusaha
		Kinerja kawasan Investasi KEK MBTK masih rendah	Infrastruktur pendukung Belum optimal, dukungan perusahaan sawit sekitar masih rendah, kelembagaan BUPP yang masih berbenah
		Fluktuasi harga komoditas yang mempengaruhi stabilitas harga kebutuhan pokok	Kebutuhan bahan makanan pokok selama ini tergantung dari Jawa dan Sulawesi. Demikian juga kebutuhan barang-barang hasil industri.
			kesenjangan informasi dan distorsi struktur pasar menyebabkan tidak efisiennya harga di pasar
			Belum optimalnya penyediaan pangan mandiri masyarakat akibat perubahan iklim
			Belum maksimalnya penataan dan pembinaan pedagang termasuk pedagang kaki lima
		Masih rendahnya daya saing produk ekspor	Terbatasnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor dan memiliki kemampuan mengakses informasi pasar

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Kondisi sarana dan prasarana penunjang perdagangan belum memadai untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa
			Belum maksimalnya pemasaran produk dan komoditi unggulan
			Belum optimalnya perlindungan konsumen
3	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik	Masih rendahnya kualitas perencaan daerah	Kurang optimalnya dukungan data dalam menyusun dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi.
			Belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran.
			Kebijakan perencanaan dari Pemerintah Pusat yang sering berubah
		Belum Optimalnya upaya pencapaian target pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah	Lemahnya sumber daya manusia pengelola data reformasi birokrasi
			Kurangnya koordinasi antara perangkat daerah
			Keterlambatan penyampaian data IKK (Indikator Kinerja Kunci)
			Rencana aksi yang belum disertai bukti dukungan
		Belum optimalnya penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Kutai Timur	Kurangnya komitmen perangkat daerah untuk mengelola arsipnya sesuai NSPK
			Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana kearsipan di perangkat daerah dan lembaga kearsipan daerah
			Kurangnya pemahaman kompetensi arsiparis dan pengelola arsip di perangkat daerah
		Belum optimalnya dukungan infrastruktur TIK secara merata dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi dan informasi	Jaringan telekomunikasi belum merata di seluruh desa dan kualitas jaringan telekomunikasi di sebagian desa masih kurang baik
			Aplikasi layanan di OPD belum sepenuhnya terintegrasi
			Belum maksimal pengelolaan informasi dan komunikasi publik
		Belum optimalnya penyelenggaraan statistik daerah	Belum sinerginya pembangunan wilayah yang berdasarkan data-data sektoral Pemerintahan
		Belum maksimalnya pelaksanaan pengamanan informasi perangkat daerah	Belum terlaksananya standar keamanan informasi
			Kurangnya SDM yang mengikuti Diklat tentang Pengelolaan Ruang SIBER
		Kurang meratanya kompetensi dan profesionalisme pegawai	Kurangnya penilaian kualifikasi karena dipengaruhi tingkat pendidikan PNS yang harus ditingkatkan ke jenjang yang lebih tinggi
			Kurangnya pemahaman dari ASN terkait pentingnya kompetensi untuk mengikuti Bimtek dan Diklat Kepemimpinan.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Kurangnya kesadaran dan kewajiban PNS untuk mengoptimalkan kinerja, berpengaruh pada penilaian SKP
			Kurangnya pemahaman dan kesadaran pada aturan dan disiplin ASN, sehingga masih ada tindakan hukuman disiplin (hukdis) yang terjadi pada ASN
			Banyaknya data yang belum sesuai dengan standar dan prosedur sehingga mengurangi nilai pada Indeks NSPK
		Penyelenggaraan Manajemen ASN belum optimal	Belum optimalnya pemahaman dan komitmen perangkat daerah terhadap prinsip sistem merit
			Belum adanya peta jalan pengembangan SDM ASN jangka menengah/panjang
			Perencanaan kebutuhan ASN kurang berbasis analisis jabatan dan beban kerja
		Belum Optimalnya Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Mendukung Pendapatan Daerah	Kurang kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak daerah tepat waktu
			Data potensi pajak daerah belum dioptimalkan
			Masih ada beberapa desa belum terjangkau jaringan internet (*blank spot*) sehingga penerapan ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) belum cukup optimal menjangkau seluruh wilayah Kutai Timur
			Belum diterapkannya sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku
			Masih kurangnya fungsi pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah
			Kurang optimalisasi SDM Petugas Pajak
			Belum dilakukan update NJOP PBB-P2
		Belum Optimalnya upaya pengawasan Internal Pemerintah Daerah	SPIP Belum sepenuhnya diimplementasikan
			Belum optimalnya tindak lanjut penerapan predikat zona integritas
			Masih Rendahnya tingkat kapabilitas APIP
		Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan desa tidak maksimal	Kondisi sarana dan prasarana pemerintahan desa yang belum memadai
			Keterjangkauan dan akses pelayanan masih sangat susah dijangkau
			Sarana dan prasarana layanan dasar bagi masyarakat masih sangat minim.
			Perlu dilaksanakan penyesuaian kembali peraturan Bupati tentang penataan desa dan kewenangan desa
		Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan adminsitrasi	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Administrasi Kependudukan
			Kondisi geografis Kutai Timur yang sangat luas sehingga Sulit Mengakses Layanan Disdukcapil

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		kependudukan dan pencatatan sipil	yang ada di Ibukota Kabupaten Kutai Timur (Sangatta)
			Kurangnya sumber daya manusia (aparatur pelayanan Disdukcapil) untuk memberikan pelayanan baik kantor Disdukcapil maupun di kecamatan
			Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan (peralatan, jaringan internet dan gedung pelayanan yang ada di kecamatan)
		Belum Optimalnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kurangnya cakupan sosialisasi ,pengawasan dan penanganan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
			Kurangnya kerja sama dengan lembaga vertikal dan lintas SKPD terkait perda dan perkada
4	Belum meratanya pemenuhan infrastruktur dasar dan digital yang berkualitas	Belum optimalnya pemenuhan akses terhadap air minum layak	Keterbatasan jangkauan pelayanan air minum untuk daerah-daerah yang mempunyai topografi lereng dan terpencil
		Belum optimalnya penanganan pemukiman kumuh	Penanganan rumah layak huni belum berkesinambungan
			Banyak kawasan permukiman yang berkembang secara tidak terencana, mengakibatkan permukiman kumuh dengan infrastruktur yang buruk dan kualitas hidup yang rendah.
			Belum memadainya sanitasi di wilayah permukiman
			Kegiatan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana belum bisa dilaksanakan karena masih menunggu SK Bupati tentang bencana
		Belum meratanya akses listrik di seluruh Kabupaten Kutai Timur	Luasnya wilayah Kutai Timur menjadi tantangan dalam pemenuhan jaringan elektrifikasi
			Infrastruktur listrik yang ada belum mampu menampung dan mendistribusikan energi dari sumber terbarukan
			Diperlukan investasi besar dalam pengembangan jaringan listrik dan teknologi penyimpanan energi untuk memastikan ketersediaan energi yang stabil sepanjang waktu.
			Kebijakan dan regulasi yang sering berubah-ubah mengganggu iklim investasi di sektor EBT
		Belum optimalnya pemenuhan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas permukiman	Untuk Perumahan umum karena belum adanya pelepasan aset dari developer sehingga untuk penyediaan PSU nya belum bisa di-*take over*
			Perumahan swadaya terkait rentang kendali, karena luasnya wilayah dengan kondisi perumahan yang tersebar sehingga diperlukan biaya yang besar dan waktu yang lama

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Penyerahan aset PSU dari developer tidak memenuhi syarat
		Akses Konektivitas ke Daerah yang Belum Optimal	Kondisi jalan mantap yang masih rendah dikarenakan kondisi tanah dasar yang ada di Kabupaten Kutai Timur memerlukan penanganan yang lebih kompleks, sehingga membutuhkan daya dukung yang besar untuk mencapai kondisi jalan yang mantap
			Kondisi jembatan non permanen yang rusak atau tidak memadai
			Kendala Kawasan hutan, karena ada Sebagian ruas jalan berada dalam kawasan hutan. Perubahan status jalan di Kawasan hutan (sudah dilakukan ada yang disetujui dan ada yang tidak)
			Kesenjangan infrastruktur jalan antar wilayah kota dan pedesaan
		Belum optimalnya pemenuhan aksesibilitas yang berkualitas dalam mendukung mobilitas barang dan jasa	Kurangnya sarana prasarana pelabuhan
			Belum adanya izin pengoperasian pelabuhan
			Trayek angkutan dalam kota belum tertata
			Konektivitas antara kecamatan yang belum baik
		Belum meratanya cakupan layanan telekomunikasi/internet	Masih ada beberapa desa yang berada di kawasan pedalaman dan pesisir belum menikmati layanan internet
			kapasitas jaringan telekomunikasi di beberapa wilayah belum maksimal.
			Luasnya wilayah Kutai Timur menjadi tantangan dalam pemenuhan jaringan telekomunikasi
		Masih Rendahnya Kualitas Pembangunan Di Desa	Belum maksimalnya dalam pengelolaan usaha desa/BUMDESA dan aset desa
			Belum optimalnya peran LKD dan LAD dalam memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di desa
			Belum diaturnya regulasi tentang LKD dan LAD oleh desa
			Belum tergalinya dan teridentifikasinya potensi desa
			Masih minimnya desa yang melakukan kerjasama antar desa dan pihak ketiga
5	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup yang berdampak pada tingginya risiko bencana	Belum Optimalnya Pengelolaan Persampahan	Belum optimalnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah termasuk bank sampah / komunitas / komunitas swadaya masyarakat / *offtaker*, TPST, TPS 3R, rumah kompos, rumah maggot BSF
			Kurangnya Kesadaran dan keterampilan masyarakat tentang pengelolaan sampah serta belum terbentuknya pengelola sampah di kecamatan di luar kota Sangatta

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum adanya penetapan lokasi TPST, TPS 3R, rumah kompos, rumah maggot BSF, dan pengelolaan sampah lainnya
			Belum adanya teknologi pengelolaan sampah modern
			Belum tersedianya lokasi dan fasilitas TPA *sanitary landfill* dan kontrol *landfill*
			Belum adanya kerjasama dengan pihak swasta terkait penanganan dan pengelolaan sampah
			Kurangnya ketaatan pelaku usaha kegiatan dan masyarakat dalam pengelolaan sampah
			Belum adanya pembaharuan terkait regulasi mengenai pengelolaan sampah
		Belum optimalnya upaya pencegahan, Penanggulangan, Pemulihan dan Pemantauan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik
			Kurangnya kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku
			Belum tersedianya alat monitoring kualitas lingkungan dan sarana dan prasarana uji kualitas sampel
			Kurangnya SDM laboratorium lingkungan
			Belum optimalnya pengendalian pencemaran dari sumber pencemar bergerak dan tidak bergerak
		Belum optimalnya upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup	Masih kurang ketersediaan dokumen kajian lingkungan hidup seperti Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (RIP-KEHATI) kabupaten, kajian pengelolaan lingkungan hidup, instrumen ekonomi lingkungan hidup, Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup, Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (NSDA dan LH), inventarisasi data dan informasi sumber daya alam
			Masih kurangnya hasil inventarisasi GRK dan profil emisi GRK
			Kurangnya penetapan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta data identifikasi dan inventarisasi tutupan lahan
			Belum adanya pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
			Belum optimalnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelaku usaha, pengelolaan pengaduan lingkungan hidup, pembinaan, dan penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi /masyarakat adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum Optimalnya Penanganan Penanggulangan Bencana	Belum terlaksananya sosialisasi peta bahaya, peta kerentanan, peta kapasitas dan kajiannya kepada masyarakat Kabupaten Kutai Timur
			Belum optimalnya pelaksanaan regulasi pelaksanaan prabencana, saat dan pasca bencana
			Belum lengkapnya dokumen kebencanaan
			Belum optimalnya pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana dan keluarga tangguh bencana,
			Belum optimalnya peningkatan kapasitas SDM penanggulangan bencana
			Belum optimalnya kajian kebutuhan peralatan dan logistik berdasarkan renkon atau kajian lainnya (risiko, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi) untuk bencana prioritas,
			Belum optimalnya fungsi pusdalops penanggulangan bencana
			Belum optimalnya sinergi mitra kerja penanggulangan bencana antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pra bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana
			Belum terlaksananya sosialisasi kepada seluruh sekolah/madrasah ditingkat pendidkan dasar (SD) hingga menegah (SMP) di kawasan rawan bencana - tentang hasil/ manfaat/ tujuan dari kegiatan/program sekolah dan madrasah aman bencana (SMAB),
			Belum terintegrasinya sistem peringatan dini terhadap bencana (EWS) di semua wilayah rawan bencana
			Belum terlaksananya simulasi rencana kontinjensi per jenis ancaman bencana
		Belum optimalnya pelayanan Kebakaran area Kutai Timur	Kurangnya ketersediaan lahan yang dihibahkan untuk pembangunan Pos Pemadam
			Akses jalan penghubung antar wilayah banyak yang rusak
			Sumber daya manusia (SDM) di bidang pemadam kebakaran masih kurang

Sumber : Analisis Tim penyusun RPJMD Kabupaten Kutai Timur

2.3.2 Isu - Isu Strategis

Isu strategis adalah suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah dan/atau tantangan dan menjadi peluang bagi suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Isu strategis dalam uraian ini dikelompokkan berdasarkan isu strategis di tingkat global, isu strategis tingkat nasional, dan isu strategis tingkat regional/daerah. Secara singkat, hubungan antara potensi daerah, permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi Kab. Kutai Timur seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.83 Isu Strategis Kabupaten Kutai Timur

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Sektor Pertambangan Sektor Pertanian dan Perkebunan Sektor Perikanan Sektor Industri Pengolahan	Masih rendahnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia dan cenderung terjadi ketidakmerataan antar wilayah	Pengembangan Kualitas SDM Pelestarian Budaya	*Sustainable Development Goals* (SDG's) Sebagai Kelanjutan Dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*)	Percepatan Penghapusan Kemiskinan Extrem Percepatan Penangan Stunting *Middle Income Trapp* (MIT)	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	Rendahnya tingkat kesejahteraaan masyarakat	Kesejahteraan masyarakat Ketahanan Pangan Dampak Pembangunan IKN				Tingginya angka kemiskinan
	Transformasi ekonomi yang berjalan lamban dan masih sangat tergantung pada sektor pertambangan	Pengembangan sektor unggulan dan hilirisasi industri	Perkembangan Geopolitik dan Geoekonomi Global	Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Implementasi dari kebijakan ekonomi hijau dan ekonomi biru Kebijakan pengembangan industri pengolahan Penguatan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata	Percepatan Transformasi Ekonomi Dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Ketergantungan Barang Pokok Ibukota Nusantara di Kalimantan Timur	Optimalisasi Sumber Daya Daerah Non-Tambang
	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola	Peningkatan pelayanan Publik dan Kompetensi ASN		Pemenuhan *Mandatory Spending* dan	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan		upaya efisiensi anggaran	yang profesional dan akuntabel	
	Belum meratanya pemenuhan infrastruktur dasar dan digital yang berkualitas	Infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah	Perkembangan dan disrupsi teknologi		Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur	Infrastruktur dasar yang berkelanjutan Pemekaran wilayah
	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup yang berdampak pada tingginya risiko bencana	Kelestarian kawasan lindung dan keanekaragaman hayati kerawanan bencana dan dampak perubahan iklim kerusakan dan pencemaran lingkungan pengelolaan sampah dan limbah pengembangan pemanfaatan energi terbarukan	Komitmen penurunan emisi GRK dan tantangan perubahan iklim serta transisi energy ke *clean energy*		Peningkatan kualitas lingkungan hidup pelestarian lingkungan sumber energi nasional	Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Sumber: Analisis Tim Penyusunan RPJMD Kab. Kutai Timur

A. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Dengan terbitnya Permendagri 100 Tahun 2018 penerapan SPM di daerah lebih terarah untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Peningkatan sarana dan prasarana serta pembaharuan sistem pendidikan merupakan langkah awal yang penting. Semua masyarakat Kutai Timur, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk pendidikan yang berkualitas. Dengan tindakan yang tepat dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, masyarakat, dan sektor swasta, serta pemanfaatan teknologi, maka akan dapat menciptakan transformasi positif dalam sistem pendidikan. Dalam mengembangkan pendidikan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus berperan aktif dalam merumuskan kebijakan yang mendorong pertumbuhan pendidikan yang berkualitas. Pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan pendidikan yang berkualitas dengan menerapkan kebijakan yang tepat. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan model pendidikan yang inovatif, memperkuat jaringan kerja sama antar institusi pendidikan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui program pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta pemberdayaan masyarakat lokal dapat menjadi kunci keberhasilan untuk mengatasi tantangan pendidikan di daerah, sehingga dapat membuka pintu akses pendidikan yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing.

Antara dunia pendidikan dan ketenagakerjaan dibutuhkan sinergi yang baik agar bisa memainkan peran penting dalam perbaikan kualitas sumber daya dalam standar kehidupan sosial yang terus berkembang di masyarakat global. Sistem pendidikan dan ketenagakerjaan yang tepat akan membawa kemajuan bagi suatu negara dan peradaban dunia. Kutai Timur harus mampu mewujudkan sinergi dalam bidang pendidikan melalui perkembangan dunia ketenagakerjaan di Indonesia untuk menghadapi era *society* 5.0. Di tengah dinamika dan transformasi ketenagakerjaan dan pendidikan, sekolah kejuruan dan perguruan tinggi harus dapat menghadapi perubahan-perubahan dan menciptakan sinergi. Untuk itu, perlu dilakukan usaha-usaha dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mendorong

kewirausahaan, pengembangan kemampuan digital, program pelatihan dan adaptasi, dan peningkatan mobilitas ketenagakerjaan.

Peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan di Kabupaten Kutai Timur membutuhkan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak. Penggunaan teknologi digital dan jaringan telekomunikasi dapat membantu meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di perkotaan dan perdesaan, walau tidak dapat mengatasi semua tantangan yang ada. Peningkatan infrastruktur dan tenaga medis perlu di lakukan untuk memastikan layanan kesehatan yang berkualitas dapat tersedia. Pelatihan dan edukasi ditingkat masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan teknologi digital dalam akses dan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Kutai Timur. Dengan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan, di harapkan dapat tercipta layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat, dan secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kutai Timur.

B. Tingginya Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang belum terpecahkan di Kabupaten Kutai Timur. Kondisi kemiskinan yang dicerminkan oleh persentase penduduk miskin pada tahun 2024 masih sebesar 8,81 persen (peringkat 3 dengan persentase kemiskinan tertinggi di Prov. Kaltim) dengan jumlah absolut sebesar 3.711.000 penduduk. Walaupun tren data menunjukkan penurunan persentase kemiskinan, akan tetapi jumlah penduduk miskin secara absolut menunjukkan peningkatan (tahun 2023 sebanyak 3.704.000). Garis kemiskinan di Kutai Timur juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 39.091 menjadi sebesar Rp.753.332,-. Sehingga, kenaikan persentase penduduk miskin bisa jadi diakibatkan oleh rendahnya pendapatan penduduk sehingga tidak mampu memenuhi batas pengeluaran minimumnya. Upaya pemerintah daerah Kutai Timur dalam penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan pada peningkatan penyediaan lapangan kerja dan lapangan usaha yang melibatkan masyarakat lokal.

C. Optimalisasi Sumber Daya Daerah Non-Tambang

Perekonomian Kutai Timur yang masih bertumpu pada sektor pertambangan dan penggalian perlu melakukan transformasi struktural seiring dengan kesepakatan Paris *Agreement* terkait transisi energi menuju nol emisi karbon (*net*

zero emission). Pengurangan atau bahkan penghentian pemanfaatan bahan bakar fosil dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batubara secara global dipastikan akan memengaruhi PDRB Kutai Timur secara signifikan. Hal ini menunjukkan pergeseran fokus dari sektor pertambangan, yang saat ini masih memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Domestik Bruto Regional (PDBR) Kutai Timur. Meskipun Kutai Timur saat ini masih mengandalkan PDRB yang berasal dari sektor pertambangan gas dan minyak bumi, pemerintah Kabupaten Kutai Timur bersiap menghadapi batasan penggunaan batu bara yang akan berakhir pada tahun 2050. Kutai Timur perlu mengubah arah PDRB secara perlahan, di mana tumpuan terhadap agribisnis dan agroindustri dipandang perlu untuk dilakukan agar ketergantungan terhadap industri tambang dapat berfokus pada transformasi pertanian dalam arti luas, perikanan, manufaktur, pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta ekonomi digital.

Dalam rangka mendukung kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan anggota koperasi, maka Presiden Republik Indonesia memberikan arahan berupa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Instruksi tersebut berisi arahan dan langkah-langkah komprehensif dalam pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan cakupan bidang usaha penyediaan Kebutuhan Bahan Pokok, Simpan Pinjam, Klinik Desa, Aptotek, *cold storage* atau Pergudangan dan Logistik serta bidang usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan upaya untuk membangun kemandirian ekonomi Indonesia melalui penyediaan akses terhadap berbagai suberdaya dan pasar lebih luas. Dengan kemandirian ini, melalui produksi dan pemasaran produk-produk lokal diharapkan dapat mendorong pengurangan terhadap ketergantungan pada impor. Selain itu, pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mendukung pada penguatan ketahanan pangan serta meningkatkan kegiatan ekonomi inklusif. Hal ini dilakukan melalui partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kerjasama dan gotong royong.

Terdapat 3 (tiga) model Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yaitu : (1) pembentukan koperasi baru dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, (2)

pengembangan koperasi yang telah ada (eksisting) melalui peningkatan kapasitas dan perluasan cakupan usaha, dan (3) revitalisasi koperasi yang tidak aktif/lemah melalui restrukturisasi manajemen dan atau melakukan penggabungan (merger) bila diperlukan.

Koperasi juga merupakan alat yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi di sekitar kawasan hutan/area berhutan khususnya pada masyarakat yang menempati wilayah di sekitar kawasan hutan/area berhutan dalam konteks Perhutanan Sosial (PS). Koperasi masyarakat setempat dapat mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada Kawasan Hutan Lindung dan/atau Kawasan Hutan Produksi untuk menjamin keseimbangan antara mata pencaharian masyarakat setempat (*livelihood*) dan pelestarian kawasan hutan itu sendiri.

D. Infrastruktur dasar yang Berkelanjutan

Pertumbuhan pembangunan infrastruktur mendasar yang belum merata, menyebabkan masih banyaknya desa tertinggal. Hal ini masih terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Kutai Timur, ditandai dengan minimnya infrastruktur, baik prasarana jalan, fasilitas pelayanan umum, pendidikan, kesehatan maupun ekonomi yang mengakibatkan aktivitas sosial ekonomi rendah, sehingga desa ditinggalkan penduduknya bermigrasi ke kota. Peningkatan pemerataan infrastruktur, terutama yang bersifat dasar seperti: prasarana transportasi, jaringan listrik dan komunikasi serta instalasi dan jaringan air minum sangat panting dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di Kutai Timur. Prasarana infrastruktur dibutuhkan tidak saja oleh rumah tangga namun juga oleh industri. Infrastruktur merupakan prasyarat bagi sektor-sektor lain untuk berkembang, serta akan mempengaruhi dan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sehingga peningkatan prasarana infrastruktur diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membawa kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.

E. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Reformasi birokrasi di Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap

sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi yang holistik di Kabupaten Kutai Timur diharapkan dapat berkontribusi positif dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas

Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kutai Timur telah berada pada kondisi yang cukup baik jika didasarkan pada capaian indikator pembangunan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan, terkait optimalisasi akuntabilitas kinerja baik secara administratif maupun sosial. Pemerintahan Daerah harus mengantisipasi adanya penyimpangan dengan memperkuat sikap politik dalam penegakan hukum yang baik, dan memperkuat profesionalitas pemerintahan. Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur juga hendaknya meningkatkan integritas diri dan integritas lembaga menuju pada wilayah/zona bebas korupsi. Pemerintahan yang profesional dan akuntabel memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Dengan melihat berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi, pemerintahan yang profesional dan akuntabel menjadi isu penting untuk diprioritaskan.

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Di samping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Peningkatan mutu layanan dan kinerja, serta penerapan *good corporate governance*, harus dilakukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan layanan publik yang berkualitas bagi masyarakat Kutai Timur.

F. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan merupakan isu yang semakin mendapat perhatian di era modern ini. Dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang efektif dan bertanggung jawab penting dilakukan. Konservasi sumber daya alam dan

lingkungan (KSDAL) merupakan tanggung jawab semua tanpa terkecuali karena pengaruh ekologis yang ditimbulkan dari berbagai kegiatan pembangunan tidak dibatasi oleh perbedaan wilayah administratif pemerintahan negara. Oleh karena itu, upaya konservasi harus menjadi bagian *integral* dari pembangunan. Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Kutai Timur akan terkait dengan kepentingan daerah lain maupun kepentingan nasional bahkan internasional. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai keberlanjutan. Dengan sumber daya alam yang terbatas, pengelolaan yang efektif diperlukan agar sumber daya ini bisa dimanfaatkan secara optimal tanpa merusak ekosistem dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, pengelolaan yang baik juga akan memastikan ketersediaan sumber daya alam untuk generasi masa depan.

Kutai Timur masih memiliki hutan alam yang cukup luas, yang merupakan benteng pertahanan terakhir bagi ekologi dan sosial-budaya. Kawasan-kawasan berhutan, baik di dalam Kawasan hutan maupun di luar Kawasan hutan, harus terus dikelola keberadaannya. Pengembangan ekonomi produktif dari pertanian dalam arti luas difokuskan pada lahan-lahan bercadangan karbon rendah, serta pada wilayah yang potensial dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Pengelolaan dan pemanfaatan limbah industri, termasuk pengembangan energi baru terbarukan dari limbah-limbah pertanian, menjadi alternatif dalam pemenuhan energi dan menurunkan emisi GRK.

Di tengah isu global dalam masalah lingkungan dan perubahan iklim terutama berkaitan dengan pengurangan dan penghapusan secara bertahap (*pashing out*) pemanfaatan batu bara sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara (*Coal Fired Power Plant*) hingga 2030 sesuai dengan komitmen pada pertemuan G20 di Bali tahun 2022, maka hal ini mendorong setiap negara (termasuk Indonesia) untuk melaksanakan pemanfaatan energi yang berorientasi pada transisi energi yang berkeadilan dan berkelanjutan (*Just Energy Transition*). Hal ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan akses energi yang bersih dan terjangkau bagi semua orang. Dengan demikian, Kabupaten Kutai Timur harus dapat menjawab tantangan ini dengan melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki menuju kemandirian energi. Sektor Pertambangan dan

Penggalian merupakan sektor basis dalam PDRB Kabupaten Kutai Timur yang dimungkinkan bergeser pada sektor non basis yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Jasa Pertanian. Diawali dengan penerapan praktik-praktik pertanian yang baik (*Good Agriculural Practices*), maka potensi sektor ini dapat diarahkan pada pengembangan ekonomi hijau yang berfokus pada pembangunan

Pembangunan berkelanjutan dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, Kabupaten Kutai Timur harus mendorong peningkatan investasi hijau yang berkelanjutan dan ramah lingkungan agar dapat membantu meningkatkan pengembangan kegiatan ekonomi hijau di Kutai Timur.

Sektor Pertanian khususnya pada sub sektor Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur telah memiliki landasan keberlanjutan yang memadai. Sejak tahun 2018 telah dirintis kerja sama dengan sejumlah Mitra Pembangunan (NGO/CSO/LSM) untuk keberlanjutan pada sub Sektor Perkebunan mulai dari aspek tata kelola, penerapan praktik-praktik pertanian yang baik, penguatan kapasitas pekebun mandiri dan koperasi, membangun kemitraan rantai pasok antara koperasi dan perusahaan kelapa sawit, dan mendorong identifikasi dan penetapan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT). Penguatan implementasi keberlanjutan (*sustainability*) pada sektor pertanian secara luas, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur perlu mendorong penguatan pada aspek Tata Kelola meliputi tatanan regulasi, analisis dan rekomendasi kebijakan (*policy brief*) bagi para pengambil keputusan agar menjamin terlaksananya kegiatan oleh semua pihak dalam mendukung pembangunan keberlanjutan.

Dalam hal menurunkan ancaman risiko bencana, dilakukan peningkatan kapasitas daerah dalam mengantisipasi bencana, di antaranya melalui pembatasan kawasan permukiman dan kegiatan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan bencana, desa tangguh bencana, sekolah/madrasah aman bencana, penguatan sarana-prasarana, serta pengembangan sistem tanggap darurat, dan penguatan kapasitas peringatan dini.

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini akan menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2025-2029. Visi dan Misi dalam konteks ini merupakan Visi dan Misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2025-2029 yaitu Bapak Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si dan H. Mahyunadi, S.E., M.Si. Sedangkan tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu kepemimpinan Bupati bersama Wakil Bupati. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

3.1.1 Visi dan Misi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur periode 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Kutai Timur Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing"

Visi tersebut merupakan suatu cita-cita besar dalam rangka membangun daerah dan masyarakat Kutai Timur agar dapat berkembang secara berkelanjutan, menghadapi tantangan zaman, dengan memanfaatkan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Unsur yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan adalah Kutai Timur yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Secara lebih spesifik, penjelasan setiap unsur dalam visi ini disajikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pokok-Pokok Visi Kabupaten Kutai Timur

No	Pokok-Pokok Visi	Penjeasan
1	**Kutai Timur**	Bahwa sasaran capaian keberhasilan penerapan visi tersebut adalah untuk seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2	**Tangguh**	Merujuk pada kemampuan Kutai Timur untuk bertahan, berkembang, dan menghadapi tantangan yang ada, baik yang berasal dari alam, sosial, politik maupun ekonomi. Daerah yang tangguh tidak hanya mampu bertahan dalam kondisi sulit, tetapi juga dapat pulih dan bangkit lebih kuat setelah menghadapi bencana atau krisis. Makna "tangguh" ini menekankan pada aspek-aspek berikut: ○ **Ketahanan Ekonomi**: Kabupaten Kutai Timur harus memfokuskan pembangunan ekonominya pada sektor-sektor yang dapat bertahan (*resilience*) terhadap fluktuasi pasar, bencana alam, atau perubahan kebijakan di tingkat regional, nasional dan global. ○ **Ketahanan Sosial**: Kutai Timur harus memiliki masyarakat yang memiliki daya tahan sosial yang tinggi, mampu mengatasi konflik, ketidaksetaraan, dan kemiskinan. ○ **Ketahanan Politik**: mencerminkan kondisi pemerintahan dan masyarakat yang memiliki ketahanan dalam menghadapi dinamika politik, dengan didukung oleh tata kelola pemerintahan yang demokratis, stabil, dan akuntabel ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, serta terciptanya harmoni antara berbagai

No	Pokok-Pokok Visi	Penjeasan
		kepentingan politik demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan ○ **Manajemen Bencana dan Infrastruktur**: Dengan risiko bencana alam, seperti banjir, kebakaran hutan, atau gempa bumi, wilayah ini harus memiliki sistem manajemen bencana yang tangguh dan infrastruktur yang mampu bertahan terhadap bencana alam. Perencanaan yang matang dalam pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi bencana sangat penting. ○ **Kesiapsiagaan dan Adaptasi**: Masyarakat dan pemerintah daerah perlu memiliki sistem dan kesiapan untuk beradaptasi dengan perubahan, baik perubahan iklim, ekonomi, maupun politik. Ini termasuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kutai Timur agar masyarakat dapat beradaptasi dengan baik dalam dunia yang terus berubah.
3	**Mandiri**	Kutai Timur diharapkan mampu mengelola potensi sumber daya yang ada secara mandiri dan tidak terlalu bergantung pada bantuan atau intervensi dari luar. Hal ini mencakup kemandirian dalam ekonomi, pengelolaan pemerintahan, serta dalam pemberdayaan masyarakat. Makna “mandiri” ini menekankan pada aspek-aspek berikut: ○ **Ekonomi Lokal yang Kuat**: Kabupaten Kutai Timur harus mampu mengelola secara optimal sektor-sektor unggulan yang ada di daerahnya, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata, agar dapat menciptakan ekonomi yang mandiri. Diversifikasi ekonomi menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor atau sumber daya alam

No	Pokok-Pokok Visi	Penjeasan
		saja misalnya ketergantungan pada sektor Pertambangan dan Penggalian. ○ **Pemberdayaan Masyarakat dan UMKM**: Salah satu cara untuk mencapai kemandirian adalah melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dukungan terhadap kewirausahaan lokal dan penguatan sumber daya manusia akan menciptakan lapangan kerja dan mendongkrak perekonomian daerah. ○ **Sumber Daya Manusia yang Berkualitas**: Kemandirian juga berkaitan dengan upaya untuk mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas, terutama tenaga kerja. Meningkatkan kualitas pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri dan pasar lokal akan menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu berinovasi, serta mengurangi ketergantungan pada pekerja dari luar daerah.
4	**Berdaya Saing**	Kutai Timur harus mampu bersaing secara positif, baik di tingkat regional, nasional, maupun global, dalam hal ekonomi, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, serta daya tarik bagi investor. Makna "**berdaya saing**" ini menekankan pada aspek-aspek berikut: ○ **Infrastruktur Berkualitas**: Agar Kutai Timur dapat bersaing, pembangunan infrastruktur yang mendukung, seperti transportasi, konektivitas digital, dan infrastruktur dasar lainnya, harus menjadi prioritas. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan daya saing dalam perdagangan, investasi, dan mobilitas masyarakat.

No	Pokok-Pokok Visi	Penjeasan
		○ **Inovasi dan Teknologi**: Kutai Timur perlu mendorong inovasi di berbagai sektor, terutama di bidang teknologi dan industri berbasis digital. Penggunaan teknologi dalam sektor-sektor tradisional, seperti pertanian dan perikanan, dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. ○ **Pariwisata dan *Branding* Daerah**: Dengan potensi alam dan budaya yang kaya, sektor pariwisata harus dikembangkan untuk menarik wisatawan lokal dan internasional. *Branding* daerah yang kuat, dengan menonjolkan keunggulan-keunggulan khas Kutai Timur, akan meningkatkan daya saingnya sebagai destinasi wisata. ○ **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**: Untuk dapat bersaing, SDM harus memiliki keahlian yang relevan dengan tuntutan pasar global. Peningkatan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan program pengembangan kepemimpinan akan membantu masyarakat di Kutai Timur untuk berdaya saing. ○ **Kebijakan Pemerintah yang Mendukung**: Pemerintah daerah harus memiliki kebijakan yang mendukung terciptanya iklim yang kondusif bagi dunia usaha, seperti insentif bagi investor, regulasi yang mempermudah bisnis, serta penciptaan peluang-peluang baru bagi pelaku usaha

Visi **"Terwujudnya Kutai Timur Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing"** bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi merupakan suatu langkah strategis yang memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan. Kesatuan dari ketiga aspek ini akan membawa Kutai Timur menuju kemajuan yang berkelanjutan, di mana masyarakatnya dapat hidup dengan sejahtera, daerahnya dapat berkembang, dan Kutai Timur dapat memainkan peran penting dalam perekonomian nasional maupun global dengan target sasaran seperti pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Kutai Timur Periode Lima Tahun Pertama

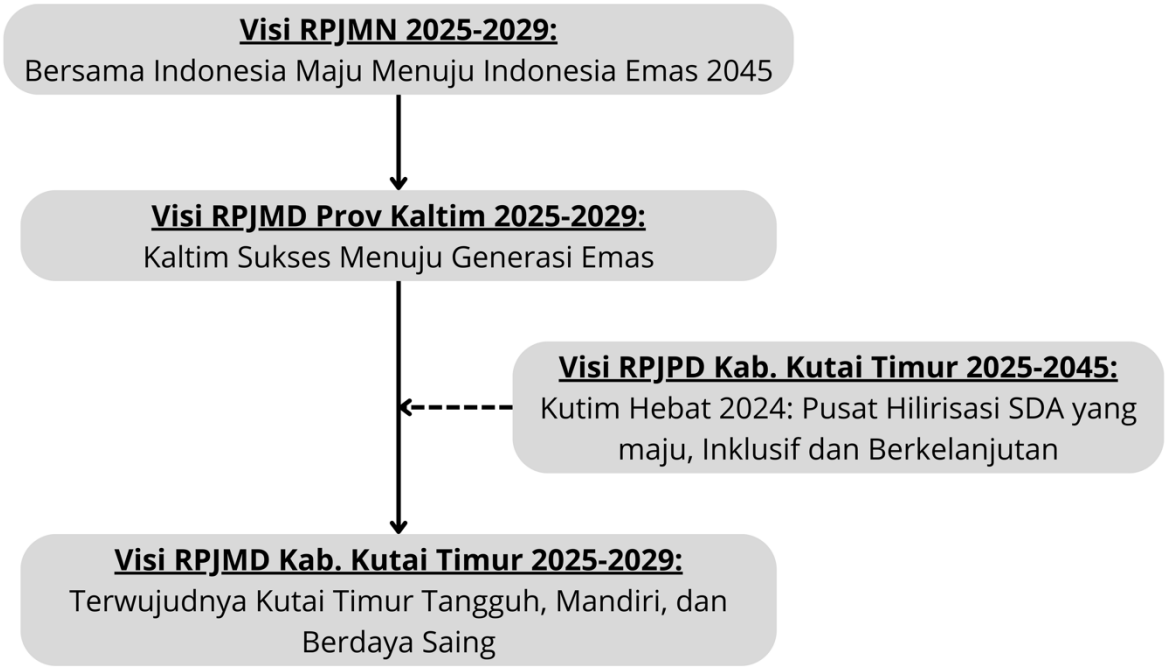
NO	Sasaran Visi RPJP	Indikator Pembangunan	REALIASI	Target Tahun ke-					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Peningkatan Pendapatan per kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	344,49	366,53	389,99	414,94	441,49	469,74	499,80
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	4,34	4,56	4,80	5,05	5,31	5,58	5,87
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	8,81	7,64–8,5	6,92-7,82	6,21-7,14	5,49-6,37	4,78-5,80	4,06–5,12
		Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota		19,24	18,92	18,6	18,28	17,96	17,64
		Rasio gini (Indeks)	0,283	0,277–0,282	0,270-0,280	0,263-0,278	0,256-0,276	0,249-0,274	0,242–0,272
3	Peran kabupaten/kota secara provinsi meningkat/ Peningkatan Perekonomian dan Daya Saing Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	9,82	9,85-10	10,17-10,38	10,49-10,76	10-80,14	11,12-11,52	11,44-11,9
		Indeks Daya Saing Daerah	3,17	3,25-3,45	3,33-3,53	3,41-3,61	3,49-3,69	3,58-3,78	3,67-3,87
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	75,9	76,18	76,60	77,02	77,45	77,87	78,29
5	Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	NA	61,66	63,50	65,33	67,16	69,00	70,83

Visi Kutai Timur 2025-2029 diciptakan untuk dapat meningkatkan pendapatan per kapita yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata, di mana sasaran ini selaras dengan cita-cita Kutai Timur menjadi daerah yang mandiri secara ekonomi. Selain itu, pencapaian visi tangguh dan mandiri tidak dapat dilepaskan dari upaya sistematis untuk mengurangi kemiskinan dan memperkecil kesenjangan sosial. Program-program pro-rakyat akan difokuskan pada penyediaan jaminan sosial, peningkatan layanan dasar, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, dan pemenuhan kebutuhan dasar secara merata di wilayah pedalaman maupun pesisir. Kutai Timur juga diarahkan untuk berperan aktif dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur melalui kontribusi sektor unggulan. Dengan potensi sumber daya alam dan posisi strategis dalam pengembangan wilayah, Kutai Timur dipersiapkan sebagai simpul pertumbuhan baru yang menopang daya saing provinsi dan nasional.

Sememntara itu, daya saing daerah menjadi kunci bagi keberlanjutan pembangunan. Sasaran ini mendorong inovasi daerah dalam pembangunan infrastruktur ekonomi, penguatan konektivitas wilayah, peningkatan investasi, digitalisasi pelayanan publik, serta reformasi tata kelola birokrasi. Semua ini adalah wujud dari visi berdaya saing yang berorientasi pada efisiensi dan produktivitas. Tidak hanya itu, pembangunan manusia adalah fondasi utama dalam membangun Kutai Timur yang tangguh dan mandiri. Sasaran ini mendorong investasi pada sektor pendidikan, kesehatan, pelatihan vokasi, dan pengembangan pemuda. SDM yang unggul akan menjadi motor penggerak transformasi ekonomi dan sosial daerah. Kutai Timur juga berkomitmen terhadap pembangunan yang berwawasan lingkungan. Visi tangguh juga mengandung makna ketahanan ekologi. Oleh karena itu, arah pembangunan akan ditujukan untuk mengurangi emisi GRK melalui penguatan tata kelola lingkungan, rehabilitasi hutan dan lahan, serta transisi energi bersih dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Visi Kabupaten Kutai Timur periode 2025-2029 sudah selaras dengan visi RPJMN 2025-2029 dan visi Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029 seperti pada Gambar berikut:

Gambar 3.1 Keselarasan Visi Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kutai Timur



Visi Kabupaten Kutai Timur periode 2025-2029 menitikberatkan pada pemerataan pembangunan baik infrastruktur maupun Sumber Daya Manusia serta diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada sektor tambang, sehingga dapat terwujud kondisi Kutai Timur yang tangguh, mandiri dan berdaya saing dan kesejahteraan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kutai Timur. Hal ini sejalan dengan keinginan dari RPJMN 2025-2029. Narasi "***Indonesia Maju***" dalam RPJMN 2025-2029 dimaknai oleh Kutai Timur sebagai perwujudan daerah yang "***Tangguh" dan "Mandiri***", serta Narasi "***Indonesia Emas 2045***" dimaknai oleh Kutai Timur sebagai perwujudan daerah yang memiliki "***Daya Saing***".

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Timur 2025-2029 seperti yang telah ditetapkan di atas, maka dirumuskan misi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut:

1. **Misi 1: "Peningkatan dan Pemerataan Daya Saing Daerah Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat, Cerdas serta Berprestasi."**

   Peningkatan daya saing berarti meningkatkan kemampuan suatu daerah atau masyarakat untuk bersaing dengan daerah lain dalam berbagai aspek, seperti

ekonomi, pendidikan, kesehatan, teknologi. Sedangkan pemerataan daya saing memiliki makna bahwa hasil pembangunan harus merata ke semua wilayah dalam suatu daerah, baik perkotaan maupun pedesaan, dan memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan bersaing.

Misi peningkatan dan pemerataan daya saing ini akan difokuskan pada:

a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
   - SDM yang unggul akan menjadi kunci utama dalam pembangunan berbagai aspek di Kutai Timur.
   - Dengan meningkatkan pendidikan, pelatihan, dan moral masyarakat, Kutai Timur dapat menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global.
   - Masyarakat yang cerdas dan terampil akan lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk dalam menghadapi tantangan industri dan teknologi.

b. Mengurangi Kesenjangan Sosial dan Ekonomi
   - Pemerataan pembangunan akan membantu mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan di Kutai Timur.
   - Dengan adanya akses yang lebih baik ke pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, masyarakat di seluruh wilayah bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang.
   - Ketimpangan dalam pembangunan bisa menyebabkan ketidakstabilan sosial, sehingga pemerataan menjadi kunci untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

c. Meningkatkan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat
   - Masyarakat yang sehat akan lebih produktif dan mampu berkontribusi lebih baik dalam pembangunan daerah.
   - Akses layanan kesehatan yang lebih baik akan mengurangi angka kematian, meningkatkan harapan hidup, dan menciptakan generasi yang lebih kuat secara fisik dan mental.
   - Gizi yang baik dan pola hidup sehat akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan belajar anak-anak serta produktivitas tenaga kerja.

d. Menjaga Identitas Budaya dan Moralitas Masyarakat
   - Nilai-nilai budaya lokal perlu dijaga agar tidak tergerus oleh modernisasi yang tidak sesuai dengan karakter masyarakat Kutai Timur.
   - Masyarakat yang berbudaya akan lebih memiliki rasa kebersamaan, gotong royong, dan tanggung jawab sosial yang tinggi.
   - Pendidikan berbasis moral akan menghasilkan generasi yang memiliki akhlak baik, menjunjung tinggi etika, dan mampu menjadi pemimpin yang berintegritas di masa depan.

e. Meningkatkan Prestasi dan Daya Saing Daerah
   - Mendorong prestasi di berbagai bidang (pendidikan, olahraga, seni, dan ekonomi) akan membantu meningkatkan citra Kutai Timur sebagai daerah yang maju dan inovatif.
   - Prestasi yang tinggi akan menarik lebih banyak investasi, meningkatkan pariwisata, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
   - Dengan daya saing yang meningkat, Kutai Timur bisa menjadi salah satu daerah terdepan di Kalimantan Timur, baik dalam pembangunan SDM maupun sektor ekonomi lainnya.

2. Misi 2: "Transformasi Ekonomi Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Industri Berbasis Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pariwisata, Peternakan, Perikanan, dan Kelautan."

Misi ini menekankan pentingnya transformasi/perubahan dan penguatan struktur ekonomi di Kutai Timur dengan mengandalkan sektor-sektor utama yang menjadi potensi daerah.

Secara lebih spesifik misi ini difokuskan pada:

a. Transformasi Ekonomi

   Transformasi ekonomi berarti mengubah dan meningkatkan struktur ekonomi agar lebih kuat, berkelanjutan, dan tidak hanya bergantung pada satu sektor saja. Ini mencakup:

   - **Diversifikasi ekonomi,** Kutai Timur tidak boleh hanya bergantung pada sektor pertambangan, tetapi juga mengembangkan sektor lain yang lebih berkelanjutan.

- **Meningkatkan nilai tambah,** pembangunan ekonomi di Kutai Timur harus mampu mendorong hilirisasi industri, misalnya pengolahan hasil pertanian dan perikanan agar bernilai lebih tinggi sebelum dijual.
- **Pemanfaatan teknologi dan inovasi,** dilakukan melalui adopsi teknologi baru dalam pertanian, perikanan, dan industri agar lebih efisien dan produktif.

b. Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal

Kutai Timur memiliki potensi besar dalam beberapa sektor unggulan yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi secara berkelanjutan, antara lain:

- **Pertanian dan Perkebunan**, melalui pengembangan tanaman unggulan seperti sawit, nenas, kakao, karet, dan hortikultura, serta meningkatkan kesejahteraan petani dengan akses modal dan pasar yang lebih baik.
- **Kehutanan**: Mendorong pengelolaan hutan secara lestari untuk menjaga keseimbangan antara ekologi dan ekonomi.
- **Pariwisata**: Mengembangkan ekowisata dan wisata budaya untuk menarik wisatawan serta meningkatkan pendapatan daerah.
- **Peternakan dan Perikanan**: Meningkatkan produksi peternakan dan perikanan dengan pendekatan modern agar lebih produktif dan berkelanjutan.
- **Kelautan**: Mengoptimalkan potensi laut dan pesisir dengan meningkatkan infrastruktur perikanan serta mendukung nelayan dengan teknologi dan akses pasar.

3. Misi 3: "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh dan Berintegritas."

Misi ini berfokus pada perbaikan sistem pemerintahan agar lebih kuat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Beberapa hal yang menjadi fokus dalam misi ini, adalah:

a. Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh

Tata kelola pemerintahan yang tangguh berarti pemerintah mampu menjalankan tugasnya dengan efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini mencakup:

- **Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan** : Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN (Aparatur Sipil Negara) agar lebih produktif dan inovatif dalam melayani masyarakat.
- **Mengembangkan sistem pemerintahan berbasis teknologi** : Digitalisasi layanan publik untuk mempercepat dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.
- **Meningkatkan ketahanan birokrasi** : Pemerintahan harus mampu menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan regulasi, krisis ekonomi, dan bencana, dengan kebijakan yang cepat dan tepat.
- **Peningkatan pelayanan publik** : Memastikan semua layanan pemerintahan, seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, dan bantuan sosial, berjalan dengan cepat dan tanpa hambatan.

b. Pemerintahan yang Berintegritas

Integritas dalam pemerintahan berarti menjalankan tugas dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab, tanpa korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Ini mencakup:

- **Transparansi dalam pengelolaan anggaran**: Menggunakan anggaran daerah secara ekonomis, efisien dan efektif, transparan, bertanggungjawab agar masyarakat tahu bagaimana uang mereka digunakan.
- **Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)**: Mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan agar kebijakan yang dibuat benar-benar untuk kepentingan rakyat.
- **Partisipasi masyarakat dalam pengawasan**: Seoptimal mungkin melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kinerja pemerintah dan pelayanan publik.
- **Meningkatkan kesejahteraan aparatur negara**: Dengan memberikan gaji dan tunjangan yang layak, diharapkan ASN lebih fokus dalam bekerja dan tidak tergoda untuk melakukan korupsi.

4. **Misi 4 "Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Digital yang Mendukung Konektivitas Antar Wilayah dan Pemerintahan yang Berintegritas."**

   Misi ini menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur fisik dan digital untuk memperkuat konektivitas antarwilayah serta mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan transparan.

Misi ini menekankan pada:

a. Peningkatan Infrastruktur Dasar

Infrastruktur dasar adalah fasilitas fisik yang menjadi fondasi utama dalam mendukung kehidupan masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Fokus utama peningkatan infrastruktur dasar meliputi:

- **Jalan dan transportasi** : Membangun dan memperbaiki jalan, jembatan, serta sarana transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas ke daerah terpencil.
- **Listrik dan air bersih** : Memastikan seluruh masyarakat, termasuk di pedesaan, memiliki akses listrik yang stabil dan air bersih yang cukup.
- **Fasilitas pendidikan dan kesehatan** : Meningkatkan jumlah dan kualitas sekolah, puskesmas, serta rumah sakit agar pelayanan kepada masyarakat lebih merata.
- **Perumahan dan sanitasi** : Menyediakan hunian yang layak dan sistem pembuangan limbah yang baik guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

b. Peningkatan Infrastruktur Digital

Di era digital, teknologi menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah. Peningkatan infrastruktur digital akan difokuskan pada:

- **Internet dan jaringan telekomunikasi** : Memperluas akses internet ke seluruh wilayah, termasuk daerah pelosok, agar masyarakat bisa menikmati layanan digital seperti *e-commerce*, pendidikan daring, dan *telemedicine*.
- **Sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-Government)** : Menerapkan layanan digital dalam administrasi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
- **Transformasi digital di sektor ekonomi** : Mendorong penggunaan teknologi digital dalam sektor pertanian, perdagangan, dan UMKM agar lebih kompetitif di pasar nasional maupun global.
- **Edukasi dan literasi digital** : Memberikan pelatihan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan teknologi dengan baik dan menghindari dampak negatif dunia digital.

c. Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah

Konektivitas antarwilayah sangat penting untuk pemerataan pembangunan. Fokus peningkatan konektivitas antar wilayah ini adalah:

- **Membangun akses transportasi yang lebih baik** antara kota dan desa agar distribusi barang dan jasa lebih lancar.
- **Mempermudah mobilitas masyarakat** dengan menyediakan sarana transportasi umum yang terjangkau dan nyaman.
- **Meningkatkan akses ke pasar dan pusat ekonomi** bagi pelaku usaha di daerah terpencil agar mereka dapat menjual produknya lebih luas.
- **Menghubungkan desa dengan kota melalui jaringan internet** agar masyarakat desa dapat mengakses layanan digital dan informasi secara lebih mudah.

d. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berintegritas

Peningkatan infrastruktur yang memadai dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan profesional. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- **Penerapan sistem *e-Government*** dalam upaya untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik.
- **Digitalisasi layanan administrasi publik** agar masyarakat dapat mengakses dokumen kependudukan, perizinan, dan layanan lainnya dengan cepat, transparan dan tanpa pungli.
- **Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan anggaran** untuk memastikan dana pembangunan digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif (3E).

5. Misi 5 "Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Terpadu dan Berkesinambungan."

Misi ini menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dengan pendekatan yang berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan yang baik akan memastikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian alam. Elemen penting yang menjadi fokus misi ini adalah:

a. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Terpadu

Pengelolaan lingkungan yang terpadu berarti mengelola sumber daya alam secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*), seperti pemerintah, masyarakat, dan industri. Hal ini mencakup:

- **Pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan** guna mencegah deforestasi dan degradasi lahan akibat aktivitas perkebunan, pertambangan, dan perumahan.
- **Pengendalian pencemaran lingkungan** guna menekan pencemaran air, udara, dan tanah dari industri dan aktivitas domestik agar lingkungan tetap sehat.
- **Peningkatan tata kelola sampah dan limbah** melalui penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
- **Pemanfaatan energi ramah lingkungan** guna mendorong penggunaan energi terbarukan, seperti tenaga surya dan biogas, guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

b. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkesinambungan

Merupakan pendekatan strategis jangka panjang yang bertujuan menjaga keseimbangan alam dan melestarikan sumber daya agar tetap bermanfaat bagi generasi mendatang. Ini mencakup:

- **Rehabilitasi dan konservasi ekosistem**

  Merupakan adalah upaya untuk memulihkan, melindungi, dan mempertahankan keseimbangan ekosistem agar tetap berfungsi secara optimal, termasuk melalui kegiatan seperti reboisasi, perlindungan lahan gambut, dan pelestarian keanekaragaman hayati.
- **Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim**

  Adalah strategi untuk menghadapi dampak perubahan iklim dengan mengurangi risiko dan meningkatkan ketahanan lingkungan serta masyarakat, seperti pembangunan tanggul, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), dan penghijauan kota.
- **Pendidikan dan kesadaran lingkungan**

  Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui kampanye, edukasi, dan partisipasi aktif dalam gerakan lingkungan.
- **Penerapan kebijakan ramah lingkungan**

  Mendorong peraturan yang lebih ketat terhadap industri agar mereka menjalankan bisnis dengan memperhatikan dampak lingkungan.

c. Keseimbangan Antara Pembangunan dan Kelestarian Alam

Fokus ini juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan.

Beberapa hal yang menjadi fokus adalah:

- **Menerapkan konsep pembangunan hijau (*green development*)** : Mengembangkan proyek infrastruktur yang ramah lingkungan, seperti bangunan hemat energi dan transportasi hijau.
- **Mendukung ekonomi berbasis lingkungan** : Mendorong usaha yang berbasis ekowisata, pertanian organik, dan industri hijau yang tidak merusak alam.
- **Menjaga keseimbangan ekosistem laut dan pesisir** : Melindungi kawasan mangrove, terumbu karang, dan ekosistem pesisir yang berperan dalam menjaga keanekaragaman hayati.

Hubungan antara kelima misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Timur ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.2 Hubungan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Timur



Visi pembangunan jangka menengah Kutai Timur difokuskan pada transformasi Sosial (pada misi 1) dan transformasi Ekonomi (pada misi II). Fokus transformasi ini akan didukung oleh fondasi transformasi Tata Kelola (pada misi III) dan peningkatan

Infrastruktur (pada misi IV) yang kesemuanya itu akan bermuara pada keberlanjutan Lingkungan Hidup (pada misi V).

Misi tersebut memuat 50 program unggulan Kepala Daerah yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah.

Tabel 3.3 Program Unggulan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur 2025-2029

Program Unggulan Kepala Daerah 2025-2029	
KUTAI TIMUR HEBAT	1.000 Beasiswa Hafidz/Hafidzah Jenjang Pelajar SD-SMP
	1.000 Rumah Layak Huni (RLH) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah & Relokasi Warga Terdampak ~~Longsor~~ Bencana
	Program RT 250 Juta Per RT Per Tahun
	1 Desa 1 Kendaraan Mobil Operasional
	1 RT 1 Kendaraan Motor Operasional
	1 Kecamatan 1 Stadion Mini
	1 KK 1 Sertifikat Pendataan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
	Angkutan Bus Listrik Anak Sekolah
	ASN Hebat & Berintegritas
	Asuransi Pertanian Gagal Panen.
	Pembukaan/cetak Lahan Pertanian 100.000 Ha dan Cetak Tambak 5.000 Ha
	Bantuan Tenaga Kesehatan, Tenaga Pendidikan, dan Peningkatan Insentif Guru Swasta dan Penyuluh Pertanian
	Beasiswa Kutim Stimulan & Beasiswa Kutim Tuntas
	Pembangunan & Perbaikan Sarana Pendidikan & Kesehatan
	Gratis Bantuan Buku, Seragam dan Sepatu Sekolah
	Gratis Minum Susu & Makan Buah untuk Stop Stunting
	Hibah 1 Miliar untuk Yayasan Pendidikan Agama
	Insentif Da'i, Guru TK/TPA, Imam Masjid, Doja, Pendeta & Guru Mingguan
	Event dan Pembinaan untuk Peningkatan Prestasi Olahraga
	Jaminan BPJS Kesehatan Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Kurang Mampu
	Jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi Masyarakat Rentan
	Layanan Jemput Bola Program Pendidikan Non Formal, Stop Stunting, dan Warga di Bawah Garis Kemiskinan
	Menggelar Festival Seni, Budaya & Wisata, Baik Tingkat Nasional & Internasional
	Pelatihan Keterampilan & Sertifikasi Kompetensi Siap Kerja untuk Masyarakat
	Penyerapan 50.000 Tenaga Kerja dan Perlindungan Buruh
	Pembangunan & Peningkatan Fasilitas Pariwisata Strategis Daerah
	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

Program Unggulan Kepala Daerah 2025-2029	
DESA HEBAT	Jalan Poros Desa Mulus
	Listrik Desa Menyala 24 Jam
	1 Desa 1 Jaringan Air Bersih yang Lancar
	Akses Internet Desa Lancar dan Internet Sekolah Gratis
	Anjungan Dukcapil Mandiri (Pencetakan KK, KTP, Akta Kelahiran, Kartu BPJS Kesehatan Setiap Desa)
	Bantuan 25 Juta Permodalan UMKM Desa
	Bantuan Bibit Tanaman Buah per Rumah Tangga untuk Penghijauan Lingkungan
	Bantuan untuk Kelompok Tani & Nelayan
	Membangun Industri Pengolahan Pisang, Nanas, Coklat/Kakao, Karet dan Padi
	Membangun Pabrik-Pabrik Hilirisasi Sawit
	Menjaga Ketersediaan Stok Pupuk Harga Terjangkau Bagi Petani Desa
	Dokter Keliling Permudah Akses Kesehatan Bagi Warga Desa & Daerah Terpencil
	Program Desa Presisi (Satu data Kutim)
	Insentif Kader Posyandu 500 Ribu Rupiah Per Bulan
	Enklave dan Perubahan Tata Ruang Bagi Wilayah yang Masih Masuk Dalam Daerah Kawasan
	Pemberdayaan, Konsultasi & Perlindungan Hukum Bagi Anak, Perempuan & Keluarga di Setiap Kecamatan
	Penangkaran Buaya Sebagai Potensi Ekonomi & Wisata
KOTA HEBAT	Semenisasi, Aspal Jalan & Gang Mulus
	Pembangunan & Revitalisasi Drainase Kota
	Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH); Taman Tempat Bermain Anak, Ramah Disabilitas, Tempat Olahraga dan Tempat Berkumpul
	Pasar Digital
	Mall UMKM & Mall Pelayanan Publik
	Percepatan Operasional Pelabuhan Kenyamukan, Pelabuhan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy dan Pembangunan Bandara Sangatta

Penyusunan program unggulan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2029 dilakukan dengan pendekatan holistik dan terintegrasi, yang tidak hanya merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat daerah, tetapi juga selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam mendukung keberhasilan pembangunan secara menyeluruh dan berjenjang dari pusat hingga daerah. Program unggulan daerah telah disusun untuk mengintegrasikan prioritas pembangunan Presiden RI (RPJPN/RPJMN 2025–2045, serta arahan Presiden Prabowo) dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur (RPJMD Provinsi dan Kaltim Berdaulat), dengan tetap memperhatikan karakteristik dan potensi lokal Kutai Timur. Sinkronisasi tersebut dapat digambarkan dalam beberapa klaster utama berikut:

1. **Ketahanan Pangan, Energi, dan Sumber Daya Alam,** Program seperti Bantuan Bibit Tanaman Buah, Asuransi Pertanian, Cetak Lahan Pertanian dan Tambak, serta Jaminan Pupuk Terjangkau mendukung langsung misi nasional untuk mencapai swasembada pangan dan Hilirisasi industri pertanian melalui peningkatan dan perluasan areal tanam berbasis pertanian modern, yang juga merupakan bagian dari prioritas Kalimantan Timur dalam program unggulan Jospol;
2. **Transformasi Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Daerah,** Inisiatif seperti Pembangunan Mall UMKM dan Mall Pelayanan Publik serta peningkatan pelayanan birokrasi digital mendukung program nasional dalam reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik, sekaligus memperkuat posisi Kutai Timur dalam meningkatkan peran ekonomi kabupaten/kota terhadap pertumbuhan Provinsi Kalimantan Timur;
3. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia,** Program beasiswa seperti Kutim Stimulan, Kutim Tuntas, Beasiswa Hafidz/Hafidzah, bantuan pendidikan dan tenaga pengajar, serta event peningkatan prestasi olahraga secara langsung mendukung prioritas nasional dalam penguatan SDM unggul dan berkarakter, serta menjadi bagian dari pengembangan manusia sebagai prioritas Kaltim Berdaulat;
4. **Kesehatan dan Perlindungan Sosial,** Program Dokter Keliling, BPJS gratis bagi masyarakat miskin, Posyandu, dan pemberian susu & buah gratis untuk cegah stunting, merupakan respons konkret terhadap program nasional peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta dukungan terhadap upaya pencapaian zero stunting dan perlindungan kelompok rentan, sebagaimana juga menjadi fokus RPJMD Provinsi Kalimantan Timur;
5. **Percepatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi,** Inovasi seperti ASN Hebat & Berintegritas serta Anjungan Dukcapil Mandiri menunjukkan dukungan langsung terhadap prioritas nasional dalam reformasi birokrasi, integritas ASN, dan penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, murah, dan akuntabel;
6. **Pembangunan Rendah Karbon dan Pengendalian Emisi,** Komitmen Kutai Timur dalam penurunan emisi GRK dan adaptasi perubahan iklim tercermin

melalui program-program hijau, rehabilitasi lingkungan, serta penguatan sektor energi terbarukan, sejalan dengan target nasional menuju net zero emission tahun 2060 dan kontribusi Kalimantan Timur dalam program pembangunan rendah karbon.

Dengan demikian, Program Unggulan Bupati Kutai Timur 2025–2029 bukan hanya menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga memperkuat posisi Kabupaten Kutai Timur sebagai bagian penting dalam rantai kontribusi pembangunan nasional dan provinsi, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Sinkronisasi ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan Kutai Timur yang Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing, sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan nasional dan Kalimantan Timur yang berdaulat. Secara lengkap, bentuk dukungan terhadap Program Unggulan Nasional 2025-2029 dan program unggulan Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029 seperti pada Tabel 3.4 dan Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.4 Sinkronisasi Dukungan Program Unggulan Kabupaten Kutai Timur dengan Prioritas Nasional

No.	Program Prioritas Nasional	Program Unggulan Bupati Kutai Timur
1	Mencapai swasembada pangan, energi, dan air	Bantuan Bibit Tanaman Buah Per Rumah Tangga untuk Penghijauan Lingkungan
		Asuransi Pertanian Gagal Panen
		Pembukaan/cetak Lahan Pertanian 100.000 Ha & Cetak Tambak 5.000 Ha
		Menjaga Ketersediaan Stok Pupuk Harga Terjangkau Bagi Petani Desa
		Bantuan Penyuluh Pertanian
2	Penyempurnaan sistem penerimaan negara	Mall UMKM & Mall Pelayanan Publik
3	Reformasi politik, hukum, dan birokrasi	ASN Hebat & Berintegritas
		Anjungan Dukcapil Mandiri (Pencetakan KK, KTP)
4	Pencegahan dan pemberantasan korupsi	ASN Hebat & Berintegritas
5	Pemberantasan kemiskinan	Beasiswa Kutim Stimulan & Beasiswa Kutim Tuntas
		Gratis Bantuan Buku, Seragam dan Sepatu Sekolah
		Pemberdayaan, Konsultasi & Perlindungan Hukum Bagi Anak, Perempuan & Keluarga

No.	Program Prioritas Nasional	Program Unggulan Bupati Kutai Timur
6	Pencegahan dan pemberantasan narkoba	
7	Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia	Dokter Keliling Permudah Akses Kesehatan Bagi Warga Desa & Daerah Terpencil
		Jaminan BPJS Kesehatan Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Kurang Mampu
		Gratis Minum Susu & Makan Buah untuk Stop Stunting
		Bantuan Tenaga Kesehatan
		Pembangunan & Perbaikan Sarana Pendidikan & Kesehatan
		Insentif Kader Posyandu 500 Ribu Rupiah Per Bulan
		Jaminan BPJS Kesehatan Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Kurang Mampu
8	Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi	1.000 Beasiswa Hafidz/Hafidzah Jenjang Pelajar SDSMP
		Pembangunan & Perbaikan Sarana Pendidikan
		Event dan Pembinaan untuk Peningkatan Prestasi Olahraga
		Angkutan Bus Listrik Anak Sekolah
		Bantuan Tenaga Pendidikan, dan Peningkatan Insentif Guru Swasta
9	Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif	
10	Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas	Pemberdayaan, Konsultasi & Perlindungan Hukum Bagi Anak, Perempuan & Keluarga
11	Menjamin pelestarian lingkungan hidup	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
12	Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani	Bantuan untuk Kelompok Tani & Nelayan
13	Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau	Rumah Layak Huni (RLH) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
		Relokasi Warga Terdampak Longsor
14	Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM	Bantuan 25 Juta Permodalan UMKM Desa
		Pelatihan Keterampilan & Sertifikasi Kompetensi Siap Kerja untuk Masyarakat
		Pembangunan & Peningkatan Fasilitas Pariwisata Strategis Daerah

No.	Program Prioritas Nasional	Program Unggulan Bupati Kutai Timur
		Penyerapan 50.000 Tenaga Kerja dan Perlindungan Buruh
		Pelatihan Keterampilan & Sertifikasi Kompetensi Siap Kerja untuk Masyarakat
		Layanan Jemput Bola Program Pendidikan Non Formal, Stop Stunting, dan Warga di Bawah Garis Kemiskinan
		Jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi Masyarakat Rentan
15	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan SDA	Membangun Industri Pengolahan Pisang, Nanas, Coklat/Kakao, & Karet
		Membangun PabrikPabrik Hilirisasi Sawit
16	Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah	Insentif Da'i, Guru TK/TPA, Imam Masjid, Doja, Pendeta & Guru Mingguan
17	Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga	Event dan Pembinaan untuk Peningkatan Prestasi Olahraga
		Menggelar Festival Seni, Budaya & Wisata, Baik Tingkat Nasional & Internasional
		1 Kecamatan 1 Stadion Mini

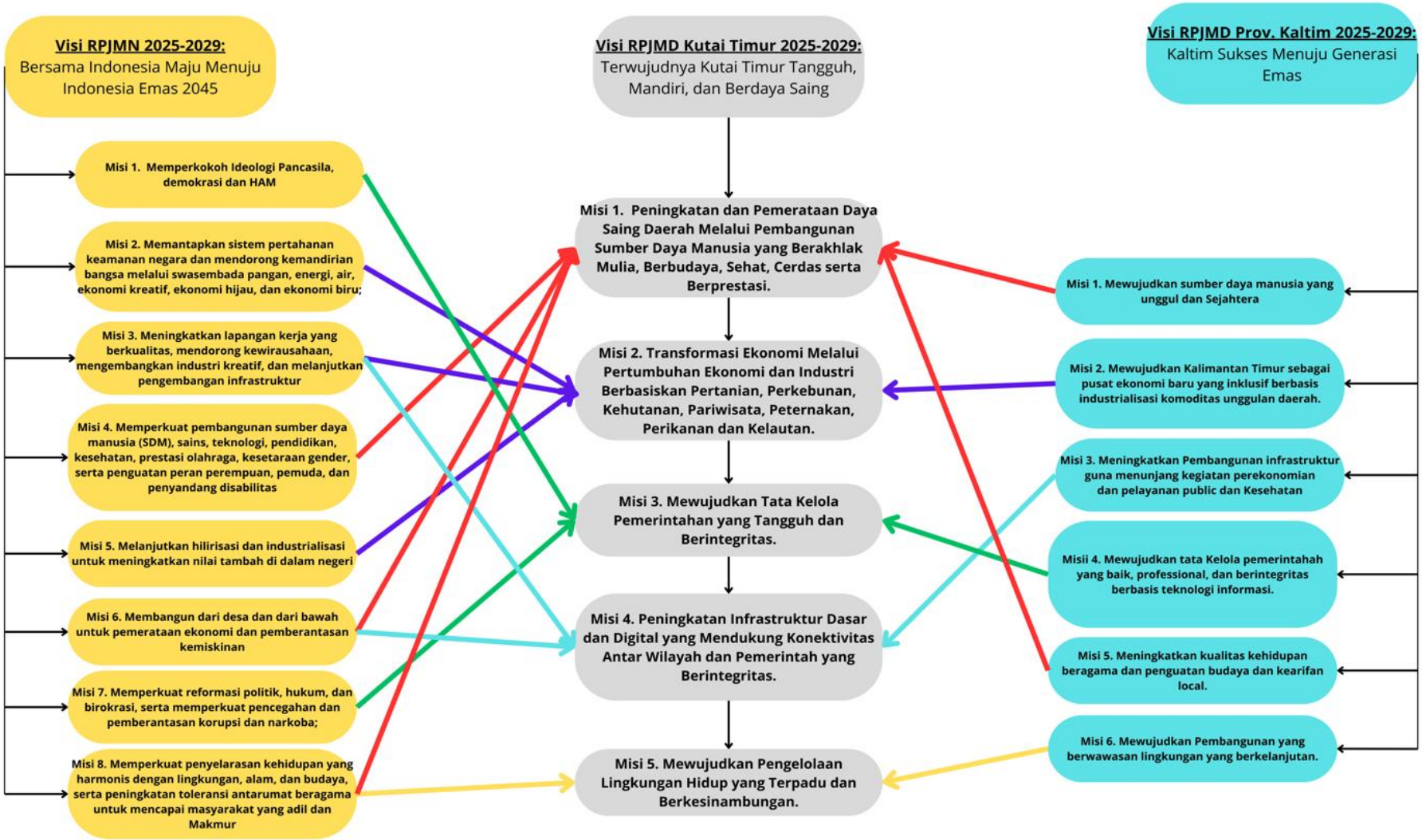
Tabel 3.5 Sinkronisasi Dukungan Program Unggulan Kabupaten Kutai Timur dengan Prioritas Provinsi Kalimatan Timur

Program Unggulan Provinsi	Program Unggulan Bupati
Gratis Bersekolah SMA/SMK hingga 53	1.000 Beasiswa Hafidz/Hafidzah Jenjang Pelajar SD-SMP
Peningkatan insentif guru sekolah umum, pesantren serta penjaga rumah ibadah;	Bantuan Tenaga Kesehatan, Tenaga Pendidikan, dan Peningkatan Insentif Guru Swasta dan Penyuluh Pertanian
Gratis Bersekolah SMA/SMK hingga 53	Beasiswa Kutim Stimulan & Beasiswa Kutim Tuntas
Membangun dan meningkatkan infrastruktur layanan kesehatan dan rumah sakit;	Pembangunan & Perbaikan Sarana Pendidikan & Kesehatan
Gratis Seragam Sekolah;	Gratis Bantuan Buku, Seragam dan Sepatu Sekolah
Gratis Makanan Bergizi;	Gratis Minum Susu & Makan Buah untuk Stop Stunting
Gratis Hajidan Umrah untuk Marbot	Insentif Da'i, Guru TK/TPA, Imam Masjid, Doja, Pendeta & Guru Mingguan
Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan;	Jaminan BPJS Kesehatan Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Kurang Mampu

Program Unggulan Provinsi	Program Unggulan Bupati
Mengembangkan pariwisata dan budaya berbasis desa	Menggelar Festival Seni, Budaya & Wisata, Baik Tingkat Nasional & Internasional
Mengembangkan pariwisata dan budaya berbasis desa	Pembangunan & Peningkatan Fasilitas Pariwisata Strategis Daerah
Hilirisasi industri pertanian melalui peningkatan dan perluasan areal tanam berbasis pertanian modern;	Membangun Industri Pengolahan Pisang, Nanas, Coklat/Kakao, & Karet
Memudahkan investasi termasuk pemberian insentif dan keflasama antara pemerintah daerah, pusat dan swasta	Membangun Pabrik-Pabrik Hilirisasi Sawit
Mengembangkan pariwisata dan budaya berbasis desa	Penangkaran buaya sebagai potensi ekonomi dan wisata
Mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk mendukung UMKM	Mall UMKM & Mall Pelayanan Publik
Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah;	1 KK 1 Sertifikat Pendataan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Pengembangan teknologi dan inovasi di semua sektor perikanan, kelautan, industri dan pelayanan publik	Anjungan Dukcapil Mandiri (Pencetakan KK, KTP, Akta Kelahiran, Kartu BPJS Kesehatan Setiap Desa)
Pembangunan infrastruktur di seluruh Kaltim seperti jalan (tol dan non-tol), jembatan, transportasi umum, jaringan komunikasidan pelabuhan internasional;	Jalan Poros Desa Mulus
Gratis Wifi lnternet di Seluruh Desa;	Akses Internet Desa Lancar dan Internet Sekolah Gratis
Pembangunan infrastruktur di seluruh Kaltim seperti jalan (tol dan non-tol), jembatan, transportasi umum, jaringan komunikasidan pelabuhan internasional;	Semenisasi, Aspal Jalan & Gang Mulus
	Pembangunan & Revitalisasi Drainase Kota
Mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk mendukung UMKM	Pasar Digital
Pembangunan infrastruktur di seluruh Kaltim seperti jalan (tol dan non-tol), jembatan, transportasi umum, jaringan komunikasidan pelabuhan internasional;	Percepatan Operasional Pelabuhan Kenyamukan, Pelabuhan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy dan Pembangunan Bandara Sangatta

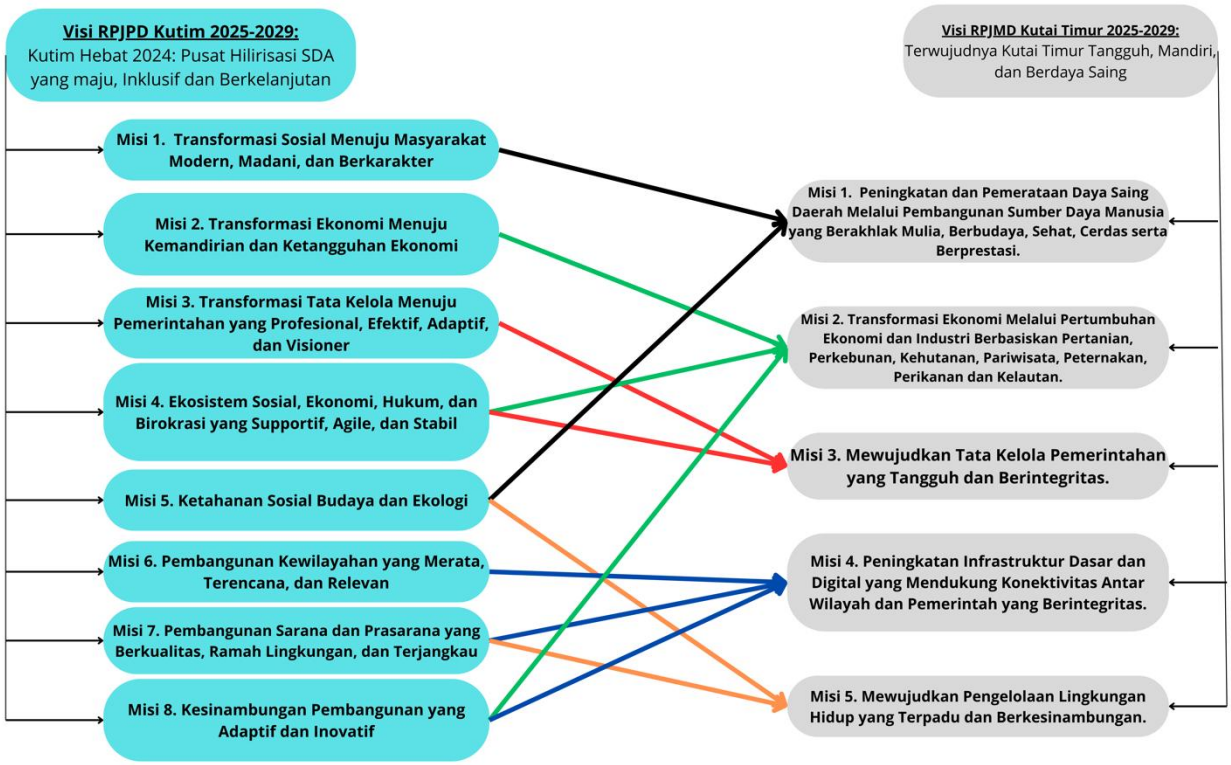
Selain untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2029, Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur di atas juga disusun dalam rangka untuk mendukung pencapaian prioritas RPJMN Tahun 2025-2029 dengan skema keterkaitan antara visi dan misi Kutai Timur dengan visi misi provinsi dan nasional dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.3 Skema Keterkaitan Antara Visi dan Misi Kabupaten Kutai Timur dengan Visi Misi Provinsi dan Nasional



RPJMD juga merupakan penerapan RPJPD dalam setiap lima tahun. Sejalan dengan hal tersebut, maka sinkronisasi antara misi pembangunan Jangka Panjang Daerah dan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah sangat penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan secara terarah, berkelanjutan, dan selaras dengan visi jangka panjang daerah. Sinkronisasi antara RPJPD dan RPJMD bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan strategi penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan dengan arah yang jelas, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan perencanaan yang terintegrasi, daerah dapat lebih siap menghadapi tantangan masa depan dan mencapai visi jangka panjangnya dengan efektif.

Gambar 3.4 Sinkronisasi Misi RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2025-2045 dan Misi RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2025-2029

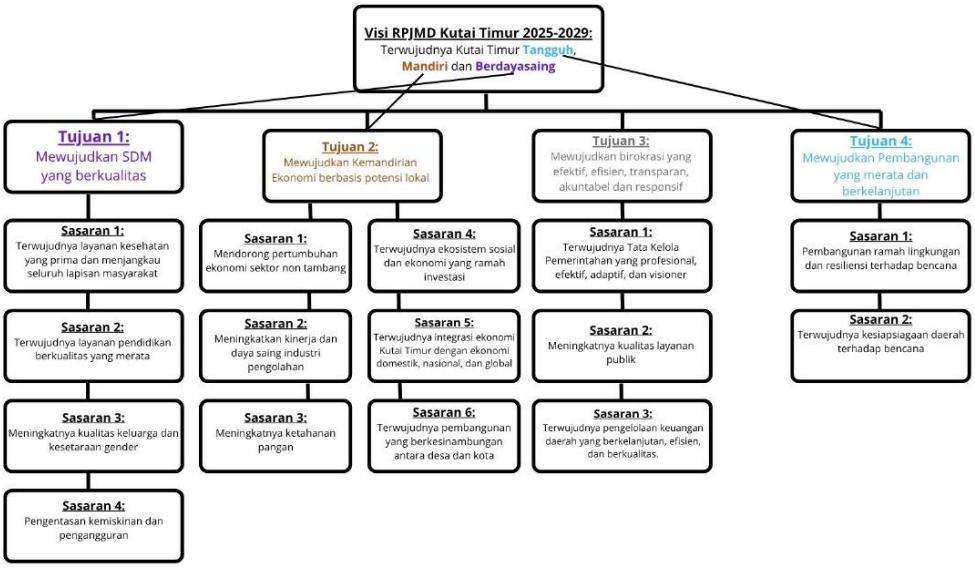


3.1.2 Tujuan dan Sasaran

Pencapaian visi pembangunan daerah selanjutnya diturunkan ke dalam rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa

hasil pembangunan Daerah. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan berdasarkan pada analisis isu-isu strategis. Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah ini selanjutnya menjadi sebuah rangkaian kinerja yang terhubung secara cascading dengan pencapaian visi, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan pelaksanaan 5 (lima) misi pembangunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 yang akan menjadi dasar perumusan arah kebijakan pembangunan daerah.

Gambar 3.5 Cascading Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Timur 2025-2029



Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan diukur dengan indikator kinerja dan target kinerja dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Indikator kinerja yang digunakan dalam rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah telah menginternalisasi indikator sasaran visi dan sebagian indikator utama pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2045. Sedangkan untuk target kinerja juga telah memperhatikan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dalam RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2045 tahap pertama. Terdapat 4 (empat) tujuan dan 15 (lima belas) sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Timur

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Visi : "Terwujudnya Kutai Timur Tangguh, Mandiri dan Berdaya Saing"										
1	Peningkatan dan Pemerataan Daya Saing Daerah Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat, Cerdas serta Berprestasi.	**T1. Mewujudkan SDM yang berkualitas**		**Indeks Pembangunan Manusia**	**76,18**	**76,6**	**77,02**	**77,45**	**77,87**	**78,29**
			T1.S1. Terwujudnya layanan kesehatan yang prima dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,33	74,79	75,25	75,71	76,16	76,61
				Angka Stunting	25,35	23,7	22,16	20,72	19,38	18,12
			T1.S2. Terwujudnya layanan pendidikan berkualitas yang merata	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (Tahun)	9,49	9,51	9,53	9,55	9,57	9,59
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,03	13,04	13,05	13,06	13,07	13,08
			T1.S3. Meningkatnya kualitas keluarga dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	64,47	65,73	67	68,26	69,53	70,79
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,51	0,49	0,47	0,46	0,44	0,42
			T1.S4. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran	Tingkat Kemiskinan (%)	7,93–8,14	7,16-7,55	6,38-6,97	5,61-6,38	4,83-5,80	4,06–5,21
				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,44–5,51	5,21-5,31	4,98-5,10	4,76-4,90	4,53-4,70	4,30–4,50
2	Transformasi Ekonomi Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Industri Berbasiskan Pertanian, Perkebunan, Kehutanan,	**T2. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal**		**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**10**	**10,38**	**10,76**	**11,14**	**11,52**	**11,9**
				PDRB per kapita (Rp Juta)	**366,53**	**389,99**	**414,94**	**441,49**	**469,74**	**499,8**

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Pariwisata, Peternakan, Perikanan dan Kelautan.			**Rasio gini (Indeks)**	**0,278–0,283**	**0,271-0,281**	**0,264-0,279**	**0,257-0,277**	**0,250-0,275**	**0,243–0,273**
			T2.S1. Mendorong pertumbuhan ekonomi sektor non tambang	Proporsi PDRB Sektor Non-Tambang (%)	25,06	25,66	26,91	27,56	28,22	28,88
			T2.S2 Meningkatkan kinerja dan daya saing industri pengolahan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	4,56	5,06	6,9	8,74	10,58	12,42
			T2.S3. Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	64,22	66,9	69,7	72,62	75,66	78,82
			T2.S4. Terwujudnya ekosistem sosial dan ekonomi yang ramah investasi	Nilai investasi PMDN (Juta Rupiah)	5.200.000	5.250.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
				Nilai investasi PMA (Ribu $)	268.750	271.875	275.000	275.000	275.000	275.000
			T2.S5. Terwujudnya integrasi ekonomi Kutai Timur dengan ekonomi domestik, nasional, dan global	Proporsi Nilai Ekspor terhadap PDRB	70,99	71,69	72,39	73,09	73,79	74,49
3	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Digital yang Mendukung Konektivitas Antar Wilayah dan Pemerintah yang Berintegritas.		T2.S6. Terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan antara desa dan kota	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	7,89–8,01	8,01–8,13	8,13–8,26	8,26–8,38	8,38–8,50	8,50–9,00

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh dan Berintegritas.	**T3. Mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan responsif**		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**72 (BB)**	**73 (BB)**	**75 (BB)**	**77 (BB)**	**78 (BB)**	**80 (BB)**
			T3.S1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, efektif, adaptif, dan visioner	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,1	3,18	3,26	3,34	3,42	3,5
				Indeks Sistem Merit	296,25	317	337,75	358,5	379,25	400
				Nilai SAKIP	63,4	66,72	70,04	73,36	76,68	80
				Indeks Integritas Pemerintah (Survei Penilaian Integritas)	62,13	65,11	68,08	71,05	74,03	77
				Indeks Inovasi Daerah	28,7	32,6	36,6	40,5	44,5	28,88
			T3.S2. Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Pelayanan Publik	2,48	2,61	2,73	2,86	2,98	3,11
			T3.S3. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan berkualitas	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	74,73	76,23	77,73	79,23	80,73	82,23
5	Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Terpadu dan Berkesinambungan.	**T4. Mewujudkan Pembangunan yang merata dan berkelanjutan**		**Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)**	**61,66**	**63,5**	**65,33**	**67,16**	**69**	**70,83**
			T4.S1. Pembangunan ramah lingkungan dan resiliensi terhadap bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	77,37	78,91	80,49	82,1	83,74	85,41

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
			T4.S2. Terwujudnya kesiapsiagaan daerah terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	166,36	159,36	152,36	145,36	138,36	131,36

Keempat tujuan pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 ini selaras dengan 17 (tujuh belas) tujuan Pembangunan Berkelanjutan global atau yang dikenal dengan sebutan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 telah sesuai dengan semangat global dalam pengentasan persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Keselarasan antara RPJMD dengan tujuan SGDs dapat dilihat secara lebih jelas pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.6 Keselarasan Tujuan RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2025-2029 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Tujuan RPJMD KUTIM 2025-2029	Tujuan SDG'S							
T1. Mewujudkan SDM Yang berkualitas	1 MENGHAPUS KEMISKINAN	3 KESEHATAN YANG BAIK DAN KESEJAHTERAAN	4 PENDIDIKAN BERMUTU	5 KESETARAAN GENDER	8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI			
T2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi berbasis potensi lokal	2 MENGAKHIRI KELAPARAN	9 INFRASTRUKTUR, INDUSTRI DAN INOVASI	12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB					
T3. Mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan responsif	16 PERDAMAIAN, KEADILAN, DAN KELEMBAGAAN YANG KUAT	17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN						
T4. Mewujudkan Pembangunan yang merata dan berkelanjutan	6 AKSES AIR BERSIH DAN SANITASI	7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU	9 INFRASTRUKTUR, INDUSTRI DAN INOVASI	10 MENGURANGI KETIMPANGAN	11 KOTA DAN KOMUNITAS YANG BERKELANJUTAN	13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	14 MENJAGA EKOSISTEM LAUT	15 MENJAGA EKOSISTEM DARAT

3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Guna mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Kabupaten Kutai Timur 2025-2029. Strategi Pembangunan berdasarkan tujuan dan sasaran merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD akan dicapai.

3.2.1 Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *Grand Design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan

bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Perumusan strategi dalam perencanaan pembangunan menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*added value*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Pentahapan pembangunan merupakan salah satu bagian dari strategi yang menggambarkan arah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029. Adapun pentahapan pembangunan RPJMD secara indikatif direpresentasikan melalui tema pembangunan tahunan yang disajikan pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.7 Agenda/Tahapan Pembangunan Tahunan Kutai Timur 2025-2029



Agenda pembangunan Kabupaten Kutai Timur tahun 2025–2029 disusun secara bertahap dengan arah yang jelas dan terukur untuk mewujudkan visi daerah. Setiap tahapan pembangunan memiliki fokus yang berbeda, namun saling terkait dan berkesinambungan. Pola ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Kutai

Timur tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan fondasi kokoh bagi kemandirian dan daya saing daerah di masa depan. Mulai dari pemantapan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan diarahkan secara bertahap menuju penguatan sumber daya manusia, transformasi ekonomi yang berkelanjutan, hingga penguatan sektor non-tambang sebagai upaya melepaskan ketergantungan dari sumber daya alam ekstraktif. Pada akhirnya, tahapan pembangunan ini bermuara pada terwujudnya Kutai Timur yang Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing di tahun 2029.

- **Tahun 2025 – Pemantapan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat guna mendukung daya saing daerah**, Pada awal periode RPJMD, pembangunan difokuskan pada penguatan fondasi ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agenda ini diarahkan untuk mendukung daya saing daerah melalui percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan akses masyarakat pada layanan dasar. Tahun ini menjadi momentum konsolidasi pembangunan, selaras dengan RKP Nasional 2025 yang menekankan akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan serta RKPD Prov Kal-Tim 2025 yang meningkatkan diversifikasi ekonomi yang didukung infrastruktur wilayah dan SDM berdaya saing.
- **Tahun 2026 – Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak transformasi ekonomi yang didukung dengan kemantapan infrastruktur yang mendukung investasi,** Setelah fondasi ekonomi mulai kokoh, perhatian pembangunan beralih pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai motor utama transformasi ekonomi. Fokus diarahkan pada peningkatan pendidikan, kesehatan, pengarusutamaan Gender serta peningkatan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja. Selain itu pembangunan konektivitas antar wilayah difokuskan untuk menunjang peningkatan sumber daya ekonomi dan investasi daerah yang didukung transformasi Tata Kelola Pemerintahan.
- **Tahun 2027 – Transformasi ekonomi berkelanjutan melalui penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia yang berdayasaing menuju Kutai Timur sejahtera**. Tahap ketiga menjadi momentum transformasi ekonomi Kutai Timur menuju pola pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah, termasuk daerah pedalaman dan perbatasan, menjadi prioritas agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara inklusif. Selain itu, penguatan kapasitas SDM diarahkan untuk membentuk tenaga kerja yang kompetitif, sehingga mendukung ekosistem ekonomi yang produktif menuju Kutai Timur sejahtera.

- **Tahun 2028 – Menuju Kutai Timur mandiri melalui penguatan ekonomi non tambang dan ketahanan pangan yang didukung pembangunan berkelanjuatan dan pemerintahan yang partisipatif**. Pada tahun keempat, fokus pembangunan diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan sektor non-tambang sebagai sumber pertumbuhan baru, serta peningkatan ketahanan pangan masyarakat. Pembangunan dilakukan dengan prinsip berkelanjutan dan partisipatif, sehingga masyarakat memiliki peran aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Tahapan ini sekaligus mempersiapkan Kutai Timur memasuki era pasca-tambang dengan fondasi ekonomi yang kokoh.
- **Tahun 2029 – Perwujudan visi Kutai Timur yang tangguh, mandiri dan berdaya saing**. Tahun terakhir periode RPJMD menjadi puncak konsolidasi seluruh agenda pembangunan. Fokus diarahkan pada penguatan ketangguhan daerah dalam menghadapi tantangan global, kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal, serta daya saing yang ditopang oleh SDM unggul dan tata kelola pemerintahan yang responsif. Tahun 2029 menjadi momentum untuk memastikan seluruh upaya pembangunan tidak hanya menghasilkan capaian fisik, tetapi juga memberi dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur secara menyeluruh

Tahapan pembangunan Kabupaten Kutai Timur 2025–2029 yang telah dirumuskan sebelumnya bukan hanya sekadar penanda arah capaian setiap tahun, tetapi sekaligus menuntut adanya strategi yang tepat untuk mewujudkannya. Setiap tema pembangunan tahunan memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, sehingga diperlukan pendekatan strategis yang selaras dengan kebutuhan dan potensi daerah pada tahap tersebut. Dengan demikian, setiap tahapan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kutai Timur 2025–2029 memiliki keterkaitan langsung dengan indikasi strategi yang disusun. Strategi-strategi inilah yang akan menjadi

jembatan antara arah pembangunan makro dengan implementasi program nyata di lapangan, sehingga visi Kutai Timur Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing dapat diwujudkan secara konsisten dan terukur. Berikut ini merupakan indikasi strategi dalam RPJMD Kutai Timur 2025-2029:

Tabel 3.7 Strategi Pemenuhan Tujuan dan Sasaran Dalam RPJMD Kutai Timur

TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI
T1. Mewujudkan SDM Yang berkualitas	
T1.S1. Terwujudnya layanan kesehatan yang prima dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Pemerataan akses dan ketersediaan pelayanan kesehatan,
	Peningkatan ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan
	Penguatan pembiayaan dan jaminan kesehatan
	Pencegahan dan pengendalian penyakit secara komprehensif,
	Transformasi digital dan sistem informasi kesehatan,
	Pemberdayaan masyarakat dan penguatan kesehatan masyarakat
	Penurunan kejadian stunting pada bayi dan balita,
T1.S2. Terwujudnya layanan pendidikan berkualitas yang merata	Pemerataan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan,
	Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan,
	Penguatan mutu pembelajaran dan kurikulum
	Dukungan sosial dan bantuan pendidikan untuk siswa tidak mampu,
	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang layak dan modern
	Kolaborasi dengan dunia usaha dan lembaga non-formal
T1.S3. Meningkatnya kualitas keluarga dan kesetaraan gender	Penguatan ketahanan dan kualitas keluarga
	Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah
	Pemberdayaan perempuan dalam ekonomi, politik, dan kepemimpinan
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA)
	Perlindungan terhadap kelompok rentan dan marginal
T1.S4. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran	Peningkatan pendapatan dan akses terhadap lapangan kerja
	Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
	Perlindungan sosial terpadu dan inklusif
	Penguatan layanan dasar di wilayah tertinggal dan pedalaman
	Kemitraan dan kolaborasi multipihak

TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI
T2. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal	
T2.S1. Mendorong pertumbuhan ekonomi sektor non tambang	Penguatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan
	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta UMKM
	Pengembangan sektor pariwisata berbasis alam, budaya, dan ekowisata
	Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Ekonomi Hijau
	Kolaborasi dan inovasi lintas sektor
T2.S2. Meningkatkan kinerja dan daya saing industri pengolahan	Hilirisasi produk pertanian, perkebunan dan perikanan
	Penguatan infrastruktur dan kawasan industri
	Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing SDM Industri
	Penguatan akses pasar dan branding produk lokal
	Fasilitasi pembiayaan dan insentif industri pengolahan
T2.S3. Meningkatnya ketahanan pangan	Peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal
	Penguatan cadangan dan distribusi pangan daerah,
	Perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan
	Penguatan ketahanan pangan keluarga dan komunitas
	Pengembangan sistem informasi dan tata kelola panga
T2.S4. Terwujudnya ekosistem sosial dan ekonomi yang ramah investasi	Penyederhanaan regulasi dan perizinan investasi
	Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung investasi
	Jaminan stabilitas sosial, politik, dan keamanan,
	Promosi dan fasilitasi investasi berbasis potensi unggulan daerah
T2.S5. Terwujudnya integrasi ekonomi Kutai Timur dengan ekonomi domestik, nasional, dan global	Mendorong hilirisasi dan diversifikasi produk ekspor lokal
	Penguatan konektivitas dan infrastruktur pendukung ekspor
	Promosi dagang dan akses ke pasar internasional,
T2.S6. Terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan antara desa dan kota	Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar antar kecamatan dan desa
	Pengendalian risiko banjir dan infrastruktur resilien terhadap iklim
	Pengembangan bandara dan pelabuhan sebagai pusat konektivitas daerah

TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI
	Peningkatan infrastruktur irigasi, bendungan, dan ketersediaan air baku
	Penyediaan akses air minum aman di daerah sulit terlayani,
	Peningkatan kualitas tata kelola dan pembiayaan infrastruktur
	Peningkatan status desa untuk pemenuhan dimensi IDM
	Penguatan konektivitas dan integrasi wilayah desa–kota
	Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan perencanaan partisipatif
	Integrasi program kabupaten dan dana desa,
	Pengembangan wilayah perdesaan sebagai basis ketahanan sosial dan ekonomi
T3. Mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan responsif	
T3.S1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, efektif, adaptif, dan visioner	Pemberdayaan masyarakat dan partisipasi dalam adaptasi perubahan iklim,
	Pemanfaatan teknologi dan kolaborasi multi-pihak
	Penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja daerah
	Membangun budaya pemerintahan yang inovatif dan berintegritas
	Penguatan ekosistem inovasi daerah
	Peningkatan infrastruktur pendukung ekonomi digital
	Dukungan regulasi dan insentif inovasi
T3.S2. Meningkatnya kualitas layanan publik	Standardisasi dan penyederhanaan prosedur layanan,
	Pengembangan mal pelayanan publik (MPP) dan lyanan terpadu
	Digitalisasi layanan publik
	Peningkatan kompetensi dan etika pelaksana layanan
	Penguatan mekanisme pengaduan dan umpan balik masyarakat
T3.S3. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan berkualitas	Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan berkualitas

TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI
T4. Mewujudkan Pembangunan yang merata dan berkelanjutan	
T4.S1. Pembangunan ramah lingkungan dan resiliensi terhadap bencana	Penguatan tata kelola lingkungan hidup berkelanjutan
	Peningkatan kualitas IKLH
T4.S2. Terwujudnya kesiapsiagaan daerah terhadap bencana	Penguatan sistem manajemen risiko dan ketahanan bencana daerah

1) T1.S1. Terwujudnya layanan kesehatan yang prima dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat

a. **Pemerataan Akses dan Ketersediaan Pelayanan Kesehatan**. Strategi pemerataan akses dan ketersediaan pelayanan kesehatan diarahkan untuk menjawab tantangan geografis dan demografis Kutai Timur yang memiliki wilayah luas, sebaran penduduk tidak merata, serta keterbatasan infrastruktur dasar. Program Dokter Keliling dan layanan kesehatan bergerak menjadi solusi praktis untuk menjangkau masyarakat di daerah pedalaman, terpencil, maupun perbatasan, sehingga hak dasar kesehatan dapat dirasakan lebih merata. Di sisi lain, pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana kesehatan diperlukan untuk memastikan bahwa kualitas layanan tidak hanya hadir sesaat, tetapi berkelanjutan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan sesuai standar. Upaya ini diperkuat dengan optimalisasi sistem rujukan berjenjang, agar setiap kasus kesehatan ditangani sesuai tingkatannya, sekaligus mengurangi beban rumah sakit rujukan utama. Selain itu, peningkatan jumlah dan kualitas Puskesmas serta Pustu menjadi kunci memperluas cakupan layanan primer di tingkat lokal. Dengan tenaga kesehatan yang memadai, layanan dasar yang optimal, serta jejaring rujukan yang kuat, strategi ini diharapkan dapat menghadirkan layanan kesehatan yang prima, inklusif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kutai Timur

b. **Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kesehatan.** Strategi peningkatan ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan ditujukan untuk menjawab permasalahan mendasar terkait keterbatasan jumlah, distribusi yang belum merata, serta kompetensi tenaga medis di Kutai Timur. Rekrutmen dan distribusi tenaga medis secara proporsional menjadi langkah penting agar kebutuhan layanan kesehatan di setiap wilayah, termasuk daerah terpencil, pedalaman, dan perbatasan, dapat terpenuhi secara adil. Upaya ini perlu diimbangi dengan pemberian insentif daerah dan tunjangan khusus sebagai daya tarik untuk mempertahankan tenaga kesehatan, sekaligus meningkatkan motivasi

dan kinerja mereka dalam memberikan pelayanan prima. Selain itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan menjadi elemen krusial dalam menghadapi dinamika penyakit, perkembangan teknologi medis, dan standar pelayanan kesehatan modern. Dengan tenaga medis yang terdistribusi secara merata, termotivasi, serta kompeten, strategi ini diharapkan mampu memperkuat fondasi layanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan di Kutai Timur

c. **Penguatan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan,** Strategi penguatan pembiayaan dan jaminan kesehatan diarahkan untuk memastikan seluruh masyarakat Kutai Timur memperoleh perlindungan kesehatan yang berkeadilan. Pemenuhan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi prioritas agar tidak ada warga yang tertinggal dari skema jaminan nasional, sekaligus mengurangi beban biaya pribadi saat mengakses layanan kesehatan. Di sisi lain, optimalisasi layanan bagi ibu hamil, balita, lansia, serta kelompok rentan lainnya dilakukan untuk menekan angka kematian ibu dan anak, meningkatkan kualitas tumbuh kembang generasi muda, serta menjamin kehidupan sehat bagi kelompok usia lanjut. Dengan pembiayaan yang lebih inklusif dan jaminan kesehatan yang efektif, strategi ini diharapkan mampu memperkuat daya tahan sistem kesehatan daerah, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik, serta mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih merata dan berkelanjutan di Kutai Timur.

d. **Pencegahan dan Pengendalian Penyakit secara Komprehensif.** Strategi pencegahan dan pengendalian penyakit secara komprehensif dirancang untuk memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat Kutai Timur melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), imunisasi lengkap, serta skrining dini penyakit tidak menular menjadi upaya penting untuk menekan angka kesakitan sejak hulu, sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kesehatan. Di sisi lain, penguatan program penanganan penyakit menular dilakukan guna

menekan risiko penularan yang cepat, terutama di wilayah padat penduduk maupun daerah rawan wabah. Tak kalah penting, penyediaan pelayanan kesehatan jiwa dan rehabilitasi bagi masyarakat dengan gangguan mental ringan hingga sedang menjadi langkah strategis untuk menghadirkan layanan kesehatan yang lebih inklusif. Dengan adanya pendekatan ini, kesehatan mental tidak lagi dipandang sebelah mata, tetapi menjadi bagian integral dari pelayanan kesehatan daerah**.** Secara keseluruhan, strategi ini diharapkan mampu menurunkan beban penyakit menular dan tidak menular, memperluas akses layanan kesehatan jiwa, serta menciptakan masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan tangguh menghadapi tantangan kesehatan di masa depan

e. **Transformasi Digital dan Sistem Informasi Kesehatan,** Strategi transformasi digital dan sistem informasi kesehatan merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan pelayanan kesehatan di Kutai Timur. Digitalisasi rekam medis dan pelayanan berbasis aplikasi memungkinkan tenaga kesehatan memberikan layanan yang lebih cepat, tepat, dan terdokumentasi dengan baik, sekaligus mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan. Sementara itu, integrasi sistem data kesehatan antar fasilitas dan Dinas Kesehatan membuka peluang pemantauan kondisi kesehatan masyarakat secara real-time, sehingga deteksi dini masalah kesehatan dapat dilakukan dengan lebih responsif. Dengan dukungan teknologi digital, pelayanan kesehatan akan semakin transparan, terukur, dan terkoordinasi, yang pada akhirnya memperkuat tata kelola sektor kesehatan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. Strategi ini menjadi fondasi menuju sistem kesehatan daerah yang modern, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat

f. **Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Kesehatan Masyarakat,** Strategi pemberdayaan masyarakat dan penguatan kesehatan masyarakat menekankan pentingnya partisipasi aktif warga sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan di Kutai Timur. Penguatan peran kader Posyandu melalui peningkatan kapasitas dan pemberian insentif

bulanan menjadi langkah krusial agar kader tetap termotivasi dalam memberikan layanan dasar, khususnya bagi ibu, balita, dan kelompok rentan. Selain itu, edukasi gizi, kesehatan reproduksi, dan pola hidup sehat yang dilaksanakan melalui sekolah maupun komunitas lokal merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing. Tidak kalah penting, kemitraan dengan organisasi masyarakat, PKK, dan tokoh adat akan memperkuat basis sosial dalam advokasi kesehatan masyarakat. Kolaborasi ini mampu menumbuhkan kesadaran kolektif, memperluas jangkauan informasi kesehatan, sekaligus memastikan program kesehatan lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat. Dengan pemberdayaan masyarakat yang kuat, strategi ini diharapkan mampu melahirkan kemandirian komunitas dalam menjaga kesehatan, mengurangi ketergantungan pada layanan kuratif, serta memperkuat fondasi pembangunan kesehatan yang berkelanjutan di Kutai Timur

g. **Penurunan kejadian Stunting pada bayi dan balita.** Strategi penurunan kejadian stunting diarahkan untuk memastikan tumbuh kembang optimal bagi bayi dan balita di Kutai Timur melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif. Pemberian makanan tambahan, susu gratis, serta penguatan fungsi Posyandu menjadi langkah utama dalam pemenuhan kebutuhan gizi anak. Upaya ini diperkuat dengan optimalisasi gerakan aksi konvergensi lintas sektor, sehingga pencegahan stunting dilakukan secara terpadu mulai dari tingkat keluarga, desa, hingga kabupaten. Inovasi layanan jemput bola melalui Cap Jempol Stop Stunting memastikan intervensi gizi dan kesehatan menjangkau langsung keluarga berisiko, khususnya di wilayah pedalaman dan terpencil. Sementara itu, pembentukan kampung keluarga berkualitas, Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat), dan rumah data kependudukan berfungsi sebagai pusat edukasi, layanan, dan pengelolaan informasi yang mendukung ketepatan sasaran program. Selain dari APBD dan dukungan pemerintah, strategi ini juga mengoptimalkan pembiayaan yang bersumber dari CSR perusahaan

sebagai bentuk kolaborasi dunia usaha dalam percepatan penurunan stunting. Dengan pendekatan komprehensif dan partisipatif ini, diharapkan prevalensi stunting di Kutai Timur dapat ditekan secara signifikan, melahirkan generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing.

2) T1.S2. Terwujudnya layanan pendidikan berkualitas yang merata.

a. **Pemerataan Akses Pendidikan yang Inklusif dan Berkeadilan**. Strategi pemerataan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan diarahkan untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di wilayah Kutai Timur yang memiliki tantangan geografis, sebaran penduduk yang tidak merata, serta keterbatasan infrastruktur. Pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah menjadi prioritas agar setiap anak mendapatkan ruang belajar yang aman, layak, dan mendukung proses pembelajaran yang efektif. Penyediaan transportasi sekolah, seperti bus listrik, hadir sebagai solusi inovatif untuk mengurangi hambatan jarak dan meningkatkan aksesibilitas bagi anak-anak di daerah terpencil. Selain itu, pengembangan sekolah terbuka dan pembelajaran berbasis komunitas memungkinkan fleksibilitas layanan pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang terkendala jarak, kondisi sosial-ekonomi, maupun kebutuhan khusus. Upaya ini diperkuat dengan penguatan inklusivitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, agar mereka memperoleh kesempatan belajar yang setara dalam lingkungan yang ramah dan adaptif. Melalui strategi ini, diharapkan setiap anak di Kutai Timur memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan berkualitas, tanpa terhambat oleh faktor geografis, sosial, maupun fisik, sehingga tercipta generasi yang cerdas, mandiri, dan berdaya saing.

b. **Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan**. Strategi peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan difokuskan untuk memperkuat peran pendidik sebagai aktor utama dalam peningkatan mutu pendidikan di Kutai Timur. Peningkatan kompetensi guru dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran agar mampu menjawab tantangan pendidikan abad 21. Langkah ini diimbangi dengan pemberian insentif

dan afirmasi bagi guru, terutama yang bertugas di wilayah pedalaman dan perbatasan, guna menjaga motivasi dan meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, rekrutmen tenaga pengajar secara proporsional dan berbasis zonasi menjadi upaya untuk mengatasi kekurangan guru, sehingga distribusi pendidik lebih merata di seluruh wilayah. Program magang, pertukaran guru, serta pengiriman guru berprestasi turut mendukung peningkatan mutu melalui transfer pengetahuan, pengalaman, dan inovasi pembelajaran. Dengan strategi ini, diharapkan kualitas pembelajaran di Kutai Timur semakin meningkat, kesenjangan pendidikan antarwilayah dapat ditekan, dan terbentuk ekosistem pendidikan yang adaptif, berdaya saing, serta berorientasi pada pengembangan SDM unggul.

c. **Penguatan Mutu Pembelajaran dan Kurikulum**., Strategi penguatan mutu pembelajaran dan kurikulum diarahkan untuk memastikan peserta didik di Kutai Timur mampu menguasai kompetensi dasar sekaligus memiliki karakter dan daya saing yang kuat. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran melalui platform digital, e-learning, dan konten pendidikan daring menjadi jawaban atas kebutuhan inovasi metode belajar yang lebih interaktif, fleksibel, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah terpencil. Selain itu, pengembangan pendidikan karakter, literasi digital, dan numerasi dijadikan fondasi utama dalam membentuk SDM unggul. Dengan demikian, siswa tidak hanya cakap dalam aspek akademik, tetapi juga memiliki kecerdasan emosional, keterampilan, serta kesiapan menghadapi transformasi digital dan dinamika global. Melalui strategi ini, kualitas pendidikan di Kutai Timur diharapkan semakin adaptif, relevan dengan perkembangan zaman, dan mampu melahirkan generasi yang sehat secara moral, kritis secara intelektual, serta tangguh dalam bersaing di masa depan.

d. **Dukungan Sosial dan Bantuan Pendidikan untuk Siswa Tidak Mampu,** Strategi dukungan sosial dan bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu menjadi langkah konkret dalam mewujudkan pendidikan

yang berkeadilan di Kutai Timur. Melalui program Beasiswa Kutim Stimulan dan Kutim Tuntas, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin maupun siswa berprestasi tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan tanpa terkendala faktor ekonomi. Selain itu, pemberian perlengkapan sekolah gratis berupa seragam, buku, dan sepatu setiap tahun ajaran baru membantu meringankan beban orang tua sekaligus mendorong semangat belajar siswa. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai intervensi sosial, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang untuk mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya strategi ini, diharapkan akses pendidikan di Kutai Timur semakin merata, inklusif, serta mampu membangun generasi yang lebih cerdas, tangguh, dan berdaya saing.

e. **Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Layak dan Modern**. Strategi peningkatan sarana dan prasarana pendidikan diarahkan untuk menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan sesuai standar di seluruh wilayah Kutai Timur. Pembangunan laboratorium, perpustakaan, ruang kelas, serta toilet yang layak menjadi prioritas agar peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermutu di setiap jenjang pendidikan. Pemenuhan fasilitas sekolah berbasis teknologi juga menjadi kebutuhan mendesak untuk menyiapkan generasi yang melek digital dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Selain itu, standarisasi fasilitas sekolah sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan penting untuk menjamin kesetaraan mutu layanan di seluruh sekolah, baik di wilayah perkotaan maupun pedalaman. Dengan demikian, pemerataan sarana prasarana tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga mempersempit kesenjangan pendidikan antarwilayah. Melalui strategi ini, Kutai Timur diharapkan mampu menghadirkan sistem pendidikan yang modern, inklusif, dan berdaya saing, sehingga menghasilkan SDM unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan.

f. **Kolaborasi dengan Dunia Usaha dan Lembaga Non-Formal**, Strategi kolaborasi dengan dunia usaha dan lembaga non-formal bertujuan memperkuat ekosistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan daerah dan dunia kerja. Pengembangan kemitraan dengan industri dan dunia kerja (DUDI) membuka peluang bagi peserta didik untuk memperoleh pengalaman praktis, memperluas akses magang, serta meningkatkan kesiapan kerja setelah lulus. Di sisi lain, pemberdayaan pendidikan nonformal berperan sebagai jalur alternatif yang fleksibel bagi masyarakat yang belum terjangkau pendidikan formal, sehingga tidak ada kelompok yang tertinggal dalam peningkatan kapasitas SDM. Pelibatan masyarakat, LSM, serta tokoh adat dan agama menjadi kunci dalam membangun lingkungan pendidikan yang kondusif, sesuai dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Kutai Timur. Melalui sinergi multi-pihak ini, pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga gerakan bersama untuk melahirkan generasi yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global.

3) T1.S3. Meningkatnya kualitas keluarga dan kesetaraan gender.

2.1.1.1.5 **Penguatan Ketahanan dan Kualitas Keluarga.** Strategi penguatan ketahanan dan kualitas keluarga difokuskan pada peningkatan peran keluarga sebagai unit terkecil namun paling strategis dalam pembangunan SDM Kutai Timur. Edukasi keluarga melalui program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) menjadi wadah penting untuk membekali keluarga dengan pengetahuan, keterampilan, serta dukungan dalam menghadapi setiap tahapan siklus kehidupan. Penyediaan layanan konseling keluarga dan parenting berbasis komunitas turut memperkuat fungsi keluarga dalam menciptakan lingkungan yang sehat, harmonis, dan adaptif terhadap perubahan sosial. Kampanye keluarga sehat dan bahagia mendorong terciptanya kesadaran kolektif akan pentingnya pola hidup sehat dan relasi keluarga yang berkualitas. Upaya ini diperkuat dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui media digital dan platform edukasi daring, sehingga pesan-pesan edukatif dapat

menjangkau masyarakat lebih luas dan efektif. Dengan strategi ini, diharapkan terbangun keluarga Kutai Timur yang tangguh, sejahtera, dan mampu menjadi fondasi utama dalam melahirkan generasi unggul yang siap bersaing di masa depan.

2.1.1.1.6 **Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah**. Strategi pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan daerah diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan di Kutai Timur mampu memberikan manfaat yang setara bagi laki-laki maupun perempuan. Integrasi perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program di setiap perangkat daerah menjadi kunci agar pembangunan lebih inklusif dan berkeadilan. Selain itu, penguatan kelembagaan PUG dilakukan untuk memperkuat koordinasi, kapasitas, serta komitmen lintas sektor dalam mendorong terciptanya ruang partisipasi yang setara. Dengan demikian, PUG tidak hanya menjadi agenda administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Melalui strategi ini, diharapkan pembangunan Kutai Timur mampu mengurangi kesenjangan gender, memperluas peran perempuan dalam pembangunan, dan mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih adil, responsif, dan berkelanjutan.

2.1.1.1.7 **Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi, Politik, dan Kepemimpinan**. Strategi pemberdayaan perempuan dalam ekonomi, politik, dan kepemimpinan diarahkan untuk memperluas peran serta perempuan dalam pembangunan daerah secara nyata dan berkelanjutan. Pelatihan keterampilan dan bantuan usaha bagi perempuan, terutama ibu rumah tangga dan perempuan kepala keluarga, menjadi langkah penting untuk meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga sekaligus memperkuat basis ekonomi lokal. Fasilitasi bagi perempuan pelaku UMKM dalam mengakses pasar, pembiayaan, serta legalitas usaha semakin membuka ruang agar perempuan dapat berdaya saing dalam dunia usaha. Di ranah sosial-politik, peningkatan partisipasi perempuan dalam forum desa, BPD, organisasi masyarakat, maupun jabatan

struktural pemerintahan berfungsi untuk memastikan representasi dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, pemberian penghargaan bagi tokoh perempuan inspiratif dan organisasi perempuan yang aktif menjadi apresiasi sekaligus motivasi untuk terus mendorong kontribusi nyata perempuan dalam pembangunan. Dengan strategi ini, perempuan di Kutai Timur tidak hanya berperan sebagai pendukung, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan, memperkuat demokrasi lokal, serta melahirkan kepemimpinan yang inklusif dan berkeadilan gender.

2.1.1.1.8 **Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA)**. Strategi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA) difokuskan pada perlindungan hak asasi serta pemenuhan kebutuhan korban secara menyeluruh. Penguatan layanan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta unit layanan ramah korban menjadi langkah strategis untuk memberikan akses cepat, aman, dan manusiawi bagi mereka yang membutuhkan perlindungan. Upaya ini dipertegas melalui pendidikan anti-kekerasan dan kesetaraan gender di sekolah, komunitas, maupun tempat ibadah, guna menumbuhkan kesadaran kolektif sejak dini. Di samping itu, peningkatan koordinasi lintas sektor antara aparat kepolisian, rumah sakit, DP3A, dan lembaga sosial menjadi kunci agar penanganan korban lebih komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Kampanye publik seperti “Stop KDRT”, “Stop Perkawinan Anak”, dan “Lindungi Anak dari Eksploitasi dan Kekerasan” memperkuat gerakan bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas kekerasan. Dengan strategi ini, Kutai Timur diharapkan mampu membangun sistem perlindungan yang tangguh, menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mewujudkan masyarakat yang lebih berkeadilan, ramah anak, dan responsif gender.

2.1.1.1.9 **Perlindungan terhadap Kelompok Rentan dan Marginal**. Strategi perlindungan terhadap kelompok rentan dan marginal diarahkan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar serta

terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kutai Timur, khususnya perempuan miskin, penyandang disabilitas, korban kekerasan, serta kelompok rentan lainnya. Fasilitasi layanan hukum dan pendampingan menjadi langkah utama agar kelompok ini memperoleh akses terhadap keadilan dan perlindungan yang layak. Selain itu, program dukungan sosial bagi ibu tunggal, lansia perempuan, dan perempuan dengan HIV/AIDS dirancang untuk memperkuat daya tahan hidup serta meningkatkan kualitas kesejahteraan mereka. Upaya ini diperkuat dengan penguatan lembaga rujukan dan pusat aduan masyarakat berbasis desa/kelurahan, sehingga pelayanan perlindungan dapat diakses lebih dekat, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Dengan strategi ini, diharapkan kelompok rentan di Kutai Timur tidak lagi termarjinalkan, tetapi terlindungi, berdaya, dan mampu menjalani kehidupan yang lebih sejahtera dalam masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

4) T1.S4. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran

a. **Peningkatan Pendapatan dan Akses terhadap Lapangan Kerja.** Strategi peningkatan pendapatan dan akses terhadap lapangan kerja diarahkan untuk memperluas peluang ekonomi masyarakat Kutai Timur sekaligus menekan tingkat pengangguran. Penguatan sektor pertanian, perikanan, dan UMKM berbasis desa menjadi fokus utama karena sektor ini menyerap tenaga kerja terbesar serta mampu meningkatkan kemandirian ekonomi lokal. Program padat karya produktif dilaksanakan untuk menyediakan lapangan kerja langsung, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur desa. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif dan digitalisasi UMKM membuka ruang inovasi baru yang sesuai dengan tren pasar modern, memperluas akses pemasaran, dan meningkatkan daya saing produk lokal. Upaya ini diperkuat melalui pemberian insentif dan kemudahan investasi agar dunia usaha semakin tertarik menanamkan modal di Kutai Timur, sehingga tercipta lebih banyak kesempatan kerja berkualitas. Dengan strategi ini, diharapkan

pendapatan masyarakat meningkat, tingkat kesejahteraan membaik, serta struktur ekonomi daerah semakin tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

b. **Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).** Penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi pondasi utama dalam mendorong daya saing daerah. Melalui program beasiswa Kutim Tuntas dan Stimulan, pemerintah memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi generasi muda, khususnya dari keluarga kurang mampu maupun berprestasi. Selain itu, pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi kerja diarahkan untuk menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga mampu terserap di pasar kerja secara optimal. Tidak kalah penting, peningkatan keterampilan digital dan kewirausahaan menjadi langkah strategis menghadapi tantangan era transformasi digital dan ekonomi kreatif. Dengan kombinasi kebijakan ini, SDM Kutai Timur diharapkan tumbuh menjadi tenaga kerja terampil, adaptif, dan inovatif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

c. **Perlindungan Sosial Terpadu dan Inklusif**. Perlindungan sosial yang terpadu dan inklusif merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, memperoleh jaminan kesejahteraan yang layak. Melalui peningkatan cakupan bantuan sosial tepat sasaran, baik berupa bantuan pangan, pendidikan, maupun subsidi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, pemerintah berupaya mengurangi beban hidup masyarakat. Efektivitas program akan semakin kuat dengan optimalisasi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), sehingga intervensi berbasis data dapat menjangkau penerima yang benar-benar membutuhkan. Lebih jauh, strategi ini tidak berhenti pada pemberian bantuan, melainkan juga mendorong kemandirian keluarga miskin produktif melalui pendampingan kewirausahaan dan program graduasi kemiskinan. Dengan demikian, perlindungan sosial tidak hanya bersifat kuratif, tetapi

juga transformatif dalam memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan.

d. **Penguatan Layanan Dasar di Wilayah Tertinggal dan Pedalaman**. Penguatan layanan dasar di wilayah tertinggal dan pedalaman menjadi kunci dalam menurunkan kesenjangan pembangunan antarwilayah di Kutai Timur. Aksesibilitas yang terbatas terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, dan internet seringkali menghambat mobilitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Melalui pembangunan serta perbaikan infrastruktur dasar, hambatan konektivitas dapat diatasi sehingga membuka peluang baru bagi aktivitas ekonomi pedesaan. Selain itu, layanan pendidikan dan kesehatan di wilayah rentan kemiskinan akan diperkuat melalui pemberian insentif bagi guru dan tenaga kesehatan di daerah terpencil, guna memastikan kehadiran tenaga profesional yang memadai. Strategi ini juga diperkuat dengan mobilisasi program desa tematik berbasis potensi lokal, yang diintegrasikan dengan program prioritas kabupaten. Dengan pendekatan ini, pembangunan di wilayah tertinggal tidak hanya menghadirkan layanan dasar, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar mampu mandiri sesuai karakteristik lokalnya.

e. **Kemitraan dan Kolaborasi Multipihak**. Kemitraan dan kolaborasi multipihak merupakan pendekatan strategis untuk memperkuat efektivitas pembangunan di Kutai Timur. Sinergi dengan program provinsi dan pusat memastikan konsistensi kebijakan serta memaksimalkan sumber daya lintas level pemerintahan. Di sisi lain, kolaborasi dengan dunia usaha melalui pemanfaatan program CSR, dukungan LSM, serta lembaga keagamaan memberikan ruang partisipasi aktif bagi berbagai aktor non-pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih jauh, pemanfaatan Dana Desa dan APBDesa diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja lokal, sehingga pembangunan berbasis desa dapat berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan terbangunnya kolaborasi multipihak ini, program pembangunan tidak

hanya bergantung pada pemerintah daerah, melainkan menjadi gerakan bersama yang didukung oleh seluruh pemangku kepentingan.

5) T2.S1. Mendorong pertumbuhan ekonomi sektor non tambang

a. **Penguatan Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan**. Penguatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan merupakan salah satu motor utama pembangunan ekonomi Kutai Timur yang berorientasi pada ketahanan pangan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Upaya ini dilakukan melalui perluasan lahan pertanian produktif, baik untuk tanaman pangan maupun hortikultura, yang dikelola secara kawasan agar memberikan skala ekonomi yang optimal. Pada sektor perikanan, program cetak tambak dan kemitraan dengan pelaku usaha diarahkan untuk memperkuat produktivitas sekaligus membuka pasar yang lebih luas. Peningkatan infrastruktur pendukung serta penguatan kapasitas petani, pembudidaya ikan, dan peternak menjadi langkah penting untuk mendorong efisiensi dan daya saing. Lebih jauh, pengembangan komoditas unggulan lokal berbasis klaster produksi dan agribisnis akan menjadi strategi hilirisasi yang memberi nilai tambah dan memperluas kesempatan kerja. Dengan pendekatan ini, sektor pertanian dan perikanan tidak hanya sekadar penyedia pangan, tetapi juga pilar ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

b. **Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta UMKM**. Pengembangan IKM dan UMKM menjadi pilar penting dalam memperkuat struktur ekonomi daerah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Melalui fasilitasi pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, dan pemasaran digital, pelaku UMKM akan memiliki kemampuan lebih baik dalam mengelola usaha serta memperluas jaringan pemasaran. Peningkatan akses pembiayaan juga menjadi prioritas agar UMKM tidak terhambat modal dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, pendirian kawasan sentra industri berbasis komoditas lokal akan mendorong penguatan rantai nilai dan hilirisasi produk daerah. Promosi

produk lokal melalui pameran, platform digital, dan program "Bangga Buatan Kutim" diharapkan mampu memperluas pasar serta meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap produk daerah. Dengan strategi ini, UMKM dan IKM Kutai Timur tidak hanya berkembang secara kuantitas, tetapi juga berdaya saing tinggi di tingkat regional maupun nasional.

c. **Pengembangan Sektor Pariwisata Berbasis Alam, Budaya, dan Ekowisata**, Pengembangan sektor pariwisata berbasis alam, budaya, dan ekowisata menjadi salah satu motor diversifikasi ekonomi Kutai Timur. Dengan memperkuat daya tarik destinasi wisata, baik melalui konservasi alam maupun revitalisasi budaya lokal, pariwisata dapat menjadi pintu masuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur dan amenitas pariwisata yang memadai turut menjadi prasyarat agar wisatawan mendapatkan pengalaman yang berkualitas. Lebih jauh, pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pelaku utama desa wisata dan ekowisata memastikan manfaat pariwisata dapat dirasakan langsung di tingkat akar rumput. Upaya ini diperkaya dengan strategi promosi digital dan penyelenggaraan event daerah yang mampu memperluas jangkauan pasar wisata. Dengan pendekatan ini, sektor pariwisata Kutai Timur tidak hanya berorientasi pada kunjungan wisatawan, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan masyarakat.

d. **Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Ekonomi Hijau**. Optimalisasi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan ekonomi hijau menjadi langkah penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kutai Timur. Melalui pengembangan produk HHBK seperti madu hutan, rotan, dan tanaman obat, masyarakat sekitar hutan dapat memperoleh sumber pendapatan alternatif yang ramah lingkungan. Dukungan kelembagaan koperasi dan BUMDes menjadi kunci agar rantai nilai HHBK dapat berjalan efisien sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang merata. Selain itu, pengembangan ekonomi berbasis konservasi melalui kemitraan kehutanan, ekowisata,

dan jasa lingkungan diarahkan untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus membuka peluang usaha baru. Pelatihan pengolahan hasil hutan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan juga menjadi bagian integral agar masyarakat memiliki keterampilan dan daya saing yang lebih baik. Dengan pendekatan ini, Kutai Timur dapat membangun model ekonomi hijau yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem hutan.

e. **Kolaborasi dan Inovasi Lintas Sektor**. Kolaborasi dan inovasi lintas sektor menjadi pendorong penting dalam membangun struktur ekonomi Kutai Timur yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Melalui penguatan riset dan pengembangan (R&D) di sektor pertanian serta ekonomi kreatif bersama perguruan tinggi dan lembaga litbang, diharapkan muncul inovasi produk dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan lokal. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM pelaku sektor non-tambang, termasuk generasi muda, perempuan, dan penyandang disabilitas, menjadi langkah strategis untuk memastikan transformasi ekonomi berlangsung inklusif. Integrasi program sektoral dengan pemanfaatan Dana Desa turut memperkuat basis pertumbuhan ekonomi lokal berbasis potensi desa. Dengan sinergi multipihak ini, Kutai Timur dapat mempercepat lahirnya ekosistem ekonomi baru yang lebih berdaya saing dan ramah keberlanjutan.

6) T2.S2. Meningkatkan kinerja dan daya saing industri pengolahan

a. **Hilirisasi Produk Pertanian, Perkebunan dan Perikanan**. Hilirisasi produk pertanian, perkebunan, dan perikanan merupakan strategi kunci dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi Kutai Timur. Dengan mengembangkan sentra industri pengolahan berbasis komoditas unggulan lokal, potensi hasil bumi tidak lagi hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk bernilai tinggi. Fasilitasi unit pengolahan hasil (UPH) dan industri rumah tangga juga membuka peluang bagi masyarakat untuk menghasilkan produk makanan olahan, kerajinan, maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK) secara lebih mandiri. Peningkatan kapasitas teknologi pascapanen dan pengolahan diarahkan

agar kualitas produk lokal mampu bersaing di pasar regional hingga nasional. Selain itu, kemitraan dengan investor melalui pembangunan pabrik pengolahan skala menengah, baik dengan skema investasi langsung maupun Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), akan memperkuat rantai industri daerah. Dengan pendekatan ini, hilirisasi tidak hanya meningkatkan daya saing, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru serta memperluas basis ekonomi lokal.

b. **Penguatan Infrastruktur dan Kawasan Industri**. Penguatan infrastruktur dan kawasan industri menjadi fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kutai Timur yang lebih terarah dan berdaya saing. Pembangunan kawasan industri kecil dan menengah (IKM) di kecamatan potensial akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang mampu menggerakkan ekonomi lokal. Upaya ini diperkuat dengan penyediaan infrastruktur dasar kawasan industri, sehingga aktivitas produksi dan distribusi dapat berjalan lebih efisien. Revitalisasi pasar induk dan gudang logistik daerah juga menjadi bagian penting untuk memperkuat rantai distribusi hasil industri pengolahan sekaligus mengurangi ketergantungan pada pusat distribusi luar daerah. Lebih jauh, penerapan digitalisasi rantai pasok dan pencatatan produksi berbasis teknologi akan meningkatkan transparansi, akurasi data, dan daya saing produk lokal di pasar regional maupun nasional. Dengan strategi ini, Kutai Timur dapat membangun ekosistem industri yang modern, efisien, dan inklusif.

c. **Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing SDM Industri**. Peningkatan kapasitas dan daya saing SDM industri merupakan prasyarat penting dalam memperkuat basis industri lokal di Kutai Timur. Melalui pelatihan teknis yang mencakup aspek produksi, sanitasi, standar mutu seperti HACCP, pengemasan, hingga pemasaran, pelaku IKM dan UMKM dapat meningkatkan kualitas produk sekaligus memenuhi standar pasar yang lebih luas. Selain itu, sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja industri lokal menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas dan daya saing SDM daerah. Pemberian insentif dan pembinaan

berkelanjutan bagi pelaku industri kecil yang berorientasi ekspor atau substitusi impor juga diarahkan untuk mendorong transformasi industri ke arah yang lebih kompetitif dan mandiri. Dengan strategi ini, Kutai Timur dapat mencetak SDM industri yang handal, adaptif, dan siap menghadapi dinamika pasar global.

d. **Penguatan Akses Pasar dan Branding Produk Lokal**. Penguatan akses pasar dan branding produk lokal menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah di Kutai Timur. Fasilitasi sertifikasi halal, izin edar BPOM, dan PIRT memastikan produk industri rumah tangga memenuhi standar keamanan dan kualitas, sehingga lebih mudah diterima pasar. Upaya ini diperkuat dengan promosi produk unggulan melalui pameran daerah maupun nasional, serta pemanfaatan platform digital e-commerce yang mampu memperluas jangkauan pemasaran. Selain itu, pendampingan branding dan pengemasan produk sesuai standar pasar regional hingga global akan memberikan nilai tambah dan meningkatkan citra produk lokal. Penyusunan katalog digital produk unggulan industri Kutai Timur juga akan memperkuat visibilitas sekaligus mempermudah akses pasar bagi konsumen dan mitra usaha. Dengan strategi ini, produk lokal Kutai Timur dapat naik kelas, berdaya saing tinggi, dan menjadi kebanggaan daerah.

e. **Fasilitasi Pembiayaan dan Insentif Industri Pengolahan**. Fasilitasi pembiayaan dan insentif industri pengolahan merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi tumbuhnya industri kecil dan menengah (IKM) di Kutai Timur. Melalui akses pembiayaan yang lebih mudah, baik melalui KUR, dana bergulir, maupun dukungan CSR, pelaku industri dapat mengembangkan kapasitas usaha tanpa terbebani keterbatasan modal. Selain itu, pemberian insentif berupa keringanan pajak atau retribusi daerah diarahkan bagi industri yang ramah lingkungan serta mampu menyerap tenaga kerja lokal, sehingga tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan. Skema subsidi alat produksi dan bahan baku awal juga didorong untuk memfasilitasi tumbuhnya industri baru yang potensial. Dengan strategi

ini, Kutai Timur dapat mempercepat pertumbuhan industri pengolahan yang berdaya saing, inklusif, dan berorientasi jangka panjang.

7) T2.S3. Meningkatnya ketahanan pangan

a. **Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pangan Lokal.** Peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal merupakan strategi penting untuk mewujudkan kemandirian pangan di Kutai Timur. Perluasan lahan pangan strategis melalui program cetak sawah, intensifikasi, dan ekstensifikasi lahan menjadi langkah awal untuk memperkuat ketersediaan pangan daerah. Upaya ini dipadukan dengan pemanfaatan teknologi pertanian modern dan mekanisasi agar hasil pertanian lebih efisien, berkualitas, dan berdaya saing. Pengembangan pertanian berbasis kawasan dengan pendekatan korporatisasi petani serta klaster komoditas unggulan diarahkan untuk memperkuat posisi petani dalam rantai nilai agribisnis. Selain itu, diversifikasi pangan lokal seperti sorgum, umbi, jagung, pisang, dan talas menjadi strategi jangka panjang dalam mengurangi ketergantungan terhadap beras sekaligus memperkaya pola konsumsi masyarakat. Dengan demikian, kemandirian pangan daerah dapat dicapai secara lebih berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal.

b. **Penguatan Cadangan dan Distribusi Pangan Daerah**. Penguatan cadangan dan distribusi pangan daerah menjadi instrumen penting dalam menjaga ketahanan pangan Kutai Timur, terutama saat menghadapi paceklik, bencana, atau fluktuasi pasar. Melalui pembangunan dan optimalisasi lumbung pangan masyarakat serta gudang pangan desa, stok pangan dapat lebih terjamin dan stabil sepanjang tahun. Selain itu, penguatan sistem distribusi dan rantai pasok pangan didorong untuk memastikan hasil pertanian dapat tersalurkan secara merata, cepat, dan efisien. Fasilitasi logistik serta pemasaran hasil pertanian langsung ke konsumen atau koperasi juga akan mengurangi rantai tengkulak dan meningkatkan nilai jual petani. Pemantauan harga dan stok pangan secara berkala melengkapi strategi ini agar pemerintah daerah dapat melakukan intervensi cepat saat terjadi gejolak. Dengan

langkah-langkah tersebut, Kutai Timur mampu membangun sistem pangan yang lebih tangguh, adil, dan berkelanjutan.

c. **Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan**. Perlindungan dan pemberdayaan petani serta nelayan menjadi pilar penting dalam membangun kemandirian pangan dan ekonomi berbasis sumber daya lokal di Kutai Timur. Melalui skema asuransi pertanian dan perikanan, risiko gagal panen maupun bencana dapat diminimalisir sehingga keberlanjutan usaha tetap terjaga. Dukungan pemerintah juga diperkuat dengan subsidi pupuk dan sarana produksi yang lebih tepat sasaran, sekaligus peningkatan peran penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang kini ditopang dengan layanan berbasis digital. Langkah ini akan mendekatkan inovasi, teknologi, dan informasi kepada petani dan nelayan secara lebih cepat dan efektif. Di sisi lain, regenerasi petani milenial menjadi agenda strategis melalui pelatihan agribisnis, teknologi modern, serta akses permodalan. Dengan begitu, sektor pertanian dan perikanan tidak hanya terlindungi, tetapi juga lebih berdaya, inovatif, dan adaptif menghadapi tantangan masa depan.

d. **Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga dan Komunitas**. Ketahanan pangan tidak hanya bertumpu pada skala besar melalui pertanian dan distribusi regional, tetapi juga harus diperkuat dari lingkup terkecil: keluarga dan komunitas. Pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya sayur, buah, ternak, dan ikan menjadi strategi sederhana namun berdampak nyata dalam memenuhi kebutuhan gizi rumah tangga. Selain itu, kampanye konsumsi pangan bergizi, beragam, dan berimbang perlu digencarkan untuk mengubah pola konsumsi masyarakat, terutama pada keluarga rentan. Upaya ini diperkuat dengan pendampingan khusus bagi ibu hamil dan anak, sehingga penanganan stunting dapat berjalan lebih efektif. Peran perempuan juga dioptimalkan, baik sebagai pengelola pangan rumah tangga maupun pelaku usaha tani berbasis keluarga. Dengan demikian, ketahanan pangan tidak hanya menjadi urusan produksi, melainkan juga gerakan sosial yang memperkuat kemandirian keluarga sekaligus daya tahan komunitas lokal.

e. **Pengembangan Sistem Informasi dan Tata Kelola Pangan**. Pengelolaan ketahanan pangan di tingkat daerah membutuhkan sistem informasi yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Dengan digitalisasi data produksi serta kebutuhan pangan, pemerintah daerah dapat memetakan kesenjangan pasokan dan permintaan secara lebih tepat waktu. Penyusunan Food Security and Vulnerability Mapping (FSVA) menjadi instrumen penting dalam memotret kondisi ketahanan dan kerentanan pangan, sehingga arah intervensi kebijakan dapat berbasis bukti dan lebih terarah. Lebih jauh, pemantauan ketahanan pangan melalui indikator ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan memberikan gambaran komprehensif bagi perencanaan. Dengan tata kelola informasi yang baik, kebijakan pangan daerah tidak hanya reaktif terhadap krisis, tetapi juga preventif dalam memastikan kecukupan dan keberlanjutan pangan masyarakat.

8) T2.S4. Terwujudnya ekosistem sosial dan ekonomi yang ramah investasi

a. **Penyederhanaan Regulasi dan Perizinan Investasi**. Kemudahan berusaha menjadi kunci untuk mendorong minat investasi di Kutai Timur. Dengan mengoptimalkan pelayanan perizinan terpadu melalui Mal Pelayanan Publik dan OSS Daerah, proses perizinan dapat dipangkas dari segi waktu, biaya, dan prosedur, sehingga lebih ramah bagi pelaku usaha. Di sisi lain, penyusunan regulasi daerah yang pro-investasi, transparan, dan efisien memastikan adanya kepastian hukum sekaligus mengurangi potensi hambatan birokrasi. Hal ini harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas SDM pelayanan investasi, agar petugas mampu memberikan layanan yang cepat, profesional, dan responsif. Transformasi digital melalui perizinan berbasis aplikasi dan real-time menjadi langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas, mencegah pungli, dan memberi kenyamanan bagi investor, baik lokal maupun nasional. Dengan demikian, Kutai Timur dapat memperkuat citra sebagai daerah yang terbuka dan kondusif bagi investasi.

b. **Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pendukung Investasi.** Investasi hanya dapat tumbuh jika ditopang oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, Kutai Timur perlu mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, serta jaringan telekomunikasi dan internet. Infrastruktur yang baik akan memperlancar arus barang, jasa, dan manusia, sekaligus menekan biaya logistik. Selain itu, pengembangan kawasan industri terpadu dan zona ekonomi khusus menjadi instrumen strategis dalam menarik investor. Kawasan ini dapat menyediakan berbagai fasilitas terintegrasi, mulai dari utilitas, logistik, hingga layanan pendukung usaha, sehingga menciptakan iklim investasi yang kompetitif. Untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari potensi konflik, pemerintah daerah juga harus memastikan ketersediaan lahan investasi yang legal, bersih dari sengketa, serta selaras dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Hal ini akan meningkatkan kepercayaan investor dan mempercepat realisasi investasi di sektor-sektor produktif.

c. J**aminan Stabilitas Sosial, Politik, dan Keamanan**. Investasi tidak hanya membutuhkan regulasi yang jelas dan infrastruktur yang memadai, tetapi juga jaminan stabilitas sosial, politik, dan keamanan. Tanpa kondisi sosial yang kondusif, investor akan ragu menanamkan modalnya. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan dunia usaha menjadi kunci dalam menjaga harmoni dan menciptakan rasa aman. Selain itu, Kutai Timur perlu memiliki mekanisme yang cepat dan efektif dalam penanganan potensi konflik, baik yang terkait lahan, tenaga kerja, maupun isu lingkungan. Respons yang sigap akan mencegah eskalasi masalah sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik maupun investor. Di sisi lain, sosialisasi manfaat investasi dan partisipasi lokal juga penting untuk memastikan masyarakat tidak merasa ditinggalkan, melainkan menjadi bagian dari proses pembangunan. Dengan begitu,

tercipta rasa memiliki (sense of belonging) yang dapat memperkuat dukungan masyarakat terhadap agenda investasi daerah.

d. **Promosi dan Fasilitasi Investasi Berbasis Potensi Unggulan Daerah**. Promosi investasi tidak cukup dilakukan secara umum, melainkan harus berbasis potensi unggulan daerah agar lebih tepat sasaran dan menarik minat investor. Kutai Timur memiliki kekayaan sumber daya di sektor pertanian, pariwisata, perikanan, energi terbarukan, hingga pengolahan hasil tambang, yang semuanya perlu dituangkan dalam profil investasi (investment prospectus) yang komprehensif dan menarik. Keaktifan pemerintah daerah dalam berbagai forum investasi, baik regional maupun nasional, serta pendekatan langsung ke calon investor strategis akan semakin memperluas peluang masuknya modal. Untuk memperkuat daya tarik ini, dibutuhkan juga fasilitasi pertemuan bisnis (business matching) yang mempertemukan investor dengan pelaku usaha lokal, sehingga tercipta sinergi antara modal besar dan kekuatan ekonomi rakyat. Selain itu, keberhasilan investasi juga ditentukan oleh ketersediaan rantai pasok lokal. Dengan melakukan pemetaan potensi UMKM dan menghubungkannya ke ekosistem investasi, Kutai Timur bukan hanya menjadi tujuan investasi, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi inklusif yang melibatkan masyarakat setempat secara nyata.

9) T2.S5. Terwujudnya integrasi ekonomi Kutai Timur dengan ekonomi domestik, nasional, dan global

a. **Mendorong Hilirisasi dan Diversifikasi Produk Ekspor Lokal**. Hilirisasi dan diversifikasi produk ekspor merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Kutai Timur pada penjualan bahan mentah dan menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih besar. Melalui pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan ekspor, seperti hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan hutan non-kayu, daerah tidak hanya meningkatkan daya saing produk, tetapi juga memperluas lapangan kerja lokal. Untuk mempercepat akses pasar global, pemerintah daerah perlu memfasilitasi pelaku UMKM dan IKM masuk ke rantai ekspor melalui pendampingan perizinan, standarisasi

mutu, sertifikasi, hingga akses pembiayaan. Diversifikasi produk olahan bernilai tambah—misalnya olahan pangan, produk kreatif, hingga bio-based product—akan memperkuat posisi Kutai Timur di pasar internasional yang menuntut inovasi dan keberlanjutan. Selain itu, diperlukan skema kemitraan ekspor yang melibatkan koperasi, BUMDes, dan eksportir nasional. Model ini tidak hanya menjamin keberlangsungan pasokan produk dalam jumlah besar, tetapi juga memastikan pelaku usaha lokal ikut terhubung langsung dengan pasar global. Dengan demikian, hilirisasi dan diversifikasi ekspor akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

b. **Penguatan Konektivitas dan Infrastruktur Pendukung Ekspor**. Penguatan konektivitas dan infrastruktur ekspor menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan Kutai Timur sebagai pusat perdagangan dan ekspor yang kompetitif. Optimalisasi Pelabuhan Maloy (KEK MBTK) dan Pelabuhan Kenyamukan sebagai gerbang ekspor utama akan mendorong percepatan distribusi produk unggulan daerah menuju pasar nasional maupun internasional. Keberadaan pelabuhan modern yang terintegrasi dengan kawasan ekonomi khusus menjadikan Kutai Timur lebih menarik bagi investor dan pelaku perdagangan global. Selain itu, peningkatan sistem logistik dan cold chain untuk produk pertanian dan perikanan segar sangat penting agar mutu tetap terjaga hingga ke tangan konsumen internasional. Sistem distribusi yang efisien akan menurunkan biaya logistik, memperpendek waktu tempuh, serta meningkatkan daya saing produk ekspor Kutai Timur. Lebih jauh, penguatan infrastruktur jalan penghubung dari sentra produksi ke pelabuhan menjadi prioritas agar arus barang lebih lancar dan terkoneksi dengan baik. Hal ini akan memastikan rantai pasok ekspor berjalan efektif, termasuk untuk komoditas bernilai tinggi. Pemanfaatan KEK dan kawasan industri sebagai pusat kegiatan ekspor dan re-ekspor juga berperan strategis, tidak hanya memperkuat daya tarik investasi, tetapi juga membuka peluang bagi industri pengolahan lokal untuk naik kelas menjadi pemain

ekspor. Dengan demikian, konektivitas dan infrastruktur yang solid akan menjadikan Kutai Timur lebih berdaya saing sebagai simpul ekspor regional maupun global.

c. **Promosi Dagang dan Akses ke Pasar Internasional**. Promosi dagang yang terarah menjadi instrumen penting untuk memperluas jangkauan produk unggulan Kutai Timur ke pasar internasional. Melalui penyusunan katalog produk ekspor yang terintegrasi dan disebarluaskan melalui platform digital global, pemerintah daerah dapat menampilkan potensi komoditas lokal secara lebih profesional, modern, dan mudah diakses oleh calon mitra dagang internasional. Katalog digital ini bukan hanya sekadar etalase produk, melainkan juga sarana branding daerah sebagai pusat produksi dan ekspor yang berdaya saing. Selain itu, kolaborasi dengan KADIN, APINDO, dan pelaku ekspor nasional akan menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem ekspor Kutai Timur. Melalui pembinaan terhadap eksportir pemula, pelaku usaha lokal akan mendapat bimbingan teknis terkait prosedur ekspor, regulasi, standarisasi mutu, hingga akses pasar global. Kemitraan ini memastikan UMKM dan IKM Kutai Timur tidak hanya mampu memproduksi barang berkualitas, tetapi juga siap berkompetisi di pasar internasional dengan dukungan jejaring yang lebih luas.

10) T2.S6. Terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan antara desa dan kota

a. **Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar antar Kecamatan dan Desa**. Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar antar kecamatan dan desa merupakan fondasi penting untuk mengurangi kesenjangan wilayah di Kutai Timur, terutama antara daerah pusat pemerintahan dan kawasan tertinggal, terluar, serta terisolir (3T). Melalui pemetaan wilayah prioritas pembangunan, pemerintah daerah dapat memastikan alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran, sehingga setiap wilayah memperoleh akses yang adil terhadap layanan dasar dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa yang menghubungkan

pusat produksi, pasar, dan pemukiman masyarakat menjadi kunci dalam membuka aksesibilitas ekonomi. Infrastruktur jalan yang memadai akan memperlancar distribusi barang dan jasa, sekaligus meningkatkan mobilitas masyarakat. Hal ini diperkuat dengan pembangunan jembatan penghubung antar desa dan kecamatan untuk memastikan keterhubungan lintas wilayah tidak lagi terhambat kondisi geografis. Lebih jauh, penerapan skema padat karya berbasis masyarakat dalam pembangunan infrastruktur memberikan manfaat ganda: selain mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar, juga menciptakan lapangan kerja lokal dan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap fasilitas yang dibangun. Dengan demikian, strategi pemerataan pembangunan infrastruktur ini bukan hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa secara inklusif.

b. **Pengendalian Risiko Banjir dan Infrastruktur Resilien terhadap Iklim**. Pengendalian risiko banjir menjadi salah satu tantangan utama pembangunan di Kutai Timur, terutama pada wilayah dengan intensitas curah hujan tinggi dan kondisi geografis rawan genangan. Untuk itu, strategi diarahkan pada kombinasi pendekatan teknis, ekologis, dan kelembagaan. Normalisasi dan rehabilitasi sungai, kanal, serta saluran drainase utama dilakukan untuk memulihkan kapasitas daya tampung aliran air dan mencegah terjadinya luapan di kawasan pemukiman maupun pusat ekonomi. Selain itu, pembangunan tanggul, kolam retensi, dan sistem pemantauan banjir berbasis data dan peringatan dini akan memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi banjir. Pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring debit air dan sistem peringatan dini berbasis komunitas akan meningkatkan efektivitas mitigasi bencana. Tidak kalah penting, Kutai Timur perlu mengintegrasikan pendekatan nature-based solution, seperti rehabilitasi hutan riparian, restorasi lahan basah, dan penghijauan kawasan hulu, sebagai solusi jangka panjang yang ramah lingkungan. Pendekatan ini sekaligus mendukung agenda pembangunan hijau dan

berkelanjutan. Agar upaya ini berjalan optimal, diperlukan kolaborasi lintas sektor dalam tata kelola Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu, melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat, serta lembaga pengelola lingkungan. Dengan demikian, infrastruktur yang dibangun tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga resilien terhadap perubahan iklim, sekaligus memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat terhadap risiko bencana banjir.

c. **Pengembangan Bandara dan Pelabuhan sebagai Pusat Konektivitas Daerah**. Pengembangan bandara dan pelabuhan merupakan strategi kunci untuk memperkuat konektivitas Kutai Timur, baik di tingkat regional maupun nasional. Percepatan pembangunan Bandara Kenyamukan sebagai bandara perintis bertujuan membuka akses udara yang lebih cepat dan efisien, menghubungkan Kutai Timur dengan wilayah Kaltim dan Kawasan Timur Indonesia lainnya. Di sektor laut, Pelabuhan Maloy difokuskan sebagai pelabuhan ekspor-industri utama, sementara Pelabuhan Kenyamukan difungsikan untuk kebutuhan logistik masyarakat dan UMKM, sehingga mendukung distribusi barang baik skala komersial maupun kebutuhan lokal. Penyediaan akses jalan dan logistik menuju bandara dan pelabuhan, termasuk integrasi dengan kawasan industri dan sentra ekonomi, memastikan konektivitas multimoda yang lancar dan efisien. Selain itu, fasilitasi kolaborasi pemerintah-pelaku usaha (KPBU) dalam pembiayaan infrastruktur konektivitas menjadi langkah strategis untuk mempercepat pembangunan tanpa membebani APBD secara signifikan. Dengan kombinasi pengembangan infrastruktur udara, laut, dan darat, Kutai Timur dapat meningkatkan mobilitas orang, barang, dan jasa, sekaligus membuka peluang ekonomi baru, memperkuat distribusi produk lokal, dan mendukung daya saing investasi di daerah.

d. **Peningkatan Infrastruktur Irigasi, Bendungan, dan Ketersediaan Air Baku**. Peningkatan infrastruktur air menjadi pilar utama untuk mendukung produktivitas pertanian, ketersediaan air minum, dan pengendalian banjir di Kutai Timur. Rehabilitasi dan pembangunan

jaringan irigasi teknis maupun semi-teknis memungkinkan lahan pertanian produktif mendapatkan pasokan air yang andal, sehingga meningkatkan hasil panen dan ketahanan pangan lokal. Selain itu, pembangunan embung dan bendungan skala kecil hingga menengah berfungsi ganda: sebagai sumber irigasi, pengendali banjir, dan sarana konservasi air. Optimalisasi infrastruktur ini juga mencakup SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) untuk memenuhi kebutuhan permukiman dan kawasan pertumbuhan, sehingga mendukung kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Pendekatan berbasis digital melalui sistem monitoring irigasi (smart irrigation) memungkinkan pemantauan debit air dan kondisi infrastruktur secara real-time, memudahkan perencanaan, pemeliharaan, dan respon cepat terhadap potensi kekeringan atau banjir. Dengan kombinasi infrastruktur fisik dan digital, Kutai Timur dapat memastikan ketersediaan air yang aman, efisien, dan berkelanjutan untuk pertanian, masyarakat, dan sektor ekonomi lainnya.

e. **Penyediaan Akses Air Minum Aman di Daerah Sulit Terlayani**. Strategi ini difokuskan pada peningkatan akses air minum aman untuk wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan layanan. Langkah pertama adalah pembangunan SPAM skala kecil dan sumur bor dalam, dilengkapi dengan sarana filtrasi dan desinfeksi, untuk menjamin kualitas air yang memenuhi standar kesehatan di desa-desa yang belum terlayani jaringan perpipaan. Selanjutnya, dilakukan rehabilitasi dan optimalisasi jaringan PDAM eksisting, dengan peningkatan kapasitas pompa, perbaikan pipa distribusi, dan pengendalian kebocoran, sehingga efisiensi suplai air meningkat dan cakupan layanan diperluas. Untuk daerah dengan cakupan layanan rendah, dilakukan pembangunan jaringan air bersih baru, termasuk instalasi sambungan rumah tangga (SR) yang terintegrasi dengan sistem distribusi, guna meningkatkan akses langsung bagi masyarakat. Pendekatan ini mengedepankan prinsip engineering dan manajemen sistem berbasis data, sehingga setiap intervensi bersifat terukur, efektif, dan berkelanjutan. Dengan demikian,

strategi ini tidak hanya memperluas cakupan layanan, tetapi juga memastikan mutu air minum sesuai standar teknis dan kesehatan publik.

f. **Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Pembiayaan Infrastruktur**. Strategi ini menitikberatkan pada peningkatan efektivitas perencanaan, pengelolaan, dan pendanaan proyek infrastruktur. Peningkatan kapasitas perencanaan teknis OPD terkait memastikan setiap proyek infrastruktur dirancang sesuai kebutuhan, standar teknis, dan prioritas strategis daerah. Selanjutnya, penguatan sistem pemeliharaan berbasis siklus hidup (life-cycle maintenance) memungkinkan infrastruktur berfungsi optimal dalam jangka panjang, dengan perencanaan pemeliharaan preventif dan prediktif, meminimalkan kerusakan, dan menurunkan biaya perbaikan mendadak. Untuk mendukung keberlanjutan pembiayaan, strategi ini memanfaatkan skema alternatif, seperti KPBU, CSR, dana desa, maupun kolaborasi APBD, guna mendanai proyek strategis tanpa membebani anggaran tunggal pemerintah daerah. Selain itu, pelibatan masyarakat melalui kanal aduan publik dan pemantauan pembangunan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Sistem ini memungkinkan identifikasi masalah sejak dini, mendorong partisipasi warga, dan memastikan hasil pembangunan infrastruktur sesuai target teknis dan sosial. Dengan pendekatan teknokratis ini, tata kelola dan pembiayaan infrastruktur Kutai Timur dapat lebih efisien, terukur, dan berkelanjutan, mendukung pencapaian prioritas pembangunan jangka menengah dan panjang.

g. **Peningkatan Status Desa untuk Pemenuhan Dimensi IDM**. Strategi ini difokuskan pada percepatan peningkatan indeks desa membangun (IDM) melalui intervensi terpadu di bidang layanan dasar, ekonomi, dan tata kelola desa. Peningkatan akses layanan dasar, mencakup pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi di desa tertinggal dan sangat tertinggal, menjadi prioritas untuk memastikan kesejahteraan warga secara merata. Selanjutnya, penguatan ekonomi desa dilakukan melalui pemberdayaan BUMDes, koperasi, dan pengembangan

kewirausahaan lokal, sehingga desa tidak hanya bergantung pada transfer anggaran, tetapi mampu menciptakan sumber pendapatan mandiri. Pembangunan infrastruktur desa diarahkan agar fungsional dan konektif, termasuk akses jalan, jembatan, jaringan listrik, dan telekomunikasi, yang terintegrasi dengan pusat ekonomi kecamatan maupun kabupaten, mendukung mobilitas dan distribusi barang/jasa. Selain itu, pelatihan dan penguatan kelembagaan desa, mulai dari aparatur hingga mekanisme perencanaan dan pelaporan, meningkatkan kapasitas desa dalam pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan, dan pemanfaatan dana desa secara optimal.

h. **Penguatan Konektivitas dan Integrasi Wilayah Desa–Kota**. Strategi ini menitikberatkan pada pengembangan konektivitas fisik dan digital antara desa dan kota untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi. Pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pinggiran dikembangkan dan diintegrasikan dengan pusat kota melalui infrastruktur penghubung desa–kecamatan–kabupaten, sehingga arus barang, jasa, dan tenaga kerja berjalan lebih lancar. Selain itu, digitalisasi pelayanan publik desa dan pengembangan smart village memperkuat akses warga desa terhadap layanan publik dan transformasi digital. Pemetaan rantai pasok desa–kota juga dilakukan untuk memastikan hasil pertanian, perikanan, dan UMKM desa dapat tersalur ke pasar kota secara efisien, mendorong inklusi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pedesaan

i. **Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Perencanaan Partisipatif**. Strategi ini bertujuan meningkatkan efektivitas tata kelola desa melalui pemanfaatan data dan sistem informasi. Pendampingan berbasis IDM, SDGs Desa, dan Sistem Informasi Desa (SID) memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan desa dirancang berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan terukur secara indikator kinerja. Selain itu, penguatan forum Musrenbangdes dan musyawarah kampung mendorong partisipasi warga dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga pembangunan desa menjadi lebih

inklusif, transparan, dan akuntabel. Peningkatan kapasitas aparatur desa dan BPD juga menjadi fokus utama untuk memperkuat kemampuan teknis, manajerial, dan koordinasi antar lembaga. Kolaborasi lintas sektor, termasuk OPD dan perguruan tinggi dalam riset dan inovasi pembangunan desa, mendukung implementasi solusi berbasis bukti dan inovatif. Dengan pendekatan ini, pemerintahan desa dapat mengoptimalkan sumber daya lokal, memperkuat partisipasi masyarakat, dan meningkatkan kualitas layanan publik serta pembangunan ekonomi di tingkat desa.

j. **Integrasi Program Kabupaten dan Dana Desa**. Strategi ini menekankan pada sinkronisasi antara program unggulan kabupaten dan pembangunan desa untuk memperkuat efektivitas intervensi pembangunan. RPJMDes dan RKPDes diselaraskan dengan prioritas kabupaten, sehingga setiap kegiatan desa mendukung pencapaian indikator pembangunan daerah secara menyeluruh dan terukur. Pemanfaatan dana desa diarahkan melalui pendampingan intensif, memastikan alokasi dan penggunaan anggaran mendukung pencapaian IDM, layanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Selain itu, pengembangan platform pelaporan dan pemantauan berbasis digital memungkinkan transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi real-time terhadap pelaksanaan program di tingkat desa. Untuk mendorong inovasi, diterapkan mekanisme insentif bagi desa yang menunjukkan kinerja unggul, partisipatif, dan mampu keluar dari kategori tertinggal. Pendekatan ini mendorong kompetisi sehat antar desa, mempercepat pemerataan pembangunan, dan menciptakan desa yang mandiri, produktif, dan berdaya saing.

k. **Pengembangan Wilayah Perdesaan sebagai Basis Ketahanan Sosial dan Ekonomi.** Strategi ini bertujuan menjadikan wilayah perdesaan sebagai basis ketahanan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Peningkatan akses ke pendidikan vokasi, layanan kesehatan, dan jaringan internet di desa mendukung peningkatan kapasitas SDM lokal sekaligus memperluas peluang ekonomi dan konektivitas informasi.

Selain itu, fasilitasi pembentukan kawasan perdesaan tematik memungkinkan desa mengembangkan potensi lokal secara terintegrasi, baik di sektor pertanian, pariwisata, maupun ekonomi kreatif. Pendekatan ini mendorong efektivitas program pembangunan dan meningkatkan daya saing desa di tingkat kabupaten maupun regional. Strategi ini juga menekankan penguatan peran pemuda dan perempuan sebagai agen perubahan dalam pembangunan desa. Keterlibatan aktif kelompok ini memperkuat partisipasi masyarakat, inovasi lokal, dan keberlanjutan program, sehingga wilayah perdesaan menjadi mandiri secara ekonomi dan tangguh secara sosial.

11) T3.S1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, efektif, adaptif, dan visioner

a. **Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi dalam Adaptasi Perubahan Iklim.** Strategi ini fokus pada penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan risiko bencana. Program desa peduli lingkungan dan desa tangguh bencana diterapkan untuk meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan respons komunitas terhadap bencana alam maupun dampak perubahan iklim. Pendidikan dan advokasi juga menjadi komponen penting melalui edukasi perubahan iklim dan kesiapsiagaan bencana di sekolah dan komunitas lokal, sehingga generasi muda dan masyarakat secara aktif memahami risiko, mitigasi, dan adaptasi yang tepat. Selain itu, strategi ini mendorong ekonomi hijau melalui insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan *green economy* dan *eco-labeling*, serta kampanye publik pengelolaan sampah, pengurangan plastik sekali pakai, dan konservasi air. Pendekatan ini memastikan partisipasi masyarakat dan sektor swasta secara sinergis dalam menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan ketahanan sosial-ekonomi daerah.

b. **Pemanfaatan Teknologi dan Kolaborasi Multi-Pihak**. Strategi ini menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi informasi dan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pengelolaan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Penggunaan sistem informasi lingkungan dan

kebencanaan berbasis geospasial (SIG) memungkinkan pemantauan real-time kondisi lingkungan, identifikasi risiko, dan perencanaan mitigasi berbasis data yang akurat. Kolaborasi multi-pihak dilakukan dengan BMKG, BNPB, BPBD, perguruan tinggi, dan dunia usaha untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana, sekaligus memperkuat transfer pengetahuan dan inovasi berbasis komunitas. Selain itu, pelaporan capaian IKLH dan IKD secara terbuka melalui dashboard lingkungan daerah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Strategi ini juga mendorong pembangunan berkelanjutan melalui investasi hijau, termasuk energi terbarukan, pertanian organik, dan pariwisata berkelanjutan. Pendekatan ini menjamin bahwa pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan ekonomi berjalan secara sinergis, efisien, dan berkelanjutan.

c. **Penguatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah.** Strategi ini menitikberatkan pada penguatan tata kelola pemerintahan melalui integrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja. Implementasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja (PBK) yang terintegrasi dengan SAKIP dan SIPD memastikan seluruh program dan kegiatan OPD terukur, efektif, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra, dan Renja dilakukan berbasis data dan hasil evaluasi capaian kinerja sebelumnya, sehingga perencanaan lebih realistis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Monitoring dan evaluasi capaian program dilakukan secara berkala, dengan pelaporan berbasis outcome untuk menilai dampak nyata dari kebijakan dan intervensi pembangunan. Selain itu, strategi ini mendukung peningkatan nilai SAKIP dan Reformasi Birokrasi (RB) melalui tindak lanjut audit, pembinaan berkala, dan implementasi best practices. Pendekatan ini memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus menciptakan budaya manajemen kinerja yang berkelanjutan.

d. **Membangun Budaya Pemerintahan yang Inovatif dan Berintegritas**. Strategi ini menitikberatkan pada pembentukan budaya birokrasi yang profesional, inovatif, dan berintegritas. Pemberian insentif inovasi dan kompetisi kinerja antar-OPD dan antar-desa mendorong peningkatan kreativitas, produktivitas, dan kolaborasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, penerapan zona integritas dan WBK/WBBM di unit strategis memperkuat tata kelola yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sementara peran Inspektorat Daerah yang proaktif dan edukatif memastikan pengawasan internal berjalan efektif dan berorientasi pada pembinaan. Strategi ini juga menekankan transparansi anggaran, layanan, dan kinerja melalui kanal digital dan keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat dapat memantau, memberikan masukan, dan menilai akuntabilitas pemerintah. Pendekatan ini secara sistematis membangun kepercayaan publik dan memperkuat budaya pemerintahan yang inovatif, bersih, dan profesional.

e. Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah. Strategi ini bertujuan membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan di Kutai Timur. Pendirian atau penguatan Pusat Inovasi Daerah (PID) atau Pusat Kreativitas Kutai Timur menjadi basis pengembangan ide, riset, dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan lokal. Kolaborasi lintas sektor dilakukan melalui model quadruple helix, yakni sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan komunitas, untuk memperkuat transfer pengetahuan, pengembangan produk inovatif, dan adopsi teknologi tepat guna. Selain itu, lomba inovasi dan insentif bagi pelaku usaha, ASN, dan pelajar mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan solusi kreatif dan aplikatif untuk masalah lokal. Pendekatan ini juga mencakup pemetaan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk skala desa dan komunitas, sehingga inovasi dapat langsung diterapkan, meningkatkan produktivitas, daya saing lokal, dan kualitas hidup masyarakat. Dengan cara ini, Kutai Timur dapat

menumbuhkan ekosistem inovasi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata pada pembangunan daerah.

f. **Peningkatan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Digital**. Strategi ini menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur digital yang memadai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan digital di Kutai Timur. Peningkatan akses internet berkualitas di seluruh kecamatan dan desa memastikan semua pelaku ekonomi, termasuk masyarakat pedesaan, dapat terhubung ke pasar digital dan layanan informasi secara merata. Selain itu, pembangunan ruang kerja bersama (co-working space) berbasis desa/kecamatan memberikan fasilitas bagi pelaku ekonomi digital untuk berkolaborasi, mengembangkan produk kreatif, dan memanfaatkan teknologi secara efektif. Strategi ini juga memperkuat ekosistem inovasi lokal dan mendukung sinergi antarpengusaha, pelajar, dan start-up. Untuk mendukung transaksi dan akses pembiayaan, penyediaan platform pembayaran digital dan fintech bagi pelaku usaha kecil mempermudah arus modal, memperluas akses pasar, dan meningkatkan inklusi keuangan. Pendekatan ini menciptakan fondasi yang kuat bagi pengembangan ekonomi digital yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kutai Timur.

g. **Dukungan Regulasi dan Insentif Inovasi.** Strategi ini bertujuan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi inovasi dan adopsi teknologi di Kutai Timur. Penyusunan kebijakan daerah yang mendorong penggunaan teknologi lokal dan inovasi dalam proses bisnis memastikan regulasi mendukung pengembangan produk dan layanan berbasis teknologi serta solusi kreatif lokal. Untuk mendorong partisipasi sektor swasta, diterapkan skema insentif fiskal bagi pelaku usaha yang mengadopsi teknologi ramah lingkungan atau berteknologi tinggi, sehingga mendorong efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan usaha. Selain itu, strategi ini memperkuat tata kelola publik melalui digitalisasi sistem perizinan, OSS daerah, dan layanan satu pintu, yang meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik. Pendekatan ini memperkuat sinergi regulasi, insentif, dan teknologi

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi secara berkelanjutan.

12) T3.S2. Meningkatnya kualitas layanan public

a. **Standardisasi dan Penyederhanaan Prosedur Layanan.** Strategi ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan efisiensi pelayanan publik di Kutai Timur melalui penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang jelas dan terukur. Standarisasi ini memastikan setiap warga menerima layanan publik dengan mutu, kecepatan, dan kepastian yang sama di seluruh wilayah. Selain itu, reformasi prosedur layanan diarahkan agar proses menjadi lebih cepat, transparan, dan tanpa biaya tersembunyi, disertai penerapan sistem layanan satu pintu untuk perizinan, kependudukan, dan bantuan sosial. Pendekatan ini meminimalkan birokrasi yang berbelit dan mempercepat akses masyarakat terhadap layanan publik. Untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas, dilakukan audit layanan publik secara berkala guna memangkas prosedur yang tidak relevan dan meningkatkan kepatuhan OPD terhadap standar pelayanan. Dengan demikian, strategi ini mendorong terciptanya pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

b. **Pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Layanan Terpadu**. Strategi ini bertujuan memperkuat akses masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, terpadu, dan berkualitas. Peningkatan kapasitas Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadikannya pusat layanan multi-instansi yang modern, terintegrasi, dan efisien, sehingga masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan di satu lokasi dengan prosedur yang lebih sederhana. Koordinasi lintas instansi juga diperkuat melalui penguatan sinergi antar-OPD, instansi vertikal, dan BUMD, sehingga layanan publik berjalan konsisten, terstandardisasi, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Strategi ini mendorong terciptanya ekosistem pelayanan terpadu yang mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional. Selain itu, pemanfaatan layanan keliling (mobile service) menjangkau wilayah terpencil dan pedesaan, memastikan masyarakat yang sulit mengakses

MPP tetap memperoleh layanan publik. Pendekatan ini memperluas jangkauan, mengurangi kesenjangan pelayanan, dan meningkatkan inklusi masyarakat dalam akses layanan pemerintah.

c. **Digitalisasi Layanan Publik**. Strategi ini menitikberatkan pada percepatan transformasi digital dalam penyelenggaraan layanan publik di Kutai Timur. Pengembangan portal pelayanan publik digital (e-layanan) memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan secara daring, meningkatkan kecepatan, transparansi, dan efisiensi pelayanan. Integrasi lintas OPD melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta penyediaan layanan melalui aplikasi mobile, chatbot, dan kios layanan mandiri, mendorong interoperabilitas data, kemudahan akses, dan layanan 24/7 bagi warga. Pendekatan ini mempermudah masyarakat memperoleh informasi, mengurus dokumen, dan memanfaatkan layanan pemerintah tanpa harus datang langsung ke kantor. Untuk mendukung keberlanjutan digitalisasi, dilakukan penguatan infrastruktur internet di desa dan kecamatan, sehingga akses digital merata di seluruh wilayah. Dengan demikian, strategi ini menciptakan ekosistem layanan publik yang modern, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kutai Timur.

d. **Peningkatan Kompetensi dan Etika Pelaksana Layanan**. Strategi ini menitikberatkan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan layanan publik di Kutai Timur. Pelatihan pelayanan prima (service excellence) diberikan kepada petugas frontliner untuk meningkatkan kualitas interaksi, responsivitas, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan. Selain itu, penerapan kode etik pelayanan dan standar etika profesi bagi seluruh penyelenggara layanan memastikan perilaku dan keputusan aparat publik konsisten dengan prinsip integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Hal ini membangun budaya kerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Strategi ini juga mengintegrasikan mekanisme reward and punishment berbasis evaluasi kinerja dan kepuasan pengguna layanan, sehingga mendorong motivasi, disiplin, dan perbaikan berkelanjutan.

Pendekatan ini memastikan layanan publik lebih efisien, transparan, dan berfokus pada kualitas serta pengalaman pengguna.

e. **Penguatan Mekanisme Pengaduan dan Umpan Balik Masyarakat**. Strategi ini menitikberatkan pada peningkatan akuntabilitas dan responsivitas layanan publik melalui mekanisme pengaduan yang efektif. Pengoperasian kanal pengaduan publik terpadu seperti call center, kotak saran digital, dan media sosial resmi pemerintah daerah memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan keluhan secara mudah dan transparan. Selain itu, strategi ini menekankan respons cepat terhadap pengaduan masyarakat, sehingga setiap isu atau kendala dalam pelayanan dapat segera ditangani, meminimalkan hambatan, dan meningkatkan kepuasan publik. Pendekatan ini menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Untuk memastikan pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan, dilakukan penyusunan laporan tahunan pelayanan publik berbasis aspirasi dan keluhan masyarakat, yang menjadi dasar evaluasi, pengambilan kebijakan, dan penyempurnaan prosedur layanan. Strategi ini memperkuat interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik.

13) T3.S3. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan berkualitas

a. **Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan**, efisien, dan berkualitas. Strategi ini menitikberatkan pada penguatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Optimalisasi pendapatan daerah secara berkelanjutan memastikan sumber daya keuangan memadai untuk membiayai program prioritas dan mendukung kemandirian fiskal. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, serta penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, mendorong pengelolaan anggaran yang lebih efisien, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pendekatan ini memperkuat integritas, kontrol internal, dan

pemantauan kinerja keuangan. Strategi ini juga menekankan pengembangan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi, termasuk sistem akuntansi dan pelaporan digital, untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan transparansi proses keuangan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

14) T4.S1. Pembangunan ramah lingkungan dan resiliensi terhadap bencana

a. **Penguatan Tata Kelola Lingkungan Hidup Berkelanjutan**. Strategi ini bertujuan membangun pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan selaras dengan pembangunan ekonomi Kutai Timur. Integrasi prinsip kelestarian lingkungan ke dalam seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran daerah memastikan setiap program dan kegiatan mempertimbangkan dampak ekologis secara sistematis. Selain itu, penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan, perkebunan, dan industri yang berpotensi merusak lingkungan, serta rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara berkelanjutan, mendorong pemulihan ekosistem dan mitigasi risiko degradasi lingkungan. Strategi ini juga menekankan penguatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam pemantauan kualitas air, udara, tanah, dan keanekaragaman hayati, serta penggunaan data lingkungan berbasis teknologi. Pendekatan ini menciptakan tata kelola lingkungan yang responsif, akuntabel, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

b. **Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**. Strategi ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kutai Timur secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pembangunan dan optimalisasi ruang terbuka hijau (RTH) serta revitalisasi ekosistem pesisir dan rawa melalui penanaman mangrove dan konservasi lahan basah mendorong pemulihan fungsi ekologis dan keseimbangan lingkungan. Selain itu, pengendalian pencemaran melalui pengolahan limbah domestik, industri, dan pertanian sesuai baku mutu memastikan sumber daya alam

tetap lestari dan risiko dampak kesehatan masyarakat diminimalkan. Pendekatan ini memperkuat kapasitas pemerintah dalam memitigasi tekanan lingkungan akibat aktivitas ekonomi. Strategi ini juga menekankan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui transisi energi bersih, efisiensi energi, dan transportasi ramah lingkungan. Upaya ini sejalan dengan target pembangunan rendah karbon dan menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat Kutai Timur.

15) T4.S2. Terwujudnya kesiapsiagaan daerah terhadap bencana

a. **Penguatan Sistem Manajemen Risiko dan Ketahanan Bencana Daerah.** Strategi ini menitikberatkan pada peningkatan kapasitas Kutai Timur dalam menghadapi risiko bencana melalui pendekatan manajemen risiko yang sistematis. Pemetaan wilayah rawan bencana dan integrasi hasil kajian risiko ke dalam tata ruang dan rencana pembangunan memastikan setiap kegiatan pembangunan mempertimbangkan potensi ancaman bencana. Selain itu, penguatan sistem peringatan dini dan jalur evakuasi, serta pelaksanaan simulasi bencana, pelatihan satgas desa tangguh bencana, dan penyusunan Rencana Kontinjensi meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan aparat dalam merespons bencana secara cepat dan efektif. Strategi ini juga menekankan pemenuhan standar bangunan tahan bencana untuk fasilitas publik, sekolah, dan puskesmas, sehingga infrastruktur vital tetap berfungsi saat bencana terjadi. Pendekatan ini memperkuat ketahanan daerah, meminimalkan kerugian sosial-ekonomi, dan mendukung pembangunan yang aman dan berkelanjutan.

3.2.2 Arah Kebijakan Kabupaten Kutai Timur 2025-2029

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha pelaksanaan rencana pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada Pemerintah Daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 (lima) tahun periode Kepala Daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Berikut indikasi arah kebijakan dalam RPJMD Kutai Timur 2025-2029:

Tabel 3.8 Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2025-2029

No	Misi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan dan Pemerataan Daya Saing Daerah Melalui Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat, Cerdas, serta Berprestasi	Menyediakan beasiswa pendidikan, program keterampilan, serta pelatihan sertifikasi untuk meningkatkan kualitas SDM sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
		Pengembangan pendidikan karakter untuk menghasilkan generasi yang berakhlak mulia, sehat, dan cerdas, serta memfasilitasi akses pendidikan dan kesehatan yang merata di seluruh wilayah Kutai Timur
		Pembangunan, rehabilitasi, dan pengadaan sarana, prasarana, serta alat kesehatan untuk UKP dan UKM rujukan sesuai standar pelayanan minimal.
		Pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, fasilitas belajar, serta sarana pendukung untuk semua jenjang pendidikan di seluruh wilayah termasuk
		optimalisasi program beasiswa, insentif bagi tenaga kesehatan, serta bantuan buku, seragam, dan makanan bergizi untuk anak-anak sebagai upaya menurunkan angka stunting.
		Memastikan akses air bersih, internet desa, dan jaringan listrik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih merata.
		Fokus pada program pengentasan kemiskinan, melalui pemberian bantuan sosial, subsidi untuk kelompok rentan, dan peningkatan insentif bagi pekerja sektor informal.
		Menyusun strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis desa, dengan membangun usaha ekonomi kreatif, serta menyediakan pelatihan kewirausahaan dan akses pasar.
2	Transformasi Ekonomi Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Industri Berbasis Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pariwisata, Peternakan, Perikanan, dan Kelautan	Mendorong hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan dengan pembangunan pabrik pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, serta pengembangan industri pengolahan produk lokal (misalnya pengolahan coklat, pisang, karet, dan hasil perkebunan lainnya).
		Meningkatkan kerjasama antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk pengembangan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata sebagai komoditas unggulan daerah.
		Memfasilitasi akses permodalan dan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat, khususnya di sektor UMKM dan koperasi, untuk mendukung diversifikasi usaha berbasis komoditas lokal.
		Pengembangan infrastruktur pariwisata yang terintegrasi, termasuk perbaikan fasilitas pelabuhan dan bandara yang menjadi titik masuk wisatawan, serta penyediaan akses yang memadai ke destinasi wisata.
		Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan, serta mendorong penggunaan produk berbasis energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
		Memperkenalkan praktik pertanian berkelanjutan dan peningkatan kapasitas petani dan nelayan, dengan menyediakan pelatihan teknis dan akses terhadap teknologi terbaru yang mendukung keberlanjutan dan efisiensi produksi.
		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan
		pengolahan hasil hutan bukan kayu (HHBK), pemasaran, serta promosi produk lokal untuk mendukung ekonomi masyarakat.

No	Misi	Arah Kebijakan
		Mengimplementasikan pelatihan keterampilan dan sertifikasi bagi tenaga kerja di sektor industri hilir agar lebih siap bersaing di pasar lokal dan internasional.
		Mengembangkan destinasi pariwisata unggulan, serta memperkenalkan budaya dan sejarah lokal melalui festival seni dan budaya, dengan tujuan menarik wisatawan domestik dan internasional.
		Menerapkan prinsip ekonomi hijau dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan mendukung inisiatif yang mengurangi emisi GRK dan mempertahankan kelestarian alam dalam sektor kehutanan, perkebunan, dan pertanian.
		Perluasan Akses Keuangan Bagi Pelaku Usaha Sektor Riil Berbasis Lokal serta Penguatan Kelembagaan Keuangan Rakyat dan Inklusif (koperasi produksi, koperasi simpan pinjam, BUMDes dan lembaga keuangan mikro berbasis komunitas).
3	Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Terpadu dan Berkesinambungan	Menerapkan praktik pertanian berkelanjutan, kehutanan lestari, dan perikanan yang ramah lingkungan serta penguatan tata kelola keberlanjutan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi SDA.
		Mendorong pengelolaan sumber daya alam melalui regulasi yang ketat, seperti pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, perkebunan, dan industri yang dapat merusak lingkungan.
		Meningkatkan kolaborasi dengan lembaga internasional dalam upaya konservasi alam, serta memperkuat peran masyarakat adat dalam melestarikan lingkungan hidup.
		Mendorong penggunaan energi terbarukan di sektor industri dan rumah tangga, serta meningkatkan penggunaan transportasi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon.
		Memperkenalkan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi hijau dan solusi berbasis alam yang mendukung pengurangan emisi GRK.
		Mengimplementasikan program penghijauan, pengelolaan hutan berkelanjutan pada lahan dengan stok karbon tinggi (*High Carbon Stock*) dan bernilai konservasi tinggi (*High Conservation Value*) serta restorasi lahan yang telah rusak untuk menanggulangi dampak perubahan iklim dan meningkatkan penyerapan karbon.
		Membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang mengelola sampah dengan cara yang lebih ramah lingkungan, termasuk penerapan 5R (*Reduce, Reuse, Recycle, Recover, Revenue*) serta ikut berkontribusi dalam Pemantauan sampah laut.
		Menerapkan regulasi yang lebih ketat bagi industri dalam pengelolaan limbah, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar peraturan lingkungan.
		Membangun dan memperkuat zona konservasi, seperti Taman Nasional, hutan lindung, dan cagar alam yang dapat menjaga spesies flora dan fauna langka
		Mendorong kebijakan berbasis ekosistem yang memperhatikan keberlanjutan alam dan memberikan ruang untuk peran serta masyarakat adat dalam pengelolaan kawasan konservasi.
		Menyusun dan melaksanakan program pelestarian keanekaragaman hayati dengan pendekatan yang terpadu, termasuk kegiatan restorasi habitat alami dan penanaman pohon untuk memperbaiki ekosistem.

No	Misi	Arah Kebijakan
		Melaksanakan kampanye pendidikan lingkungan untuk seluruh lapisan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam pelestarian alam.
		Meningkatkan penataan dan pengelolaan sumber daya air dengan membangun infrastruktur pengelolaan air yang efisien dan ramah lingkungan serta mengimplementasikan sistem pengelolaan air berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya air di wilayah mereka.
		Mendorong konservasi air dengan program penanaman vegetasi di sekitar daerah aliran sungai untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyerapan air.
4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh dan Berintegritas	Meningkatkan kapasitas perencanaan daerah dengan memperkuat analisis kebutuhan daerah serta memastikan penganggaran berbasis kinerja yang selaras dengan visi pembangunan.
		Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa pencapaian program sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
		Melakukan reformasi birokrasi dengan tujuan untuk menyederhanakan prosedur dan mempercepat pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa seluruh instansi pemerintah bekerja secara efisien dan transparan.
		Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan, termasuk di dalamnya pelatihan kepemimpinan dan keterampilan teknis yang relevan dengan kebutuhan organisasi.
		Memastikan bahwa seluruh pencapaian kinerja ASN dinilai berdasarkan indikator kinerja yang jelas dan terukur, serta mengimplementasikan sistem reward and punishment yang adil.
		Memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah, dengan memastikan transparansi dalam penggunaan anggaran, serta meningkatkan pelaporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan standar yang berlaku.
		Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, termasuk penerapan sistem e-budgeting dan e-procurement untuk mengurangi potensi korupsi dan meningkatkan efisiensi anggaran.
		Menyelenggarakan audit keuangan secara rutin untuk memastikan bahwa seluruh anggaran daerah digunakan sesuai dengan peruntukannya, serta mempublikasikan hasil audit kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas.
		Meningkatkan akses informasi publik dan memperkuat pelayanan informasi untuk masyarakat dengan menyediakan portal informasi pemerintah yang mudah diakses dan transparan.
		Mendorong kolaborasi antar pihak dalam pengambilan keputusan, dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan.
		Mengoptimalkan pengawasan internal dengan memperkuat peran Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
		Memperkuat sistem whistleblower untuk memberikan ruang bagi masyarakat dan aparatur pemerintah untuk melaporkan penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan pemerintahan dan anggaran.

No	Misi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan kerjasama dengan lembaga penegak hukum (KPK, kejaksaan, dan kepolisian) untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara sistematis dan berkelanjutan.
		Mengintegrasikan sistem informasi pemerintahan yang terhubung secara online, untuk mempermudah akses data antar instansi dan memfasilitasi pelayanan publik yang lebih cepat dan akurat.
		Mengimplementasikan e-Government secara lebih luas untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mempercepat proses administrasi yang sebelumnya memakan waktu.
5	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Digital yang Mendukung Konektivitas Antar Wilayah dan Pemerintahan yang Berintegritas	Mempercepat pembangunan dan perbaikan jalan poros desa serta jalan utama antar kecamatan termasuk Pembangunan Jalan Akses Jembatan Nibung - Simp. KM 46, untuk memastikan aksesibilitas yang lebih baik antara wilayah pedesaan dan perkotaan
		Membangun dan memperbaiki jembatan, terutama yang berada di wilayah terpencil dan yang mengalami kerusakan, untuk memastikan konektivitas yang stabil dan mempercepat distribusi barang dan layanan.
		Mengoptimalkan penataan kawasan transportasi, termasuk pembangunan pelabuhan dan pengembangan pelabuhan maloy serta bandara, dan memperbaiki fasilitas transportasi umum untuk mendukung mobilitas warga dan barang.
		Dukungan terhadap Pembangunan Bendungan Sukarahmat
		Pembangunan, normalisasi, dan rehabilitasi sungai, kanal, tanggul, kolam retensi, serta drainase perkotaan dan pedesaan sesuai standar
		Penataan kawasan permukiman padat, revitalisasi permukiman kumuh , Rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta integrasi dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten
		Pembangunan tanggul, pemecah gelombang, dan struktur penahan abrasi untuk melindungi permukiman, kawasan industri, dan ekosistem pesisir terutama sekitar Pantai Manubar
		Meningkatkan investasi di sektor energi terbarukan, seperti pembangunan Instalasi energi surya, hidro, turbin angin (*wind turbine*) energi biomassa, dan biofuel untuk mempercepat transisi ke energi hijau dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
		Mempercepat pembangunan infrastruktur listrik dan penyediaan jaringan listrik yang dapat menjangkau wilayah pedesaan, pemukiman dan daerah yang belum terjangkau.
		Meningkatkan infrastruktur penyediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dengan program seperti 1 Desa 1 Jaringan Air Bersih yang Lancar serta Optimalisasi sistem pengelolaan air, monitoring kualitas air, dan pemeliharaan rutin fasilitas SPAM untuk efisiensi dan keberlanjutan layanan.
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B Sangatta
		Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Kenyamukan
		Mengembangkan infrastruktur jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Kutai Timur, terutama di desa-desa terpencil dan daerah pesisir yang masih kesulitan dalam mengakses layanan internet yang stabil serta menyediakan akses internet gratis di sekolah-sekolah dan akses internet publik di desa-desa untuk mendukung kegiatan pendidikan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis digital.

No	Misi	Arah Kebijakan
		Dukungan operasional KEK Maloy dengan memastikan ketersediaan infrastruktur jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, dan logistik
		Menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai dan meningkatkan akses pendidikan berkualitas dengan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah serta menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.
		Membangun fasilitas pendukung pariwisata yang lebih memadai, termasuk akses jalan menuju destinasi wisata, penginapan ramah lingkungan, dan fasilitas pendukung lainnya yang menarik wisatawan.
		Meningkatkan infrastruktur pengamanan bencana, termasuk pembangunan tempat evakuasi yang mudah dijangkau, serta pembangunan sistem peringatan dini di wilayah rawan bencana.
		Membangun rumah-rumah dan infrastruktur yang resisten terhadap bencana untuk memastikan ketahanan masyarakat terhadap bencana alam.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah memiliki nilai yang sangat strategis sebab menjadi prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, prioritas pembangunan daerah selama periode pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Timur, meliputi:

1. **Peningkatan infrastruktur dan konektivitas**, antara lain infrastruktur dasar, transportasi, logisitik, dan digital
2. **Tranformasi ekonomi berkelanjutan**, antara lain diversifikasi Ekonomi, UMKM, dan pariwisata berkelanjutan
3. **Peningkatan kualitas SDM**, antara lain Pendidikan berkualitas, Kesehatan masyarakat dan kapasitas kepemudaan
4. **Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah**, antara lain transparasi, akuntabilitas, pelayanan publik dan penegakan hukum
5. **Peningkatan kualitas lingkungan hidup**, antara lain restorasi lingkungan, Pengelolaan SDA dan Mitigasi Perubahan Iklim
6. **Penguatan Ketahanan Pangan**, antara lain pertanian berkelanjutan, diversifikasi pangan, pasar dan distribusi pangan

3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub ini akan menjabarkan Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagai instrumen operasional yang diturunkan langsung dari sasaran RPJM. Program-program ini difokuskan pada penguatan kapasitas pelayanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi daerah, serta pengelolaan

lingkungan hidup secara berkelanjutan. Formulasi program prioritas mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, dan integrasi lintas sektor, sehingga setiap intervensi memiliki dampak terukur.

Sebagai turunan operasional dari sasaran RPJM, program prioritas memastikan pencapaian target pembangunan jangka menengah daerah secara sistematis. Implementasi program didukung oleh pendekatan berbasis data, pemanfaatan teknologi informasi, dan penguatan kapasitas kelembagaan OPD terkait, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan menjadi lebih akuntabel dan responsif terhadap dinamika kebutuhan daerah.

Untuk memudahkan pemahaman dan pengelolaan, tabel berikut menyajikan rincian Program Prioritas Pembangunan Daerah beserta, indikator kinerja, dan OPD pelaksana. Tabel ini berfungsi sebagai panduan implementatif yang menghubungkan sasaran strategis RPJMD Kutai Timur dengan kegiatan operasional di tingkat perangkat daerah, sehingga pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan dapat direalisasikan secara optimal, terukur, dan berkelanjutan.

Tabel 3.9 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
T1. Mewujudkan SDM Yang berkualitas					**Indeks Pembangunan Manusia**	**75,9**	**76,18**	**76,6**	**77,02**	**77,45**	**77,87**	**78,29**	
T1.S1. Terwujudnya layanan kesehatan yang prima dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat					**Usia Harapan Hidup (UHH)**	**73,75**	**74,33**	**74,79**	**75,25**	**75,71**	**76,16**	**76,61**	
					Angka Stunting		**25,35**	**23,7**	**22,16**	**20,72**	**19,38**	**18,12**	
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ketersediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama	96%	95%	95%	95%	95%	95%	95,00%	Dinas Kesehatan
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki ketersediaan minimal 40% alat kesehatan esensial	29%	38%	48%	62%	76%	90%	100,00%	
					Persentase kematian akibat penyakit menular dan tidak menular pada pasien yang telah mendapatkan perawatan sesuai standar	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	
					Angka kematian ibu	134	122	109	97	86	77	70	
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi minimal madya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang sesuai standar	85%	89%	90%	93%	93%	93%	94%	Dinas Kesehatan

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi.	70,70%	72%	75%	80%	83%	85%	90%	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Posyandu Siklus Hidup	3%	10%	32%	48%	64%	69%	80%	Dinas Kesehatan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Peringkat Kelulusan Akreditasi	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	RSUD Kudungga
					Persentase Pengembangan SIM RS	68,20%	68,20%	72,70%	77,20%	81,80%	86,30%	90,90%	
					NDR (Net Death Rate) yanmed	30/1000	25/1000	25/1000	25/1000	25/1000	25/1000	25/1000	
					LOS (Length of Stay)	4,02	3 SD 9 HARI	3 SD 9 HARI	3 SD 9 HARI	3 SD 9 HARI	3 SD 9 HARI	3 SD 9 HARI	
T1.S2. Terwujudnya layanan pendidikan berkualitas yang merata					**Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (Tahun)**	**9,47**	**9,49**	**9,51**	**9,53**	**9,55**	**9,57**	**9,59**	
					Harapan Lama Sekolah (Tahun)	**13,02**	**13,03**	**13,04**	**13,05**	**13,06**	**13,07**	**13,08**	
			Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 Tahun	65,31%	68,51%	71,72%	74,76%	77,80%	80,84%	80,84%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar 7-15 Tahun	99,97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
					Angka Partisipasi Sekolah Kesetaran 7-18 Tahun	32,40%	37,38	42,36%	47,34%	52,31%	57,29%	57,29%	
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Proporsi PTK Bersertifikat SD	37,7	40,7	45,7	50,7	55,7	60,7	65,7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Proporsi PTK Bersertifikat SMP	36,6	40,6	45,6	50,6	55,6	60,6	65,6	
			Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kualitas kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Presentase Penerima Beasiswa	91.97%	75.57%	76%	77.57%	78%	79,57%	79,57%	Sekretariat Daerah
			Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembang Kebudayaan	Persentase pelaksanaan event Kebudayaan	0	20,00%	40	60	80	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Cakupan pembinaan olahraga	44,66	45	58,33	61,66	65	70	75	Dinas kepemudaan dan Olahraga
T1.S3. Meningkatnya kualitas keluarga dan kesetaraan gender					**Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga**		**64,47**	**65,73**	**67**	**68,26**	**69,53**	**70,79**	
					Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	**0,517**	**0,51**	**0,49**	**0,47**	**0,46**	**0,44**	**0,42**	
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	badan	53,99	10%	20%	25%	30%	35%	40%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Perlindungan Perempuan	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Rasio KDRT	0,006	0,006	0,005	0,004	0,003	0,002	0,001	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya Kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak	IPG	53,99	PRATAMA	MADYA	NINDYA	UTAMA	MENTOR	MENTOR	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pemenuhan Hak Anak	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Kabupaten/Kota Layak Anak	Madya	Nindia	Utama	Utama	Utama	Paripurna	Paripurna	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak eksploitasi, penelantaran perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	0,031	0,031	0,031	0,03	0,029	0,028	0,027	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Pengendalian Penduduk	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	4.0%	3.9%	3.8%	3.7%	3.6%	3.5%	3.5%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Kelauarga Berencana (KB)	Anga Kelahiran total (Total fertilitaty rate/ TFR)	2.04 Anak	2.02 Anak	2.24 Anak	2.23 Anak	2.22 Anak	2.21 Anak	2.20 Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	12.09%	11.9%	11.9%	11.08%	11.07%	11.06%	11.05%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
T1.S4. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran					**Tingkat Kemiskinan (%)**	**8,81**	**7,93–8,14**	**7,16-7,55**	**6,38-6,97**	**5,61-6,38**	**4,83-5,80**	**4,06–5,21**	
					Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	**5,76**	**5,44–5,51**	**5,21-5,31**	**4,98-5,10**	**4,76-4,90**	**4,53-4,70**	**4,30–4,50**	
			Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	69.84	06.64%	22.18	46.12	76.01	100	100	Dinas Sosial

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase warge negara migram korban tindak kekerasan yang mendapat penanganan	100	20	40	60	80	100	100	Dinas Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang mendapat rehabilitasi Sosial	100%	09.43%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Meningkatnya perlingdungan dan jaminan sosial	Cakupan anak - anak terlantar yang mendapatkan perlindungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial
					Cakupan fakir miskin yang mendapatkankan pelatihan untuk pengembangan usaha		17.63%	35.26%	52.89%	70.53%	100%	100%	Dinas Sosial
			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Terkelolanya Informaso Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	15%	28.95%	38.21%	49.04%	69.35%	100%	100%	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Produktivitas tenaga kerja	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki ketrampilan /Kompetensi	88,76%	91.64%	91.66%	92.38%	94.07%	97.21%	97.21%	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja terdaftar yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	24,33%	24.35%	26.79%	32.41%	43.13%	63.16%	63.16%	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
			Program Hubungan Industrial	Meningkatnya perlingdungan pekerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak (PP/PKB, LKS Biparfis, Struktur Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagkerjaan)	66,37%	66,36%	72.56%	75.49%	80.97%	81.18%	81.45%	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
T2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi berbasis potensi lokal					**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**9,82**	**9,85-10**	**10,24-10,38**	**10,62-10,76**	**11-11,14**	**11,36-11,52**	**11,76-11,9**	
					PDRB per kapita (Rp Juta)	**344,49**	**366,53**	**389,99**	**414,94**	**441,49**	**469,74**	**499,8**	
					Rasio gini (Indeks)	**0,283**	**0,278–0,283**	**0,271-0,281**	**0,264-0,279**	**0,257-0,277**	**0,250-0,275**	**0,243–0,244**	

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
T2.S. Mendorong pertumbuhan ekonomi sektor non tambang					**Proporsi PDRB Sektor Non-Tambang (%)**	**24,47**	**25,06**	**25,66**	**26,91**	**27,56**	**28,22**	**28,88**	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Daya Tarilk Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan	58,82	64,71	70,59	76,47	93,33	94,12	94,91	Dinas Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya jangkauan pemasaran	Persentase peningkatan promosi pemasaran pariwisata	25	20	16,67	14,29	12,5	11,11	9,72	Dinas Pariwisata
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi	71,37	74,04	75,96	77,88	79,81	86,54	93,27	Dinas Pariwisata
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan ekraf	Presentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang terlatih	28,57	33,61	37,82	46,22	50,42	58,82	67,22	Dinas Pariwisata
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	6,56%	13,71%	12,43%	12,12%	11,86%	11,86%	51,20%	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	- 8.726,62 Ton - 81 Kelompok	6.985,55	6.985,70	6.985,75	6.985,80	6.985,85	6.985,90	Dinas Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	- 1.255,48 Ton - 15 Kelompok - 5 Jenis Bibit/Benih	1.100,81	1.100,91	1.100,95	1.100,97	1.100,99	1.200	Dinas Perikanan
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Jumlah Kegiatan Pengawasan Perikanan	3 Kelompok POKMASWAS	3	3	3	3	4 Kelompok POKMASWAS	3	Dinas Perikanan
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	41,29 Kg/Tahun	40,25 Kg/Tahun	40,25 Kg/Tahun	40,28 Kg/Tahun	40,30 Kg/Tahun	40,31 Kg/Tahun	40,32 Kg/Tahun	Dinas Perikanan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatanya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Produksi Komoditas Tanaman Pangan	25777	27420						Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
					Produktivitas Padi	4,86	4,86	4,91	4,96	5,01	5,06	5,06	

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Produksi Komoditas Tanaman Hortikultura	89.120,00	109.175,93	116.279,60	122.084,84	133.311,55	145.593,35	626.445,27	
					Produksi Sektor Peternakan	2.867	3.298	3.300	3.350	3.400	3.450	16.798	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatanya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B		65.325	65.325	63,73	62,21	60,77	60,77	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatanya Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Presentase Pengendalian Kasus Penyakit Hewan Menular	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatanya Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Presentase Penanganan Bencana Pertanian			55,33	60	66,7	66,7	66,7	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Cakupan bina kelompok tani	21	21,45	21,5	22,5	23,5	22,5		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatanya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Tingkat Cakupan Penyediaan Sarana Pertanian	NA	40	45	51	59	69	79	Dinas Perkebunan
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatanya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Tingkat Penyediaan Prasarana Pertanian	NA	20	20	26	34	44	54	Dinas Perkebunan
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatanya Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan Penanggulangan bencana Pertanian	NA	60	60	66	74	84	94	Dinas Perkebunan
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Perizinan usaha pertanian yang diawasi	NA	20	20	26	34	44	54	Dinas Perkebunan

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			PROGRAM PEYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	NA	0,17	0,17	6	14	24	34	Dinas Perkebunan
T2.S2. Meningkatkan kinerja dan daya saing industri pengolahan					**Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)**	**4,34**	**4,56**	**5,06**	**6,9**	**8,74**	**10,58**	**12,42**	
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Tingkat Capaian Pembangunan Industri		5%	15%	20%	25%	30%	30%	Dinas Perindutrian dan Perdagangan
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Tingkat Kepatuhan Pengusaha Terhadap Regulasi Izin Usaha	10%	10%	12%	15%	18%	20%	20%	Dinas Perindutrian dan Perdagangan
T2.S3. Meningkatnya ketahanan pangan					**Indeks Ketahanan Pangan**	**NA**	**64,22**	**66,9**	**69,7**	**72,62**	**75,66**	**78,82**	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	105.96	78.00	81.00	84.00	87.00	90.00	93.00	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya diverhifkasi dan pangan masyarakat	Skor pola pangan harapan	86.80	89.00	91.20	93.40	95.60	97.80	100.00	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya penanganan Kerwanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	13.89	13.00	12.00	11.00	10.00	09.00	09.00	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya mengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	96.67	97.00	97.50	98.00	98.50	99.00	99.00	Dinas Ketahanan Pangan
T2.S4. Terwujudnya ekosistem sosial dan ekonomi yang ramah investasi					**Nilai investasi PMDN (Juta Rupiah)**	**5.160.000**	**5.200.000**	**5.250.000**	**5.300.000**	**5.300.000**	**5.300.000**	**5.300.000**	
					Nilai investasi PMA (Ribu $)		**268.750**	**271.875**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total Terhadap Target Realisasi	487 Investor Baru	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Jumlah Promosi yang diikuti	487 Investor Baru	6 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	6.303 Izin	3.500 Izin	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha	9,5 Triliun	9,6 Triliun	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	6.303 Izin	3.500 Izin	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
T2.S5. Terwujudnya Integrasi Ekonomi Kutai Timur Dengan Ekonomi Domestik, Nasional, dan Global					**Proporsi Nilai Ekspor terhadap PDRB**	**NA**	**70,99**	**72**	**72,39**	**73,09**	**73,79**	**74,49**	
			Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor	NA	5%	7%	10%	12%	15%	15%	Dinas Perindutrian dan Perdagangan
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efesien merata dan terintegrasi	Persentase Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan	11%	11%	11%	12%	12%	13%	13%	Dinas Perindutrian dan Perdagangan
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Jumlah Operasi Pasar yang Dilaksanakan	4 kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	Dinas Perindutrian dan Perdagangan
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Pengawasan Alat UTTP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perindutrian dan Perdagangan

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Produk Lokal pada kegiatan promosi daerah	NA	10%	12%	15%	18%	20%	20%	Dinas Perindutrian dan Perdagangan
T2.S6. Terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan antara desa dan kota					**Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur**	**NA**	**7,89–8,01**	**8,01–8,13**	**8,13–8,26**	**8,26–8,38**	**8,38–8,50**	**8,50–9,00**	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik		38%	47%	56%	63%	70%	70%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Capaian Akses Air Minum Layak		53,95%	62,28%	64,78%	66,88%	68,08%	68,08%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Cakupan wilayah saluran drainase rawan genangan air /Banjir		69%	76%	82%	85%	85%	85%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah Domestik		77,36% (Aman 2,6%)	0,77%	1,03%	1,28%	3,08%	3,08%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengembangan Permukiman	Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentasi Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentasi Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik		60,64%	64,55%	67,77%	70,07%	74,97%	74,97%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Meningkatnya bangunan dan Lingkungan yang tertata	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB		0,35%	41,94%	42,57%	43,22%	43,89%	43,89%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya aksesabitias masyarakat yang aman dan nyaman	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap		38,49%	42,57%	46,03%	48,95%	51,61%	51,61%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Wilayah Pemanfaatan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang		64,17%	72,50%	80,85%	89,15%	97,50%	97,50%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	-Persentase penyediaan / rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan korban terdampak relokasi program pemerintah kab/kota	39,56%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 ha di kabupaten	37,84%	37,46%	36,95%	36,31%	35,54%	34,65%	34,65%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum(PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	26,32%	31%	32%	40%	43%	48%	51%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya kualitas ayana transportasi darat	Rasio Fatalitas Kecelakaan	25,93%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	Dinas Perhubungan
					Persentase Orang dan Barang Yang Melalui Transportasi Darat	175.560 Orang	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
			Program Pengelolaan Pelayaran	Meningkatnya kualitas ayana transportasi laut	Persentase Orang dan Barang Yang Melalui Pelabuhan/Dermaga	178.085 Orang	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Dinas Perhubungan
T3. Mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan responsif					**Indeks Reformasi Birokrasi**	**70,35 (BB)**	**72 (BB)**	**73 (BB)**	**75 (BB)**	**77 (BB)**	**78 (BB)**	**80 (BB)**	
T3.S1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, efektif, adaptif, dan visioner					**Indeks Pmerintahan Digital**								
					Indeks Sistem Merit	**275,5**	**296,25**	**317**	**337,75**	**358,5**	**379,25**	**400**	
					Nilai SAKIP	**60,08**	**63,4**	**66,72**	**70,04**	**73,36**	**76,68**	**80**	

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Indeks Integritas Pemerintah (Survei Penilaian Integritas)	**59,16**	**62,13**	**65,11**	**68,08**	**71,05**	**74,03**	**77**	
					Indeks Inovasi Daerah		**28,7**	**32,6**	**36,6**	**40,5**	**44,5**	**28,88**	
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	75%	80%	80%	80%	85%	90%	80%	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan persandian
					Persentase Lokasi yang Terkoneksi Jaringan Intranet / Internet di Kabupaten Kutai Timur	75%	80%	84%	89%	93%	96%	100%	
			Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	- Indeks Keterbukaan Informasi Publik	97,76	98	98,25	98,5	98,75	99	99	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan persandian
			Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan karir	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN									
				Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Tingkat Pengisian Jabatan Struktural	87%	96%	95%	95%	95%	96%	97	
				Meningkatnya kualitas penilaian kerja ASN	Tingkat pelanggaran disiplin ASN	0,94%	0,46%	0,34%	0,29%	0,23%	0,23%	0,22	
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Menurunnya kejadian penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase tindak lanjut temuan	86,2	87,2	88,2	89,2	90,2	91,2	92,2	Inspektorat

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Meningkatnya kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Maturitas SPIP SKPD Level 3		50	55	60	65	70	75	Inspektorat
			Program Riset Dan Inovasi Daerah	Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Riset dan Inovasi			100%	100%	100%	100%	100%	Badan Riset dan Inovasi Daerah
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanan dan pembanguna daerah	Persentase Capaian kinerja Program	93,47%	94%	94,50%	95%	95,50%	96%	96,50%	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Konsistensi Renstra dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Konsistensi RKPD dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Perekonomian Dan SDA	Persentase Konsistensi Renja PD dengan Renstra PD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
					Persentase Konsistensi Renja PD dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatn kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Kinerja Penyelenggara Pemerintahan	91.8	92	93	94	95	97	97	Sekretariat Daerah

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Meningkatnya kualitas kebijak kesejahteraan rakyat									
				Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Presentase Penerima Beasiswa	91.97%	75.57%	76%	77.57%	78%	79,57%	79,57%	
					Efektifitas Kerjasama Daerah	0,76	0,79	0,8	0,81	0,82	0,83	0,83	
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan	71.69	71.80	71.90	72.00.00	72.10.00	72.10.00	72.10.00	Sekretariat Daerah
					Presentase Layanan Eletrikfikasi Rumah Tangga	84.50	84,50%	90,42	96,74	100	100	100	
					Presentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pembangunan dan Perekonomian	0,75	75%	80%	85%	90%	90%	90%	
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembinaan pengawasan pemerintahan desa	Tingkat Digitalisasi Administrasi Desa	63%	68%	75%	80%	85%	95%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	- Persentase Publikasi Data Sektoral dalam Portal Satu Data	0%	31%	45%	59%	72%	86%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan persandian
T3.S2. Meningkatnya kualitas layanan publik					**Indeks Pelayanan Publik**	**2,9**	**2,48**	**2,61**	**2,73**	**2,86**	**2,98**	**3,11**	
			Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) DALAM Pelayanan Adminduk	73,46%	62%	55%	70%	80%	99%	99	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Anak Berusia 0-4 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran	99,63%	96%	97%	97,50%	98%	98,50%	99	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawian bagi Penduduk yang menikah	100%	62%	63%	63,50%	64%	"64,5%	65	
					Persentase Kepemilikan Akta Kematian bagi Penduduk yang meninggal	100%	64%	65,50%	67%	67,50%	68%	69	
					Persentase Penduduk yang memiliki Akta Cerai bagi Penduduk yang bercerai	100%	62%	63%	63,50%	64%	"64,5%	65	
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pemantaan informasi kependudukan	Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP	30%	30%	20%	18,50%	16,50%	14,50%	15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Lembaga DPRD		75	80	85	90	95	100%	Sekretariat DPRD
				Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Tingkat Efektivitas Agenda Rapat DPRD	97,64%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	
					Tingkat Penyelesaian Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)								
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Time Respon Limit) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	97,59	97,83	97,83	97,83	98,83	98,83	98,83	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Meningkatnya penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
				Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum									
				Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat									
			Pengurusan Hak Hakatas Tanah	Meningkatnya kejelasan hak-hak atas tanah bagi pemerintah dan masyarakat miskin	Tingkat Penyelesaian Pengurusan Hak Atas Tanah	0%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	Dinas Pertanahan
T3.S3. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan berkualitas					**Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah**		**74,73**	**76,23**	**77,73**	**79,23**	**80,73**	**82,23**	
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase Capaian pajak daerah terhadap target yang ditetapkan	100	100	100	100	100	100	100	Badan Pendapatan Daerah
				Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Persentase WP terdaftar aktif terhadap total WP terdata	60,2	63,5	67	70	73	77	79	
				Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Realisasi penagihan Terhadap Piutang Pajak	64,6	65	62,7	64	66	67,2	68,4	
					Persentase Realisasi penerimaan PBB dan BPHTB berdasarkan Ketetapan	29,2	30,1	30,8	31,4	32,1	32,6	33,2	
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tata kelola	Prosentase Kesalahan Penganggaran								Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Keuangan daerah	Indeks kepuasan OPD terhadap pelayanan perbendaharaan								
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya tata kelola aset daerah									Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
T4. Mewujudkan Pembangunan yang merata dan berkelanjutan					**Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)**	**NA**	**61,66**	**63,5**	**65,33**	**67,16**	**69**	**70,83**	
T4.S1. Pembangunan ramah lingkungan dan resiliensi terhadap bencana					**Indeks kualitas lingkungan hidup**	**75,85**	**77,37**	**78,91**	**80,49**	**82,1**	**83,74**	**85,41**	
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	1 Dokumen	50	50	52	53	54	55	Dinas Lingkungan hidup
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya pencemaran dan atau kerusakan LH	Persentase Peningkatan IKLH	0 Persen	10%	11%	12%	13%	14%	14%	Dinas Lingkungan hidup
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	Unit	5	10	15	20	25	30	Dinas Lingkungan hidup
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Dikelola di TPS LB3 Kabupaten	66.67%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	Dinas Lingkungan hidup
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izinperlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase Peningkatan Tolak Ukur Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	88 Laporan	50	50	52	53	54	54	Dinas Lingkungan hidup

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Program Pengakuankeberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya	0 Persen	n/a	40%	41%	41%	43%	43%	Dinas Lingkungan hidup
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang di berikan kepada lembaga masyarakat / lembaga pendidikan	0 Entitas	80%	80%	80,20%	80,40%	80,50%	81%	Dinas Lingkungan hidup
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya penyelesaian sengketa kasus tindak pidana LH	Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup	100%	80%	80&%	80%	82%	82,50%	83%	Dinas Lingkungan hidup
			Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Capaian Pengelolaan Persampahan Yang Dikelola pada Fasilitas Pengelolaan Sampah	50,44%	41,92%	41,99%	42,50%	45%	50%	50%	Dinas Lingkungan hidup
			Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Infrastruktur Pengelolaan Sampah Perkotaan		93,08%	42,80%	45,50%	48,30%	50,80%	50,80%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
T4. S2. Terwujudnya kesiapsiagaan daerah terhadap bencana					**Indeks Risiko Bencana**		**166,36**	**159,36**	**152,36**	**145,36**	**138,36**	**131,36**	
			Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	151,32	166,36	159,36	152,36	145,36	138,36	131,36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat									

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja						Perangkat Daerah
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Meningkatnya penanganan bencana pada saat Pasca bencana									

3.2.4 Dukungan Program Unggulan RPJMD Kutai Timur 2025-2029 Terhadap Kegitan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kutai Timur 2025–2029 tidak dapat dipisahkan dari kerangka pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Hal ini penting untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah selaras dengan agenda pembangunan nasional, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian sasaran prioritas pemerintah pusat.

Dalam konteks tersebut, program-program unggulan daerah yang dirumuskan dalam RPJMD Kutai Timur diarahkan untuk mendukung Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025–2029, khususnya yang relevan dengan karakteristik wilayah, potensi sumber daya, serta isu strategis yang dihadapi daerah Untuk memperjelas keterkaitan tersebut, pada bagian berikut disajikan tabel pemetaan (mapping) antara Program Unggulan RPJMD Kutai Timur 2025–2029 dengan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025–2029. Tabel ini memudahkan identifikasi kontribusi masing-masing program unggulan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, sekaligus menjadi dasar perumusan strategi pelaksanaan dan pengalokasian sumber daya di daerah.

Tabel 3.10 Pemetaan (*mapping*) antara Program Unggulan RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2025–2029 dengan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025–2029

NO	RPJMN TAHUN 2026 - 2030	RPJMD KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026 - 2030	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	CATATAN PENYELARASAN
	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	KEGIATAN PRIORITAS DAERAH			
(01)	*(02)*	*(03)*			*(05)*
1	Investasi pelayanan kesehatan primer	Bantuan Tenaga Kesehatan, Tenaga Pendidikan, dan Peningkatan Insentif Guru Swasta dan Penyuluh Pertanian	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	Memberikan bantuan penempatan tenaga kesehatan
		Jaminan BPJS Kesehatan Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Kurang Mampu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Memastikan pelayanan kesehatan bisa dijangkau seluruh lapisan masyarakat kurang mampu
		Dokter Keliling Permudah Akses Kesehatan Bagi Warga Desa & Daerah Terpencil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Dokter dan tenaga medis akan berkeliling dari satu desa ke desa lain secara rutin, dengan menggunakan kendaraan operasional yang memadai—baik kendaraan darat maupun sungai—untuk memberikan layanan kesehatan primer langsung ke masyarakat.
		Insentif Kader Posyandu 500 Ribu Rupiah Per Bulan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	Pemerintah memberikan insentif tetap bulanan sebesar Rp500.000 per kader sebagai stimulus kesejahteraan sekaligus penguatan motivasi dalam menjalankan peran vital mereka.
2	Penuntasan TBC	Dokter Keliling Permudah Akses Kesehatan Bagi Warga Desa & Daerah Terpencil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Dokter dan tenaga medis akan berkeliling dari satu desa ke desa lain secara rutin, dengan menggunakan kendaraan operasional yang memadai—baik kendaraan darat maupun sungai—untuk memberikan layanan kesehatan primer langsung ke masyarakat.
3	Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	Jaminan BPJS Kesehatan Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Kurang Mampu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Memastikan pelayanan kesehatan bisa dijangkau seluruh lapisan masyarakat kurang mampu

NO	RPJMN TAHUN 2026 - 2030 KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	RPJMD KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026 - 2030 KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	CATATAN PENYELARASAN
(01)	*(02)*	*(03)*			*(05)*
4	Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	Pembangunan & Perbaikan Sarana Pendidikan & Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Peningkatan infrastruktur dan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah kecamatan dan desa, terutama di daerah 3T (terpencil, terluar, tertinggal) yang selama ini mengalami ketimpangan akses dan mutu layanan.
5	Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	Jalan Poros Desa Mulus	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memperbaiki dan membangun jalan poros desa — yaitu jalan penghubung antarpermukiman, pusat produksi, layanan publik, dan akses ke kota/kecamatan — agar seluruh wilayah desa memiliki aksesibilitas transportasi yang baik sepanjang tahun.
		1.000 Rumah Layak Huni (RLH) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah & Relokasi Warga Terdampak Longsor	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program ini mencakup pembangunan rumah baru, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), hingga relokasi terpadu bagi warga terdampak bencana ke lokasi yang lebih aman dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Pendekatan pelaksanaan dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan mitra swasta/CSR.
		Listrik Desa Menyala 24 Jam	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Memastikan seluruh desa, termasuk daerah terpencil dan terluar, mendapatkan akses listrik yang stabil dan menyala penuh selama 24 jam sehari. Program ini ditujukan untuk mengatasi persoalan ketimpangan energi antarwilayah serta mendorong transformasi ekonomi dan sosial di pedesaan. Dengan menggandeng PLN dan berbagai mitra penyedia energi, program ini mengusung

NO	RPJMN TAHUN 2026 - 2030	RPJMD KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026 - 2030	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	CATATAN PENYELARASAN
	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	KEGIATAN PRIORITAS DAERAH			
(01)	*(02)*	*(03)*			*(05)*
					berbagai pendekatan—mulai dari ekspansi jaringan listrik, pembangkit energi baru terbarukan (EBT), hingga solusi hybrid dan off-grid untuk wilayah yang belum terjangkau infrastruktur PLN konvensional.
6	Pencegahan dan penurunan stunting	Gratis Minum Susu & Makan Buah untuk Stop Stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Memberikan akses rutin terhadap susu dan buah segar secara gratis sebagai asupan tambahan bergizi untuk memperkuat tumbuh kembang anak.
		Layanan Jemput Bola Program Pendidikan Non-Formal, Stop Stunting, dan Warga di Bawah Garis Kemiskinan			Program "Layanan Jemput Bola" bertujuan menjangkau langsung kelompok masyarakat yang rentan dan sulit mengakses layanan dasar, khususnya dalam bidang pendidikan non-formal, kesehatan gizi (stunting), dan perlindungan sosial bagi warga yang berada di bawah garis kemiskinan.
7	Pengembangan Hilirisasi Kelapa	Membangun Pabrik-Pabrik Hilirisasi Sawit	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pemerintah mendorong pembangunan dan pengembangan pabrik-pabrik pengolahan lanjutan seperti refinery (pemurnian CPO), pabrik biodiesel, pabrik sabun, margarin, hingga industri oleokimia, yang berlokasi di kawasan ekonomi strategis dan dekat dengan sentra perkebunan sawit.
			Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Perkebunan	
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Membangun Industri Pengolahan Pisang, Nanas, Coklat/Kakao, & Karet	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program ini dirancang untuk membangun sentra industri kecil dan menengah (IKM) yang mampu mengolah hasil pertanian menjadi produk olahan bernilai jual tinggi, seperti cokelat batang, keripik

NO	RPJMN TAHUN 2026 - 2030	RPJMD KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026 - 2030	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	CATATAN PENYELARASAN
	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	KEGIATAN PRIORITAS DAERAH			
(01)	*(02)*	*(03)*			*(05)*
					pisang, sari nanas, lateks, dan barang jadi berbahan karet.
8	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	Penguatan Ketahanan Pangan melalui Revitalisasi, Rehabilitasi, Optimasi, dan Pembukaan/cetak Lahan Pertanian & Tambak	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	Program ini menyasar kawasan desa yang memiliki potensi pengembangan sawah, ladang produktif, serta tambak air tawar dan payau, khususnya untuk mendukung kemandirian pangan, pengendalian inflasi, dan peningkatan kesejahteraan petani dan pembudidaya ikan.
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan	
9	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan	Revitalisasi lahan pertanian dan tambak yang tidak optimal, rehabilitasi lahan rusak, optimasi lahan eksisting, serta pembukaan atau pencetakan lahan baru untuk mendukung ekspansi produksi pangan lokal.
10	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	Bantuan Bibit Tanaman Buah Per Rumah Tangga untuk Penghijaun Lingkungan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Setiap rumah tangga di seluruh desa akan mendapatkan bantuan bibit tanaman buah produktif seperti mangga, rambutan, durian, jambu, atau alpukat yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Program ini bertujuan menciptakan lingkungan pemukiman yang asri, sehat, dan bernilai ekonomi, sekaligus mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga kelestarian alam dari pekarangan rumah sendiri.
11	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	1 Desa 1 Jaringan Air Bersih yang Lancar	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memastikan setiap desa memiliki sistem distribusi air bersih yang berfungsi optimal, sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan.
12	Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut				

NO	RPJMN TAHUN 2026 - 2030 KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	RPJMD KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026 - 2030 KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	CATATAN PENYELARASAN
(01)	*(02)*	*(03)*			*(05)*
13	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	Bantuan Tenaga Kesehatan, Tenaga Pendidikan, dan Peningkatan Insentif Guru Swasta dan Penyuluh Pertanian	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Memberikan bantuan penempatan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik, serta peningkatan insentif bagi guru swasta dan penyuluh pertanian agar mereka lebih termotivasi dan optimal dalam menjalankan tugas.
		Insentif Da'i, Guru TK/TPA, Imam Masjid, Doja, Pendeta & Guru Mingguan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Memberikan insentif kepada tenaga pendidik yang tersedia bagi satuan pendidikan

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Bab ini akan membahas seluruh rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah 2025-2029. Program Perangkat Daerah ini akan menjadi acuan Perangkat Daerah dalam menyusun Bab IV Renstra Perangkat Daerah. Program Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
	URUSAN BIDANG PENDIDIKAN															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	70,4	76,60%	466.818.825.763	77,60%	353.195.485.409	78,60%	367.948.010.182	79,60%	383.438.161.194	80,60%	399.702.819.757	81,60%	416.780.711.247	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		IP ASN	80	81		82		83		84		85		86		
	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 Tahun	65,31%	68,51%	566.644.180.399	71,72%		74,76%	446.630.656.591	77,80%	465.433.248.603	80,84%	485.175.970.215	80,84%	505.905.827.908	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar 7-15 Tahun	99,97%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Angka Partisipasi Sekolah Kesetaran 7-18 Tahun	32,40%	37,38		42,36%		47,34%		52,31%		57,29%		57,29%		
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Proporsi PTK Bersertifikat SD	37,70	40,70	77.324.522.269	45,70	58.503.793.484	50,70	60.947.422.291	55,70	63.513.232.538	60,70	66.207.333.298	65,70	69.036.139.096	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Proporsi PTK Bersertifikat SMP	36,60	40,60		45,60		50,60		55,60		60,60		65,60		
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	100%	100%	322.874.221	100%	244.286.886	100%	254.490.437	100%	265.204.166	100%	276.453.582	100%	288.265.468	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase pelaksanaan event Kebudayaan	0	20,00%	1.656.599.315	40	1.253.384.326	60	1.305.736.590	80	1.360.706.467	100	1.418.424.838	100	1.479.029.128	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Penyelenggaraan Festival Seni	0%	20,00%	538.798.931	40,00%	407.655.689	60,00%	424.682.947	80,00%	442.561.568	100,00%	461.334.120	100,00%	481.045.299	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pembinaan Sejarah	Presentase Sarana dan Prasarana Sejarah yang dipetakan	0	20,00%	169.882.770	40,00%	128.533.436	60,00%	133.902.113	80,00%	139.539.225	100,00%	145.458.192	100,00%	151.673.107	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	- Presentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	11,60%	12,10%	384.250.865	13,60%	290.724.502	15,00%	302.867.694	17,00%	315.618.045	18,00%	329.005.914	19,00%	343.063.176	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Permuseuman	1. Presentase Koleksi museum yang dikelola dengan baik 2. Jumlah museum yang terbangun	1.10,60% 2..0	1.16,67% 2..13,00%	1.519.308.960	1.22,73% 2..27,00%	1.149.510.337	1.28,79% 2..47,00%	1.197.523.917	1.34,85% 2..67,00%	1.247.938.176	1.40,91% 2..100,00%	1.300.873.148	1.45% 2..100,00%	1.356.454.868	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	66,65		290.597.716.056		219.866.457.213		229.049.998.597		238.692.717.050		248.817.571.426		259.448.668.520	Dinas Kesehatan
		IP ASN	79	80		81		82		83		84		85		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama	96%	95%	186.571.807.571	95%	141.160.374.222	95%	147.056.462.943	95%	153.247.356.100	95%	159.747.793.914	95,00%	166.573.253.619	Dinas Kesehatan
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki ketersediaan minimal 40% alat kesehatan esensial	29%	38%		48%		62%		76%		90%		100,00%		
		Persentase kematian akibat penyakit menular dan tidak menular pada pasien yang telah mendapatkan perawatan sesuai standar	0,07%	0,07%		0,07%		0,07%		0,07%		0,07%		0,07%		
		Angka kematian ibu	134	122		109		97		86		77		70		

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi minimal madya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang sesuai standar	85%	89%	703.390.738	90%	532.185.978	93%	554.414.707	93%	577.754.873	93%	602.262.047	94%	627.994.580	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi.	70,70%	72%	2.422.576.880	75%	1.832.923.546	80%	1.909.482.423	83%	1.989.869.245	85%	2.074.275.408	90%	2.162.901.879	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Siklus Hidup	3%	10%	11.941.196.171	32%	9.034.718.279	48%	9.412.086.934	64%	9.808.324.021	69%	10.224.372.963	80%	10.661.224.352	Dinas Kesehatan
	UPT RSUD SANGKULIRANG															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel	100%	100%	7.750.253.586	100%	5.863.847.871	100%	6.108.773.314	100%	6.365.945.030	100%	6.635.975.332	100%	6.919.507.149	UPT RSUD Sangkulirang
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Usia Harapan Hidup	100%	100%	6.376.939.343	100%	4.824.797.249	100%	5.026.322.874	100%	5.237.924.781	100%	5.460.106.782	100%	5.693.397.884	UPT RSUD Sangkulirang
	UPT PUSKESMAS SANDARAN															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel	100%	100%	420.037.808	100%	317.800.931	100%	331.075.071	100%	345.012.917	100%	359.647.656	100%	375.014.131	UPT Puskesmas Sandaran
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Usia Harapan Hidup	100%	100%	1.840.379.325	100%	1.392.432.424	100%	1.450.592.549	100%	1.511.660.681	100%	1.575.782.220	100%	1.643.109.835	UPT Puskesmas Sandaran
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kecamatan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup	100%	100%	3.871.629	100%	2.929.278	100%	3.051.630	100%	3.180.100	100%	3.314.993	100%	3.456.631	UPT Puskesmas Sandaran

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
		Sehat Angka Usia Harapan Hidup														
	UPT PUSKESMAS SANGKULIRANG															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel	100%	100%	1.682.459.112	100%	1.625.806.235	100%	1.693.714.087	100%	1.765.017.332	100%	1.839.885.739	100%	1.918.497.566	UPT Puskesmas Sangkulirang
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Usia Harapan Hidup	100%	100%	1.246.501.584	100%	1.204.636.375	100%	1.254.952.499	100%	1.307.784.430	100%	1.363.257.957	100%	1.421.505.160	UPT Puskesmas Sangkulirang
	UPT PUSKESMAS KALIORANG															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel	100%	100%	2.574.147.741	100%	1.947.602.176	100%	2.028.951.034	100%	2.114.367.334	100%	2.204.054.450	100%	2.298.225.922	UPT Puskesmas Kaliorang
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Usia Harapan Hidup	100%	100%	1.265.298.421	100%	957.325.766	100%	997.312.042	100%	1.039.297.632	100%	1.083.382.501	100%	1.129.671.613	UPT Puskesmas Kaliorang
	UPT PUSKESMAS KAUBUN															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel	100%	100%	1.971.371.826	100%	1.491.541.452	100%	1.553.841.235	100%	1.619.256.008	100%	1.687.941.519	100%	1.760.061.306	UPT Puskesmas Kaubun
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Usia Harapan Hidup	100%	100%	1.326.613.979	100%	1.003.717.165	100%	1.045.641.150	100%	1.089.661.335	100%	1.135.882.529	100%	1.184.414.782	UPT Puskesmas Kaubun
	UPT PUSKESMAS KARANGAN															

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel	100%	100%	1.301.294.119	100%	984.560.139	100%	1.025.683.960	100%	1.068.863.971	100%	1.114.202.984	100%	1.161.808.947	UPT Puskesmas Karangan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Usia Harapan Hidup	100%	100%	1.652.126.006	100%	1.249.999.817	100%	1.302.210.714	100%	1.357.032.156	100%	1.414.594.671	100%	1.475.035.311	UPT Puskesmas Karangan
	UPT PUSKESMAS SEPASO															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel	100%	100%	2.532.642.715	100%	1.916.199.441	100%	1.996.236.647	100%	2.080.275.713	100%	2.168.516.732	100%	2.261.169.803	UPT Puskesmas Sepaso
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Usia Harapan Hidup	100%	100%	1.206.423.304	100%	912.780.807	100%	950.906.497	100%	990.938.471	100%	1.032.972.044	100%	1.077.107.295	UPT Puskesmas Sepaso
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kecamatan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Angka Usia Harapan Hidup	100%	100%	1.932.805	100%	1.462.362	100%	1.523.443	100%	1.587.578	100%	1.654.920	100%	1.725.628	UPT Puskesmas Sepaso
	UPT PUSKESMAS BUSANG															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel	100%	100%	932.143.262	100%	705.260.314	100%	734.718.138	100%	765.648.852	100%	798.126.103	100%	832.227.216	UPT Puskesmas Busang
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Usia Harapan Hidup	100%	100%	1.529.040.176	100%	1.156.872.982	100%	1.205.194.090	100%	1.255.931.254	100%	1.309.205.276	100%	1.365.142.999	UPT Puskesmas Busang
	UPT PUSKESMAS LONG MESANGAT															

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel	100%	100%	1.089.980.742	100%	824.680.274	100%	859.126.117	100%	895.294.252	100%	933.270.793	100%	973.146.162	UPT Puskesmas Long Mesangat
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Usia Harapan Hidup	100%	100%	1.364.022.987	100%	1.032.020.849	100%	1.075.127.043	100%	1.120.388.547	100%	1.167.913.126	100%	1.217.813.934	UPT Puskesmas Long Mesangat
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kecamatan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Angka Usia Harapan Hidup	100%	100%	7.179.709	100%	5.432.173	100%	5.659.068	100%	5.897.308	100%	6.147.460	100%	6.410.119	UPT Puskesmas Long Mesangat
	UPT PUSKESMAS MUARA ANCALONG															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel	100%	100%	1.508.487.037	100%	1.141.322.461	100%	1.188.994.044	100%	1.239.049.206	100%	1.291.607.127	100%	1.346.792.943	UPT Puskesmas Muara Ancalong
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Usia Harapan Hidup	100%	100%	1.395.709.419	100%	1.055.994.828	100%	1.100.102.385	100%	1.146.415.319	100%	1.195.043.900	100%	1.246.103.911	UPT Puskesmas Muara Ancalong
	UPT PUSKESMAS MUARA BENGKAL															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel	100%	100%	1.563.157.559	100%	1.182.686.221	100%	1.232.085.515	100%	1.283.954.774	100%	1.338.417.496	100%	1.395.603.355	UPT Puskesmas Muara Bengkal
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Usia Harapan Hidup	100%	100%	1.291.815.228	100%	977.388.403	100%	1.018.212.669	100%	1.061.078.149	100%	1.106.086.903	100%	1.153.346.095	UPT Puskesmas Muara Bengkal
	UPT PUSKESMAS BATU AMPAR															

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel	100%	100%	537.644.325	100%	406.782.113	100%	423.772.883	100%	441.613.191	100%	460.345.515	100%	480.014.455	UPT Puskesmas Batu Ampar
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Usia Harapan Hidup	100%	100%	1.382.078.756	100%	1.045.681.858	100%	1.089.358.655	100%	1.135.219.292	100%	1.183.372.960	100%	1.233.934.312	UPT Puskesmas Batu Ampar
	UPT PUSKESMAS KOMBENG															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel	100%	100%	2.927.943.300	100%	2.215.284.170	100%	2.307.813.763	100%	2.404.969.836	100%	2.506.983.713	100%	2.614.098.283	UPT Puskesmas Kombeng
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Usia Harapan Hidup	100%	100%	1.452.963.219	100%	1.099.313.097	100%	1.145.230.003	100%	1.193.442.753	100%	1.244.066.142	100%	1.297.220.699	UPT Puskesmas Kombeng
	UPT PUSKESMAS TELEN															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel	100%	100%	705.373.420	100%	533.686.076	100%	555.977.463	100%	579.383.419	100%	603.959.672	100%	629.764.739	UPT Puskesmas Telen
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Usia Harapan Hidup	100%	100%	1.411.244.336	100%	1.067.748.558	100%	1.112.347.053	100%	1.159.175.473	100%	1.208.345.313	100%	1.259.973.646	UPT Puskesmas Telen
	UPT PUSKESMAS MUARA WAHAU 1															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel	100%	100%	1.394.465.265	100%	1.055.053.501	100%	1.099.121.739	100%	1.145.393.390	100%	1.193.978.623	100%	1.244.993.117	UPT Puskesmas Muara Wahau 1
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan	100%	100%	1.558.954.859	100%	1.179.506.455	100%	1.228.772.935	100%	1.280.502.738	100%	1.334.819.032	100%	1.391.851.141	UPT Puskesmas Muara Wahau 1

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Masyarakat Angka Usia Harapan Hidup														
	UPT PUSKESMAS MUARA WAHAU 2															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel	100%	100%	2.126.001.674	100%	1.608.534.514	100%	1.675.720.949	100%	1.746.266.705	100%	1.820.339.748	100%	1.898.116.444	UPT Puskesmas Muara Wahau 2
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Usia Harapan Hidup	100%	100%	975.089.457	100%	737.753.439	100%	768.568.459	100%	800.924.230	100%	834.897.789	100%	870.570.026	UPT Puskesmas Muara Wahau 2
	UPT PUSKESMAS RANTAU PULUNG															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel	100%	100%	1.454.114.754	100%	1.100.184.350	100%	1.146.137.647	100%	1.194.388.608	100%	1.245.052.118	100%	1.298.248.802	UPT Puskesmas Rantau Pulung
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Usia Harapan Hidup	100%	100%	1.203.963.358	100%	910.919.610	100%	948.967.560	100%	988.917.907	100%	1.030.865.772	100%	1.074.911.029	UPT Puskesmas Rantau Pulung
	UPT PUSKESMAS TEPIAN BARU															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel	100%	100%	1.810.554.751	100%	1.369.867.128	100%	1.427.084.730	100%	1.487.163.213	100%	1.550.245.619	100%	1.616.482.145	UPT Puskesmas Tepian Baru
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Usia Harapan Hidup	100%	100%	1.140.924.515	100%	863.224.372	100%	899.280.153	100%	937.138.722	100%	976.890.220	100%	1.018.629.294	UPT Puskesmas Tepian Baru
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kecamatan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup	100%	100%	1.940.859	100%	1.468.455	100%	1.529.791	100%	1.594.193	100%	1.661.815	100%	1.732.819	UPT Puskesmas Tepian Baru

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sehat Angka Usia Harapan Hidup														
	UPT PUSKESMAS TELUK LINGGA															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel	100%	100%	2.658.370.268	100%	2.011.325.005	100%	2.095.335.484	100%	2.183.546.487	100%	2.276.168.041	100%	2.373.420.672	UPT Puskesmas Teluk Lingga
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Usia Harapan Hidup	100%	100%	2.017.878.263	100%	1.526.728.258	100%	1.590.497.749	100%	1.657.455.715	100%	1.727.761.579	100%	1.801.582.737	UPT Puskesmas Teluk Lingga
	UPT PUSKESMAS SANGATTA UTARA															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel	100%	100%	1.936.317.036	100%	1.465.018.970	100%	1.526.210.943	100%	1.590.462.515	100%	1.657.926.665	100%	1.728.764.023	UPT Puskesmas Sangatta Utara
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Usia Harapan Hidup	100%	100%	1.753.078.964	100%	1.326.380.903	100%	1.381.782.141	100%	1.439.953.441	100%	1.501.033.306	100%	1.565.167.164	UPT Puskesmas Sangatta Utara
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kecamatan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Angka Usia Harapan Hidup	100%	100%	2.379.156	100%	1.800.071	100%	1.875.258	100%	1.954.204	100%	2.037.097	100%	2.124.135	UPT Puskesmas Sangatta Utara
	UPT PUSKESMAS SANGATTA SELATAN															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel	100%	100%	1.677.664.336	100%	1.269.322.137	100%	1.322.340.103	100%	1.378.008.968	100%	1.436.461.275	100%	1.497.836.198	UPT Puskesmas Sangatta Selatan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan	100%	100%	1.324.979.457	100%	1.002.480.484	100%	1.044.352.815	100%	1.088.318.762	100%	1.134.483.007	100%	1.182.955.464	UPT Puskesmas Sangatta Selatan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Masyarakat Angka Usia Harapan Hidup														
	UPT PUSKESMAS TELUK PANDAN															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel	100%	100%	1.196.124.635	100%	904.988.826	100%	942.789.054	100%	982.479.294	100%	1.024.154.046	100%	1.067.912.536	UPT Puskesmas Teluk Pandan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Usia Harapan Hidup	100%	100%	1.215.835.133	100%	919.901.804	100%	958.324.929	100%	998.669.210	100%	1.041.030.705	100%	1.085.510.274	UPT Puskesmas Teluk Pandan
	UPT INSTALASI FARMASI KABUPATEN															
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	- Rasio rumah sakit per satuan penduduk - Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk		0,02 0,51	639.907.694		484.154.657		504.377.179		525.610.828		547.906.158		571.316.256	UPT Instalasi Farmasi Kabupaten
	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel	100%	100%	17.881.942	100%	13.529.491	100%	14.094.600	100%	14.687.965	100%	15.310.999	100%	15.965.184	UPT Laboratorium Kesehatan Daerah
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Usia Harapan Hidup	100%	100%	966.591.433	100%	731.323.828	100%	761.870.291	100%	793.944.077	100%	827.621.553	100%	862.982.902	UPT Laboratorium Kesehatan Daerah
	RSUD Kudungga															**RSUD Kudungga**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai SAKIP	61		117.724.039.158		89.070.099.276		92.790.443.676		96.696.805.295		100.798.484.996		105.105.248.682	RSUD Kudungga

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	DAERAH KABUPATEN/KOTA	IP ASN	81	82		83		84		85		86		87		
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Peringkat Kelulusan Akreditasi	Paripurna	Paripurna	94.328.157.443	Paripurna	71.368.757.036	Paripurna	74.349.738.956	Paripurna	77.479.769.972	Paripurna	80.766.302.539	Paripurna	84.217.161.734	RSUD Kudungga
		Persentase Pengembangan SIM RS(Kabid Penunjang)	68,20%	68,20%		72,70%		77,20%		81,80%		86,30%		90,90%		
		NDR (Net Death Rate) yanmed	30/1000	25/1000		25/1000		25/1000		25/1000		25/1000		25/1000		
		LOS (Length of Stay)	4,02	3 SD 9 HARI		3 SD 9 HARI		3 SD 9 HARI		3 SD 9 HARI		3 SD 9 HARI		3 SD 9 HARI		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
	PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	52,9	76,7%	43.684.220.101	81,3%	33.051.514.788	87%	34.432.034.390	92,2%	35.881.579.971	97,4%	37.403.602.831	97,4%	39.001.726.835	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		IP ASN	81	82		83		84		85		86		87		
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik		38%	78.385.197.226	47%	59.306.300.979	56%	61.783.449.500	63%	64.384.455.447	70%	67.115.511.692	70%	69.983.120.749	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Capaian Akses Air Minum Layak		53,95%	94.191.472.072	62,28%	71.265.340.779	64,78%	74.242.003.134	66,88%	77.367.498.606	68,08%	80.649.268.853	68,08%	84.095.127.611	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Infrastruktur Pengelolaan Sampah Perkotaan		93,08%	4.533.074.966	42,8%	3.429.728.033	45,5%	3.572.983.397	48,3%	3.723.401.529	50,8%	3.881.340.567	50,8%	4.047.176.558	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah Domestik		77,36% (Aman 2,6%)	881.890.202	0,77%	667.238.810	1,03%	695.108.524	1,28%	724.371.724	3,08%	755.098.083	3,08%	787.360.760	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan wilayah saluran drainase rawan genangan air /Banjir		69%	95.009.527.179	76%	71.884.281.907	82%	74.886.796.643	85%	78.039.437.115	85%	81.349.709.612	85%	84.825.495.733	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Permukiman	Persentasi Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik			11.758.536		8.896.517		9.268.114		9.658.290		10.067.974		10.498.143	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentasi Bangunan Gedung dalm Kondisi Baik		60,64%	335.186.907.705	64,55%	253.602.674.177	67,77%	264.195.334.298	70,07%	275.317.627.425	74,97%	286.996.035.209	74,97%	299.258.363.382	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB		0,35%	171.871.357.677	41,94%	130.038.002.438	42,57%	135.469.523.880	43,22%	141.172.621.395	43,89%	147.160.873.786	43,89%	153.448.538.795	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap		38,49%	388.035.530.236	42,57%	1.015.337.537.050	46,03%	899.467.774.451	48,95%	936.945.813.349	51,61%	976.207.529.425	51,61%	1.017.432.700.698	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Terampil yang Memiliki Sertifikat Kompetensi		6,18%	4.144.883.949	7,91%	3.136.022.408	9,65%	3.267.010.063	11,38%	3.404.547.101	13,11%	3.548.960.990	13,11%	3.700.595.573	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Wilayah Pemanfaatan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang		64,165%	3.262.993.747	72,5%	2.468.783.598	80,85%	2.571.901.539	89,15%	2.680.175.377	97,5%	2.793.862.907	97,5%	2.913.234.813	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	UPT LABORATORIUM KONTRUKSI DAN UNIT PEMELIHARAAN RUTIN JALAN/ALAT BERAT															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - UPT Laboratorium Kontruksi dan Unit Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat	100%	100%	2.644.298.547	100%	2.000.678.330	100%	2.084.244.111	100%	2.171.988.182	100%	2.264.119.455	100%	2.360.857.293	UPT Laboratorium Konstruksi dan Unit Pemeliharaan Rutin Jalan/ Alat Berat
	UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN/ALAT															

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	BERAT KEC. SANGATTA UTARA															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Sangatta Utara	100%	100%	94.942.333	100%	71.833.443	100%	74.833.834	100%	77.984.245	100%	81.292.176	100%	84.765.504	UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Jalan/ Alat Berat Kecamatan Sangatta Utara
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				44.231.275		33.465.417		34.863.224		36.330.923		37.872.006		39.490.143	UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Jalan/ Alat Berat Kecamatan Sangatta Utara
	UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN/ALAT BERAT KEC. SANGKULIRANG															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN/ALAT BERAT KEC. SANGKULIRANG	100%	100%	90.961.087	100%	68.821.229	100%	71.695.803	100%	74.714.107	100%	77.883.326	100%	81.211.006	UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Jalan/ Alat Berat Kecamatan Sangkulirang
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				48.212.521		36.477.631		38.001.255		39.601.060		41.280.856		43.044.641	UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Jalan/ Alat Berat Kecamatan Sangkulirang
	UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN/ALAT BERAT KEC. MUARA WAHAU															

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN/ALAT BERAT KEC. MUARA WAHAU	100%	100%	120.795.118	100%	91.393.680	100%	95.211.077	100%	99.219.344	100%	103.428.025	100%	107.847.140	UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Jalan/ Alat Berat Kecamatan Muara Wahau
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				18.378.490		13.905.180		14.485.981		15.095.823		15.736.157		16.408.507	UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Jalan/ Alat Berat Kecamatan Muara Wahau
	UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN/ALAT BERAT KEC. MUARA BENGKAL															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN/ALAT BERAT KEC. MUARA BENGKAL	100%	100%	109.034.100	100%	82.495.285	100%	85.941.008	100%	89.559.017	100%	93.357.926	100%	97.346.781	UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Jalan/ Alat Berat Kecamatan Muara Bengkal
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				30.139.507		22.803.575		23.756.051		24.756.151		25.806.256		26.908.866	UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Jalan/ Alat Berat Kecamatan Muara Bengkal
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
	PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai SAKIP		76,7%	92.640.053.684	81,3%	70.091.536.423	87%	73.019.170.468	92,2%	76.093.186.215	97,4%	79.320.902.749	97,4%	82.710.005.110	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	DAERAH KABUPATEN/KOTA	IP ASN	81	82		83		84		85		86		87		
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-Persentase penyediaan / rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan korban terdampak relokasi program pemerintah kab/kota	39,56%	100,00%	60.242.647.414	100%	45.579.633.728	100%	47.483.436.873	100%	49.482.430.174	100%	51.581.373.141	100%	53.785.263.256	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	- Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten	37,84%	37,46%	81.565.007.750	36,95%	61.712.148.086	36,31%	64.289.785.771	35,54%	66.996.305.340	34,65%	69.838.150.888	34,65%	72.822.088.714	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	- Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh yang ditangani	0%	0,25%	38.695.015.505	13%	167.920.877.835	32,51%	30.499.528.239	55,27%	31.783.520.231	81,27%	33.131.711.821	100%	34.547.312.991	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM(PSU)	- Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	26,32%	31%	60.396.608.503	32%	184.340.319.918	40%	47.604.789.468	43%	49.608.891.563	48%	51.713.198.762	51%	53.922.721.320	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Presentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU		0,00%	232.355.658	20%	175.800.471	40%	183.143.432	60%	190.853.541	80%	198.949.156	100%	207.449.552	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	UPT PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN SANGATTA UTARA															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	100%	534.034.702	100%	404.051.069	100%	420.927.767	100%	438.648.299	100%	457.254.858	100%	476.791.746	UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Utara
	UPT PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN SANGATTA SELATAN															

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	100%	273.090.563	100%	206.620.532	100%	215.250.808	100%	224.312.597	100%	233.827.477	100%	243.818.100	UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Selatan
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	100%	27.303.957	100%	20.658.195	100%	21.521.061	100%	22.427.071	100%	23.378.381	100%	24.377.257	UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Selatan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	70%	84%	20.416.290.337	86%	15.446.981.094	88%	16.092.181.785	90%	16.769.642.511	92,00	17.480.976.273	94	18.227.876.723	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	151,32	144,32	10.970.496.885	137,32	8.300.286.447	130,32	8.646.978.821	123,32	9.011.005.814	116,32	9.393.234.157	109	9.794.573.916	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	70%	84%	116.441.722.850	86	88.099.897.764	88,00	91.779.718.084	90,00	95.643.529.420	92,00	99.700.531.323	94	103.960.383.322	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	- Tingkat Waktu Tanggap (Time Respon Limit) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	97,59	97,83	21.020.717.381	97,83	15.904.291.064	97,83	16.568.593.009	98,83	17.266.110.051	98,83	17.998.502.946	99	18.767.515.485	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		- Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	0,05	0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	70	84,00%	38.142.689.280	86	28.858.788.274	88,00	30.064.183.038	90,00	31.329.847.541	92,00	32.658.795.269	94	34.054.190.383	Satuan Polisi Pamong Praja

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100	100,00%	12.382.382.835	100,00%	9.368.520.450	100,00%	9.759.831.596	100,00%	10.170.708.299	100,00%	10.602.128.837	100,00%	11.055.120.402	Satuan Polisi Pamong Praja
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	CC	CC	13.212.281.672	B	9.996.422.554	B	10.413.960.369	BB	10.852.375.075	BB	11.312.710.517	A	11.796.062.730	Dinas Sosial
		IP ASN	Sedang	Sedang		Sedang		Sedang		Sedang		Sedang		Sedang		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	69.84	06.64%	2.737.251.973	22:18	2.071.006.964	46.12	2.157.510.283	76.01	2.248.338.767	100	2.343.708.676	100	2.443.847.080	Dinas Sosial
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	- Persentase warge negara migram korban tindak kekerasan yang mendapat penanganan	100	20	68.072.196	40	51.503.476	60	53.654.711	80	55.913.507	100	58.285.243	100	60.775.566	Dinas Sosial
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	- Persentase PMKS yang mendapat rehabilitasi Sosial	100%	09.43%	4.318.206.928	100%	3.267.158.709	100%	3.403.623.759	100%	3.546.912.062	100%	3.697.364.781	100%	3.855.340.135	Dinas Sosial
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan anak - anak terlantar yang mendapatkan perlindungan	100%	100%	4.687.813.481	100%	3.546.803.313	100%	3.694.948.762	100%	3.850.501.484	100%	4.013.831.841	100%	4.185.328.716	Dinas Sosial
		Cakupan fakir miskin yang mendapatkankan pelatihan untuk pengembangan usaha		17.63%		35.26%		52.89%		70.53%		100%		100%		
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	- Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	20%	4.066.566.787	40%	3.076.767.583	60%	3.205.280.239	80%	3.340.218.528	100%	3.481.903.731	100%	3.630.673.195	Dinas Sosial
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai SAKIP	B	B	22.643.962.036	B	17.132.439.228	B	17.848.039.355	B	18.599.419.488	B	19.388.368.628	B	20.216.765.224	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		IP ASN	77%	77%		77%		77%		77%		77%		77%		
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	- Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	15%	28.95%	319.559.297	38.21%	241.778.812	49.04%	251.877.604	69.35%	262.481.336	100%	273.615.255	100%	285.305.870	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	- Persentase lulusan pelatihan yang memiliki ketrampilan /Kompetensi	88,76%	91.64%	5.289.367.478	91.66%	4.001.939.534	92.38%	4.169.095.442	94.07%	4.344.609.145	97.21%	4.528.898.534	97.21%	4.722.402.392	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	- Persentase Tenaga Kerja terdaftar yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	24,33%	24.35%	3.812.148.887	26.79%	2.884.274.802	32.41%	3.004.747.281	43.13%	3.131.243.383	63.16%	3.264.064.290	63.16%	3.403.526.243	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	- Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak (PP/PKB, LKS Biparfis, Struktur Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagkerjaan)	66,37%	66,36%	32.680.271.975	72.56%	24.725.919.107	75.49%	25.758.689.200	80.97%	26.843.097.797	81.18%	27.981.726.824	81.45%	29.177.287.303	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Indeks Tahapan Perencanaan Kawasan Transmigrasi	73.24%	74.45%	2.130.395.312	75.78%	1.611.858.745	77.25%	1.679.184.028	78.86%	1.749.875.575	80.63%	1.824.101.700	80.63%	1.902.039.131	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Indeks Perkembangan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	73.24%	74.45%	6.615.308.999	75.78%	5.005.147.916	77.25%	5.214.206.559	78.86%	5.433.718.133	80.63%	5.664.205.286	80.63%	5.906.216.797	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI MANDIRI															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	100%	3.669.365.200	100%	2.776.244.555	100%	2.892.204.748	100%	3.013.962.950	100%	3.141.809.062	100%	3.276.047.481	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Mandiri

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi		91.64 %	3.047.713.478		2.305.902.380		2.402.216.980		2.503.347.310		2.609.534.157		2.721.030.346	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Mandiri
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
	PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP			14.669.927.724		11.099.278.687		11.562.881.396		12.049.664.240		12.560.786.227		13.097.464.313	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		IP ASN														
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	badan	53,99	10%	815.854.063	20%	617.275.816	25%	643.058.640	30%	670.130.604	35%	698.556.167	40%	728.403.007	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT	0,006	0,006	1.614.762.579	0,005	1.221.730.619	0,004	1.272.760.748	0,003	1.326.342.383	0,002	1.382.603.101	0,001	1.441.676.854	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program peningkatan kualitas keluarga	IDG	53,99	PRATAMA	508.630.994	MADYA	384.830.604	NINDYA	400.904.487	UTAMA	417.782.065	MENTOR	435.503.521	MENTOR	454.111.050	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	sistem data gender dan anak (SIGA)	2 dok	2 dok	134.233.038	2 dok	101.560.820	2 dok	105.802.886	2 dok	110.257.055	2 dok	114.933.933	2 dok	119.844.655	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Pemenuhan Hak Anak	Kabupaten/Kota Layak Anak	Madya	Nindia	6.574.519.416	Utama	4.974.286.486	Utama	5.182.056.086	Utama	5.400.214.166	Paripurna	5.629.280.149	Paripurna	5.869.799.432	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Perlindungan Khusus Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	0,031	0,031	1.710.139.640	0,031	1.293.892.977	0,030	1.347.937.236	0,029	1.404.683.707	0,028	1.464.267.502	0,027	1.526.830.487	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	63,65	64,00	6.061.851.008	65	4.586.401.172	66.00	4.777.969.297	68.00	4.979.115.828	70.00	5.190.319.686	72.00	5.412.083.736	Dinas Ketahanan Pangan
		IP ASN	80.00	80.00		80.00		80.00		80.00		80.00		80.00		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	105.96	78.00	20.403.655.216	81.00	15.437.421.351	84.00	16.082.222.744	87.00	16.759.264.206	90.00	17.470.157.742	93.00	18.216.595.954	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor pola pangan harapan	86.80	89.00	10.471.839.602	91.20	7.923.001.960	93.40	8.253.935.643	95.60	8.601.416.009	97.80	8.966.270.395	100.00	9.349.367.499	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	13.89	13:00	1.390.732.098	12:00	1.052.228.983	11:00	1.096.179.245	10:00	1.142.327.021	09:00	1.190.782.184	09:00	1.241.660.107	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	96.67	97.00	1.479.554.651	97.50	1.119.432.196	98.00	1.166.189.450	98.50	1.215.284.567	99.00	1.266.834.440	99.00	1.320.961.807	Dinas Ketahanan Pangan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	66,7%	76,7%	3.519.913.357	81,3%	2.663.169.174	87%	2.774.406.353	92,2%	2.891.205.390	97,4%	3.013.844.379	97,4%	3.142.615.318	Dinas Pertanahan
		IP ASN	81	82		83		84		85		86		87		
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Tingkat Penyelesaian Sengketa Tanah	100%	100%	29.090.193	100%	22.009.663	100%	22.928.978	100%	23.894.259	100%	24.907.805	100%	25.972.027	Dinas Pertanahan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	- Tingkat Penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untk pembangunan	65%	50%	24.435.762.150	80%	18.488.116.583	90%	19.260.341.623	95%	20.071.177.915	100%	20.922.556.022	100%	21.816.503.034	Dinas Pertanahan
	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Presentase Administrasi Penetapan Tanah Ulayat	100%	100%	29.090.193	100%	22.009.663	100%	22.928.978	100%	23.894.259	100%	24.907.805	100%	25.972.027	Dinas Pertanahan
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Tingkat Pemanfaatan Tanah Kosong	100%	100%	29.090.193	100%	22.009.663	100%	22.928.978	100%	23.894.259	100%	24.907.805	100%	25.972.027	Dinas Pertanahan
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Presentase Administrasi Penggunaan dan Penatagunaan Tanah	100%	100%	29.090.193	100%	22.009.663	100%	22.928.978	100%	23.894.259	100%	24.907.805	100%	25.972.027	Dinas Pertanahan
	PENGURUSAN HAK HAKATAS TANAH	Tingkat Penyelesaian Pengurusan Hak Atas Tanah	0%	20%	436.352.896	40%	330.144.939	60%	343.934.672	80%	358.413.891	100%	373.617.072	100%	389.580.411	Dinas Pertanahan
	PROGRAM SURVEI, PENGUKURANDAN PEMETAAN	Persentase Penyelesaian Pemetaan	0%	20%	581.803.861	40%	440.193.252	60%	458.579.562	80%	477.885.188	100%	498.156.096	100%	519.440.548	Dinas Pertanahan
	UPT SURVEY DAN PEMETAAN															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran UPT.Survey Dan Pemetaan	100%	100%	101.815.676	100%	77.033.819	100%	80.251.423	100%	83.629.908	100%	87.177.317	100%	90.902.096	UPT Survey dan Pemetaan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai ESAKIP		61	31.232.503.113	61,00	23.630.536.064	62,00	24.617.553.405	63,00	25.653.921.612	64,00	26.742.108.230	65'00	27.884.704.179	Dinas Lingkungan hidup
		Indeks Profesionalisme ASN		74		75		76		77		78		79		

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	1 Dokumen	50	1.870.354.141	50	1.415.111.393	52	1.474.218.790	53	1.536.281.557	54	1.601.447.463	55	1.669.871.664	Dinas Lingkungan hidup
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan IKLH	0 Persen	10%	1.490.643.553	11%	1.127.822.067	12%	1.174.929.756	13%	1.224.392.829	14%	1.276.329.056	14%	1.330.862.094	Dinas Lingkungan hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH	Unit	5	23.505.693.481	10	17.784.425.907	15	18.527.258.685	20	19.307.233.103	25	20.126.206.241	30	20.986.128.036	Dinas Lingkungan hidup
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Dikelola di TPS LB3 Kabupaten	66.67%	1%	242.374.399	1%	183.380.658	1%	191.040.234	1%	199.082.789	1%	207.527.472	1%	216.394.388	Dinas Lingkungan hidup
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZINPERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Peningkatan Tolak Ukur Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	88 Laporan	50	936.848.676	50	708.820.434	52	738.426.959	53	769.513.811	54	802.155.005	54	836.428.258	Dinas Lingkungan hidup
	PROGRAM PENGAKUANKEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya	0 Persen	n/a	210.516.720	40%	159.277.114	41%	165.929.915	41%	172.915.357	43%	180.250.071	43%	187.951.521	Dinas Lingkungan hidup
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang di berikan kepada lembaga masyarakat / lembaga pendidikan	0 Entitas	80%	1.597.007.792	80%	1.208.297.333	80,2%	1.258.766.371	80,4%	1.311.758.861	80,5%	1.367.400.975	81%	1.425.825.196	Dinas Lingkungan hidup
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	26 Entitas	80%	353.550.887	80%	267.496.875	80,4%	278.669.878	80,5%	290.401.531	80,7%	302.719.767	81%	315.653.915	Dinas Lingkungan hidup
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup	100%	80%	418.685.316	80&%	316.777.635	80%	330.009.032	82%	343.902.000	82,5%	358.489.615	83%	373.806.612	Dinas Lingkungan hidup

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Capaian Pengelolaan Persampahan Yang Dikelola pada Fasilitas Pengelolaan Sampah	50,44%	41,92%	55.268.125.461	41,99%	41.815.906.563	42,50%	43.562.503.626	45%	45.396.430.542	50%	47.322.053.804	50%	49.343.958.229	Dinas Lingkungan hidup
	UPT KEBERSIHAN SANGATTA UTARA															
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Capaian Pengelolaan Persampahan yang Dikelola pada Fasilitas Pengelolaan Sampah		41,92%	22.898.192.342		17.324.790.074		18.048.424.451		18.808.240.546		19.606.047.445		20.443.744.690	UPT Kebersihan Sangatta Utara
	UPT KEBERSIHAN SANGATTA SELATAN															
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Capaian Pengelolaan Persampahan yang Dikelola pada Fasilitas Pengelolaan Sampah		41,92%	8.854.748.547		6.699.509.614		6.979.339.583		7.273.161.050		7.581.673.590		7.905.611.757	UPT Kebersihan Sangatta Selatan
	UPT TPA, PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK DAN LUMPUR TINJA															
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Capaian Pengelolaan Persampahan yang Dikelola pada Fasilitas Pengelolaan Sampah		41,92%	5.340.959.441		4.040.974.053		4.209.760.383		4.386.986.030		4.573.072.959		4.768.464.235	UPT TPA, Pengelolaan Limbah Domestik dan Lumpur Tinja
	UPT LABORATORIUM LH															
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan IKLH		10,00%	81.988.412		62.032.496		64.623.515		67.344.084		70.200.681		73.200.109	UPT Laboratorium LH
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI PENCATATAN SIPIL KEPENDUDUKAN DAN															

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	65.90%		18.137.932.099		13.723.173.485		14.296.372.932		14.898.232.351		15.530.184.741		16.193.734.751	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		IP ASN														
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) DALAM Pelayanan Adminduk	73,46%	62%	3.502.887.721	55%	2.650.287.565	70%	2.760.986.695	80%	2.877.220.782	99%	2.999.266.572	99	3.127.414.653	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pencatatan Sipil	Persentase Anak Berusia 0-4 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran	99,63%	96%	5.286.614.006	97%	3.999.856.254	97,5%	4.166.925.147	98%	4.342.347.483	98,5%	4.526.540.937	99	4.719.944.063	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawian bagi Penduduk yang menikah	100%	62%		63%		63,5%		64%		"64,5%		65		
		Persentase Kepemilikan Akta Kematian bagi Penduduk yang meninggal	100%	64%		65,5%		67%		67,5%		68%		69		
		Persentase Penduduk yang memiliki Akta Cerai bagi Penduduk yang bercerai	100%	62%		63%		63,5%		64%		"64,5%		65		
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP	30%	30%	2.040.939.296	20%	1.544.176.253	18,5%	1.608.674.525	16,5%	1.676.397.710	14,5%	1.747.507.055	15	1.822.171.867	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	- Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan - Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	100%	100%	121.819.914	100%	92.169.041	100%	96.018.824	100%	100.061.097	100%	104.305.483	100	108.762.088	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai SAKIP			30.673.180.143		23.207.351.872		24.176.693.348		25.194.501.899		26.263.200.877		27.385.334.804	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	DAERAH KABUPATEN/KOTA	IP ASN														
	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan akses internet desa	24%	40%	1.349.251.698	55%	1.020.844.881	70%	1.063.484.269	85%	1.108.255.626	100%	1.155.265.552	100%	1.204.625.973	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Kerjasama Desa yang Telah Ditindaklanjuti	0%	10%	1.068.730.135	18%	808.602.048	27%	842.376.324	37%	877.839.314	45%	915.075.453	50%	954.173.399	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Digitalisasi Administrasi Desa	63%	68%	25.061.410.135	75%	18.961.482.334	80%	19.753.479.257	85%	20.585.076.027	95%	21.458.252.635	100%	22.375.088.074	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	- Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif(%)	90%	91,12%	6.917.596.521	93%	5.233.858.890	96%	5.452.470.498	98%	5.682.012.686	100%	5.923.031.983	100%	6.176.102.246	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP			13.454.149.277		10.179.419.771		10.604.601.147		11.051.041.591		11.519.804.058		12.012.004.648	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		IP ASN														
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	4.0%	3.9%	1.528.333.164	3.8%	1.156.338.057	3.7%	1.204.636.822	3.6%	1.255.350.525	3.5%	1.308.599.914	3.5%	1.364.511.772	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Anga Kelahiran total (Total fertilitaty rate/ TFR)	2.04 Anak	2.02 Anak	10.506.773.973	2.24 Anak	7.949.433.332	2.23 Anak	8.281.471.019	2.22 Anak	8.630.110.591	2.21 Anak	8.996.182.141	2.20 Anak	9.380.557.269	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	12.09%	11.9%	3.600.936.622	11.9%	2.724.471.439	11.08%	2.838.269.135	11.07%	2.957.756.716	11.06%	3.083.218.675	11.05%	3.214.953.733	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	66,7%	76,7%	38.375.209.705	81,3%	29.034.713.408	87%	30.247.456.341	92,2%	31.520.836.421	97,4%	32.857.885.504	97,4%	34.261.787.042	Dinas Perhubungan
		IP ASN	81	82		83		84		85		86		87		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasiao Fatalitas Kecelakaan	25,93%	20%	32.367.302.514	20%	24.489.126.170	20%	25.512.005.724	20%	26.586.029.256	20%	27.713.753.964	20%	28.897.864.907	Dinas Perhubungan
		Persentase Orang dan Barang Yang Melalui Transportasi Darat	175.560 Orang	10%		10%		10%		10%		10%		10%		
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Orang dan Barang Yang Melalui Pelabuhan/Dermaga	178.085 Orang	10%	48.144.521.189	10%	36.426.182.049	10%	37.947.657.196	10%	39.545.206.101	10%	41.222.632.450	10%	42.983.930.117	Dinas Perhubungan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Cakupan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Perkeretaapian	-		154.170.534	1 Dok	116.645.546		121.517.681		126.633.424		132.004.953		137.645.059	Dinas Perhubungan
	UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR															
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah KIR Kendaraan Bermotor		6500 unit	1.468.901.642		1.111.372.121		1.157.792.716		1.206.534.342		1.257.713.048		1.311.450.690	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	66,7%	76,7%	21.051.976.077	81,3%	15.927.941.418	87%	16.593.231.208	92,2%	17.291.785.487	97,4%	18.025.267.481	97,4%	18.795.423.574	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan persandian
		IP ASN	81	82		83		84		85		86		87		
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	- Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	75%	80%	112.883.786.642	80%	85.407.960.471	80%	88.975.342.006	85%	92.721.092.617	90%	96.654.130.758	80%	100.783.820.807	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan persandian
		- Persentase Lokasi yang Terkoneksi Jaringan Intranet / Internet di Kabupaten Kutai Timur	75%	80%		84%		89%		93%		96%		100%		
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	- Indeks Keterbukaan Informasi Publik	97,76	98,00	24.171.080.107	98,25	18.287.857.944	98,5	19.051.718.436	98,75	19.853.771.953	99	20.695.928.146	99	21.580.192.148	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan persandian
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	- Persentase Publikasi Data Sektoral dalam Portal Satu Data	0%	31%	1.965.022.870	45%	1.486.737.827	59%	1.548.836.969	72%	1.614.041.068	86%	1.682.505.372	100%	1.754.392.891	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan persandian
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	- Indeks KAMI	0%	0%	1.455.258.791	2%	1.101.049.929	2,5%	1.147.039.380	3%	1.195.328.303	3,5%	1.246.031.672	4%	1.299.270.210	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan persandian
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP	69,2		11.566.693.102		8.751.368.967		9.116.902.482		9.500.712.674		9.903.713.375		10.326.864.111	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		IP ASN		1		1		1		1		1		1		
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pengawasan dan pemeriksaan kopera		25,26%	5.485.993.480	28,88%	4.150.706.919	31,77%	4.324.076.651	34,95%	4.506.114.870	38,44%	4.697.254.999	160,29%	4.897.952.135	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi aktif	43,01%	43,66%	154.125.262	44,3%	116.611.293	44,93%	121.481.998	45,54%	126.596.238	46,13%	131.966.190	46,13%	137.604.640	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	15,44%	4,37%	196.286.708	10,22%	148.510.675	9,97%	154.713.777	9,72%	161.227.033	9,49%	168.065.953	47,47%	175.246.818	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	17,95%	45,63%	1.904.838.975	46,51%	1.441.202.645	47,67%	1.501.399.841	48,78%	1.564.606.896	50,16%	1.630.974.304	50,16%	1.700.660.083	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	6,56%	13,71%	7.090.158.333	12,43%	5.364.419.290	12,12%	5.588.484.239	11,86%	5.823.752.436	11,86%	6.070.784.042	51,2%	6.330.167.229	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	1	1	1.926.565.780	1	1.457.641.162	1	1.518.524.974	1	1.582.452.976	1	1.649.577.378	1	1.720.058.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	66,15	66,90	17.598.596.092	66,90	13.315.111.444	67,00	13.871.266.660	67,00	14.455.229.636	67,10	15.068.390.762	67,15	15.712.209.944	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Indeks Profesionalitas ASN														
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total Terhadap Target Realisasi	487 Investor Baru	100%	4.235.936.007	100%	3.204.912.466	100%	3.338.777.571	100%	3.479.335.930	100%	3.626.922.208	100%	3.781.887.800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah Promosi yang diikuti	487 Investor Baru	6 Dokumen	8.726.464.378	100%	6.602.449.712	100%	6.878.225.612	100%	7.167.790.308	100%	7.471.833.238	100%	7.791.078.314	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	6.303 Izin	3.500 Izin	1.728.376.343	100%	1.307.690.881	100%	1.362.311.460	100%	1.419.663.069	100%	1.479.882.258	100%	1.543.112.406	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha	9,5 Triliun	9,6 Triliun	3.507.894.786	100%	2.654.075.914	100%	2.764.933.278	100%	2.881.333.511	100%	3.003.553.755	100%	3.131.885.012	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	6.303 Izin	3.500 Izin	182.707.992	100%	138.237.008	100%	144.010.992	100%	150.073.674	100%	156.439.491	100%	163.123.599	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	- Persentase organisasi pemuda yang aktif	67,36	67,36	4.979.371.423	68,75	3.767.396.278	69,44	3.924.755.614	70,13	4.089.982.916	70,83	4.263.471.584	71,53	4.445.634.684	Dinas kepemudaan dan Olahraga
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	- Cakupan pembinaan olahraga	44,66	45,00	41.140.940.134	58,33	31.127.267.194	61,66	32.427.413.429	65,00	33.792.566.975	70,00	35.225.978.198	75,00	36.731.059.983	Dinas kepemudaan dan Olahraga
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	- Presentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif.	34,02	32,98	11.132.451.537	34,02	8.422.821.462	35,05	8.774.631.968	36,08	9.144.032.998	37,11	9.531.904.081	38,14	9.939.168.717	Dinas kepemudaan dan Olahraga
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP			22.362.502.056		16.919.486.389		17.626.191.747		18.368.232.374		19.147.375.031		19.965.474.822	Dinas kepemudaan dan Olahraga
		IP ASN														
	UPTD SARANA PRASARANA OLAHRAGA															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Keuangan	100%	100%	3.272.187.398	100%	2.475.739.521	100%	2.579.148.002	100%	2.687.726.907	100%	2.801.734.758	100%	2.921.443.000	UPTD Sarana Prasarana Olahraga
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP			27.854.183.146		21.074.496.558		21.954.751.390		22.879.018.963		23.849.499.915		24.868.504.915	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		IP ASN														
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Presentase Perpustakaan yang berstandar nasional	2,57	3,12	13.570.234.766		10.267.250.142		10.696.100.080		11.146.392.516		11.619.199.572		12.115.646.982	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Nlai Kegemaran Membaca Masyarakat														
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat Daerah Yang Telah Menerapkan arsip sesuai aturan	18,51	24,07	3.241.036.528		2.452.170.749		2.554.594.792		2.662.140.038		2.775.062.546		2.893.631.179	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip yang dilindungi dan diselamatkan	50	370	500.897.905		378.979.743		394.809.244		411.430.219		428.882.243		447.206.868	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	UPT PERPUSTAKAAN KECAMATAN MUARA BENGKAL															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Keuangan	100%	100%	67.749.529	100%	51.259.346	100%	53.400.383	100%	55.648.473	100%	58.008.966	100%	60.487.485	UPT Perpustakaan Kecamatan Muara Bengkal
	UPT PERPUSTAKAAN KECAMATAN SANGKULIRANG															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Keuangan	100%	100%	72.266.164	100%	54.676.636	100%	56.960.409	100%	59.358.371	100%	61.876.231	100%	64.519.984	UPT Perpustakaan Kecamatan Sangkulirang
	UPT PERPUSTAKAAN KECAMATA SANGATTA UTARA															

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Keuangan	100%	100%	72.266.164	100%	54.676.636	100%	56.960.409	100%	59.358.371	100%	61.876.231	100%	64.519.984	UPT Perpustakaan Kecamatan Sangatta Utara
	UPT PERPUSTAKAAN KECAMATAN MUARA WAHAU															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Keuangan	100%	100%	67.749.529	100%	51.259.346	100%	53.400.383	100%	55.648.473	100%	58.008.966	100%	60.487.485	UPT Perpustakaan Kecamatan Muara Wahau
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	78	78,85	31.499.225.056	79,7	23.832.338.093	80,6	24.827.784.447	81,5	25.873.003.118	82,5	26.970.482.723	84	28.122.836.309	Dinas Perikanan
		Nilai SAKIP	53	54		55		56		57		58				
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	- 8.726,62 Ton - 81 Kelompok	6985,55	17.648.991.201	6985,7	13.353.240.423	6985,75	13.910.988.237	6985,8	14.496.623.443	6985,85	15.111.540.408	6985,9	15.757.203.222	Dinas Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	- 1.255,48 Ton - 15 Kelompok - 5 Jenis Bibit/Benih	1.100,81	22.393.998.077	1.100,91	16.943.316.303	1.100,95	17.651.017.006	1.100,97	18.394.102.745	1.100,99	19.174.342.770	1.200	19.993.594.797	Dinas Perikanan
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Kegiatan Pengawasan Perikanan	3 Kelompok POKMASWAS	3	1.133.953.927	3	857.950.420	3	893.785.915	3	931.413.184	4 Kelompok POKMASWAS	970.921.816	3	1.012.405.880	Dinas Perikanan
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	41,29 Kg/Tahun	40,25 Kg/Tahun	2.345.908.515	40,25 Kg/Tahun	1.774.916.200	40,28 Kg/Tahun	1.849.052.185	40,30 Kg/Tahun	1.926.894.970	40,31 Kg/Tahun	2.008.629.893	40,32 Kg/Tahun	2.094.451.563	Dinas Perikanan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	UPT BALAI BENIH IKAN KALIORANG															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Keuangan	100%	100%	63.148.983	100%	47.778.570	100%	49.774.220	100%	51.869.652	100%	54.069.856	100%	56.380.070	UPT Balai Benih Ikan Kaliorang
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	- Produksi Perikanan Budidaya - Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan - Jumlah Jenis Bibit/Benih Unggul		1100.81 Ton 13 Kelompok 5 Jenis/Benih	116.904.001		88.449.658		92.144.087		96.023.238		100.096.346		104.373.110	UPT Balai Benih Ikan Kaliorang
	UPT BALAI BENIH IKAN AIR LAUT TELUK KABA															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Keuangan	100%	100%	127.804.363	100%	96.696.880	100%	100.735.785	100%	104.976.636	100%	109.429.529	100%	114.105.067	UPT Balai Benih Ikan Air Laut Teluk Kaba
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	- Produksi Perikanan Budidaya - Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan - Jumlah Jenis Bibit/Benih Unggul		1100.81 Ton 13 Kelompok 5 Jenis/Benih	59.750.829		45.207.524		47.095.784		49.078.458		51.160.265		53.346.163	UPT Balai Benih Ikan Air Laut Teluk Kaba
	UPT BALAI BENIH UDANG TELUK LOMBOK															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Keuangan	100%	100%	45.013.246	100%	34.057.057	100%	35.479.577	100%	36.973.222	100%	38.541.551	100%	40.188.295	UPT Balai Benih Udang Teluk Lombok
	UPT TEMPAT PELELANGAN IKAN KENYAMUKAN															
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	- Jumlah Kelompok Penangkap Ikan - Produksi Perikanan Tangkap		50 Kelompok 6985.55 Ton	187.555.192		141.904.404		147.831.569		154.055.094		160.589.794		167.451.229	UPT Tempat Pelelangan Ikan Kenyamukan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	UPT TEMPAT PELELANGAN IKAN SANGKULIRANG															
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	- Jumlah Kelompok Penangkap Ikan - Produksi Perikanan Tangkap		50 Kelompok 6985.55 Ton	142.541.946		107.847.347		112.351.993		117.081.871		122.048.243		127.262.934	UPT Tempat Pelelangan Ikan Sangkulirang
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesioanalisme ASN		1	22.752.505.907	1	17.214.563.605	1	17.933.593.962	1	18.688.575.837	1	19.481.306.806	1	20.313.674.324	Dinas Pariwisata
		SAKIP Dinas Pariwisata														
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan	58,82	64,71	9.974.965.867	70,59	7.547.066.907	76,47	7.862.298.262	93,33	8.193.291.185	94,12	8.540.833.754	94,91	8.905.753.452	Dinas Pariwisata
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan promosi pemasaran pariwisata	25,00	20,00	4.676.797.558	16,67	3.538.468.658	14,29	3.686.265.979	12,50	3.841.453.166	11,11	4.004.399.712	9,72	4.175.493.586	Dinas Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi	71,37	74,04	7.140.443.739	75,96	5.402.465.268	77,88	5.628.119.349	79,81	5.865.056.134	86,54	6.113.839.758	93,27	6.375.062.564	Dinas Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Presentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang terlatih	28,57	33,61	2.152.702.064	37,82	1.628.736.050	46,22	1.696.766.277	50,42	1.768.198.015	58,82	1.843.201.340	67,22	1.921.954.831	Dinas Pariwisata
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Profesioanalisme ASN	76	77,00%	112.383.125.779	78	85.029.160.074	79	88.580.719.599	80	92.309.857.100	81	96.225.451.477	82	100.336.825.572	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	DAERAH KABUPATEN/KOTA	SAKIP Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan														dan Peternakan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Komoditas Tanaman Pangan	25777	27420	46.146.999.952		34.914.855.933		36.373.204.916		37.904.471.349		39.512.301.103		41.200.522.345	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
		Produktivitas Padi	4,86	4,86		4,91		4,96		5,01		5,06		5,06		
		Produksi Komoditas Tanaman Hortikultura	89120	109175,93		116279,6		122084,84		133311,55		145593,35		626445,27		
		Produksi Sektor Peternakan	2867	3298		3300		3350		3400		3450		16798		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B		65.325	18.818.381.533	65.325	14.238.002.054	63,73	14.832.705.234	62,21	15.457.143.572	60,77	16.112.803.827	60,77	16.801.247.094	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Presentase Pengendalian Kasus Penyakit Hewan Menular	100	100	1.349.642.177	100	1.021.140.317	100	1.063.792.046	100	1.108.576.360	100	1.155.599.890	100	1.204.974.597	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Presentase Penanganan Bencana Pertanian			2.712.365.117	55,33	2.052.177.550	60	2.137.894.388	66,7	2.227.897.068	66,7	2.322.399.881	66,7	2.421.627.836	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok tani	21	21,45	5.379.145.985	21,50	4.069.866.022	22,50	4.239.859.133	23,50	4.418.351.899	22,50	4.605.769.304		4.802.557.579	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN	Indek Profesionalisme ASN	77	78	3.331.037.037	79	2.520.265.204	80	2.625.533.466	81	2.736.065.141	82	2.852.123.400	83	2.973.984.572	Dinas Perkebunan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Perkebunan	66,20	66,5		67,7		80		81		82		83		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Cakupan Penyediaan Sarana Pertanian	NA	40	17.078.068.823	45	12.921.280.109	51	13.460.985.492	59	14.027.676.145	69	14.622.701.330	79	15.247.477.775	Dinas Perkebunan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat Penyediaan Prasarana Pertanian	NA	20	4.107.958.699	20	3.108.084.736	26	3.237.905.470	34	3.374.217.240	44	3.517.344.599	54	3.667.628.326	Dinas Perkebunan
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan Penanggulangan bencana Pertanian	NA	60	1.834.422.546	60	1.387.925.520	66	1.445.897.398	74	1.506.767.870	84	1.570.681.866	94	1.637.791.561	Dinas Perkebunan
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perizinan usaha pertanian yang diawasi	NA	20	596.729.550	20	451.486.040	26	470.344.036	34	490.144.931	44	510.935.872	54	532.766.359	Dinas Perkebunan
	PROGRAM PEYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	NA	0,17	8.266.227.546	0,17	6.254.234.168	6	6.515.465.550	14	6.789.758.500	24	7.077.766.098	34	7.380.174.076	Dinas Perkebunan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalisme ASN			5.682.011.765		4.299.014.505		4.478.578.856		4.667.121.424		4.865.091.121		5.072.959.302	Dinas Perindutrian dan Perdagangan
		Nilai SAKIP														
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Kepatuhan Terhadap Legalitas Usaha	NA	10%	547.069.543	12%	413.913.240	14%	431.201.868	16%	449.354.927	18%	468.415.639	18%	488.429.387	Dinas Perindutrian dan Perdagangan
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan Nilai Ekspor	NA	5%	2.066.014.844	7%	1.563.148.433	10%	1.628.439.148	12%	1.696.994.399	15%	1.768.977.413	15%	1.844.559.578	Dinas Perindutrian dan Perdagangan
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan	11%	11%	26.028.633.449	11%	19.693.284.243	12%	20.515.847.599	12%	21.379.539.122	13%	22.286.415.221	13%	23.238.635.126	Dinas Perindutrian dan Perdagangan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Operasi Pasar yang Dilaksanakan	4 kali	4 Kali	5.728.218.437	4 Kali	4.333.974.509	4 Kali	4.514.999.095	4 Kali	4.705.074.909	4 Kali	4.904.654.515	4 Kali	5.114.213.100	Dinas Perindutrian dan Perdagangan
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pengawasan Alat UTTP	100%	100%	1.316.573.726	100%	996.120.702	100%	1.037.727.392	100%	1.081.414.418	100%	1.127.285.794	100%	1.175.450.740	Dinas Perindutrian dan Perdagangan
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk Lokal pada kegiatan promosi daerah	NA	10%	1.122.731.138	12%	849.459.250	15%	884.940.079	18%	922.194.949	20%	961.312.563	20%	1.002.386.058	Dinas Perindutrian dan Perdagangan
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Tingkat Capaian Pembangunan Industri		5%	2.293.247.977	15%	1.735.073.197	20%	1.807.544.990	25%	1.883.640.373	30%	1.963.540.526	30%	2.047.435.686	Dinas Perindutrian dan Perdagangan
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Tingkat Kepatuhan Pengusaha Terhadap Regulasi Izin Usaha	10%	10%	109.161.250	12%	82.591.486	15%	86.041.227	18%	89.663.455	20%	93.466.795	20%	97.460.301	Dinas Perindutrian dan Perdagangan
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tingkat Ketersediaan dan Aksesibilitas Data Industri	6,25	6,25	272.690.216	6,5	206.317.629	6,75	214.935.253	7	223.983.758	7,25	233.484.688	7,25	243.460.666	Dinas Perindutrian dan Perdagangan
	UPT PASAR INDUK SANGATTA UTARA															
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				843.119		637.904		664.549		692.526		721.901		752.745	UPT Pasar Induk Sangatta Utara
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				934.100.375		706.741.068		736.260.740		767.256.396		799.801.835		833.974.547	UPT Pasar Induk Sangatta Utara
	UPT PASAR SANGKULIRANG															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				293.581.290		222.123.832		231.401.661		241.143.381		251.372.188		262.112.435	UPT Pasar Sangkulirang

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	UPT PASAR MUARA WAHAU															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				501.346.511		379.319.159		395.162.836		411.798.697		429.266.351		447.607.388	UPT Pasar Muara Wahau
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
	SEKRETARIAT DAERAH															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP	60.30%	60.50%	279.932.753.681	65,00%	211.797.338.414	70.10%	220.643.843.001	72,00%	229.932.672.818	73,00%	239.685.944.125	73,00%	249.926.878.998	Sekretariat Daerah
		IP ASN	78.15	78.35		78.75		79.10		79.50		79.70		79.70		
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kinerja Penyelenggara Pemerintahan	91.8	92	101.790.898.494	93	77.015.072.700	94	80.231.894.021	95	83.609.556.408	97	87.156.101.914	97	90.879.974.696	Sekretariat Daerah
		Indeks Reformasi Hukum	87.40	87.80		88.00		88.30		88.50		90.00		90.00		
		Presentase Penerima Beasiswa	91.97%	75.57%		76%		77.57%		78%		79,57%		79,57%		
		Efektifitas Kerjasama Daerah	0,76	0,79		0,8		0,81		0,82		0,83		0,83		
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Tata Kelola Pengadaan	71.69	71.80	16.352.673.575	71.90	12.372.445.502	72:00:00	12.889.226.764	72:10:00	13.431.847.089	72:10:00	14.001.598.431	72:10:00	14.599.837.340	Sekretariat Daerah
		Presentase Layanan Eletrikfikasi Rumah Tangga	84.50	84,50%		90,42		96,74		100		100		100		

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
		Presentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pembangunan dan Perekonomian	0,75	75%		80%		85%		90%		90%		90%		
	SEKRETARIAT DPRD															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	96,79%	80%	143.894.263.861	85%	108.870.511.571	90%	113.417.893.929	95%	118.192.645.404	100%	123.206.134.453	100%	128.470.297.954	Sekretariat DPRD
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	- Indeks Kepuasan Masyarakat pada Lembaga DPRD		75	52.847.304.827	80	39.984.311.794	85	41.654.405.481	90	43.408.003.852	95	45.249.282.141	100%	47.182.624.345	Sekretariat DPRD
		Tingkat Efektivitas Agenda Rapat DPRD - Tingkat Penyelesaian Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)	97,64%	80%		85%		90%		95%		100%		100%		
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
	PERENCANAAN															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalisme ASN	77	78,00%	27.435.704.887	79	20.757.875.583	80	21.624.905.561	81	22.535.287.037	81	23.491.187.588	81	24.494.883.165	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
		Nilai SAKIP Bappeda	67,65	69		70,5		72		73,5		75		76,5		
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian kinerja Program	93,47%	94%	8.966.176.418	94,50%	6.783.816.027	95%	7.067.167.367	95,50%	7.364.686.274	96%	7.677.081.126	96,50%	8.005.095.721	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Renstra dengan RPJMD	100%	100%	12.592.128.018	100%	9.527.213.819	100%	9.925.153.384	100%	10.342.989.927	100%	10.781.718.298	100%	11.242.383.087	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
		Persentase Konsistensi RKPD dengan RPJMD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Konsistensi Renja PD dengan Renstra PD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Konsistensi Renja PD dengan RKPD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	KEUANGAN															
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Profesionalisme ASN			53.993.165.982		40.851.271.233		42.557.576.709		44.349.197.459		46.230.399.246		48.205.661.123	Badan Pendapatan Daerah
		Nilai SAKIP														
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian pajak daerah terhadap target yang ditetapkan	100	100	11.077.002.650	100	8.380.868.791	100	8.730.926.987	100	9.098.488.092	100	9.484.427.254	100	9.889.663.373	Badan Pendapatan Daerah
		Persentase WP terdaftar aktif terhadap total WP terdata	60,2	63,5		67,0		70,0		73,0		77,0		79,0		
		Persentase Realisasi penagihan Terhadap Piutang Pajak	64,6	65,0		62,7		64,0		66,0		67,2		68,4		
		Persentase Realisasi penerimaan PBB dan BPHTB berdasarkan Ketetapan	29,2	30,1		30,8		31,4		32,1		32,6		33,2		
	PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalisme ASN			111.556.085.093		84.403.420.450		87.928.843.629		91.630.537.967		95.517.317.023		99.598.435.031	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Nilai SAKIP														

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Kesalahan Penganggaran			1.452.821.351.155		1.099.205.760.383		1.145.118.182.486		1.193.326.225.694		1.243.944.671.062		1.297.094.038.698	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Indeks kepuasan OPD terhadap pelayanan perbendaharaan														
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				39.410.837.684		29.818.270.339		31.063.741.446		32.371.486.107		33.744.618.001		35.186.406.491	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	KEPEGAWAIAN															
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				30.375.291.498		22.981.969.092		23.941.896.617		24.949.820.519		26.008.140.616		27.119.376.718	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	- Persentase ASN yang memperoleh pengembangan karir	88%	100%	8.443.990.401	100%	6.388.729.682	100%	6.655.578.769	100%	6.935.770.311	100%	7.229.971.430	100	7.538.882.604	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		- Tingkat Pengisian Jabatan Struktural	87%	96%		95%		95%		95%		96%		97		
		- Tingkat pelanggaran disiplin ASN	0,94%	0,46%		0,34%		0,29%		0,23%		0,23%		0,22		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	- Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal	38,47%	50%	1.753.882.072	50%	1.326.988.535	50%	1.382.415.153	50%	1.440.613.102	50%	1.501.720.948	50	1.565.884.187	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai SAKIP	67%	76,40%	13.053.913.502	81%	9.876.601.074	87%	10.289.134.099	92,20%	10.722.293.775	97,40%	11.177.111.435	97,40%	11.654.669.978	Badan Riset dan Inovasi Daerah

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	DAERAH KABUPATEN/KOTA	IP ASN	76%	82%		82%		87%		92%		92%		92%		
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Riset dan Inovasi			5.318.839.994	100%	4.024.238.462	100%	4.192.325.768	100%	4.368.817.440	100%	4.554.133.694	100%	4.748.715.762	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
	INSPEKTORAT DAERAH															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalisme ASN	-	80,00	43.138.994.211	80,00	32.638.996.458	80,00	34.002.285.695	80,00	35.433.739.394	80,00	36.936.765.778	80,00	38.514.943.481	Inspektorat
		Nilai SAKIP Inspektorat	60,10	60,10		61,10		62,10		63,10		64,10		65,10		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan	86,20	87,20	15.037.049.130	88,20	11.377.043.028	89,20	11.852.247.598	90,20	12.351.212.398	91,20	12.875.125.437	92,20	13.425.234.129	Inspektorat
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Maturitas SPIP SKPD Level 3		50,00	8.425.188.081	55,00	6.374.503.833	60,00	6.640.758.725	65,00	6.920.326.361	70,00	7.213.872.379	75,00	7.522.095.698	Inspektorat
	UNSUR KEWILAYAHAN															
	KECAMATAN SANGATTA SELATAN															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	47,55	47.65	13.176.773.471	48:00:00	9.969.557.022	48:50:00	10.385.972.698	49:00:00	10.823.209.158	50	11.282.307.442	55.00	11.764.360.639	Kecamatan Sangatta Selatan
		IP ASN / indeks profesionalitas ASN	74,05	74,10		74,15		74,2		74,25		74,3		74,35		

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat yang dilayani		2%	220.098.026	11%	166.526.337	13%	173.481.930	15%	180.785.302	17%	188.453.843	19%	196.505.811	Kecamatan Sangatta Selatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir	72.17%	63.46%	11.905.083.487	65.00%	9.007.395.394	67.00%	9.383.622.807	69.00 %	9.778.661.590	71.00%	10.193.452.313	73.00 %	10.628.982.572	Kecamatan Sangatta Selatan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum	40%	40%	198.357.121	40%	150.077.152	40%	156.345.683	40%	162.927.641	40%	169.838.696	40%	177.095.305	Kecamatan Sangatta Selatan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan	90.44%	90.44%	598.789.627	90.44%	453.044.696	90.44%	471.967.795	90.44%	491.837.048	90.44%	512.699.765	90.44%	534.605.617	Kecamatan Sangatta Selatan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	33%	67%	694.497.116	100%	525.457.056	100%	547.404.727	100%	570.449.781	100%	594.647.088	100%	620.054.261	Kecamatan Sangatta Selatan
	KECAMATAN SANGATTA UTARA															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	45,8	48	14.952.874.518	50	11.313.356.450	50,55	11.785.900.914	51	12.282.072.601	51,55	12.803.052.873	52	13.350.082.158	Kecamatan Sangatta Utara
		IP ASN / indeks profesionalitas ASN	76	77		78		79		80		81		82		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat yang dilayani		100%	70.416.466		53.277.153		55.502.472		57.839.056		60.292.470		62.868.555	Kecamatan Sangatta Utara
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir	0%	100%	19.962.074.420	100,00%	15.103.320.979	100,00%	15.734.167.425	100%	16.396.556.194	100,00%	17.092.064.401	100,00%	17.822.348.019	Kecamatan Sangatta Utara
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum		50%	74.021.187	55,00%	56.004.488	60,00%	58.343.724	65%	60.799.921	70,00%	63.378.929	75%	66.086.887	Kecamatan Sangatta Utara
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan		0,001155188	94.233.648		71.297.251		74.275.246		77.402.141		80.685.381		84.132.782	Kecamatan Sangatta Utara

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik		100%	60.823.962	100%	46.019.457	100%	47.941.631	100%	49.959.914	100%	52.079.111	100%	54.304.267	Kecamatan Sangatta Utara
	KECAMATAN BENGALON															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	54,8	50	1.673.504.456	55	8.318.622.555	60	8.526.588.119	70	8.531.787.258	75	8.531.917.236	85	8.531.920.486	Kecamatan Bengalon
		IP ASN / indeks profesionalitas ASN	75	80		85		85		85		85		85		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat yang dilayani	80%	85%	32.033.497	90%	24.236.569	100,00%	25.248.899	100,00%	26.311.847	100%	27.427.941	100%	28.599.840	Kecamatan Bengalon
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir		47%	62.610.927	73%	47.371.476	75%	49.350.122	78%	51.427.700	80%	53.609.157	80%	55.899.688	Kecamatan Bengalon
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum	100,00%	100,00%	17.472.817	100,00%	13.219.947	100,00%	13.772.127	100,00%	14.351.916	100%	14.960.695	100%	15.599.913	Kecamatan Bengalon
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan	80%	85%	76.443.573	90%	57.837.267	100%	60.253.056	100%	62.789.634	100%	65.453.041	100%	68.249.619	Kecamatan Bengalon
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	95%	100%	51.763.220	100%	39.164.092	100%	40.799.926	100%	42.517.552	100%	44.321.059	100%	46.214.742	Kecamatan Bengalon
	KECAMATAN KALIORANG															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	56,65	74	6.474.751.547	74	4.898.802.039	74	5.103.418.749	74	5.318.266.296	74	5.543.856.219	74	5.780.725.639	Kecamatan Kaliorang
		IP ASN / indeks profesionalitas ASN	75	78		78		78		78		78		78		

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat yang dilayani		22 pelayanan	139.391.394	24 pelayanan	105.463.637	15 pelayanan	109.868.718	15 pelayanan	114.494.054	15 pelayanan	119.350.656	15 pelayanan	124.450.089	Kecamatan Kaliorang
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir		50%	164.189.510	50%	124.225.911	50%	129.414.668	50%	134.862.864	50%	140.583.470	50%	146.590.105	Kecamatan Kaliorang
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum		78%	121.155.001	78%	91.665.968	78%	95.494.738	78%	99.514.947	78%	103.736.167	78%	108.168.447	Kecamatan Kaliorang
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan		75%	437.252.503	75%	330.825.582	75%	344.643.745	75%	359.152.815	75%	374.387.340	75%	390.383.590	Kecamatan Kaliorang
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik		75%	318.574.002	75%	241.033.337	75%	251.100.992	75%	261.672.030	75%	272.771.619	75%	284.426.188	Kecamatan Kaliorang
	KECAMATAN MUARA WAHAU															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	57	98%	9.811.331.224	98%	7.423.260.809	98%	7.733.320.941	98%	8.058.884.080	98%	8.400.725.376	99	8.759.658.737	Kecamatan Muara Wahau
		IP ASN / indeks profesionalitas ASN														
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat yang dilayani		0	74.247.944	0	56.176.052		58.522.454		60.986.176		63.573.084		66.289.338	Kecamatan Muara Wahau
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir		95%	208.934.129	97%	158.079.724		164.682.512		171.615.440		178.895.014		186.538.567	Kecamatan Muara Wahau
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum		0	35.295.591	0	26.704.671	0	27.820.092		28.991.283		30.221.033		31.512.271	Kecamatan Muara Wahau
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan			526.209.165		398.130.262		414.759.655		432.220.518		450.554.424		469.805.025	Kecamatan Muara Wahau

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik		95%	61.421.487	95%	46.471.545	96%	48.412.602		50.450.712		52.590.727		54.837.744	Kecamatan Muara Wahau
	KECAMATAN KOMBENG															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	49	50	7.969.027.374	55	6.029.372.288	60	6.281.211.476	65	6.545.642.622	70	6.823.295.326	75	7.114.830.666	Kecamatan Kombeng
		IP ASN / indeks profesionalitas ASN	75	78		80		82		85		88		90		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat yang dilayani	70%	75%	181.472.756	76%	137.302.428	77%	143.037.375	78%	149.059.070	79%	155.381.849	80%	162.020.768	Kecamatan Kombeng
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir	70.58%	72.00%	396.042.510	0,74	299.646.070	0,76	312.161.904	0,78	325.303.530	80.01%	339.102.237	80.01%	353.590.879	Kecamatan Kombeng
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum		70%	134.944.861	100%	102.099.386	100%	106.363.947	100%	110.841.737	100%	115.543.415	100%	120.480.178	Kecamatan Kombeng
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan	70%	72%	298.290.943	73%	225.687.159	75%	235.113.823	77%	245.011.821	79%	255.404.719	80%	266.317.261	Kecamatan Kombeng
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	71%	73%	206.598.304	0,75	156.312.437	77%	162.841.408	78%	169.696.828	80%	176.895.018	80.05%	184.453.118	Kecamatan Kombeng
	KECAMATAN MUARA ANCALONG															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	41,9	53,00%	5.270.709.389	55	3.987.822.809	58	4.154.389.079	61	4.329.283.663	63	4.512.922.977	65	4.705.744.256	Kecamatan Muara Ancalong
		IP ASN / indeks profesionalitas ASN														

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat yang dilayani		50%	88.039.211	55%	66.610.535	60%	69.392.772	65%	72.314.121	70%	75.381.537	75%	78.602.324	Kecamatan Muara Ancalong
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir		15%	4.762.033.395	79%	3.602.958.158	80%	3.753.449.123	82%	3.911.464.636	84%	4.077.380.925	86%	4.251.593.029	Kecamatan Muara Ancalong
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%		79.342.849	100%	60.030.861	100%	62.538.273	100%	65.171.056	100%	67.935.478	100%	70.838.122	Kecamatan Muara Ancalong
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan			239.515.851	60%	181.217.878	65%	188.787.118	70%	196.734.819	75%	205.079.906	80%	213.842.247	Kecamatan Muara Ancalong
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik		50%	277.798.846	75%	210.182.822	80%	218.961.891	85%	228.179.912	90%	237.858.835	95%	248.021.704	Kecamatan Muara Ancalong
	KECAMATAN BATU AMPAR															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	59,5		1.020.498.919		5.248.887.755		5.380.109.949		5.383.390.492		5.383.472.517		5.383.474.568	Kecamatan Batu Ampar
		IP ASN / indeks profesionalitas ASN														
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat yang dilayani		24	28.023.417	26	21.202.539		22.088.142		23.018.025		23.994.403		25.019.599	Kecamatan Batu Ampar
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir		0,95	39.232.784	0,97	29.683.555		30.923.399		32.225.235		33.592.164		35.027.438	Kecamatan Batu Ampar
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum		0	20.550.506	0	15.548.529		16.197.971		16.879.885		17.595.895		18.347.706	Kecamatan Batu Ampar
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan			94.345.504		71.381.882		74.363.412		77.494.018		80.781.155		84.232.649	Kecamatan Batu Ampar

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik		0,95	73.234.530	0,98	55.409.302		57.723.678		60.153.773		62.705.372		65.384.551	Kecamatan Batu Ampar
	KECAMATAN TELEN															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	48,6	50	954.562.553	55	4.830.760.786	60	4.951.529.806	65	4.954.549.031	70	4.954.624.512	75	4.954.626.399	Kecamatan Telen
		IP ASN / indeks profesionalitas ASN	75	78		80		82		85		88		90		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat yang dilayani	70%	75%	31.477.495	76%	83.815.897	77%	24.810.657	78%	25.855.155	79%	26.951.877	80%	28.103.436	Kecamatan Telen
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir	70.58%	72.00%	38.858.968	0,74	99.400.725	0,76	30.628.756	0,78	31.918.188	80.01%	33.272.092	80.01%	34.693.692	Kecamatan Telen
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum		70%	25.575.465	100%	119.350.417	100%	20.158.659	100%	21.007.313	100%	21.898.400	100%	22.834.042	Kecamatan Telen
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan	70%	72%	63.479.616	73%	78.028.726	75%	50.034.825	77%	52.141.229	79%	54.352.952	80%	56.675.262	Kecamatan Telen
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	71%	73%	34.342.997	0,75	125.983.938	77%	127.069.254	78%	28.208.836	80%	29.405.396	80.05%	30.661.785	Kecamatan Telen
	KECAMATAN BUSANG															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	36,7	51	5.325.384.374	54,3	4.029.189.945	60,75	4.197.484.068	64,35	4.374.192.898	70,3	4.559.737.168	70	4.754.558.653	Kecamatan Busang
		IP ASN / indeks profesionalitas ASN		78		80		82		84		86		86		

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat yang dilayani	60%	65%	158.168.393	70%	119.670.329	75%	124.668.806	80%	129.917.207	85%	135.428.028	85%	141.214.389	Kecamatan Busang
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir	35%	45%	158.932.253	55%	120.248.265	65%	125.270.882	70%	130.544.630	75%	136.082.064	75%	141.896.371	Kecamatan Busang
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum	74%	78%	109.607.217	80%	82.928.905	84%	86.392.740	87%	90.029.766	90%	93.848.643	90%	97.858.465	Kecamatan Busang
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan	55%	60%	211.605.234	65%	160.100.684	74%	166.787.885	78%	173.809.446	85%	181.182.086	85%	188.923.357	Kecamatan Busang
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	60%	65%	160.553.695	70%	121.475.050	80%	126.548.908	85%	131.876.459	90%	137.470.387	90%	143.344.012	Kecamatan Busang
	KECAMATAN TELUK PANDAN															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	36,9	36,95	8.104.578.844	37	6.131.930.636	37,05	6.388.053.554	37,1	6.656.982.619	37,2	6.939.358.137	37	7.235.852.431	Kecamatan Teluk Pandan
		IP ASN / indeks profesionalitas ASN	76	76		76,15		76,2		76,25		76,3		76		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat yang dilayani		93%	52.129.726	94%	39.441.391	95%	41.088.808	96%	42.818.595	97%	44.634.872	98%	46.541.962	Kecamatan Teluk Pandan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir		55%	269.078.301	60%	203.584.851	65%	212.088.330	70%	221.016.984	75%	230.392.070	80%	240.235.910	Kecamatan Teluk Pandan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum		78%	115.257.008	81%	87.203.542	84%	90.845.922	88%	94.670.422	92%	98.686.147	96%	102.902.658	Kecamatan Teluk Pandan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan		75%	473.556.597	79%	358.293.288	83%	373.258.742	87%	388.972.468	91%	405.471.880	95%	422.796.264	Kecamatan Teluk Pandan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik		65%	171.776.272	73%	129.966.061	78%	135.394.577	82%	141.094.519	87%	147.079.459	97%	153.363.645	Kecamatan Teluk Pandan
	KECAMATAN RANTAU PULUNG															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	59,3	80	1.815.464.605	83,5	1.373.581.927	86,25	1.430.954.691	89,45	1.491.196.094	91,3	1.554.449.567	94.50	1.620.865.714	Kecamatan Rantau Pulung
		IP ASN / indeks profesionalitas ASN		82		87		90		92		95		97		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat yang dilayani		13 pelayanan	53.769.067	15 pelayanan	40.681.718	15 pelayanan	42.380.942	15 pelayanan	44.165.126	15 pelayanan	46.038.520	15 pelayanan	48.005.584	Kecamatan Rantau Pulung
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir		81%	4.049.181.890	85%	3.063.614.156	88%	3.191.577.411	90%	3.325.938.828	95%	3.467.018.316	98%	3.615.151.778	Kecamatan Rantau Pulung
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum		78%	50.600.556	83%	38.284.420	88%	39.883.512	92%	41.562.558	96%	43.325.556	96%	45.176.704	Kecamatan Rantau Pulung
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan		75%	123.984.284	80%	93.806.606	84%	97.724.788	89%	101.838.879	94%	106.158.675	94%	110.694.461	Kecamatan Rantau Pulung
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik		87%	31.250.763	90%	23.644.352	92%	24.631.946	95%	25.668.920	97%	26.757.743	98%	27.901.007	Kecamatan Rantau Pulung
	KECAMATAN KAUBUN															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	40,9	52,9	865.051.318	54,85	4.665.546.937	58,7	4.782.185.610	60,8	4.785.101.577	65,9	4.785.174.476	70,9	4.785.176.299	Kecamatan Kaubun
		IP ASN / indeks profesionalitas ASN		79		80		80		85		85		87		

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat yang dilayani		89%	25.344.121	90%	79.175.382	95%	19.976.313	97%	20.817.291	97%	21.700.317	99%	22.627.495	Kecamatan Kaubun
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir		95%	21.935.446	0,97	86.596.376	98%	17.289.585	98%	18.017.455	98%	18.781.718	98%	19.584.195	Kecamatan Kaubun
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum			13.740.783		100.396.287		10.830.527		11.286.479		11.765.228		12.267.915	Kecamatan Kaubun
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan		70%	141.114.341	85%	106.767.219	0%	111.226.750	0%	115.909.257	0%	120.825.889	0%	125.988.353	Kecamatan Kaubun
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik		42%	81.111.084	57%	111.368.709	57%	63.932.002	71%	66.623.459	85%	69.449.489	100%	72.416.821	Kecamatan Kaubun
	KECAMATAN SANGKULIRANG															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	63,65	59,7	7.629.965.835	60,2	5.772.838.065	60,7	6.013.962.145	61,2	6.267.142.429	61,7	6.532.981.728	62,2	6.812.112.991	Kecamatan Sangkulirang
		IP ASN / indeks profesionalitas ASN		76		77		78		79		80		80		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat yang dilayani		60	38.764.163	61	29.328.996	62	30.554.031	63	31.840.317	64	33.190.918	65	34.609.049	Kecamatan Sangkulirang
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir		62	238.493.023	62	180.444.006	65	187.980.922	68	195.894.683	70	204.204.133	72	212.929.055	Kecamatan Sangkulirang
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum		100	61.763.698	100	46.730.462	100	48.682.333	100	50.731.799	100	52.883.737	100	55.143.273	Kecamatan Sangkulirang
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan		70	254.359.846	70	192.448.857	73	200.487.200	75	208.927.460	78	217.789.733	80	227.095.120	Kecamatan Sangkulirang

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik		70	197.498.788	70	149.427.736	71	155.669.142	72	162.222.618	73	169.103.768	74	176.328.976	Kecamatan Sangkulirang
	KECAMATAN MUARA BENGKAL															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	45	50	11.712.484.790	55	8.861.675.071	60	9.231.815.931	70	9.620.463.835	75	10.028.544.134	85	10.457.028.448	Kecamatan Muara Bengkal
		IP ASN / indeks profesionalitas ASN	75	80		85		85		85		85		85		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat yang dilayani	80%	85%	70.013.273	90%	52.972.097	100,00%	55.184.673	100,00%	57.507.879	100%	59.947.245	100%	62.508.580	Kecamatan Muara Bengkal
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir		47%	562.402.743	73%	425.514.351	75%	443.287.543	78%	461.949.394	80%	481.544.337	80%	502.119.028	Kecamatan Muara Bengkal
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum	100,00%	100,00%	89.618.594	100,00%	67.805.498	100,00%	70.637.647	100,00%	73.611.404	100%	76.733.848	100%	80.012.415	Kecamatan Muara Bengkal
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan	80%	85%	360.184.222	90%	272.515.661	100%	283.898.293	100%	295.850.056	100%	308.399.407	100%	321.576.226	Kecamatan Muara Bengkal
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	95%	100%	219.330.105	100%	165.945.327	100%	172.876.652	100%	180.154.543	100%	187.796.328	100%	195.820.203	Kecamatan Muara Bengkal
	KECAMATAN LONG MESANGAT															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	40,9	52,9	7.822.175.078	54,85	5.918.263.727	58,7	6.165.462.052	60,8	6.425.020.293	65,9	6.697.556.446	70,9	6.983.719.406	Kecamatan Long Mesangat
		IP ASN / indeks profesionalitas ASN	77	79		80		80		85		85		87		

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat yang dilayani		89%	124.975.665	90%	94.556.685	95%	98.506.197	97%	102.653.185	97%	107.007.522	99%	111.579.576	Kecamatan Long Mesangat
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir		95%	433.248.973	0,97	327.796.509	98%	341.488.151	98%	355.864.375	98%	370.959.410	98%	386.809.197	Kecamatan Long Mesangat
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum			124.975.665		94.556.685		98.506.197		102.653.185		107.007.522		111.579.576	Kecamatan Long Mesangat
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan		70%	514.367.145	85%	389.170.581	0%	405.425.739	0%	422.493.656	0%	440.414.968	0%	459.232.346	Kecamatan Long Mesangat
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik		42%	166.634.221	57%	126.075.580	57%	131.341.597	71%	136.870.913	85%	142.676.696	100%	148.772.768	Kecamatan Long Mesangat
	KECAMATAN KARANGAN															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	56,35	76	4.556.863.630	76	3.447.726.554	77	3.591.733.693	77	3.742.941.189	78	3.901.709.060	78	4.068.415.325	Kecamatan Karangan
		IP ASN / indeks profesionalitas ASN		58,5		60		60		60,35		60,35		61		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat yang dilayani	60%	75%	113.529.491	80%	85.896.501	80%	89.484.288	85%	93.251.465	85%	97.207.000	90%	101.360.312	Kecamatan Karangan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir	3%	71%	225.076.543	73%	170.293.087	75%	177.406.012	77%	184.874.583	79%	192.716.583	81%	200.950.683	Kecamatan Karangan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum	77%	79%	117.243.531	100%	88.706.547	84%	92.411.706	86%	96.302.123	88%	100.387.061	90%	104.676.246	Kecamatan Karangan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan	60%	60%	235.361.523	0%	178.074.711	65%	185.512.664	70%	193.322.515	70%	201.522.859	75%	210.133.220	Kecamatan Karangan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	78%	80%	110.645.052	82%	83.714.132	84%	87.210.764	86%	90.882.229	88%	94.737.266	90%	98.785.055	Kecamatan Karangan
	KECAMATAN SANDARAN															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	49,05	52	4.414.079.468	55	3.339.695.947	57	3.479.190.786	58	3.625.660.366	61	3.779.453.425	61	3.940.936.138	Kecamatan Sandaran
		IP ASN / indeks profesionalitas ASN	62	65		67		68		69		70		75		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat yang dilayani		47%	149.823.350	47%	113.356.462	49%	118.091.217	51%	123.062.710	52%	128.282.777	53%	133.763.847	Kecamatan Sandaran
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir		76%	592.224.892	79%	448.077.812	84%	466.793.451	92%	486.444.871	96%	507.078.863	100%	528.744.554	Kecamatan Sandaran
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum		35%	96.894.665	40%	73.310.579	45%	76.372.668	50%	79.587.862	55%	82.963.816	55%	86.508.567	Kecamatan Sandaran
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan		38%	614.841.319	39%	465.189.418	41%	484.619.787	43%	505.021.674	44%	526.443.655	45%	548.936.735	Kecamatan Sandaran
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik		44%	256.387.471	56%	193.982.960	67%	202.085.380	78%	210.592.922	89%	219.525.841	100%	228.905.406	Kecamatan Sandaran
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai Sakip			3.109.004.742		2.352.275.397		2.450.526.939		2.553.691.058		2.662.013.384		2.775.751.825	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	DAERAH KABUPATEN/KOTA	IP ASN / indeks profesionalitas ASN														
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Konflik Sosial	0	0	7.678.415.970	0	5.809.495.474	0	6.052.150.688	0	6.306.938.662	0	6.574.466.035	0	6.855.369.776	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kutai Timur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANANEKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase ASN dan Forum yang mendapatkan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial,Budaya dan Agama yang bersih dari narkoba	60,28%	2,45%	2.402.954.046	27,00%	1.818.076.894	52,78%	1.894.015.646	79,78%	1.973.751.336	100%	2.057.473.810	100%	2.145.382.408	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	128%	28%	1.054.882.845	30%	798.125.178	50%	831.461.848	70%	866.465.352	100%	903.219.031	100%	941.810.394	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase sekolah dan Forum yang mendapatkan pembinaan penguatan ideologi Pancasila, Karakter Kebangsaan dan Bela Negara	100%	20,53%	7.247.827.332	40,40%	5.483.711.777	60,26%	5.712.759.421	80,13%	5.953.259.447	100%	6.205.784.475	100%	6.470.935.754	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGANETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pembinaan pendidikan politik di wilayah Kutai Timur	72%	11,20%	3.003.919.728	28%	2.272.767.995	33,50%	2.367.698.614	39%	2.467.375.764	100%	2.572.036.772	100%	2.681.930.830	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			TOTAL		**7.655.313.956.713**		**6.383.224.200.000**		**6.648.381.424.950**		**6.926.796.511.148**		**7.219.132.351.655**		**7.526.084.984.188**	
			KAPASITAS FISKAL		**7.655.313.956.713**		**6.383.224.200.000**		**6.648.381.424.950**		**6.926.796.511.148**		**7.219.132.351.655**		**7.526.084.984.188**	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Perangkat Daerah
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
DEFISIT/SURPLUS					-		-		-		-		-		-	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. IKU disusun untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pemerintah daerah berorientasi pada hasil (*outcome-oriented*) serta mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah secara terukur dan akuntabel. Penetapan IKU dilakukan dengan memperhatikan prinsip keterukuran, relevansi, dan keselarasan terhadap dokumen perencanaan nasional dan provinsi, termasuk indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta Sustainable Development Goals (SDGs). IKU juga dirancang agar dapat diukur secara berkala melalui sistem pelaporan yang terintegrasi dalam kerangka evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Dengan demikian, IKU tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintah daerah, tetapi juga sebagai panduan dalam pengambilan keputusan berbasis data (*evidence-based policy*), sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan menuju Kutai Timur yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada RPJMD Kutai Timur 2025-2029, sebagai berikut:

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,18	76,6	77,02	77,45	77,87	78,29
2	PDRB per kapita	juta Rp	366,53	389,99	414,94	441,49	469,74	499,8
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	10	10,30	10,60	10,89	11,19	11,9

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	72 (BB)	73 (BB)	75 (BB)	77 (BB)	78 (BB)	80 (BB)
5	Rasio gini	Indeks	0,278–0,283	0,271-0,281	0,264-0,279	0,257-0,277	0,250-0,275	0,243–0,273
6	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	61,66	63,5	65,33	67,16	69	70,83
7	Indeks Daya Saing Daerah	indeks	3,25-3,45	3,33-3,53	3,41-3,61	3,49-3,69	3,58-3,78	3,67-3,87
8	Tingkat Kemiskinan	%	7,93–8,14	7,16-7,55	6,38-6,97	5,61-6,38	4,83-5,80	4,06–5,21
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,44–5,51	5,21-5,31	4,98-5,10	4,76-4,90	4,53-4,70	4,30–4,50

4.2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)

Indikator kinerja penyelenggaran Pemerintah Daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 4 (empat) aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum. Adapun indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah seperti dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Indeks kualitas lingkungan hidup	angka	78,88	79,05	79,33	79,39	79,56	79,73
2	Indeks Risiko Bencana (IRB)	angka	166,36	159,36	152,36	145,36	138,36	131,36
3	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	angka	0,46	0,49	0,53	0,56	0,6	0,63
4	Akses air minum layak	%	58-60	62	64	66	68	70
5	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	52,65	55,02	57,39	59,75	62,12	64,49
6	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	55	56,75	58,5	60,25	62	63,75
7	Konsumsi Listrik per Kapita / Persentase Rumah Tangga Teraliri listrik atau rasio elektrifikasi	%	90,53	92,42	94,32	96,21	98,11	100
8	Kapasitas Air Baku	satuan	0,65	0,66	0,67	0,68	0,68	0,69
9	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	angka	83,6	84,14	84,68	85,22	85,76	86,3
10	Persentase Penurunan Emisi GRK:							
	- Kumulatif	%	20,47	22,04	23,61	25,17	26,74	28,31
	- Tahunan	%	26,31	29,75	33,19	36,62	40,06	43,5
11	Rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	98	100				
12	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	7,58	7,216	6,852	6,488	6,124	5,76
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	tahun	74,33	74,79	75,25	75,71	76,16	76,61
2	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	jiwa	10	10	9	9	8	7
3	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	21	20,44	20,08	19,57	19,05	18,54
4	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	80	80,75	81,5	82,25	83	83,75
5	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	90	90,45	90,9	91,35	91,8	92,25
6	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	98	98,2	98,4	98,6	98,8	99

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	Total Fertility Rate (Angka kelahitan total)	indeks						
8	Jumlah kematian balita	indeks						
9	Prevalensi stunting	%						
10	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%						
11	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%						
12	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%						
13	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%						
14	Literasi Membaca SD/Sederajat (%)	%	56	57,2	58,41	59,61	60,81	62,01
15	Literasi Membaca SMP/Sederajat (%)	%	70	70,25	70,51	70,76	71,01	71,26
16	Numerasi SD/Sederajat (%)	%	50-55	56,51	58,03	59,54	61,05	62,56
17	Numerasi SMP/Sederajat (%)	%	62-65	65,55	66,1	66,65	67,2	67,75
18	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (Tahun)	tahun	9,49	9,51	9,53	9,55	9,57	9,59
19	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	tahun	13,03	13,04	13,05	13,06	13,07	13,08
20	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	%	12,5	13,53	14,66	15,79	16,92	18,05
21	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	72	73,32	74,59	75,86	77,13	78,4
22	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja	%	NA	42	44	46	48	50
23	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	Nilai 0-100	64,47	65,73	67	68,26	69,53	70,79
24	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	angka	0,51	0,49	0,47	0,46	0,44	0,42
25	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	52.05.00	53,38	54,25	55,13	56	56,87
26	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	53,95	55,65	57,34	59,04	60,73	62,43
27	Proporsi anggaran IPTEK dan Inovasi terhadap APBD	%	00.15	0,32	0,49	0,66	0,83	1
28	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	90	90,5	91	91,5	92	92,5
29	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	67,89	69,4974	71,1028	72,7082	74,3136	75,92
30	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	31	32,06	33,05	34,04	35,04	36,03
31	Indeks Desa Membangun (IDM)	angka	0,75	0,77	0,78	0,8	0,81	0,82

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Tingkat Kemiskinan	%	7,93–8,14	7,16-7,55	6,38-6,97	5,61-6,38	4,83-5,80	4,06–5,21
33	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,44–5,51	5,21-5,31	4,98-5,10	4,76-4,90	4,53-4,70	4,30–4,50
34	Persentase Desa Mandiri	%	21,58	24,46	27,34	31,65	35,97	
35	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	%	11	14,8	18,6	22,4	26,2	30
36	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	%	9,5	13,6	17,7	21,8	25,9	30
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	rasio	3,45	4,97	6,48	8	9,52	11,04
2	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	4,56	5,06	6,9	8,74	10,58	12,42
3	Proporsi PDRB Sektor Non-Tambang	%	25,06	25,66	26,91	27,56	28,22	28,88
4	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	rasio	00.30	0,36	0,42	0,48	0,54	0,6
5	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	orang	1500	1.581	1.662	1.744	1.825	1.906
6	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	orang	85-90	156,74	227,46	298,19	368,91	439,64
7	Presentase Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	%	13,18	14,53	15,71	16,76	17,69	18,52
8	Rasio Kewirausahaan Daerah	rasio	3,47	3,67	3,87	4,08	4,28	4,48
9	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	rasio	0,28-0,30	0,52	0,76	0,99	1,23	1,47
10	Return on Aset (ROA) BUMD	indeks	1	1,18	1,36	1,54	1,72	1,9
11	Indeks Inovasi Daerah	indeks	15 - 25	27	28	30	32	33,75
12	Persentase peningkatan luas ANKT	%		0,08	0,09	0,09	0,1	0,1
13	Persentase Pengguna Internet dalam 3 bulan terakhir	%	82	83	84	85	86	87
14	Ekspor Barang dan Jasa	%	73-80	80,25	80,5	80,75	81	81,25
15	Proporsi Nilai Ekspor terhadap PDRB	%	70,99	71,69	72,39	73,09	73,79	74,49
16	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi	%	70-72	73,206	74,41	75,62	76,82	78,02
17	Rasio tenaga terampil yang memiliki sertifikat kompetensi	rasio	14	15	17	18	20	22
18	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	rasio	0,1	0,22	0,34	0,46	0,58	0,7
19	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	11,32	14,645	17,97	21,29	24,61	27,94

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
20	Total Kredit/PDRB	%	1,15	4,559	7,97	11,37	14,78	18,19
21	Proporsi PDRB Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi	%	0,18	0,19	0,21	0,22	0,24	0,26
22	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur*	angka	7,89–8,01	8,01–8,13	8,13–8,26	8,26–8,38	8,38–8,50	8,50–9,00
23	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)	angka	48,41	50,27	52,2	54,2	56,28	58,44
24	Jumlah Pendaftar OSS tahunan	dok	3.800	3.860	3.920	3.980	4.040	4.100,00
25	Indeks Ketahanan Pangan	angka	64,22	66,9	69,7	72,62	75,66	78,82
26	Indeks Zakat Nasional	indeks	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78	0,80
27	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	%	19,24	18,92	18,6	18,28	17,96	17,64
28	Persentase Penduduk Bekerja 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja di Sektor Formal	%	53,95	55,65	57,34	59,04	60,73	62,43
29	Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke atas yang pernah menggunakan internet selama 3 bulan terakhir	%	82	83	84	85	86	87
30	Disparitas Harga	%	7,1	6,68	6,26	5,84	5,42	5
31	Indeks Daya Saing Daerah	indeks	3,25-3,45	3,33-3,53	3,41-3,61	3,49-3,69	3,58-3,78	3,67-3,87
ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Indeks Pemerintahan Digital	indeks						
2	Indeks Pelayanan Publik	angka	2,48	2,61	2,73	2,86	2,98	3,11
3	Indeks Integritas Pemerintah	angka	62,13	65,11	68,08	71,05	74,03	77
4	Nilai SAKIP	angka	63,4	66,72	70,04	73,36	76,68	80
5	Persentase Penegakan Perda**	%	73,99	74,79	75,6	76,4	77,2	78,01
6	Jumlah kejadian tindak kriminal	kasus	526	500	473	447	421	394,5
7	Indeks Akses Keuangan Daeah (IKAD)	angka	4,97	5,01	5,03	5,06	5,08	5,1
8	Jumlah Kejadian Konflik SARA	kasus	0	0	0	0	0	0
INDIKATOR KINERJA KUNCI								
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							
1	Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 Tahun	angka	68,51	71,72	74,76	77,8	80,84	80,84

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar 7-15 Tahun	angka	100	100	100	100	100	100
3	Angka Partisipasi Sekolah Kesetaran 7-18 Tahun	angka	37,38	42,36	47,34	52,31	57,29	5729
4	Proporsi PTK Bersertifikat SD	%	40,7	45,7	50,7	55,7	60,7	65,7
5	Proporsi PTK Bersertifikat SMP	%	40,6	45,6	50,6	55,6	60,6	65,6
6	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	%	100	100	100	100	100	1
7	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai						
8	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai						
9	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai						
10	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai						
11	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%						
12	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	%						
13	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	Nilai						
14	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	Nilai						
15	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	Nilai						
16	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	Nilai						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1	Persentase ketersediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama	%	95	95	95	95	95	95
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki ketersediaan minimal 40% alat kesehatan esensial	%	38	48	62	76	90	100
3	Persentase kematian akibat penyakit menular dan tidak menular pada pasien yang telah mendapatkan perawatan sesuai standar	%	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
4	Angka kematian ibu	angka	122	109	97	86	77	70
5	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi minimal madya	%	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang sesuai standar	%	89	90	93	93	93	94
7	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi.	%	72	75	80	83	85	90
8	Persentase Posyandu Siklus Hidup	%	10	32	48	64	69	80
9	Peringkat Kelulusan Akreditasi	kategori	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
10	Persentase Pengembangan SIM RS	%	68,2	72,7	77,2	81,8	86,3	90,9
11	NDR (Net Death Rate) yanmed	angka	25/1000	25/1000	25/1000	25/1000	25/1000	25/1000
12	LOS (Length of Stay)	angka	3 SD 9 HARI	3 SD 9 HARI	3 SD 9 HARI	3 SD 9 HARI	3 SD 9 HARI	3 SD 9 HARI
13	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	%						
14	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%						
15	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%						
16	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%						
17	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%						
18	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%						
19	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%						
20	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%						
21	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%						
22	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%						
23	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%						
24	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%						
25	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	%						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	38	47	56	63	70	70
2	Capaian Akses Air Minum Layak	%	53,95	62,28	64,78	66,88	68,08	68,08
3	Persentase Infrastruktur Pengelolaan Sampah Perkotaan	%	93,08	42,8	45,5	48,3	50,8	50,8
4	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah Domestik	%	77,36 (Aman 2,6)	0,77	1,03	1,28	3,08	3,08
5	Cakupan wilayah saluran drainase rawan genangan air /Banjir	%	69	76	82	85	85	85
6	Persentasi Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	%						
7	Persentasi Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	60,64	64,55	67,77	70,07	74,97	74,97
8	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	0,35	41,94	42,57	43,22	43,89	43,89
9	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	%	38,49	42,57	46,03	48,95	51,61	51,61
10	Rasio Tenaga Terampil yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	rasio	14	15	17	18	20	22
11	Persentase Wilayah Pemanfaatan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	%	64,165	72,5	80,85	89,15	97,5	97,5
12	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	%						
13	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	%						
14	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	%						
15	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%						
16	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%						
17	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%						
18	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	%						
19	Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%						

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
20	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	hari						
21	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1	Persentase penyediaan / rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan korban terdampak relokasi program pemerintah kab/kota	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 ha di kabupaten	%	37,46	36,95	36,31	35,54	34,65	34,65
3	Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh yang ditangani	%	0,25	13	32,51	55,27	81,27	100
4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	31	32	40	43	48	51
5	Presentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	%	0	20	40	60	80	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1	Indeks Risiko Bencana (IRB)	angka	166,36	159,36	152,36	145,36	138,36	131,36
2	Tingkat Waktu Tanggap (Time Respon Limit) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	97,83	97,83	97,83	98,83	98,83	98,83
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
4	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%						
6	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%						
7	Jumlah PPNS pada Satpol PP	orang						
8	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	%						

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	%						
10	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	%						
11	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%						
12	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%						
13	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%						
14	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%						
15	Persentase penanganan pra bencana	%						
16	Persentase penanganan pasca bencana	%						
17	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%						
18	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
1	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	06.64	22.18	46.12	76.01	100	100
2	Persentase warge negara migran korban tindak kekerasan yang mendapat penanganan	%	20	40	60	80	100	100
3	Persentase PMKS yang mendapat rehabilitasi Sosial	%	09.43	100	100	100	100	100
4	Cakupan anak - anak terlantar yang mendapatkan perlindungan	%	100	100	100	100	100	100
5	Cakupan fakir miskin yang mendapatkankan pelatihan untuk pengembangan usaha	%	17.63	35.26	52.89	70.53	100	100
6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	20	40	60	80	100	100
7	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%						
8	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%						

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%						
10	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%						
11	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	%						
12	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	%						
13	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%						
14	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	%						
15	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%						
16	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDSyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%						
17	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%						
18	Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%						
19	Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%						
20	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	%						
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	16,6	19,97	26,58	38,92	49,67	66,56
2	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki ketrampilan /Kompetensi	%	89,65	90,54	91,45	92,36	93,29	94,22

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Persentase Tenaga Kerja terdaftar yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	%	24,35	26,74	30,95	37,62	48,01	64,34
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak (PP/PKB, LKS Biparfis, Struktur Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagkerjaan)	%	66,36	73,16	76,82	80,66	84,69	93,38
5	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/ Orang	542,27	571,85	603,51	637,07	672,67	705,09
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	79,1	79,45	80,00	80,15	80,5	80,5
2	Rasio KDRT	angka	0,006	0,005	0,004	0,003	0,002	0,001
3	Sistem Data Gender dan Anak (SIGA)	dokumen	2	2	2	2	2	2
4	Kabupaten/Kota Layak Anak	kategori	Nindia	Utama	Utama	Utama	Paripurna	Paripurna
5	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	angka	0,031	0,031	0,03	0,029	0,028	0,027
6	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	indeks						
7	Persentase ARG Daerah	%						
8	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	%						
9	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif	%						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	%	78.00	81.00	84.00	87.00	90.00	93.00
2	Skor pola pangan harapan	angka	89.00	91.20	93.40	95.60	97.80	100.00
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	13.00	12.00	11.00	10.00	09.00	09.00
4	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	97.00	97.50	98.00	98.50	99.00	99.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							
1	Tingkat Penyelesaian Sengketa Tanah	%	100	100	100	100	100	100
2	Tingkat Penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untk pembangunan	%	50	80	90	95	100	100
3	Presentase Administrasi Penetapan Tanah Ulayat	%	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Tingkat Pemanfaatan Tanah Kosong	%	100	100	100	100	100	100
5	Presentase Administrasi Penggunaan dan Penatagunaan Tanah	%	100	100	100	100	100	100
6	Tingkat Penyelesaian Pengurusan Hak Atas Tanah	%	20	40	60	80	100	100
7	Persentase Penyelesaian Pemetaan	%	20	40	60	80	100	100
8	Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran	%						
9	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	%						
10	Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran	%						
11	jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran	%						
12	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	%						
13	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	%						
14	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%						
15	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota	%						
16	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB	%						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
1	Cakupan penyediaan Dokumen Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	8500	86	87	88	89	90
3	Jumlah luasan penanaman Daerah Tangkapan Air	ha	30	30	30	30	30	30
4	Persentase Persetujuan Rincian Teknis TPS LB3	%	8	6	6	5	5	5

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	laporan	85	90	95	100	105	105
6	Presentase MHA yang diakui	%	20	20	20	20	20	20
7	Cakupuan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang diberikan kepada masyarakat	%	9	20	23	27	31	35
8	Cakupan Masyarakat yang mendapat Penghargaan LH	orang	4	6	8	10	12	14
9	Presentase Kasus LH yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100
10	Persentase Capaian Pengelolaan Persampahan	%	41,92	41,99	42,5	45	50	55
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/Kota	nilai						
12	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	%						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
1	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) DALAM Pelayanan Adminduk	%	62	55	70	80	99	100
2	Persentase Anak Berusia 0-4 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran	%	99	97	97,5	98	98,5	99
3	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawian bagi Penduduk yang menikah	%	100	63	63,5	64	64,5	65
4	Persentase Kepemilikan Akta Kematian bagi Penduduk yang meninggal	%	100	65,5	67	67,5	68	69
5	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Cerai bagi Penduduk yang bercerai	%	100	63	63,5	64	64,5	65
6	Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP	%	30	20	18,5	16,5	14,5	13
7	- Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan - Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	%	2	100	100	100	100	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
1	Cakupan Kerjasama Desa yang Telah Ditindaklanjuti	%	10	18	27	37	45	53
2	Tingkat Digitalisasi Administrasi Desa	%	68	75	80	85	95	100
3	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif(%)	%	91,12	93	96	98	100	100

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Persentase peningkatan status desa mandiri	%						
5	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%						
6	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%						
7	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga emasyarakatan Desa	%						
8	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	3.9	3.8	3.7	4	4	3
2	Angka Kelahiran total (Total fertilitaty rate/ TFR)	%	2.02 Anak	2.24 Anak	2.23 Anak	2.22 Anak	2.21 Anak	2.2 Anak
3	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%						
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%						
5	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15 -19 tahun						
6	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai 0-100	64,47	65,73	67	68,26	69,53	70,79
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							
1	Rasio Fatalitas Kecelakaan	%	20	20	20	20	20	20
2	Persentase Orang dan Barang Yang Melalui Transportasi Darat	%	10	10	10	10	10	10
3	Persentase Orang dan Barang Yang Melalui Pelabuhan/Dermaga	%	10	10	10	10	10	10
4	Cakupan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Perkeretaapian			1 Dok				
5	Konektivitas Kabupaten/Kota	rasio						
6	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	%						
7	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	58,57	68,96	79,21	89,6	100	100
2	Cakupan Layanan Informasi	kecamatan	8	10	10	10	18	18
3	Persentase sistem informasi yang terintegrasi dengan aplikasi layanan publik	%	80	80	80	85	90	95
4	Cakupan akses internet desa	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%						
6	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%						
7	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							
1	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	%	25,26	28,88	31,77	34,95	38,44	160,29
2	Persentase koperasi aktif	%	43,66	44,3	44,93	45,54	46,13	46,13
3	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	4,37	10,22	9,97	9,72	9,49	47,47
4	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	45,63	46,51	47,67	48,78	50,16	50,16
5	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	%	13,71	12,43	12,12	11,86	11,86	51,2
6	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	%	1	1	1	1	1	1
7	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%						
8	Pertumbuhan Wirausaha	%						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							
1	Fasilitas/Kemudahan di Bidang Penanaman Modal.	%	100	100	100	100	100	100
2	Pengembangan usaha Penanaman Modal melalui Pembinaan Penanaman Modal	%	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah promosi yang diikuti	dokumen	6	3	4	4	4	4
4	Jumlah Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang diterbitkan	izin	3.500	3.750	4.000	4.250	4.500	4750
5	Jumlah Realisasi Investasi PMDN dan PMA	triliun	9,6	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Jumlah Data yang dikelola	izin	3.500	3.750	4.000	4.250	4.500	4750
7	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%						
8	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	67,36	68,75	69,44	70,13	70,83	71,53
2	Cakupan pembinaan olahraga	%	45	58,33	61,66	65	70	75
3	Presentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif.	%	32,98	34,02	35,05	36,08	37,11	38,14
4	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	%						
5	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							
1	Presentase OPD yang menyediakan Data Statistik Sektoral	%	80	90	100	100	100	100
2	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	poin						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100
2	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							
1	Persentase pelaksanaan event Kebudayaan	%	20	40	60	80	100	100
2	Penyelenggaraan Festival Seni	%	20	40	60	80	100	100
3	Presentase Sarana dan Prasarana Sejarah yang dipetakan	%	20	40	60	80	100	100
4	Presentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	12,1	13,6	15	17	18	19
5	Presentase Koleksi museum yang dikelola dengan baik	%	16,67	22,73	28,79	34,85	40,91	46,97
6	Jumlah museum yang terbangun	%	13	27	47	67	100	100
7	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	%						
8	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	%						

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifkasi profesi dibidang kebudayaan	%						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							
1	Presentase Perpustakaan yang berstandar nasional	%	3,12	3,67	4,22	4,77	5,32	5,87
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakt (IPLM)	nilai						
3	Nlai Kegemaran Membaca Masyarakat	nilai						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							
1	Persentase perangkat Daerah Yang Telah Menerapkan arsip sesuai aturan	%	24,07	29,63	37,04	44,44	50	55,56
2	Jumlah arsip yang dilindungi dan diselamatkan	%	370	320	370	420	370	320
3	Tingkat ketersediaan arsip							
4	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki							
5	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	nilai						
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton	6985,55	6985,7	6985,75	6985,8	6985,85	6985,9
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton	1.100,81	1.100,91	1.100,95	1.100,97	1.100,99	1.200
3	Jumlah Kegiatan Pengawasan Perikanan	kelompok	3	3	3	3	4	3
4	Angka Konsumsi Ikan	kg/tahun/jiwa	40,25	40,25	40,28	40,3	40,31	40,32
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							
1	Persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan	%	64,71	70,59	76,47	93,33	94,12	94,91
2	Persentase peningkatan promosi pemasaran pariwisata	%	20	16,67	14,29	12,5	11,11	9,72
3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi	%	74,04	75,96	77,88	79,81	86,54	93,27
4	Presentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang terlatih	%	33,61	37,82	46,22	50,42	58,82	67,22
5	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%						
6	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	%						

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
1	Produksi Komoditas Tanaman Pangan	ton	27420					
2	Produktivitas Padi	ton/ha	4,86	4,91	4,96	5,01	5,06	5,06
3	Produksi Komoditas Tanaman Hortikultura	ton	109175,93	116279,6	122084,84	133311,55	145593,35	626445,27
4	Produksi Sektor Peternakan	kg	3298	3300	3350	3400	3450	16798
5	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	ha	65.325	65.325	63,73	62,21	60,77	60,77
6	Presentase Pengendalian Kasus Penyakit Hewan Menular	%	100	100	100	100	100	100
7	Presentase Penanganan Bencana Pertanian	%		55,33	60	66,7	66,7	66,7
8	Cakupan bina kelompok tani	%	21,45	21,5	22,5	23,5	22,5	
9	Tingkat Cakupan Penyediaan Sarana Pertanian	%	40	45	51	59	69	79
10	Tingkat Penyediaan Prasarana Pertanian	%	20	20	26	34	44	54
11	Cakupan Penanggulangan bencana Pertanian	%	60	60	66	74	84	94
12	Persentase Perizinan usaha pertanian yang diawasi	%	20	20	26	34	44	54
13	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	%	0,17	0,17	6	14	24	34
14	Peningkatan produksi tanaman pangan	%						
15	Peningkatan Produksi Hortikultura	%						
16	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%						
17	Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan	%						
18	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%						
19	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)	%						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							
1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	%						
2	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%						

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%						
2	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%						
3	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan.	%						
4	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan.	%						
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	%						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							
1	Indeks Tahapan Perencanaan Kawasan Transmigrasi	%	74,45	75,78	77,25	78,86	80,63	80,63
2	Indeks Perkembangan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	%	74,45	75,78	77,25	78,86	80,63	80,63
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
	SEKRETARIAT DAERAH							
1	Kinerja Penyelenggara Pemerintahan	%	92	93	94	95	97	97
2	Presentase Penerima Beasiswa	%	75.57	76	77.57	78	79,57	79,57
3	Efektifitas Kerjasama Daerah	%	0,79	0,8	0,81	0,82	0,83	0,83
4	Indeks Tata Kelola Pengadaan	%	71.80	71.90	72.00.00	72.10.00	72.10.00	72.10.00
5	Presentase Layanan Eletrikfikasi Rumah Tangga	%	84,5	90,42	96,74	100	100	100
6	Presentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pembangunan dan Perekonomian	%	75	80	85	90	90	90

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	SEKRETARIAT DPRD							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Lembaga DPRD	%	75	80	85	90	95	100
2	Tingkat Efektivitas Agenda Rapat DPRD Tingkat Penyelesaian Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)	%	80	85	90	95	100	100
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
	PERENCANAAN							
1	Persentase Capaian kinerja Program	%	94	94,5	95	95,5	96	96,5
2	Persentase Konsistensi Renstra dengan RPJMD	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Konsistensi RKPD dengan RPJMD	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Konsistensi Renja PD dengan Renstra PD	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Konsistensi Renja PD dengan RKPD	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	100	100	100	100	100
	KEUANGAN							
1	Persentase Capaian pajak daerah terhadap target yang ditetapkan	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase WP terdaftar aktif terhadap total WP terdata	%	63,5	67	70	73	77	79
3	Persentase Realisasi penagihan Terhadap Piutang Pajak	%	65	62,7	64	66	67,2	68,4
4	Persentase Realisasi penerimaan PBB dan BPHTB berdasarkan Ketetapan	%	30,1	30,8	31,4	32,1	32,6	33,2
5	Prosentase Kesalahan Penganggaran	%	0	0	0	0	0	0
6	Indeks kepuasan OPD terhadap pelayanan perbendaharaan	indeks						
7	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%						
8	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%						
9	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%						
10	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%						

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%						
12	Persentase Penurunan SILPA	%						
	KEPEGAWAIAN							
1	Indeks Sisfem Merit	angka	296,25	317	337,75	358,5	379,25	400
2	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan karir	%	100	100	100	100	100	100
3	Tingkat Pengisian Jabatan Struktural	%	96	95	95	95	96	97
4	Tingkat pelanggaran disiplin ASN	%	0,46	0,34	0,29	0,23	0,23	0,23
5	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	indeks	80,05	80,1	80,15	80,2	80,25	80,3
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal	%	50	50	50	50	50	70
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	14,81	29,63	44,44	59,26	74,07	88,89
2	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	%	14,29	28,57	42,86	57,14	71,43	85,71
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
	INSPEKTORAT							
1	Persentase tindak lanjut temuan	%	87,2	88,2	89,2	90,2	91,2	92,2
2	Persentase Maturitas SPIP SKPD Level 3	%	50	55	60	65	70	75
3	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Kategori / Opini						
4	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	nilai (1-5)						
5	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	nilai (2-5)						
6	Manajemen Risiko Indeks	nilai (1-5)						
7	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%						
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
1	Persentase sekolah dan Forum yang mendapatkan pembinaan penguatan ideologi Pancasila, Karakter Kebangsaan dan Bela Negara	%	20,53	40,4	60,26	80,13	100	100
2	Persentase pembinaan pendidikan politik di wilayah Kutai Timur	%	11,2	28	33,5	39	100	100
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	28	30	50	70	100	100
4	Persentase ASN dan Forum yang mendapatkan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial,Budaya dan Agama yang bersih dari narkoba	%	2,45	27	52,78	79,78	100	100
5	Jumlah Konflik Sosial	kasus	0	0	0	0	0	0
6	Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kutai Timur	%	100	100	100	100	100	100

BAB V
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran Visi dan Misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional Tahun 2025-2029, RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029, serta RTRW Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2036. RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, DPRD, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur selama 5 (lima) tahun ke depan. Di samping itu, RPJMD ini juga merupakan arahan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam penyusunan rencana tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029.

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Kutai Timur untuk dapat mewujudkan Visi Bupati **"TERWUJUDNYA KUTAI TIMUR TANGGUH, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING"**, perlu didukung oleh: (1) Komitmen dari kepemimpinan daerah yang kapabel, berkualitas, dan demokratis; (2) Tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (*good governance and clean government*); (3) Konsistensi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur; (4) Keberpihakan kepada rakyat (*pro-poor policy*); (5) Partisipasi aktif masyarakat, media massa, dan dunia usaha; serta (6) Mekanisme pengendalian dan pengawasan (*check and balance*) serta akuntabilitas publik yang baik.

Dengan pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah diharapkan masyarakat Kabupaten Kutai Timur menjadi kabupaten yang sejahtera dan berkeadilan bagi semua sesuai dengan Visi Bupati Kutai Timur terpilih.

5.1 Pedoman Transisi

Pedoman transisi dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah hingga akhir periode RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya, sehingga tidak terjadi kekosongan

pengaturan atau periode, sebagai upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan Kabupaten Kutai Timur, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

1) Mengingat kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati sekarang akan berakhir pada tahun 2029, maka pertanggungjawaban bupati dan wakil bupati periode sekarang atas pelaksanaan RPJMD Kutai Timur 2025-2029 hanya sampai tahun pelaksanaan 2029;
2) Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur di tahun 2029, maka penyusunan ranwal RKPD Tahun 2030 tetap berpedoman pada RPJMD 2025-2029 ini atau menunggu instruksi lebih lanjut dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Provinsi.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Agar RPJMD dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1) Bupati Kutai Timur berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029;
2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, sebagai *leading sector* perencanaan pembangunan daerah memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan pencapaian sasaran-sasaran RPJMD yang diamanatkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029;
3) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan didukung oleh instansi vertikal dan masyarakat, termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 ini dengan sebaik- baiknya;
4) RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, oleh karena itu seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun;

5) Dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 setiap tahunnya dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Timur tahun berkenaan;
6) Sesuai PP Nomor 3 tahun 2007, Bupati harus menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran dan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD, maka untuk menjamin konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. Dalam hal ini, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Timur;
7) Bahwa untuk mewujudkan visi, misi, kebijakan, dan program dalam RPJMD diperlukan instrumen antara lain perangkat daerah dan sumber daya manusia (SDM), maka penyusunan organisasi perangkat daerah harus berpedoman pada RPJMD 2025-2029 dan membagi atau memisahkan secara jelas tanggungjawab perangkat daerah antara sebagai regulator dengan sebagai operator, artinya tidak diperkenankan saat perangkat daerah mempunyai peran ganda sebagai regulator sekaligus operator karena fungsi evaluasi dan pengawasannya menjadi tumpang tindih serta dijalankan oleh SDM yang mempunyai kompetensi;
8) Mengingat pembangunan daerah saat ini dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks dan dinamis, seperti ketidakpastian fiskal, perubahan iklim, disrupsi teknologi, perubahan sosial-politik, dan keterbatasan sumber daya manusia dan kelembagaan, maka penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Daerah menjadi suatu kebutuhan strategis yang tidak dapat ditunda, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2029. Manajemen risiko pembangunan berperan penting dalam mengantisipasi potensi kegagalan pencapaian tujuan pembangunan, memastikan efisiensi pelaksanaan program, serta memperkuat ketangguhan daerah terhadap dinamika dan ketidakpastian. Hal ini sejalan

dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan proses identifikasi, penilaian, pengendalian, serta pemantauan risiko ke dalam seluruh siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan penerapan manajemen risiko, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan yang lebih akuntabel, adaptif, dan berorientasi hasil;

9) RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2025-2029 dapat dilakukan perubahan apabila syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 Pasal 50 dan/atau Permendagri nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 ayat (1) terpenuhi.